



Unika Dalam Wacana Publik
2021-2022

Editor : Ignatius Eko

FAJAR ENDEMI
Unika Dalam Wacana Publik
2021-2022

Editor: Ignatius Eko

Fajar Endemi
Unika Dalam Wacana Publik
2021-2022

Editor: Ignatius Eko

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

©Universitas Katolik Soegijapranata 2022

ISBN : (PDF)
Desain Sampul : Theresia Manggar
Perwajahan Isi : Hartoyo SP
Ukuran buku : B5
Font : Calibri (12)

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata
Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019
Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telpon (024)8441555 ext. 1409
Website : www.unika.ac.id
Email Penerbit : ebook@unika.ac.id

PRAKATA

Saat ini kita telah menginjak pertengahan tahun 2022, menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-77. Hidup bersama pandemi covid menciptakan begitu banyak cerita, dan tanda-tanda pandemi menjadi endemi pun belum ditetapkan oleh Pemerintah. Transisi endemi adalah suatu proses dimana periode dari pandemi menuju ke arah endemi dengan sejumlah indikator, seperti laju penularan virus, angka *positivity rate*, tingkat perawatan rumah sakit, hingga angka kematian. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban menyampaikan, endemi tidak mengartikan situasi tidak ada infeksi corona sama sekali, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (23/3/2022). “Bukan berarti juga kita enggak berpikir tentang Covid-19 lagi. Penyakit ini tetap ada. Statis. Tak terlalu meningkat, tak terlalu turun, dan tak ada lonjakan besar yang tak terduga seperti tahun-tahun sebelumnya.” Sebagai manusia merdeka kita meyakini endemi akan berangsur-angsur terwujud dan pada titik itu kita akan menjadi manusia berkualitas karena tempaan kesulitan dan kita berlanjut ke tahap tantangan berikutnya, *next level of a game*.

Sebagai manusia berkualitas pentinglah kita menambahkan satu lagi pada dua kesatuan relasional utama: manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*), manusia dengan sesama (*hablun min al-nas*), yakni manusia dengan semesta alam (*hablun min al-alam*). Tulisan di buku ini sangat kental membahas tentang relasi yang ketiga ini karena kesatuan manusia dan alam semesta sedang mengalami ketimpangan. Terutama, disebabkan oleh ulah manusia yang tidak sayang pada bumi. Sebagian kita masih mudah membuang sampah sembarangan atau limbah secara sembrono. Bumi akan menyelesaikan semuanya bersama waktu, begitu kira-kira pikiran kita. Oleh karena itulah, masalah lingkungan selalu terus disorot dan disuarakan untuk membuka topeng ketidakpedulian untuk membuka pikiran kita akan Bumi demi anak cucu kita.

Para pakar memprediksi pandemi akan menjadi endemi. Hal ini berdasarkan temuan dari penelitian yang melibatkan 100 ahli imunologi hingga para ahli virologi, 90 persen di antara mereka setuju Covid-19 akan menjadi endemi. Dalam konferensi pers Nota Keuangan pada 16 Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pandemi Covid-19 tak akan hilang dalam waktu singkat, masyarakat mungkin akan tetap hidup bersama virus korona ini dalam 5-10 tahun lagi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan, kita mungkin melihat pada 2022 akan mengalami suatu masa bahwa pandemi menjadi endemi. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi endemi pada tahun depan.

Salah satunya dalam penguatan program vaksinasi dan sistem kesehatan. Maka saat pandemi Covid-19 ini berubah status menjadi endemi, jangan heran jika kelak saat Anda sakit, dokter akan bertanya, apakah Anda terserang flu biasa atau virus korona.

Dalam menyongsong fajar endemi menyemburat di ufuk Timur, aktivitas menulis yang menyebarkan optimisme menjadi penyemangat pembaca dan bukan sekedar menunggu fajar endemi tiba. Para penulis buku ini adalah dosen Universitas Katolik Soegijapranata yang aktif menuliskan pemikirannya dari berbagai perspektif keilmuan mereka di media masa cetak dan digital. Ada 17 (tujuh belas) penulis yang terpilih. Editor dengan seksama memilih sudut perspektif religius, pemulihan ekonomi, masa lebaran 2022, pendidikan yang merdeka, keuangan pemerintah, kesehatan nasional, petuah leluhur negeri, situasi jelang pilpres 2024, hingga bisnis NFT (*Non-Fungible Token*). Ada pula tulisan istimewa Prof. Andreas Lako yang sekarang telah hidup damai di Sorga. Semuanya dirangkum sesuai urutan nama penulis secara *alphabetical* untuk memudahkan pembaca membaca penulis favoritnya.

Menuliskan pendapat merupakan bagian dari meningkatkan kualitas penulis dan memperluas wawasan pembaca. Sasaran pembaca buku ini adalah masyarakat luas utamanya akademisi pemerhati kemasyarakatan sosial. Buku akan dibagikan secara online melalui *market place*. Selamat memilih artikel dan melanjutkan inspirasi dalam pemikiran berikutnya.

Terima kasih.

Editor

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Prakata | iii |
| Daftar Isi | v |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Agama - Agama Yang Ramah Lingkungan</i> | 1 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Ekonomi Berbasis Ekologi</i> | 5 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Kesalehan Sosial Yang Ekologis</i> | 9 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Mewarisi Perjuangan Merawat Bumi</i> | 13 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Model Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius</i> | 17 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Pejuang Green Economy</i> | 21 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Pertumbuhan Ekonomi yang Manusiawi</i> | 25 |
| Aloys Budi Purnomo Pr : <i>Ekologi Pancasila</i> | 29 |
| Amrizarois ismail, S. Pd., M.Ling : <i>Kelangkaan Batubara Dan Wajah Asli Kapitalis</i> | 33 |
| Amrizarois ismail, S. Pd., M.Ling : <i>Main Diksi dalam Hukum Karantina</i> | 37 |
| Amrizarois ismail, S. Pd., M.Ling : <i>Masalah Wadas: Masalah Distrust</i> | 41 |
| Prof Dr Andreas Lako : <i>Jaring Pemulihan Ekonomi Daerah</i> | 45 |
| Prof Dr Andreas Lako : <i>Mendorong Pertumbuhan Berkualitas</i> | 49 |
| Prof Dr Andreas Lako : <i>Mengatasi Tekanan Keuangan Negara</i> | 53 |
| Prof Dr Andreas Lako : <i>Menyelaraskan Kesehatan-Ekonomi</i> | 57 |
| Prof Dr Andreas Lako : <i>Optimisme Ekonomi 2022</i> | 61 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prof Dr Andreas Lako : <i>Waspadai Ketimpangan Perkotaan</i> | 65 |
| Dr Ir B Sumardiyanto MSc & Andreas Ryan Sanjaya SIKom MA : <i>Medsos Dalam Edukasi Cagar Budaya</i> | 69 |
| Benny Danang Setianto : <i>Keadilan dalam Konflik Wadas</i> | 71 |
| Benny Danang Setianto : <i>Memerdekakan Pendidikan</i> | 75 |
| Budi Widianarko : <i>Pandemi, Saatnya Melepas Topeng</i> | 81 |
| Budi Widianarko : <i>Selamat Jalan Prof Andre</i> | 85 |
| Budi Widianarko : <i>Semarang Ikut Pakta Milan</i> | 87 |
| Christian Moniaga ST MArS <i>Semarang Menuju Kota Megapolitan</i> | 91 |
| Djoko Setijowarno : <i>Mudik, Jika Lelah Beristirahatlah</i> | 93 |
| Djoko Setijowarno : <i>Arus Mudik Lebaran 2022 Tidak Hanya Tanggung Jawab Negara Tetapi Juga Masyarakat</i> | 97 |
| Djoko Setijowarno : <i>Jaminan Keamanan Pemudik ke Sumatera</i> | 103 |
| Djoko Setijowarno : <i>Kelancaran Mudik Di Jalan Tol</i> | 107 |
| Djoko Setijowarno : <i>Mengimplementasi Transportasi Umum Perkotaan</i> | 111 |
| Djoko Setijowarno : <i>Mudik Sehat 2022, Protokol Kesehatan Wajib Dijalankan</i> | 115 |
| Djoko Setijowarno : <i>Pentingnya Keselamatan Pada Jalur Kereta Api</i> | 117 |
| Djoko Setijowarno : <i>Suka Duka Pengemudi Truk</i> | 121 |
| dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG : <i>Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter</i> | 125 |
| dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG : <i>Mencegah Pandemi Jadi Endemi</i> | 129 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG : <i>Kurikulum Khusus, Solusi Disparitas Tenaga Kesehatan Daerah Tertinggal</i> | 133 |
| dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG : <i>Momentum Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia</i> | 137 |
| dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG : <i>Pentingnya Dokter Keluarga di Era Normal Baru</i> | 141 |
| Ferdinand Hindiarto : <i>Memperpendek Siklus Zona Nyaman</i> | 145 |
| Ferdinand Hindiarto : <i>Menjadi Pendidik Transformatif</i> | 149 |
| Ferdinand Hindiarto : <i>Pandemi, Adaptasi & Resiliensi Lulusan Perguruan Tinggi</i> | 153 |
| Ferdinand Hindiarto : <i>Pendidikan dan Nyala Kemanusiaan</i> | 157 |
| DR. Heny Hartono, SS, MPd <i>Rumah Belajar dan Rumah Sukacita</i> | 161 |
| Ign. Dadut Setiadi : <i>Memanusiaikan Manusia</i> | 165 |
| Ign. Dadut Setiadi : <i>Sang Pahlawan Diplomasi</i> | 169 |
| JC Tukiman Taruna : <i>(Jadilah) Pemimpin Yang "Memet", "Jlimet", Dan "Rapet"</i> | 175 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Rapor Pendidikan</i> | 179 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Realitas Sosial Pandemi dan Asesmen Nasional 2021</i> | 183 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Universitas Sekolah Dasar dan Kurikulum Merdeka</i> | 187 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Setali Tiga Uang: Gidhuh, Kisruh, Lan Ribut (Part 1)</i> | 191 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Setali Tiga Uang: Beler, Clemer, Lan Cemer (Part 2)</i> | 193 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Hari Gini, Bersikap Kuatlah: Aja Cingeng, Cinging, Lan Cengeng (Part 3)</i> | 195 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Kesatria Zaman Now: Tinggalkanlah "Dhemen Moyoki, Mojoke, Lan Magoli (Part 4)</i> | 197 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JC Tukiman Taruna : <i>Mari Kita Kaji: Siapa Sebenarnya Kemaruk, Kemecer, dan Nyidham?</i> | 199 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Modal Sukses Pilpres 2024: Sabar, Sareh, Tawekal</i> | 203 |
| JC Tukiman Taruna : <i>Kemlinthi, Kemlancang, Kemlungkung, Kementhus Vs Pimpinan Muring Bengkulu</i> | 207 |
| Laksmi Hartajanie : <i>Cara Olah Susu untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi Susu Segar</i> | 211 |
| Margaretha Sih Setija Utami : <i>Tidak Cukup Hanya Bekerja dari Rumah</i> | 213 |
| Perigrinus H Sebong : <i>Hari Kesehatan Dunia: Kiprah Dan Pekerjaan Rumah Indonesia</i> | 217 |
| Perigrinus H Sebong : <i>Menekan Penularan Omicron</i> | 223 |
| Perigrinus H Sebong : <i>Pasang Surut Gelombang Corona, Endemikah?</i> | 227 |
| Perigrinus H Sebong : <i>La Nina Dan Ancaman Ekosindemi</i> | 231 |
| Perigrinus H Sebong : <i>Hotspot Sindemi Rokok Dan Sudahi Saling Tuding</i> | 237 |
| Ridwan Sanjaya : <i>Metaverse Bukan Obat Dewa</i> | 241 |
| Ridwan Sanjaya : <i>Big Data Bukan Segalanya</i> | 245 |
| Ridwan Sanjaya : <i>Heboh NFT</i> | 249 |

Agama-Agama Yang Ramah Lingkungan



Oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata, Ketua JPIC Kevikepan Semarang

Agama-agama yang ramah lingkungan hanya dapat dikembangkan bersama semua orang, apa pun agama dan kepercayaannya. Ketika agama-agama bergerak bersama merawat Bumi, saat itulah sudah dikembangkan ekologi interreligius.

Dengan asumsi bahwa agama tak hanya bersifat teosentris melainkan juga berdimensi sosiologis dan kosmologis, Prof M Zainuddin menyampaikan opininya tentang “Agama yang Menyejukkan” (*Kompas*, 28/9/2021). Umat beragama saat ini dituntut mampu memahami dan menjelaskan doktrinnya dan memberikan jawaban terhadap problem kemanusiaan secara menyeluruh, termasuk problem lingkungan hidup.

Menarik bahwa disebutkan dalam perspektif Islam, pentinglah mengembangkan tiga kesatuan relasional: manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*), dengan sesama (*hablun min al-nas*), dan dengan semesta alam (*hablun min al-alam*). Selama ini, yang lebih dominan diwartakan adalah dua dimensi pertama. Sedangkan dimensi ketiga sering dilupakan. Menurut hemat saya, inilah justru salah satu aspek penting Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Ramah lingkungan

Sebagai pastor Katolik, pemahaman saya tentang Islam sebagai *rahmatan lil alamin* mencakup pula komitmen Islam menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Tiga kesatuan relasi tersebut, terutama dimensi *hablum min al-'alam* seperti gayung bersambut meneguhkan pemahaman saya.

Gagasan tersebut juga menjawab persoalan dan beban masa lalu ketika *Abrahamic religions* (Yahudi, Kristianitas, dan Islam) dituduh sebagai agama yang menjadi akar penyebab krisis ekologi. Tuduhan itu dilontarkan Lynn White di tahun 1960-an, meski di era yang sama Seyyed Hussein Nasr sangat keras menyuarakan metafisika Islam yang ramah lingkungan.

Nasr pun menyerukan agar agama-agama lebih ramah lingkungan, tanpa mempersalahkan doktrin agama. Alih-alih, Nasr mengajak sadar bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat paradigma modernitas, yang membuat “Bumi berdarah karena luka yang ditimbulkan manusia yang tidak lagi selaras dengan Surga” (Nasr, 1996:3, 286).

Manusia membuat Ibu Bumi berdarah bahkan hingga tidak lagi selaras dengan surga bukan karena doktrin agamanya, melainkan karena paradigma modern teknokratis yang memandang alam sekadar materi yang bisa dikeruk demi keuntungan sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Paradigma itu merupakan efek dari relativisme praktis dalam wajah antroposentrisme yang menyimpang, bahkan sesat. Ketika manusia menempatkan dirinya di pusat (antroposentris), ia akhirnya memberikan prioritas tertinggi kepada kepentingan sesaat. Akibatnya, semua yang lain menjadi relatif.

Tidak mengherankan bahwa seiring dominasi paradigma teknokratis dan pemujaan kekuasaan manusia yang tak terbatas, berkembanglah relativisme yang memandang segala hal tidak relevan jika tidak melayani kepentingan langsung orang itu sendiri. Itulah logika yang membantu kita memahami bagaimana sikap-sikap tertentu yang menyebabkan baik kerusakan lingkungan maupun kemerosotan sosial, saling mendukung (Francis, Ensiklik Laudato Si', artikel 122).

Fakta ini mendorong semua orang, apa pun agama dan kepercayaannya, mengembangkan sikap yang lebih ramah lingkungan. Alih-alih dikuasai hasrat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya dengan merusak lingkungan, tantangan terbesarnya adalah mengubah paradigma antroposentris menjadi lebih ekosentris manusiawi. Paradigmanya bukan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya secara eksploitatif terhadap alam, melainkan memikirkan masa depan nasib generasi mendatang agar tidak mendapatkan warisan alam yang hancur.

Eko(teo)logi interreligius

Agama-agama yang ramah lingkungan hanya dapat dikembangkan bersama semua orang, apa pun agama dan kepercayaannya. Itulah sebabnya, agama tidak dipahami sebagai realitas tunggal, melainkan plural, agama-agama. Alasannya, semua agama dan kepercayaan selalu memiliki sumber terbaik dari tradisi imannya (ortodoksi) untuk diimplementasikan dalam perawatan Bumi sebagai rumah bersama (ortopraksis).

Ketika agama-agama, termasuk kepercayaan yang biasanya dihidupi penghayat agama-agama asli (*indigenous religions*) atau sering disebut agama adat, saling bergandengan bergerak bersama merawat Bumi, pada saat itulah sudah dikembangkan ekologi interreligius.

Pada saat masing-masing menjadikan sumber tradisi teologis terbaiknya sebagai landasan bersikap ramah lingkungan, itulah yang disebut ekoteologi interreligius (Wilfred, 2009). Ekoteologi interreligius bahkan menjadi media untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan lingkungan yang terjadi.

Agama-agama yang ramah lingkungan dalam gerak bersama merawat Bumi merupakan tuntutan dalam menghadapi Bumi yang ditimpa krisis ekologi dalam dua abad terakhir. Perwujudan iman (ortopraksis) dalam perawatan Bumi melalui sikap ramah lingkungan bukanlah opsional, melainkan sebuah imperatif yang mendesak dijalankan. Agama tidak lari dari tanggung jawabnya, melainkan wajib terlibat merawat lingkungan.

Dalam praksis itu, agama-agama bahkan bisa meninggalkan masa lalu yang “berseteru” untuk “bersekutu” menghadapi persoalan yang sama. Dengan cara itulah, Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dalam dimensi *hablum min al-alam* bersinergi dengan Kristianitas yang menghadirkan kabar gembira bagi segala makhluk dalam dimensi *shalom*-nya.

Bahkan, daya salam Buddhis *namo buddhaya* semoga sekalian makhluk berbahagia, sapaan *oom shanti oom* dalam perspektif Hindu, serta salam kebajikan dari agama Konghucu kian memperteguh sinergi agama-agama yang ramah lingkungan. Dengan demikian semua dan siapa saja akan selalu *rahayu tata tentrem kerta raharjo* berpadu dengan salah satu spirit kepercayaan di negeri ini dari sekian banyak lainnya.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/08/agama-agama-yang-ramah-lingkungan/>

Ekonomi Berbasis Ekologi

Oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Rohaniwan, ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan Semarang.

Tanpa memperhatikan hati nurani yang jujur, upaya penyelerasan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan, baik pusat maupun daerah, hanya akan menjadi bentuk-bentuk kebohongan dan tipu daya yang memuakkan.”

PENTINGLAH mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis ekologi. Lima puluh tahun yang lalu, Paus Paulus VI menyebut masalah ekologi merupakan akibat tragis dari aktivitas manusia yang tak terkendali.

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Ensiklik Rerum Novarum, 14 Mei 1971, Paus Paulus VI menerbitkan Surat Apostolik Octogesima Adveniens.

Di dalamnya, Paus Paulus VI menulis, iKarena eksploitasi alam sembarangan, manusia menimbulkan risiko menghancurkannya dan pada gilirannya ia sendiri menjadi korban degradasi ini.î Setahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 16 November 1970, dalam rangka HUT Perak (ke-25) FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa), Paus Paulus VI telah berbicara tentang kemungkinan bencana ekologis nyata yang diakibatkan oleh pengaruh peradaban industri.

Dia menegaskan ikebutuhan mendesak akan perubahan radikal dalam perilaku umat manusiaî, sebab ikemajuan ilmiah yang sangat luar biasa, kemampuan teknis yang sangat menakjubkan, pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, bila tidak disertai dengan perkembangan sosial dan moral autentik, akhirnya akan berbalik melawan manusia.î Saya sengaja mencetak miring kalimat terakhir tersebut, justru karena kalimat tersebut sangat signifikanrelevan, penting dan nyambung, dengan kondisi kita saat ini.

Masa pandemi Covid- 19 ini tak bisa dimungkiri telah menjadi indikator jelas dan terang-benderang (clara et distincta) betapa dampak perilaku eksploitatif

terhadap alam semesta telah mendatangkan bencana bagi kemanusiaan. Semua dibuat panik dan gagap menghadapinya, dengan korban jiwa yang membuat rasa kemanusiaan siapa pun seharusnya menyadarinya.

Meski sebagian orang cenderung menolak, namun kebenaran tak bisa dikuburkan bahwa perusakan lingkungan dan sumber daya alam menjadi sumber penyakit baru (Paus Fransiskus, Ensiklik *Laudato Si'*/LS, 2015, artikel 79).

Bahkan, sumber daya bumi yang dijarah karena konsep ekonomi, perdagangan dan produksi jangka pendek saja membuat hilangnya rimba dan kawasan hutan lainnya membawa serta hilangnya spesies yang dapat menjadi sumber daya yang sangat penting pada masa depan, tidak hanya untuk pangan, tetapi juga untuk penyembuhan penyakit dan berbagai kegunaan lainnya (LS 32).

Degradasi paling mendatangkan penderitaan dan penyakit adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan makhluk lainnya akan air. Masalah yang sangat serius adalah kualitas air yang tersedia bagi orang miskin, yang menyebabkan banyak kematian setiap hari. Penyakit yang berhubungan dengan air banyak ditemukan di antara orang miskin, termasuk yang disebabkan oleh mikroorganisme dan zat kimia.

Disentri dan kolera, yang terkait dengan layanan higienis dan persediaan air yang tidak layak dikonsumsi, adalah penyebab signifikan penderitaan dan kematian bayi (LS 29). Lebih parah lagi, sumber air bawah tanah di banyak tempat terancam polusi akibat kegiatan pertambangan, pertanian, dan industri tertentu. Limbah industri, detergen, dan produk kimia, yang masih lazim digunakan oleh penduduk di banyak tempat di dunia, terus mengalir ke sungai, danau dan laut. Sungai, laut, dan danau pun tercemar dan mengancam kehidupan manusia, terutama yang paling rentan (LS 29).

Paradigma Ekonomi

Dalam kondisi seperti itu, sebagai sebagian kecil saja dari problem ekologis yang sangat banyak yang membuat krisis ekologi menimpa bumi kita, bagaimana kita bisa menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pembangunan daerah?

Konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah bisa diselaraskan manakala kesalahan paradigma ekonomi eksploitatif terus dipertahankan! Mengacu gagasan Ernst M. Conradie, dalam bukunya *The Earth in God's Economy* (2015), kesalahan terbesar paradigma ekonomi adalah paradigma tekno-ekonomi yang tidak jujur, mengeruk keuntungan sebanyakbanyaknya dan

secepat-cepatnya, namun mengabaikan kelestarian lingkungan dan kaum miskin yang hanya menjadi tumbal pembangunan ekonomi.

Karenanya, sebagaimana ditegaskan pula oleh Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si'*. Pentinglah menciptakan sebuah kerangka hukum yang menetapkan batasbatas mutlak dan menjamin perlindungan ekosistem demi perawatan bumi ini.

Jika tidak, bentuk- bentuk kekuasaan baru yang berdasarkan paradigma teknoekonomi akan selalu menghancurkan bukan hanya politik kita, melainkan juga kebebasan dan keadilan (LS 53). Adalah sebuah kesalahan bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi terus membenarkan sistem global saat ini, dengan mendahulukan spekulasi dan pengejaran keuntungan finansial yang cenderung mengabaikan konteks apa pun, serta akibat-akibatnya pada martabat manusia dan lingkungan alam.

Secara moral, kerusakan lingkungan, degradasi kemanusiaan, dan etika saling terkait erat. Tanpa sadar siapa pun, terutama penguasa dan pengusaha, melakukan tindakan tidak bermoral karena distraksi terus-menerus menumpulkan kesadaran akan realitas dunia yang sangat terbatas.

Dalam konteks itulah, apa pun yang rapuh, seperti lingkungan hidup dan kaum miskin, tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan pasar yang didewakan, yang menjadi aturan tunggal. Untuk itulah, dibutuhkan perhatian lebih besar dari politik kekuasaan untuk mencegah konflik baru dan mengatasi sebabsebab yang dapat menimbulkannya y a terkait dengan konflik kepentingan lingkungan.

Merawat ekosistem mengandaikan pandangan yang jauh ke depan, karena jika kita hanya mencari keuntungan secara cepat dan mudah, tidak akan ada yang peduli pada pelestarian alam.

Biaya kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian egois jauh lebih tinggi daripada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh.

Ketika terjadi kepunahan atau kerusakan serius beberapa spesies, nilainya tidak terhitung.

Kita dapat menjadi saksi-saksi bisu atas ketidakadilan mengerikan ketika ada orang menganggap mendapat keuntungan besar dengan membuat seluruh umat manusia, sekarang dan di masa depan, membayar biaya kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Yang paling menyedihkan adalah paradigma tekno-ekonomi

yang salah menyebabkan matinya rasa hati nurani dan tertutupnya mata terhadap realitas dalam analisis-analisis yang melenceng.

Tak dapat tidak kita harus mengakui bahwa pendekatan ekologis yang sejati selalu menjadi pendekatan sosial, yang harus mengintegrasikan soal keadilan dalam diskusi lingkungan hidup, untuk mendengarkan baik jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin.

Tanpa memperhatikan hati nurani yang jujur, upaya penyelerasan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan, baik pusat maupun daerah, hanya akan menjadi bentukbentuk kebohongan dan tipu daya yang memuakkan. Generasi masa depan akan menanggung akibat semua perilaku tidak jujur yang menghancurkan lingkungan atas nama pertumbuhan ekonomi, sebagaimana generasi sekarsu telah menanggung akibat perilaku salah di masa lalu! Keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, terlebih kita manusia!(34)

Suara Merdeka 28 Agustus 2021 hal. 4

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04987186/ekonomi-berbasis-ekologi?page=all>

Kesalahan Sosial Yang Ekologis

oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang

BANGSA Indonesia disucikan oleh ritual puasa dua agama yang beriringan. Yang pertama masih sedang berlangsung, yakni ritual puasa yang diselenggarakan umat Kristiani, khususnya dari agama Katolik.

Puasa umat beragama Katolik sudah, masih, dan sedang berlangsung sejak tanggal 2 Maret 2022 yang lalu hingga tanggal 15 April 2022. Yang kedua, segera dimulai Puasa Ramadan bagi umat muslim. Puasa ini berlangsung selama bulan Ramadan.

Dalam tradisi semua agama dan kebudayaan, puasa bukanlah sekadar aktivitas manusiawi, melainkan menjadi ritual atau ibadah. Itulah sebabnya, aktivitas rohani tersebut dinamakan ibadah puasa.

Dalam perspektif semua agama dan kebudayaan, ibadah puasa menjadi ungkapan iman, apa pun agama dan kepercayaannya, sebab puasa dihubungkan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan tersebut dihayati sebagai ungkapan iman dan dihayati dalam perwujudan iman.

Kesalahan sosial

Perwujudan iman tampak dalam kesalahan sosial. Kesalahan sosial diekspresikan dalam berbagai tindakan kemurahan hati, melalui sedekah dan bela rasa kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita.

Dalam tradisi agama Katolik Indonesia, amal ibadah puasa Katolik diwujudkan dalam praksis aksi puasa pembangunan (APP). Di Keuskupan Agung Semarang, APP menjadi gerakan yang sudah dimulai sejak tahun 1968. APP ditandai dengan akumulasi finansial yang diperoleh dari cara umat bermatiraga, berpantang, dan berpuasa.

APP menjadi buah dari matiraga, pantang, dan puasa. APP diwujudkan dalam keluarga-keluarga, yang selama menjalani ritual puasa “menyisihkan” dana lalu dimasukkan ke dalam kotak APP, untuk kemudian diserahkan melalui lingkungan,

paroki, kevikepan (kumpulan beberapa paroki), dan puncaknya dikelola secara bersama di tingkat Keuskupan, bahkan di tingkat nasional sebagaimana dikelola Panitia APP Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Selama ini, akumulasi dana tersebut cukup signifikan dipergunakan sebagai dana karitatif dan pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel (KLMTD).

Laporan atas akumulasi dana tersebut dilakukan secara kredibel, transparan, dan akuntabel, sehingga jauh dari bahaya-bahaya koruptif oleh para pengelola yang bertanggung jawab atasnya. Panitia APP selama ini dilakukan bersama Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) yang secara rutin memberikan laporan atas seluruh pemasukan, pengeluaran, dan pemanfaatan dana tersebut.

Sebagai ilustrasi umum, pengelolaan dana APP dilakukan dengan cara 25 % untuk paroki atau masing-masing sekolah yang menyelenggarakan APP.

Selanjutnya, 75 % dikirim kepada Panitia APP Keuskupan untuk disalurkan dengan pembagian 25 % untuk kevikepan masing-masing, 20 % untuk Panitia APP Keuskupan, dan 30 % disetorkan ke APP Nasional untuk dana solidaritas antar Keuskupan (DSAK) dan KARINA (Karitas Indonesia) KWI, yakni lembaga resmi kemanusiaan yang dikelola sejak tahun 2006.

Pada intinya, dalam gerakan APP itu diwujudkan kesalehan sosial yang terstruktur, sistematis, dan masif diasporis secara bertanggung jawab. Buah puasa pun tampak dalam pengelolaan kemurahan hati yang bersifat karitatif (murni membantu) dan pemberdayaan berkelanjutan (sustainable empowering). Kesalehan ekologis

Di tengah krisis ekologi yang menimpa Bumi, perlulah dikembangkan kesalehan ekologis. Kesalehan ini dimaksudkan sebagai kesadaran akan saling keterkaitan satu terhadap yang lain demi perawatan Bumi sebagai rumah bersama.

Puasa-puasa yang bersifat fisik, mengurangi makan dan minum, mengekang kecenderungan hedonis-konsumeristis, memangkas sikap egois, diimbangi dengan upaya-upaya positif untuk menumbuhkan kesadaran akan pelestarian keutuhan ciptaan dan lingkungan hidup.

Dalam kesalehan ekologis, umat manusia, apa pun agama dan kepercayaannya, dapat bekerja sama sebagai sarana Allah untuk melindungi keutuhan ciptaan, masing-masing sesuai dengan budayanya, pengalamannya, prakarsanya, dan bakatnya sendiri (Paus Fransiskus, Ensiklik *Laudato Si'/LS*, 2015, artikel 14).

Kesalahan ekologis dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana namun penuh makna untuk perawatan lingkungan dan Bumi, rumah bersama.

Contohnya adalah menghindari penggunaan plastik dan kertas, mengurangi penggunaan air, memilah sampah, memasak secukupnya saja untuk dimakan, memperlakukan makhluk hidup lain dengan baik, menggunakan transportasi umum atau satu kendaraan bersama dengan beberapa orang lain, menanam pohon, dan mematikan lampu yang tidak perlu.

Contoh lainnya adalah menggunakan kembali sesuatu daripada segera membuangnya, karena terdorong oleh motivasi mendalam, dapat menjadi tindakan kasih dan kesalahan ekologis yang mengungkapkan martabat kita (bdk. LS 211).

Menurut Paus Fransiskus (LS 212), upaya-upaya yang saya sebut sebagai kesalahan ekologis ini dipastikan akan mengubah dunia. Tindakan tersebut dipastikan menyebarkan kebaikan di masyarakat. Kesalahan ekologis akan selalu menghasilkan buah di luar yang kita lihat dan pikirkan, karena menimbulkan di Bumi suatu kebaikan yang cenderung selalu menyebar, meskipun kadang-kadang tak terlihat.

Tindakan tersebut bahkan dapat memulihkan harga diri manusia, memampukannya untuk hidup lebih penuh dan mendalam serta merasakan bahwa kehidupan di Bumi ini berharga. Maka, haruslah dilindungi, bukan dieksploitasi.

Selamat melanjutkan ibadah puasa bagi umat Katolik. Selamat memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam. Marhaban ya Ramadan!

Tribun Jateng 2 April 2022 hal. 2

<https://jateng.tribunnews.com/2022/04/02/opini-alloys-budi-purnomo-pr-kesalahan-sosial-yang-ekologis?page=all>.

Mewarisi Perjuangan Merawat Bumi

Oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata

SEBAGAI nama lengkap, Samin Surosentiko (lahir di Ploso Kediren, 1859 – meninggal di Sawahlunto, 1914), barangkali tidak terlalu dikenal publik. Namun, begitu menyebut perjuangannya dan para ahli warisnya, seketika dikenali, ternyata ada hubungan antara pergerakan Sarminisme, komunitas Samin, dan Samin Surosentiko!

Para akademisi menyebutnya Samin Surosentiko. Para ahli waris ada yang menyebutnya Mbah Samin Surontiko atau Samin Surondiko. Yang saya maksudkan ahli waris dalam kaitannya dengan pergerakan Samin Surosentiko adalah ahli waris biologis maupun ideologis. Dalam riset lapangan, saya masih berjumpa dan berdialog dengan buyut-buyutnya yang tinggal di Kemantren, Blora. Terakhir berjumpa (26/2/2022), dini hari, saat kami sama-sama melayat Botoh (Tokoh Pemimpin) Sedulur Sikep (sebutan lain komunitas Samin) di Kudus, Wargono, ayah Gunritno.

Gunritno sendiri, bukan ahli waris biologis Mbah Samin Surosentiko, melainkan ahli waris ideologis. Secara ideologis, kakek canggah Gunritno adalah murid Mbah Samin Surosentiko melalui menantu Mbah Samin yang memiliki pengaran (=nama) Surokidin, di Tanduran, Blora. Leluhur Gunritno disebut Botoh Sedulur Sikep Pati, yang babat, alas di Sukolilo, Pati dan Kaliyoso, Kudus. Mereka adalah Mbah Rodiwongso, Sodipuro, dan Suronggono. Mbah Suronggono, Botoh Sedulur Sikep Pati, adalah kakek mertua Gunritno, yang makamnya ada di pekarangan pondhokan (rumah) Gunritno sampai saat ini.

Merawat Bumi

Gunritno inilah yang saat ini paling menonjol dalam mewarisi pergerakan Mbah Samin Surosentiko bersama komunitasnya, khususnya dalam perjuangan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Mbah Samin Surosentiko memiliki salah satu ajaran yang dirumuskan dengan kalimat indah: “Janjining manungsa gesang wonten dunya punika dados utusaning Pangeran, sageda amewahi asrining jagad, namung sadarmi nglampahi” (Janji manusia hidup di dunia ini adalah menjadi utusan Tuhan, untuk bisa menjaga keindahan semesta ini, semua harus dijalani dengan setia dan rendah hati).

Dari ajaran tersebut, orang tua Gunritno, Wargono dan Niti Rahayu, memiliki kalimat singkat: ngrungkebi Ibu Bumi, peduli alam, lan peduli lingkungan, yakni komitmen merawat Bumi, kepedulian pada alam dan lingkungan hidup.

Semuanya bersumber dari pergerakan Mbah Samin Surosentiko, yang pada masa kolonial Belanda berjuang bersama para petani dengan pergerakan tanpa kekerasan. Mbah Samin sendiri adalah seorang petani, seorang gogol (Sedulur Sikep), lahir dan memulai pergerakannya di desa Ploso Kediren, Randublatung, Blora.

Dia anak kedua dari lima bersaudara. Itu sebabnya dia diidentikkan dengan Werkudara (Bima), anak kedua dari lima bersaudara Pandawa yang baik, jujur, lurus, bajik, dan tulus (Sindhunata, Samin-Bawegung, 1992).

Secara watak, Mbah Samin Surosentiko dikenal sebagai pribadi yang dermawan. murah hati dan penuh kesabaran. Ajaran-ajarannya secara moral mengajak ahli warisnya bersikap jujur. Jangan bohong! Jangan mencuri! Jangan berzinah! Bersikaplah sabar trokal dan tetap tenang bila menghadapi tantangan. Dalam bahasa Jawa ajaran itu dirumuskan, “Ora oleh nemu; ora oleh goroh, ora oleh nyolong; ora oleh laku jina; nglakoni sabar: dipisohi leren bae; ora oleh nampa duwit tuwin pangan: dijaluhi duwit utawa pangan, Iya diwenehi” (Benda & Castles, 1969).

Perjuangan Mbah Samin melawan Belanda tanpa kekerasan berujung penangkapan dan pembuangan. Dengan resolusi peraturan No. 22 tanggal 21 Desember 1907, Mbah Samin Surosentiko dan delapan pengikut lainnya dibuang ke Padang. Samin meninggal pada tanggal 2 September 1914 di Kota Tengah dekat Padang.

Nyala Perjuangan

Meski Mbah Samin dibuang, namun warisan pergerakannya tidak hilang. Pergerakan itu bahkan masih hidup dan berkembang hingga saat ini di empat kabupaten di Jawa Tengah dan tiga kabupaten di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, sebaran komunitas ahli waris Mbah Samin, terutama secara ideologis ada di Blora, Kudus, Pati, dan Rembang.

Dalam mewarisi pergerakan dan perjuangan Mbah Samin Surosentiko, para ahli waris, baik yang biologis maupun ideologis, sekarang ini berfokus pada ajaran “Janjining manungsa gesang wonten dunya punika dados utusaning Pangeran, sageda amewahi asrining jagad, namung sadarmi nglampahi.”

Ajaran tersebut menjadi landasan pergerakan perawatan lingkungan, menjaga keutuhan ciptaan, melawan ketidakadilan eksploitatif terhadap alam. Sikap

merusak lingkungan dan alam merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan para petani. Pergerakan tersebut diungkapkan pula dalam tembang: Ibu Bumi wis maringi, Ibu Bumi dilarani, Ibu Bumi Kangadili. Ibu Bumi sudah memberi, Ibu Bumi disakiti, Ibu Bumi yang akan mengadili.

Komitmen tersebut terus menyala sebagai kobaran api perjuangan yang terus membakar semangat generasi muda Sedulur Sikep Pati, Kudus, Rembang, dan Blora. Tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan dari sikap tamak dan rakus yang eksploitatif terhadap Bumi, Ibu Pertiwi. Dalam satu desah nafas, perjuangan itu diserukan sebagai pergerakan merawat Bumi, rumah bersama!

Nyala api perjuangan itulah yang dikenang oleh Sedulur Sikep Blora, Kudus, Pati, dan Rembang di Pendopo Pangayoman di bekas pekarangan Mbah Samin Surosentiko di Ploso Kediren, (15/3/2022). Meski secara yuridis, Mbah Samin bukan pahlawan, namun, bagi para ahli waris, mereka adalah pahlawan yang spirit perjuangannya terus dikobarkan dan dihayati demi merawat Bumi! (*)

Tribun Jateng 15 Maret 2022 hal. 2

<https://jateng.tribunnews.com/2022/03/15/opini-alloys-budi-purnomo-pr-mewarisi-perjuangan-merawat-bumi>

Model Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius

Oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang

Krisis ekologi yang tak berkesudahan menimpa bumi telah menjadi perhatian serius oleh banyak kalangan, termasuk para pemimpin agama dan kepercayaan. Berbagai usulan tentang model kepemimpinan untuk mengatasi krisis ekologi telah ditawarkan oleh para akademisi. Namun demikian, kajian khusus tentang kepemimpinan ekoteologi interreligius belum ada.

Itulah sebabnya, melalui studi ini, saya bermaksud menjelaskan model kepemimpinan ekoteologi interreligius sesuai dengan Ensiklik *Laudato Si'* dalam konteks Komunitas Pegunungan Kendeng Utara (KPKU). Kepemimpinan tersebut melibatkan tiga elemen, yaitu ajaran Ensiklik *Laudato Si'* yang disampaikan Paus Fransiskus (2015) sebagai panduan dan alat analisis.

Kemudian, gagasan Wilfred (2009) dan Belser (2013) tentang ekoteologi interreligius, dan fakta empiris pergerakan KPKU. Proposisi teoretis baru tentang model kepemimpinan ekoteologis interreligius diperoleh berdasarkan saling kesesuaian antara ajaran Ensiklik *Laudato Si'*, gagasan ekoteologi interreligius, dan fakta empiris pergerakan KPKU.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, saya mengkaji kepemimpinan KPKU sebagai data empiris primer. Secara metodologis, saya menggunakan triangulasi yang melibatkan *grounded theory*, *content analysis*, dan *Delphi*. Sementara itu, data lapangan dikaji melalui siklus perbandingan deduktif-induktif dan interpretif-hermeneutis dengan paradigma konstruktivis post-positivistik untuk mengkonstruksi model kepemimpinan ekoteologis interreligius yang sesuai Ensiklik *Laudato Si'*.

Temuan riset ini mencakup empat hal. Pertama, adanya kesesuaian antara gagasan ekoteologi interreligius dan Ensiklik *Laudato Si'* sebagai konsep ekoteologi interreligius yang sejalan dengan Ensiklik *Laudato Si'* demi merawat Bumi, yaitu dengan melibatkan semua orang tanpa memandang agama dan kepercayaannya.

Kedua, identifikasi ciri-ciri kepemimpinan lingkungan dalam perspektif ekoteologi interreligius sesuai dengan Ensiklik *Laudato Si'*. Ketiga, konsep ekoteologi interreligius yang sesuai dengan Ensiklik *Laudato Si'* memiliki relevansi pada konteks KPKU sebagaimana terlihat dari empat elemen yaitu: hadirnya pemimpin interreligius yang ramah dan peduli lingkungan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Lalu adanya semangat perjuangan dan pengorbanan dari KPKU dalam merawat Bumi. Pembelaan dan penghormatan terhadap komunitas serta agama adat. Kemudian peneguhan pergerakan Gunritno dan komunitasnya demi merawat Bumi yang tereksplorasi di satu sisi. Juga pergerakan KPKU sebagai jawaban ajaran Ensiklik *Laudato Si'* sesuai dengan ekoteologi interreligius di sisi lain. Keempat, ciri, cara, dan strategi kepemimpinan dalam konteks KPKU untuk menjaga Kendeng Lestari telah teridentifikasi.

Rumusan Model

Secara umum, temuan-temuan tersebut telah memenuhi tujuan utama riset ini, yaitu merumuskan model kepemimpinan ekoteologis interreligius sesuai Ensiklik *Laudato Si'* dalam konteks KPKU. Model kepemimpinan tersebut ditandai dengan keberpihakan ekologis dan semangat inkarnatif-kenosis yang menggemakan hati nurani manusia untuk berjuang merawat Bumi tanpa kebencian dan kekerasan.

Model kepemimpinan ini mengamalkan dan mempromosikan pertobatan ekologis untuk menciptakan peradaban kasih ekologis dengan visi integral yang memprioritaskan kepentingan generasi mendatang daripada keuntungan sesaat.

Dalam konteks KPKU, model kepemimpinan tersebut ditopang landasan legal-yuridis formal berdasarkan Putusan PK Nomor 99 PK/TUN/2016 yang memenangkan perjuangan KPKU dan Surat Keputusan Kepala Staf Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan KLHS.

Sesuai dengan putusan legal-yuridis formal tersebut, seharusnya pabrik semen di Rembang dan praktik penambangan di PKU dihentikan. Data tersebut sesuai LS 186, "*Jika informasi objektif menunjukkan bahwa akan terjadi kerusakan serius dan permanen, meskipun tidak ada bukti yang tak terbantahkan, proyek harus dihentikan atau diubah*".

Berdasarkan riset ini, saya mendorong penguasa dan pengusaha agar mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih ekologis dengan menjadikan PKU sebagai *kawasan budidaya ekologis*, bukan objek eksploitasi tambang sebab PKU adalah kawasan lindung sebagai KBAK dengan CAT.

PKU dapat menjadi sarana pemenuhan pembangunan melalui peningkatan ekonomi yang lebih ekologis, pengembangan pendidikan ekologis, pelestarian ekosistem, budaya, kearifan lokal (*Sedulur Sikep*), dan pariwisata. *Ketiga*, secara sosio-politik, riset ini menginspirasi sinergi tiga pilar: penguasa, pengusaha, dan rakyat sesuai dengan fungsi masing-masing.

Yaitu untuk mewujudkan peradaban kasih ekologis dan mencegah terjadinya perselingkuhan antar pilar tersebut agar tidak menjadi sumber kerusakan sosio-ekologis. *Keempat*, implikasi eko-pastoral, yakni pelayanan berbasis agama dan kepercayaan untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan.

Para pemimpin agama dalam keberagamannya dapat saling bekerjasama dan menjadi kekuatan spiritual untuk edukasi merawat Bumi, rumah bersama.

<https://koran-jakarta.com/model-kepemimpinan-ekoteologis-interreligius?page=all>

Pejuang Green Economy

Oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata

DALAM dua hari beruntun, sebagai pastor Campus Ministry Unika Soegijapranata Semarang, saya harus menghadapi dan mengalami kehilangan besar. What a shocking news! Belum usai rasa duka dan kehilangan kami atas meninggalnya Drs. George Hardjanto, Msi, seorang figur dosen teladan yang selalu murah senyum, sabar, dan transformatif sesudah saya melayani dalam ibadat requiem di hari Selasa (22/2/22); pagi-pagi di hari Rabu (23/2/22) terdapat kabar duka lagi, Guru Besar Unika Soegijapranata Semarang, Prof. Dr. Andreas Lako, SE, Msi pun berpulang.

Saya menelpon nomor handphone Prof Lako, hendak janji untuk menghaturkan titipan surat dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang yang berisi tentang ijin untuk saya menjadi pengajar pada PDIL atas permintaan Prof Lako. Surat yang sama sebagai tembusan sudah saya kirimkan melalui WhatsApp pada hari Jumat (18/2/22). Prof Lako menyambutnya dengan gembira. Saya ingin menyempurnakan kegembiraan Beliau dengan menyerahkan versi printout-nya.

Namun, betapa mengejutkan. Saat saya menelpon nomor Prof Lako, yang menerima telepon putrinya, dengan isak tangis sambil mengabarkan bahwa Prof Lako berpulang. Guru Besar Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang yang juga mengemban tugas sebagai Kaprodi Program Doktor Ilmu Lingkungan di universitas yang sama tersebut berpulang sesudah berolah raga di rumahnya.

Dua hari sebelum saya menjalani ujian terbuka disertasi saya (21/1/22), Prof Lako menjadi salah satu pengujinya, beliau sempat menyampaikan kepada saya bahwa baru saja mengalami serangan jantung ringan. Dokter menyarankan agar beliau menjalani perawatan Map (opname) di rumah sakit. Namun, beliau memilih untuk tidak opname karena harus menguji dua mahasiswa PDIL, salah satunya saya.

Menanggalkan diri

Dari sepercik pengalaman ini, tampak betapa Prof Lako adalah sosok Guru Besar yang bertanggung jawab. Ia bahkan tidak memperhitungkan kepentingan pribadinya sendiri demi memberikan yang terbaik kepada mahasiswa yang dilayani

dan didampinginya. Beliau menghayati puncak pengabdian sebagai dosen dengan menanggalkan dirinya demi kepentingan mahasiswa yang dilayaninya.

Itulah yang membuat saya sebagai pastor, sahabat, dan pernah menjadi mahasiswa Beliau sungguh merasa kehilangan. Meninggalnya seorang Prof Dr Andreas Lako menjadi a great loss for Unika Soegijapranata (meminjam ungkapan Prof Dr Y Budi Widianarko – rekan sejawatnya – khususnya dan dunia akademik di negeri ini pada umumnya. Atas meninggalnya Prof Lako, saya pun segera mengabarkan kepada rekan saya, Mbak Hartati – redaktur opini Harian Kompas di Jakarta.

Selama ini, sebagai akademisi, Prof Lako juga aktif menulis di harian tersebut untuk membagikan gagasan-gagasannya di seputar persoalan ekonomi sesuai kompetensinya. Mbak Tati pun menyampaikan rasa duka mendalam dan rasa kehilangan sosok pemikir yang gagasan-gagasannya selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat luas.

Dalam tulisan-tulisannya, salah satu gagasan yang terus ditawarkan adalah kepekaan untuk berani meninggalkan egoisme, menanggalkan diri sendiri, demi kepentingan masyarakat luas. Ekonomi baginya bukan soal meraup keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan diri sendiri apalagi merugikan sesama dan alam semesta. Kuncinya adalah berani menanggalkan kepentingan diri sendiri.

Green economy

Secara konseptual, di kelas PDIL Unika Soegijapranata, Prof Lako selalu menawarkan gagasan green economy, yakni konsep ekonomi yang ramah dan peduli lingkungan. Lebih dari semuanya, dasar untuk itu adalah kasih. Baginya, green economy tidak lain adalah kasih. Itulah sebabnya, pada status WhatsApp di-tulisnya: Kasihilah sesamamu.

Kepada Beliau saya selalu menambahkan: Kasihilah sesamamu dan alam semesta ini! Green economy menjadi seimbang saat kita mampu mengasihi alam semesta ini yang haus dijaga, dirawat, dilindungi, bukan untuk dirusak dan dieksploitasi, apalagi melupakan, mengabaikan, dan melecehkan generasi mendatang.

Maka, lebih dari green economy, kata saya kepada Beliau, kita membutuhkan pengembangan paradigmatis the economy of God atau God's economy. Ekonomi yang mengacu pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan Bumi baik adanya sejak semula. Di balik konsep God's economy terdapat tugas perutusan kepada manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan-Nya yang dengan akal budi dan hati nurani menjaga dan merawat makhluk ciptaan lainnya. Itulah yang dalam prinsip ekologi disebut dengan komitmen memberikam keadilan, perdamaian, kelestarian lingkungan dan keutuhan ciptaan.

Prof Lako selalu tersenyum setiap kali mendengarkan penjelasan saya tersebut dan menyatakan “Oke Romo!” Beliau tidak hanya mengangguk setuju, melainkan juga berupaya untuk mengakomodir gagasan saya tersebut.

Namun, sejak Rabu pagi (23/2/22), saya tidak akan pernah lagi mendengar frasa penuh kasih “Oke. Romo!” dengan senyum yang mengembang dari wajah Prof Dr Andreas Lako. Senyumnya sudah didedikasikan dalam kebersamaan abadi di kehidupan abadi. Tinggallah siapa saja yang mengenal dan pernah bersama Beliau ditantang untuk mewarisi kebaikan dan komitmen yang selama ini diteladankannya kepada kita! Selamat jalan Prof Andre! Requescat in Pace! (*)

Tribun Jateng 24 Februari 2022, hal. 2

<https://jateng.tribunnews.com/2022/02/24/opini-alloys-budi-purnomo-pejuang-green-economy>

Pertumbuhan Ekonomi yang Manusiawi

Oleh: **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan SemarangSemarang

DIAKUI dengan jujur, pandemi Covid-19 telah menggoncang stabilitas (per) ekonomi(an) dunia, termasuk di Indonesia. Pada Maret 2020, penelitian Jeanet Sinding Bentzen, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengkajian Agama, Ekonomi, dan Budaya, menekankan bahwa pandemi mengintensifkan pencarian baru untuk doa. Namun, pandemi juga membuat kerusuhan rasial dan sipil serta ketidakpastian ekonomi meningkat. Kedamaian dan kegembiraan telah digantikan oleh kekhawatiran dan kemarahan.

Bagusnya adalah di samping pergumulan yang berorientasi ekonomis, sebagian besar warga masyarakat menjadi lebih sadar akan kerugian dan kesedihan secara keseluruhan. Keterasingan saat isoman yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri justru membuat kita lebih peka terhadap kesedihan orang lain. Lebih banyak orang merelakan sesuatu – meskipun dalam tingkat yang berbeda – dari kebutuhan akan tisu toilet hingga ketahanan pangan. Untuk kemaslahatan bersama, banyak orang telah memperoleh kesadaran yang meningkat akan kesedihan masyarakat akibat virus corona. Kesadaran baru diperoleh tentang efek generasi rasisme dan ketidakadilan ekonomi yang menimpa banyak orang di berbagai belahan dunia.

Paradigma Ekologi-Ekonomi

Di tengah wabah yang selalu bikin gelisah, kita masih menyaksikan ketidakadilan ekonomi(s). Kita sadari bahwa ketidakadilan ini tidak muncul dengan sendirinya. Ini menunjuk kembali ke model pembangunan yang mengabaikan pentingnya ekologi. Oleh karena itu pentinglah sejenak memeriksa secara singkat jenis bentuk masyarakat yang kita semua derita secara ekologis akibat ketidakadilan ekonomi(s).

Hal itu terutama berlaku bagi masyarakat modern karena ia dibangun di sekitar inti ekonomi, yang dipahami sebagai produksi kekayaan tanpa batas melalui eksploitasi sumber daya alam. Dalam masyarakat modern, ekonomi tidak lagi dipahami dalam pengertian aslinya sebagai pengelolaan kelangkaan yang rasional, melainkan sebagai Hasrat meraih pertumbuhan tanpa batas yang kerap kali mengabaikan aspek kemanusiaan.

Tak bisa dimungkiri, pertumbuhan ekonomi cenderung menghasilkan otomatisasi dan homogenisasi, melulu untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya. Akibatnya, realitas alam dan heterogenitas yang saling terhubung diabaikan. Itulah sebabnya, kita memerlukan paradigma ekologi-ekonomi, yang mengharuskan untuk mempertimbangkan realitas secara lebih luas. Dalam paradigma itu, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pengembangan dan tidak dapat dipandang terpisah daripadanya.

Konsep dan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan kemanusiaan (humanism). Di era krisis ekologi yang menimpa Bumi saat ini, sangat dibutuhkan humanisme yang dari dirinya mampu menyatukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, demi suatu visi yang lebih menyeluruh dan terpadu. Itulah sebabnya, kajian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kajian konteks manusia, keluarga, pekerjaan, perkotaan, dan hubungan setiap orang dengan dirinya sendiri yang menghasilkan cara tertentu untuk berhubungan dengan orang lain dan dengan lingkungan.

Akan selalu ada interaksi antara ekosistem dan hubungan sosial. Kesadarannya adalah bahwa keseluruhan akan selalu lebih besar daripada bagian-bagian segelintir, apalagi dalam orientasi kekuasaan dan keuntungan. Karenanya, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan solidaritas demi keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan.

Pelanggaran Solidaritas

Setiap pelanggaran terhadap solidaritas dan persahabatan masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup menjadi noda besar pembangunan dan nafsu pertumbuhan ekonomi. Lebih parah dan menyakitkan masyarakat adalah ketika upaya-upaya itu juga disertai dengan perilaku yang mengabaikan bahkan melanggar hukum.

Contoh, negara-negara yang memiliki undang-undang yang jelas tentang perlindungan hutan, justru menjadi saksi bisu atas banyak pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, bahkan secara kasat mata di depan rakyatnya sendiri.

Pengejaran pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh mengabaikan martabat masyarakat setempat (local wisdom). Para elite politik dan kekuasaan dituntut secara *conditio sine qua non* (tidak bisa tidak) untuk memberi perhatian kepada budaya local.

Hal yang sama berlaku dalam konflik kepentingan lingkungan yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup.

Sudah saatnya, para penguasa dan pengusaha dengan jujur dan rendah hati melakukan dialog yang memperjumpakan antara bahasa ilmiah teknis dan bahasa rakyat. Sayangnya, pencapaian pertumbuhan ekonomi kerap berkelindan dengan visi konsumeristis. Itu tampak dalam kecenderungan menyeragamkan budaya dan mengurangi keberagaman budaya, yang merupakan harta kekayaan umat manusia yang seharusnya dihormati.

Keprihatinan mendalam sekarang ini adalah bahwa eksploitasi dan degradasi lingkungan hidup tidak hanya dapat menguras sumber-sumber daya mata pencaharian setempat, tetapi juga melemahkan keterampilan sosial yang telah memungkinkan suatu cara hidup yang sejak lama membentuk identitas budaya serta makna hidup dan tinggal bersama.

Karena itu, pentinglah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan tradisi budaya mereka. Mereka bukan hanya suatu minoritas di antara yang lain, tetapi mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka (Paus Fransiskus, 2015, Ensiklik *Laudato Si'*, 145-146).

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang memerhatikan masyarakat adat dan kekayaan alamnya tanpa sikap eksploitatif, akan menghadirkan kesejahteraan integral yang bermartabat.

Tribun Jateng 26 Agustus 2021 hal. 2

Ekologi Pancasila

Oleh **Aloys Budi Purnomo Pr,**

Dosen Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata

NEGERI kita istimewa, sebab setiap tanggal 1 Juni, kita boleh bersyukur atas Hari Lahir Pancasila. Meski peringatan kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni, namun tidaklah berlebihan bila sepanjang Juni dijadikan momentum untuk merefleksikan dan mensyukuri Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengannya kita mbingkai hidup yang memancarkan nilai-nilai Pancasila, nadi darah dan daging kebangsaan kita.

Terutama ketika bangsa ini terancam fragmentasi sosio-politik yang berdampak pada friksi horizontal, kerinduan untuk terus menggemakan kembali nilai-nilai Pancasila tak bisa dinafikan.

Sebagai landasan hidup bernegara dan berbangsa, Pancasila memang istimewa, tanpa harus mendewakannya. Pancasila selalu kokoh dengan lambang Garuda Pancasila yang gagah dengan kepak sayap yang menaungi siapa saja.

Sejak kelahirannya hingga kini dan seterusnya, Pancasila selalu merentangkan ruang bagi Bhinneka Tunggal Ika yang terpancang pada kaki Garuda Pancasila.

Apalagi bila diiringi lantunan lagu karya Sudharnoto: “Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi. Sedia berkorban untukmu.

Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju maju. Ayo maju maju. Ayo maju maju.” Maknanya kian mendalam berpadu dengan kelima Sila-nya.

Aspek ekologis

Hari lahir Pancasila berdekatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni. Pancasila memiliki aspek ekologis, yakni kesalingterhubungan antar sila yang membawa kita sampai pada Tuhan, sesama, dan semesta. Iman kepada Tuhan yang Maha Esa berbuah pada Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dengan spirit Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, demi terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tuhan Yang Maha Esa adalah Sang Pencipta langit dan Bumi beserta isinya. Sang Pencipta memanggil kita untuk merawat Bumi dan seisinya demi kemanusiaan yang adil beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang saya sebut ekologi Pancasila. Pancasila mendasari relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta.

Sebagai warga bangsa yang mencintai Pancasila dengan seluruh nilai dan maknanya, saya selalu terpana dalam rasa kagum saat memikirkan makna ekologis Pancasila.

Dalam konteks ini, Pancasila tak hanya gagah dalam menghadapi virus-virus pemecah belah persatuan bangsa, melainkan juga harus perkasa dalam mengkritisi para perusak lingkungan dan alam semesta.

Sila pertama Pancasila menyadarkan kita bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan Bumi ini bukan untuk dijarah dan dirusak demi keuntungan sesaat.

Sila kedua mengingatkan kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup pula keadilan dan sikap beradab dalam merawat Bumi sebagai rumah kita bersama.

Apalagi, Pancasila sebagai rumah bersama digali dari Bumi Pertiwi Indonesia yang juga rumah kita bersama.

Dalam konteks solidaritas global ekologis, yang telah membangkitkan para pemimpin dunia untuk bangkit bersama merawat lingkungan dan Bumi ini, sila ketiga sangat penting tak hanya demi menjaga persatuan Indonesia, melainkan juga persatuan untuk merawat Bumi kita.

Gerakan ekologi global di seluruh dunia telah membuat kemajuan besar dan berhasil dalam pembentukan berbagai organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan-tantangan krisis ekologi yang menimpa kita semua.

Sebagai warga bangsa, berdasarkan Pancasila, kita pun ditantang untuk bekerja sama sebagai sarana Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi keutuhan ciptaan, masing-masing sesuai dengan pengalaman, prakarsa, dan bakat kita. Semua demi – meminjam warisan Mgr. Albertus Soegijapranata, Uskup Pribumi pertama di Indonesia dan Pahlawan Nasional – pro patria et humanitate, untuk bangsa dan kemanusiaan.

Dari sinilah lahir solidaritas universal perawatan keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemimpin ekologis

Aspek ekologis Pancasila memberikan tantangan pula akan hadirnya para pemimpin yang berjiwa ekologis. Ini sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Rumusan sila keempat sangat jelas: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam perspektif ekologi Pancasila atau implementasi Pancasila yang ekologis, rakyat membutuhkan pemimpin yang memiliki hikmat kebijaksanaan ekologis.

Pemimpin yang demikian tidak mengutamakan pendekatan kekuasaan apalagi disertai kekerasan, melainkan pemimpin yang rendah hati, yang membumi, dan peka terhadap kaum rentan yang selalu menjadi korban pertama dalam setiap kerusakan lingkungan. Musyawarah demi mencapai mufakat adalah jalan utama, bukan kesewenang-wenangan!

Dengan pemimpin berjiwa ekologis, sila kelima pun dapat terwujud dengan baik, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial dewasa ini mencakup pula keadilan ekologis (Francis, 2015). Keadilan sosial erat terkait dengan kepedulian akan alam, keadilan bagi kaum miskin, komitmen kepada masyarakat, dan kedamaian batin. Semoga paradigma ekologi Pancasila menjiwai pula para pemimpin kita.

<https://jateng.tribunnews.com/2022/06/04/opini-alloys-budi-purnomo-pr-ekologi-pancasila?page=all>



Kelangkaan Batubara Dan Wajah Asli Kapitalis

Oleh: **Amrizarois ismail, S. Pd., M.Ling,**

*Dosen Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan UNIKA Soegijapranata Semarang,
Direktur Griya Riset Indonesia*

Beberapa akhir ini kita tengah dihebohkan oleh kondisi dinamika ekonomi, diantaranya kelangkaan dari sektor energi berupa batubara. Dua kondisi ini tentu bagi kita sama sekali terdengar tidak masuk akal, mengingat negara kita memiliki sumber daya yang melimpah. Bukan barang rahasia umum lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya fosil yang melimpah, dan sudah sejak lama di eksploitasi keberadaannya mulai dari jaman kolonial, hingga saat ini. Lalu mengapa terjadi kelangkaan yang mengakibatkan langkanya komoditi yang berimbas pada munculnya ancaman krisis energi listrik di dalam negeri, hingga berujung dipecatnya Rudy Hendra Prastowo Direktur Energi Promer PLN dan pelarangan ekspor batu bara untuk periode januari 2022 (Yohana Artha Uly, 2022).

Untuk dapat menjawab hal tersebut, perlu bagikita untuk mengetahui kondisi dan potensi barang komoditi tersebut di Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Bertengger di peringkat tiga dengan jumlah produksi mencapai 562,5 juta ton, Indonesia melampaui peringkat Amerika dan Australis sebagai importir batubara (Cindy Mutia Annur, 2021). Dengan kondisi tersebut, mustahil untuk saat ini Indonesia mengalami kelangkaan batubara yang berujung pada potensi krisis energi yang cukup besar.

Kelangkaan batu bara sendiri sebetulnya berawal dari meningkatnya permintaan batu bara di tengah krisis energi yang melanda beberapa negara seperti kawasan Eropa, China, dan India (Dwi, 2021). Tingginya permintaan inilah yang kemudian menjadikan harga batu bara melambung tinggi. Namun, nampaknya para investor dan pengusaha batu bara di Indonesia terlampau rakus melihat peluang ini, sehingga secara jor-joran mengexport batu bara ke luar negeri tanpa mengindahkan kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% (Suparjo Ramalan, 2022).

Tentu hal ini menjadi ironi tersendiri, melihat banyaknya perusahaan tambang yang bercokol, mengeruk sumber daya batu bara dan menimbulkan permasalahan lingkungan yang besar dan belum terselesaikan hingga saat ini. Diketahui, dari data kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang tercatat melalui websait Minerba One Data Indonesia (MODI) terdapat 5 ribu lebih pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP)[1] dengan produksi barubara mencapai 187 juta ton lebih[2]. Tentu banyaknya perusahaan dan aktivitas tambangnya tersebut mengakibatkan kerusakan hutan yang cukup tinggi, sebagai contoh dikalimantan selatan sebanyak 1,2 juta atau 33% lahan di Kalsel dikuasai oleh pertambangan batubara yang turut juga menjadi penyumbang laju deforestasi.

Referensi Cermin Wajah Asli Kapitalis

Hal ini seolah mencerminkan wajah asli dunia kapitalistik yang memang lebih berorientasi pada pasar dengan tujuan utamanya adalah menimbun kekayaan pribadi dan lingkaran dibanding kepentingan masyarakat secara luas, setidaknya inilah yang coba ditunjukkan oleh Prof. Dr. Jamil Salmi dalam buku *Violence and Democratik Cociety*. Dalam buku tersebut, ditunjukkan paham kapitalis hanya tunduk pada sistem ekonomi yang berhaluan moda dan individu dan keputusan ekonomi oleh untung rugi pasar yang seringkali menjadi penyulut terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang halus dan terselubung dalam bentuk ketimpangan ekonomi hingga krisis (Alami, A, N, 2006). Alam di negeri ini sudah banyak dikorbankan untuk kepentingan para kapital, namun kelangkaan batu bara dalam negeri menegaskan kaum kapital seolah tidak tahu caranya berterimakasih bahkan terkesan arogan dengan beraninya melanggar ketentuan kewajiban untuk memenuhi target DMO yang telah ditentukan pemerintah.

Langkah tegas pemerintah melalui menteri BUMN dengan pemecatan Direksi PLN dan melarang pelaku usaha untuk melakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor batu bara selama periode 1-31 Januari 2022 patut untuk diapresiasi, namun tentu langkah pemecatan dan pelarangan ekspor saja tidak cukup tanpa menindak tegas dan memberikan sanksi untuk para perusahaan nakal yang terbukti tidak mematuhi kewajiban pemenuhan DMO sebanyak 25%. Ada banyak opsi pemberian sanksi para kapital nakal tersebut, diantaranya ancaman pencabutan IUP yang beberapahari lalu sepat lantang diumumkan oleh Presiden Jokowi terhadap beberapa perusahaan tambang yang tidak memenuhi ketentuan baik administrasi hingga yang terindikasi merusaklingkungan. Negara tidak boleh kalah dengan para penyamun.

Referensi

Athiqah Nur Alami. (2006). *Kekerasan kapitalisme*. 111–118.

Cindy Mutia Annur. (2021, November). Tiongkok Rajai Produksi Batu Bara pada 2020, Indonesia Peringkat Berapa? *Katadata.Co.Id*, 1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/tiongkok-rajai-produksi-batu-bara-pada-2020-indonesia-peringkat-berapa>

Dwi, C. (2021, October 14). Krisis Energi, Saham Batu Bara “Meledak” di Seluruh Dunia. *CNBC Indonesia.Com*, 1. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211014101153-17-283806/krisis-energi-saham-batu-bara-meledak-di-seluruh-dunia>

Suparjo Ramalan. (2022, January 4). PLN Krisis Batu Bara, Ternyata Ini Penyebabnya. *Okezone.Com*, 1. <https://economy.okezone.com/read/2022/01/04/320/2527365/pln-krisis-batu-bara-ternyata-ini-penyebabnya?page=1>

Yohana Artha Uly. (2022, January 6). Buntut Krisis Pasokan Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN. *Money.Kompas.Com*, 1. <https://money.kompas.com/read/2022/01/06/151359226/buntut-krisis-pasokan-batu-bara-erick-thohir-copot-direktur-energi-primer-pln?page=all>

Data ESDM, diakses di <https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>

Data BPS, diakses di <https://kaltim.bps.go.id/indicator/10/361/1/produksi-batubara.html>

[1] <https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>

[2] <https://kaltim.bps.go.id/indicator/10/361/1/produksi-batubara.html>

<https://www.rumahkabar.com/2022/01/kelangkaan-batubara-dan-wajah-asli.html>

Main Diksi dalam Hukum Karantina

Oleh: **Amrizarois Ismail SPd Mling,**

Dosen Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang.

PPKM Darurat diberlakukan untuk Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli 2021, hingga diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021. Hal tersebut menjadi sebuah alarm bagi masyarakat untuk kembali bersiap mengencangkan ikat pinggang, menahan diri untuk tidak bisa memaksimalkan pekerjaan, yang berarti juga ancaman bagi keberlangsungan kehidupan keluarga.

Bukan tanpa dasar, hal itu sangat beralasan melihat berbagai pemberitaan di media hingga kejadian di lingkungan sekitar yang menunjukkan banyak anggota masyarakat yang mengeluh rugi akibat pengetatan aturan pembatasan sosial dalam PPKM Darurat, yang seolah-olah diterjemahkan sebagai pelarangan mutlak untuk aktivitas usaha, terutama bagi pedagang kecil yang biasa mengandalkan pendapatan harian dengan berjualan.

Bagai mana tidak, pelarangan makan di tempat dan pembatasan jam berjualan hingga jam 8 malam tentu mengakibatkan penurunan omset harian. Hal itu diperparah dengan represivitas petugas penegak aturan PPKM di lapangan, seperti adanya perampasan barang dagangan, perlengkapan warung, penyiraman barang dagangan dengan pemadam kebakaran, hingga tindak kekerasan aparat terhadap pelaku usaha.

Berbagai kegaduhan dalam PPKM Darurat tersebut menjadi hasil yang berlawanan dengan apa yang diharapkan pemerintah, yaitu terciptanya ketenangan dan ketertiban, sehingga angka Covid-19 dan ketakutan masyarakat dapat dikendalikan.

Penambahan waktu PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021 tentu akan menambah pula rasa waswas masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang usaha hariannya lumpuh dalam PPKM ini dan alhasil sudah bisa ditebak akan ada kegaduhan dalam penegakan aturan di lapangan seperti saat ini.

Lalu pertanyaannya, mengapa upaya mitigasi bencana kesehatan bisa berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat? Pertanyaan tersebut seharusnya tidak

perlu muncul, bila kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini menjadi penyebab kegaduhan betul-betul diperhatikan dan diberi solusi oleh pemerintah.

Bantuan sosial menjadi solusi yang belakangan dikabarkan akan diberikan, namun kesan terlambat dan risiko ketidakmerataan menjadi penyebab mengapa masih diperlukan jaminan mutlak subsidi pemenuhan kebutuhan selama PPKM, yang sejatinya merupakan karantina kesehatan.

Persoalan karantina kesehatan sebetulnya bukan hal yang baru. Pasalnya, negara kita sebelum pandemi Covid-19 juga pernah mengalami bencana kesehatan seperti Sars dan Flu Burung, hingga negara sudah memiliki payung hukum untuk mengantisipasi kejadian serupa, yaitu UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.

Dalam UU tersebut, tepatnya pada Pasal 55, dijelaskan bahwa negara boleh saja melakukan pembatasan total kegiatan masyarakat demi kepentingan kesehatan, dengan catatan hak kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sayangnya pemerintah tidak pernah menggunakan diksi karantina wilayah, meskipun sejatinya kebijakan pembatasan sosial yang pernah diambil mulai PSBB hingga PPKM Darurat secara praktik hampir serupa dengan konsep karantina. Terlebih saat PPKM Darurat ini banyak akses jalan umum, jalan tol, moda transportasi, bahkan kegiatan ekonomi yang dibatasi operasionalnya, sehingga masyarakat pun seolah-olah tidak diperbolehkan untuk melakukan pergerakan layaknya karantina.

Seperti kehabisan modal, tampaknya pemerintah saat ini enggan memberlakukan aturan pembatasan sosial dengan diksi karantina wilayah, karena khawatir tidak mampu menanggung beban ekonomi untuk menghidupi rakyatnya.

Hal yang ironi, melihat sebelumnya pemerintah begitu mudah menekan utang untuk keperluan yang urgensinya bisa ditunda, contoh saja utang untuk infrastruktur hingga isu utang untuk keperluan pertahanan yang nilainya mencapai Rp 17 quadriliun (CNN Indonesia), dan kali ini merasa keberatan untuk melakukan spekulasi ekonomi untuk menjamin rakyatnya agar tidak mati kelaparan.

Pemusatan CSR

Apabila mau sedikit jeli dan bersusahpayah, sebetulnya Indonesia tidak kekurangan investor, para pengusaha parlente, hingga para tuan yang dijuluki sultan atas kekayaan yang mengeruk dari bumi Indonesia. Seharusnya pemerintah selaku pemegang hak otoritatif dalam hal apa pun mampu menunjukkan taringnya

dengan memaksa perusahaan- perusahaan raksasa yang bercokol hidup dan kaya raya di bumi Indonesia untuk iuran, mencurahkan seluruh kemampuan filantropinya untuk membantu rakyat yang ada di sekitarnya, mungkin dengan konsep pemusatan corporate social responsibility (CSR).

Program CSR merupakan program filantropi atau kearifan sosial suatu perusahaan untuk masyarakat di sekitarnya dan diwajibkan olehnya sebagai imbal jasa terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, yang selama ini dilakukan secara parsial dan terpisah oleh masing-masing perusahaan dengan dana yang tidak sedikit.

Bayangkan saja bila dana yang ada digerakkan terpusat dan kolektif untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

Potensi dana CSR dari perusahaan sejatinya tidak sedikit. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua Kadin Bambang Soesatyo sebagaimana dilansir detik.com bahwa potensi CSR pada tahun 2020 mencapai Rp 10 triliun, dan tentu jumlah itu belum termasuk dana CSR yang tidak ditunaikan.

Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum mengenai banyak perusahaan yang menghidar dari kewajiban penyaluran dana CSR. Potensi filantropil lain tentu masih banyak, misalnya para orang kaya dari berbagai kalangan, publik figur, dan artis-artis sultan.

Hal ini menjadi solusi alternatif apabila dalih jebolnya anggaran negara menjadi alasan pemerintah untuk enggan memberlakukan karantina wilayah. Pasalnya negeri ini tidak kekurangan potensi filantropi, dan pemerintah harus tegas dan galak untuk mengejanya, terutama bagi yang berkewajiban. Jangan hanya bertaring saat menghadapi masyarakat, namun ompong ketika dihadapkan pada para tuan. Dan satu lagi, yang penting dananya jangan dikorupsi lagi.(37)

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04503652/main-diksi-dalam-hukum-karantina?page=all>

Masalah Wadas : Masalah Distrust

Penulis : **Amrizarois Ismail SPd Mling,**

Dosen Prodi RIL UNIKA Soegijapranata Semarang, Direktur Griya Riset Indonesia

Beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan pemberitaan meletusnya konflik wadas. Benturan yang terjadi antar masyarakat dan aparat kepolisian tersebut, usut punya usut disebabkan karena penolakan masyarakat setempat terhadap rencana penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo guna urukan material pembangunan Bendungan Bener yang tengah diselesaikan pemerintah.

Bendungan atau waduk tersebut merupakan satu dari banyaknya proyek infrastruktur nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Prepres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Desa Wadas di Kecamatan Bener adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener. Berdasarkan amdal proyek bendungan Bener, lahan yang akan dieksploitasi untuk lokasi quarry (bahan material) seluas 145 hektar dan 8,64 hektarnya untuk jalan akses pengambilan material. Penambangan akan dilakukan menggunakan metode blasting (peledak) yang diperkirakan menghabiskan 5.300 ton dinamit. Warga menolak penambangan karena mengancam keberadaan 27 sumber mata air di Desa Wadas yang berarti juga berpotensi merusak lahan pertanian warga. Rencananya, Bendungan Bener menjadi yang tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian waduk 159 meter, panjang timbunan 543 meter, dan lebar bawah sekitar 290 meter. Akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Sumber air bendungan berasal dari aliran Sungai Bogowonto (dilasir dari Tribun Jateng).

Beberapa konflik penolakan warga sempat terjadi, hingga puncaknya meletuslah konflik saat pengukuran paksa tanah warga oleh BPN yang dikawal pasukan kepolisian. Kompas.com memberitakan, pada 8 februari 2022 dilakukan pengukuran tanah secara paksa dengan pengawasan ketat aparat kepolisian dengan ratusan personil dan perlengkapan huru-harunya. Jalannya pengukuran diwarnai tindakan represif aparat kepolisian dengan melakukan pengepungan rumah dan tempat ibadah, juga menangkapi beberapa warga yang notabene menolak adanya penambangan tersebut.

Tidak kali ini saja Peristiwa pengambil alihan paksa lahan warga yang berujung konflik semacam ini terjadi, di tahun-tahun terakhir juga terjadi konflik yang melibatkan petugas kepolisian dengan masyarakat yang juga dipicu atas penolakan beberapa pembangunan proyek strategis nasional diantaranya Konflik semen pembangunan pabrik semen di Kendeng, Konflik pembangunan bandara internasional Yogyakarta, Pembangunan PLTU di Batang, belum juga dengan lunaknya sikap pemerintah terhadap kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh para swasta sebagaimana deforestasi dan pembakaran hutan di Kalimantan dan luar Jawa lainnya. Begitu banyak penolakan masyarakat terhadap proses pembangunan proyek pemerintah yang paling sering ditengarai atas kekhawatiran akan rusaknya bentang alam yang memiliki fungsi fatal terhadap ekosistem. Meskipun pemerintah mengklaim telah menjalankan prosedur pembangunan dan mematuhi prinsip-prinsip perijinan lingkungan, lantas mengapa penolakan selalu terjadi seolah pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat terkait?.

Perlunya Evaluasi proses pembangunan dan pendekatan.

Sejak lama pembangunan di Negeri ini berjalan, selain membawa kemajuan di segala sektor, patut kita akui juga tidak sedikit permasalahan yang muncul berikutnya. Lingkungan menjadi salah satu sektor yang selalu dikorbankan keberadaannya demi memenuhi hasrat membangun, dan sering kali permasalahan lingkungan tidak terselesaikan dengan tuntas meskipun proyek pembangunan itu telah selesai.

Selama ini dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, pemerintah sering kali menggunakan model pendekatan pragmatis dengan membayar kompensasi kerugian, dan bahkan sering kali menggunakan pendekatan represif dengan membenturkan aparat keamanan dengan masyarakat. Praktik yang berlangsung sejak orde baru dan kini terus lestari, seolah menunjukkan ketidakseriusan pemerintah untuk mengevaluasi proses pembangunan dan model pendekatan yang primitif ini.

Pembangunan memanglah sebuah keniscayaan. Hal tersebut juga tertuang dalam prinsip keberlanjutan kehidupan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG's), bahwa sanya untuk mencapai keberlanjutan kehidupan, diperlukan keselarasan antara Perlindungan lingkungan (Environmental Protection), Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Community Development), dan Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth). Untuk mencapai keseimbangan tersebut, pembangunan haruslah melibatkan seluruh aktor pembangunan agar memungkinkan adanya check and balance terhadap satu keputusan, diantara aktor tersebut adalah Pemerintah sebagai manivestasi negara, pemodal atau swasta, dan masyarakat sipil.

Apa yang terjadi di wadas adalah cerminan adanya monopoli dalam pembangunan, yang mana masyarakat sipil menjadi kelompok yang tidak mendapat haknya dalam pengambilan keputusan, sedangkan Negara dan Pemodal menjadi kelompok superior yang selalu mendominasi sebuah hasil keputusan. Hal inilah yang terjadi dalam konflik wadas dan juga konflik lingkungan lainnya seperti konflik pembangunan pabrik semen kendeng, bandara internasional Yogyakarta, dan lainnya, yang mana masyarakat dipaksa menyetujui penyerahan hak akan tanahnya, apabila menolak akan dianggap membangkang dan negara berhak merebut paksa hak akan tanahnya. Kondisi semacam ini seolah terus berulang dan kemudian menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, jika pemerintah sebagai aktor utama tidak melunak dan mengevaluasi kekolotannya terhadap paradigma dan pendekatan dalam menjalankan pembangunan, niscaya akan terus terbentuk pobia tersendiri terhadap pembangunan hingga muncul sikap curiga, menolak dan antipati. Mari kita saksikan akan ada konflik apalagi setelah ini.

Sumber: <https://www.rumahkabar.com/2022/02/masalah-wadas-masalah-distrust.html>

Jaring Pemulihan Ekonomi Daerah

Oleh : **Prof Dr Andreas Lako**,

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata Semarang.

Strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pemulihan perekonomian Jateng pada 2022 ini menjadi sangat mendesak atau krusial. Saya mengusulkan agar Gubernur Jateng dan para bupati-wali kota bisa menginisiasi terbentuknya program “Jaring Pemulihan Ekonomi Daerah atau JPED”.

PADA 17 Januari 2022, BPS Jawa Tengah merilis berita menggembirakan (good news) tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat Jawa Tengah (Jateng). Dalam rilis itu dinyatakan bahwa jumlah masyarakat miskin per September 2021 menurun 175.000 orang (4,25%) dari 4,12 juta orang (September 2020) menjadi 3,93 juta orang (September 2021) atau tingkat kemiskinannya menurun dari 11,84 persen menjadi 11,25 persen. Sementara ketimpangan yang diukur dengan Rasio Gini menurun kembali dari 0,372 (Maret 2021) menjadi 0,368 (September 2021).

Berita gembira itu melengkapi rilis BPS Jateng pada akhir November 2021. Dalam rilisnya BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jateng menurun dari 6,48 persen (September 2020) menjadi 5,95 persen (September 2021) atau menurun 10.000 orang. Sementara penyerapan tenaga kerja meningkat 14.000 orang, yaitu dari 17,70 juta orang menjadi 17,84 juta orang.

Sejumlah dampak positif tersebut mendukung proyeksi saya pada awal 2021 yang menyatakan bahwa perekonomian Jateng pada 2021 akan pulih dan kemungkinan akan bertumbuh pada kisaran 2,0-4,4 persen (skenario pesimis-moderat). Dalam sejumlah kesempatan webinar di Bappeda dan Biro Perekonomian Jawa Tengah, saya menegaskan bahwa apabila proyeksi tersebut tercapai, maka dampak positifnya terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan sosial-ekonomi akan cukup signifikan. Begitu pula dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Ternyata proyeksi tersebut mendekati kenyataan. Selama Januari-September 2021, ekonomi Jateng telah bertumbuh 2,44 persen dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang bertumbuh minus 2,65 persen. Pertumbuhan sekitar 192 persen tersebut telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja, kenaikan IPM, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan lainnya.

Jaring Pemulihan Ekonomi

Hal tersebut menunjukkan bahwa arah, kebijakan, strategi, kolaborasi, sinergisitas, dan aksi-aksi pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sudah tepat dan perlu dilanjutkan serta diperkuat pada 2022. Sasarannya, agar implikasi positifnya, pada keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kian besar.

Walau sudah tepat, namun harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2021 yang diperkirakan akan bertumbuh sekitar 2,1- 2,3 persen masih sangat rendah. Walau mulai pulih, kinerja perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran atau lapangan usaha, belum sepenuhnya pulih. Karena itu, daya dorongnya perlu diperkuat agar implikasinya terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran dan ketimpangan kian besar. Demikian pula daya dorongnya terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat kian besar. Seperti diketahui, jumlah masyarakat miskin dan menganggur di Jateng masih besar. Demikian pula ketimpangan sosial-ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di wilayah perkotaan masih merisaukan.

Karena itu, strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pemulihan perekonomian Jateng pada 2022 ini menjadi sangat mendesak atau krusial. Saya mengusulkan agar Gubernur Jateng dan para bupati-wali kota bisa menginisiasi terbentuknya program “Jaring Pemulihan Ekonomi Daerah atau JPED”.

Tujuan dari JPED adalah membantu dunia usaha, baik usaha besar, menengah, kecil maupun mikro, untuk membangun atau mengoperasikan kembali usahanya yang sempat mati atau mati suri, selama masa pandemi Covid-19 pada 2020-2021. Selama masa pandemi Covid-19, ada banyak usaha yang tutup, mati suri atau kesulitan keuangan serius, sehingga kesulitan beroperasi. Pada masa pemulihan Covid19 mulai September 2021- akhir Januari 2022, tentu ada banyak perusahaan dan UMKM yang masih belum pulih dan bisa beroperasi kembali, karena mereka masih dililit kesulitan likuiditas atau kesulitan mendapatkan permodalan usaha. Karena itu, kehadiran JPED ini tentu akan sangat membantu mereka.

Sumber pendanaan JPED itu bisa diambil dari dana pemulihan ekonomi daerah yang dialokasi pemerintah pusat untuk tahun 2022 ini. Selain itu, bisa juga diambil dari pos-pos lain dalam APBD 2022, yang pemanfaatannya tidaklah mendesak.

Apabila usulan ini diterima, maka pemerintah perlu menyiapkan tata kelola JPED agar arah, tujuan, dan sasarannya efektif.

Usulan ini diajukan selain karena masih ada banyak dunia usaha yang belum beroperasi kembali karena masih kesulitan pendanaan, juga karena dorongan pertumbuhan ekonomi Jateng dari sisi permintaan sangat mungkin akan kian pesat. Dalam rilis BPS tentang pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2021, terlihat semua komponen pengeluaran telah bertumbuh positif. Pertumbuhan terbesar dibukukan komponen ekspor dan impor masing-masing 16,85 persen dan 15,21 persen, lalu disusul pembentukan modal tetap bruto 5,22 persen. Konsumsi rumah tangga selaku komponen terbesar untuk permintaan ekonomi (59,70%) yang selama tahun 2020 bertumbuh minus, selama 9 bulan tahun 2021 telah kembali bertumbuh positif 1,48 persen.

Hal tersebut mengindikasikan, kalau tidak terjadi lagi peristiwa-pertiswa pandemi kejutan pada tahun baru ini, maka pertumbuhan permintaan ekonomi pada 2022 ini akan semakin pesat.

Merespons kemungkinan itu, pemerintah dan dunia usaha perlu segera mempersiapkan kekuatan dan daya ungkit sektor-sektor industri dalam lapangan usaha, khususnya sektor-sektor usaha yang menjadi basis kehidupan masyarakat dan penyerap tenaga kerja terbanyak seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi, dan makanan dan minuman, serta lain-nya.

Mayoritas bidang usaha dari para pelaku UMKM Jateng bergerak dalam sektor-sektor tersebut. Mayoritas UMKM juga beroperasi di wilayah perkotaan. Selama masa pandemik Covid-19, yang paling menderita dampak negatifnya adalah wilayah-wilayah perkotaan. Jumlah kemiskinan, pengangguran, dan tingkat ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah perkotaan meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Karena itu, desain yang tepat program-program JPED dan pelaksanaannya difokuskan pada wilayah-wilayah perkotaan menjadi salah satu solusi jitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan Jateng pada 2021 ini.

Suara Merdeka 4 Februari 2022 hal. 4

Mendorong Pertumbuhan Berkualitas

Oleh : **Prof Dr Andreas Lako**,

Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, Semarang.

SEPERTI telah diduga sebelumnya, rilis BPS Jawa Tengah pada awal Oktober 2021 lalu menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah (Jateng) pada Triwulan III 2021 bertumbuh positif sebesar 2,56 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Secara keseluruhan, perekonomian Jateng selama Januari-September 2021 telah bertumbuh 2,44 persen.

Walau sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,24 persen, namun tren pertumbuhan yang terus positif tersebut patut disyukuri. Alasannya, tren pertumbuhan itu mengindikasikan bahwa fundamental perekonomian Jateng pada 2021 sudah mulai berangsur pulih dan trennya meningkat. Sangat mungkin, jika tak ada peristiwa-peristiwa negatif luar biasa selama November-Desember 2021, perekonomian Jateng pada 2021 bakal bertumbuh pada kisaran 2,4 – 2,75 persen.

Namun demikian, tren pertumbuhan positif yang terjadi sejak April 2021 hingga September 2021 tersebut ternyata tidak berdampak positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Laporan BPS Jawa Tengah tentang Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2021 pada awal Oktober 2021 lalu menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jateng selama Maret-Agustus 2021 hanya turun 0,01 persen, yaitu dari 5,96 persen (Februari 2021) menjadi 5,95 persen (Agustus 2021). Dari sisi jumlah pengangguran terbuka, pada Agustus 2021 jumlahnya justru meningkat sekitar 10.000 orang dibanding periode Februari 2021.

Pencapaian itu bertolak belakang dengan pencapaian TPT pada September 2020-Februari 2021 dimana menurun 0,51 persen (dari 6,47 persen ke 5,96 persen) atau menurun sekitar 90.000 orang. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Maret-September 2021 dapat dikatakan kurang berkualitas. Maka, pekerjaan rumah mendesak yang perlu segera dilakukan pemerintah daerah dan para stakeholder terkait adalah bagaimana segera mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi

yang mampu berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.

Pertumbuhan Berkualitas

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat. Juga pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja dari mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta menciptakan keadilan sosial dan lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas itu, pengendalian inflasi serendah mungkin dan pembangunan berkelanjutan berbasis *sustainable development goals* (SDGs) menjadi salah satu prasyarat pentingnya.

Merujuk pada kerangka teoritis tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan II dan III 2021 terlihat seperti anomali. Alasannya, karena pertumbuhan sebesar 1,03 persen dan 1,66 persen pada Triwulan II dan Triwulan III 2021 (Q to Q) implikasinya terhadap penurunan jumlah pengangguran tidak seperti pola pertumbuhan ekonomi pada dua triwulan sebelumnya. Karena itu, pemerintah perlu segera mencari sebab-sebab dan solusinya agar tidak terjadi lagi pada triwulan-triwulan berikutnya. Hal ini penting karena jumlah angkatan kerja terus meningkat.

Menurut hemat saya, fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut perlu diarahkan pada: Pertama, wilayah kabupaten dan kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) di atas 6-10 persen. Kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Tegal (9,97%), Kabupaten Cilacap (9,97%), Kabupaten Brebes (9,78%), Kota Semarang (9,54%), Kota Magelang (8,83%) dan Kota Tegal (8,23%). Kabupaten/kota lain dengan TPT di atas 6-7 persen seperti Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Kedua, wilayah perkotaan. Dari rilis BPS, juga terlihat TPT di wilayah perkotaan meningkat dari 6,93 persen (Februari 2021) menjadi 7,06 persen (Agustus 2021). Sementara itu, di wilayah perdesaan, TPT-nya menurun dari 4,98 persen menjadi 4,75 persen. Kenaikan TPT di wilayah perkotaan berisiko tinggi karena bisa menimbulkan riak-riak sosial yang mengganggu kestabilan ekonomi.

Ketiga, pekerjaan perempuan dan lulusan SMA Kejuruan. Berdasarkan rilis BPS, terlihat TPT perempuan meningkat dari 4,14 (Februari 2021) menjadi 5,14 (Agustus 2021), sementara TPT laki-laki menurun dari 7,31 menjadi 6,54. Sementara dari sisi pendidikan, TPT tertinggi justru berasal dari SMA Kejuruan diikuti SMA Umum.

Untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan menurunkan TPT, maka upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah baik dari sisi permintaan ekonomi maupun penawaran ekonomi (lapangan usaha) ke level yang lebih tinggi lagi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan memang sangat mutlak diperlukan di masa depan. Pengendalian terhadap aspek kesehatan masih sangat krusial agar tidak terjadi lagi gelombang keempat kenaikan kasus Covid-19 di Jateng yang justru bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada ekonomi kerakyatan juga sangat diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat kecil.

Suara Merdeka 22 November 2021 hal. 4

Mengatasi Tekanan Keuangan Negara

Oleh : **Prof Dr Andreas Lako**

Guru besar Akuntansi, Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, Semarang

Kendati memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, namun Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti risiko utang dan beban bunga utang pemerintah pusat yang dinilai sudah mengkhawatirkan dan berisiko.

Pemerintah diminta untuk dapat mengerem laju utang dan beban bunga utang sembari meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan (*Kompas*, 25/6/2021).

Beban APBN

Apabila serius mencermati sejumlah indikator utama dalam LKPP 2020, kita dapat memaklumi kekhawatiran BPK. Ada sejumlah indikasi yang menunjukkan Indonesia berpotensi mengalami kesulitan keuangan serius pada 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

Pertama, rasio likuiditas LKPP 2020 yang diukur dengan *current ratio* (CR) yaitu aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek, hanya 95 persen. Tercatat aset lancar Rp 665,16 triliun dan kewajiban jangka pendek Rp 701,61 triliun. Besaran CR itu menunjukkan untuk membayar kewajiban jangka pendek pada 2021 saja, pemerintah masih harus mencari pendanaan lain, misalnya berutang lagi, Rp 35,08 triliun.

Besaran CR itu juga mengindikasikan aset lancar LKPP 2020 sama sekali tidak bisa digunakan untuk menopang belanja dalam APBN 2021 Rp 2.750,0 triliun. Belanja sebesar itu hanya bisa ditopang oleh sumber pendapatan dari 2021 yang diperoleh dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan hibah.

Mencermati penerimaan pajak dan PNPB yang menurun drastis pada 2020, yakni Rp 326,18 triliun (16,7 persen), maka sangat mungkin pada 2021 ini pendapatan negara yang bersumber dari dua pos tersebut bakal kian merosot. Hal ini karena Covid-19 masih terus berlanjut dan akan menyebabkan defisit APBN 2021 kian membengkak.

Menghadapi situasi itu, sangat mungkin pada 2021 pemerintah akan menempuh lagi opsi pembiayaan dari dalam dan luar negeri dalam jumlah lebih besar. Pembiayaan untuk menutup defisit APBN 2020 naik drastis dari Rp 402,06 triliun (2019) menjadi Rp 1.193,49 triliun (2020) atau naik 196,85 persen. Peningkatan itu menyebabkan beban bunga utang akan melonjak pada 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

Kedua, rasio utang pemerintah kian meningkat. Dari Neraca LKPP 2020, terlihat kewajiban pemerintah per 30/12/2020 adalah Rp 6.625,48 triliun, sementara ekuitas hanya Rp 4.473,20 triliun. Kewajiban meningkat Rp 1.285,26 triliun (24,07 persen), sementara ekuitasnya turun Rp 654,11 triliun (12,76 persen). Berdasarkan angka itu, rasio kewajiban pemerintah pada 2020 yang diukur dengan rasio utang terhadap aset (*debt to asset ratio/DAR*) adalah 59,7 persen, sementara rasio ekuitas hanya 40,3 persen.

Dalam konteks Indonesia sebagai suatu entitas, posisi DAR sebesar itu mengkhawatirkan dan memberi sinyal Indonesia memiliki risiko finansial yang besar. Posisi itu bisa menyebabkan Indonesia mengalami tekanan finansial (*financial distress*) di 2021 dan tahun-tahun selanjutnya apabila sumber-sumber penerimaan negara tidak segera digenjot dan sumber-sumber pembelanjaan tidak segera diefisienkan.

Memang, dari jumlah kewajiban, utang jangka pendek yang dibayar pada 2021 hanya Rp 701,61 triliun (10,59 persen). Sisanya, Rp 5.923,87 triliun (89,41 persen) adalah utang jangka panjang yang masih bisa diupayakan solusinya pada 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Ada yang menyatakan, kalau jumlah utang jangka pendek tersebut dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), kemampuan pemerintah membayarnya masih aman.

Saya tidak setuju dengan opini itu. Alasannya, tidak semua PDB berpotensi menghasilkan pajak. Rasio pajak terhadap PDB hanya 9,76 persen (2019) dan 8,33 persen (2020). Jumlah penerimaan pajak bahkan tidak mampu menutup belanja negara pada tahun berjalan. Untuk menutup defisit APBN 2020, misalnya, pemerintah masih harus mencari sumber pembiayaan dari pos dalam dan luar negeri Rp 1.193,29 triliun.

Ketiga, defisit APBN kian membengkak. Defisit APBN 2020 mencapai Rp 947,70 triliun, sementara pada APBN 2019 defisitnya Rp 348,65 triliun. Selama 2012-2018, defisitnya berkisar Rp 153,3 triliun – Rp 340,1 triliun. Semua defisit itu selalu ditutup dengan pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Akumulasi defisit itulah yang menyebabkan kewajiban pemerintah kian membengkak.

Mengatasi krisis keuangan

Lalu, bagaimana solusinya? Secara umum, saya sepakat dengan harapan BPK agar pemerintah pusat dapat segera mengerem laju utang sembari meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Saat ini, pemerintah pun sudah mengajukan RUU KUP kepada DPR untuk reformasi perpajakan. Namun, mengerem laju utang dalam kondisi seperti saat ini, tidaklah mudah. Perlu solusi lain yang lebih efektif.

Pertama, memacu penerimaan pajak. Caranya, misalnya dengan menaikkan tarif pajak untuk sejumlah obyek kena pajak yang dinilai terlalu rendah. Misalnya, menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen sesuai rata-rata PPN dunia. Juga, ekstensifikasi obyek kena pajak terhadap sejumlah kegiatan dan obyek ekonomi digital yang selama ini masih bebas pajak.

Selain itu, melakukan pengusutan intensif terhadap korporasi penghindar dan penggelap pajak. Data Ditjen Pajak (2021) menunjukkan, jumlah wajib pajak (WP) badan yang melaporkan rugi selama lima tahun berturut-turut terus meningkat dari 5.199 WP (2012-2016) menjadi 9.496 WP (2015-2019).

Dari sisi akuntansi, fenomena itu sangat tak logis. Sangat mungkin, korporasi pelapor rugi itu telah menggunakan berbagai teknik manajemen laba untuk merekayasa labanya agar jumlahnya minus. Tujuannya, agar bisa menghindari dari Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

Kedua, efisiensi belanja negara. Selama masa Covid-19, belanja negara naik drastis. Pada 2020, belanja naik Rp 599,05 triliun (171,82 persen). Sementara pada 2021, walaupun hanya dianggarkan naik 6 persen, namun akibat kenaikan kasus Covid-19, sangat mungkin belanja negara akan meningkat signifikan lagi. Di sisi lain, pendapatan dari pajak dan PNBN diperkirakan akan merosot lagi sehingga defisit APBN akan kian melebar.

Menghadapi realitas itu, efisiensi anggaran untuk menekan defisit APBN sangatlah krusial. Misalnya, memotong atau meniadakan pos-pos pengeluaran yang dinilai kurang mendesak. Juga, menunda pos-pos pembelanjaan modal yang dinilai kurang mendesak.

Atau, mengurangi dana transfer ke daerah karena hasil audit BPK menunjukkan mayoritas daerah makin tidak mandiri fiskalnya dan tergantung pada pemerintah pusat selama 2013-2020. Sejumlah rekomendasi BPK juga layak ditindaklanjuti untuk menekan defisit APBN.

Kita berharap agar pemerintah dan semua pihak bisa bersama-sama berupaya dengan caranya masing-masing menekan laju kasus Covid-19. Selama 17 bulan terakhir, kita mestinya sudah belajar dari sejumlah kecerobohan kita dalam merespons realitas Covid-19.

Ke depan, kita tak boleh lagi mengulangi kecerobohan itu agar Covid-19 bisa mereda dan aktivitas perekonomian bisa bergairah lagi. Hanya dengan cara itu, defisit APBN dapat ditekan, krisis keuangan dapat dihindari dan kemampuan pemerintah dalam membayar utang dapat pulih lagi.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/06/mengatasi-tekanan-keuangan-negara>

Menyelaraskan Kesehatan-Ekonomi

Oleh : **Prof Dr Andreas Lako**,

Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata

KENDATI lebih rendah dari pertumbuhan nasional sebesar 7,07 persen, namun banyak kalangan menyambut gembira rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) pada Triwulan II 2021 sebesar 5,56 persen.

Di tengah lilitan pandemik Covid-19 yang kian serius, rilis tersebut merupakan suatu berita gembira (good news) yang melegakan. Gubernur Jateng menyukuri pertumbuhan itu karena hal itu tak lepas dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang terus di genjot (Kompas,11/8/2021).

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai pertumbuhan sebesar itu menandakan bahwa perekonomian Jateng sedang menuju ke era pemulihan. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam mensikapi pertumbuhan itu dan tak perlu euforia. Alasannya, pertumbuhan sebesar itu disebabkan periode pembandingnya adalah Triwulan II Tahun 2020 yang pertumbuhan ekonominya adalah minus 5,91 persen. Selain itu, pertumbuhan itu belum memperhitungkan dampak penerapan PPKM selama Juli-Agustus 2021 pada banyak wilayah kabupaten/- kota di Jateng. Kalau diperhitungkan, pertumbuhannya bisa jadi jauh lebih rendah. Peringatan ini tentu saja membuat masyarakat awan bingung dan bertanya mana yang benar.

Sinyal Pemulihan

Saya menilai, rilis angka pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 5,56 persen pada triwulan II 2021 patut direspons positif dan disyukuri.

Dari deretan angka-angka tersebut, terlihat pertumbuhan ekonomi Jateng sedang menuju ke fase pemulihan. Kedua, secara semesteran (yoy), pertumbuhan ekonomi Jateng pada semester I (Januari-Juni) 2021 adalah 2,33 persen dibanding periode yang sama pada 2020 sebesar minus 1,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian Jateng selama Januari-Juni 2021 sudah jauh lebih baik daripada periode yang sama pada 2020.

Membbaiknya kinerja perekonomian itu berdampak positif pada penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran terbuka. Rilis BPS pada Juli 2021 lalu menunjukkan hal tersebut. Ketiga, dari sisi permintaan dan penawaran ekonomi terlihat fundamental perekonomian Jateng sudah mulai membaik.

Dari sisi permintaan, terlihat Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor dan Impor pada semester I/2021 mulai bertumbuh positif dan meningkat. Kenaikan permintaan tersebut juga diikuti dengan peningkatan penawaran.

Sejumlah sektor fundamental ekonomi Jateng, seperti Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makanan/minuman, Jasa Pendidikan sektor-sektor pendukung lainnya terus bertumbuh positif.

Tren pertumbuhan positif tersebut tentu berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan. Penulis berharap, dalam rilis BPS selanjutnya, angka kemiskinan penduduk dan pengangguran terbuka pada September 2021 akan semakin menurun.

Kesehatan Ekonomi

Dari sejumlah indikator ekonomi di atas terlihat bahwa perekonomian Jateng dari Januari-Juni 2021 sesungguhnya telah memasuki ke fase pemulihan karena telah bertumbuh positif. Hal ini memang patut disyukuri.

Faktor pendorong yang mendukung pemulihan tersebut adalah faktor lingkungan regional, nasional dan global yang kian kondusif. Hal ini bisa dilihat dari kian meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan ekonomi. Selain itu, juga dari terus membaiknya neraca perdagangan (ekspor-impor) Provinsi Jateng pada semester I/2021.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pada sejumlah negara mitra ekonomi, kinerja ekspor-impor Jateng juga semakin bagus. Meningkatnya impor pada Juni 2021 juga memberi optimisme bahwa kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan lainnya ke depan akan semakin baik.

Faktor pendorong lainnya adalah tatakelola pemerintahan yang semakin baik dalam menyeleraskan pengendalian Covid-19 dengan kehidupan perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Selama Januari-Juni 2021, pemerintah daerah Jateng, yang dimotori Gubernur Jateng dapat dinilai cukup berhasil dalam melakukan pengendalian dan penyesuaian tersebut.

Keberhasilan tersebut berdampak positif pada kinerja perekonomian daerah. Namun, akibat sikap menganggap remeh atau ceroboh dari sebagian masyarakat pada sejumlah wilayah dan juga munculnya varian baru Covid-19 yang lebih agresif, maka pada Juli-Agustus kasus Covid-19 meningkat tajam. Jateng menjadi salah satu episentrum kasus Covid- 19 nasional.

Pemerintah terpaksa memberlakukan PPKM pada sebagian wilayah kabupaten/kota di Jateng. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada kinerja perekonomian pada sejumlah daerah kabupaten/kota. Sangat mungkin, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan III 2021 akan lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Triwulan II/2021.

Berkenaan dengan hal itu, maka faktor kunci untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi Jateng pada semester II/2021 adalah pada penyelerasan pengendalian Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pengendalian terhadap laju kasus Covid-19 di suatu daerah harus bisa diselaraskan dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat untuk bisa bertahan hidup.

Jangan sampai pengendalian Covid- 19 mengorbankan kebutuhan ekonomi masyarakat luas dan dunia usaha. Demikian pula sebaliknya. Jangan sampai kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomii, lalu melonggarkan protokol kesehatan.

Belajar dari pengalaman fluktuasi kasus Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi selama Maret 2020-Juni 2021, maka penyelerasan pengendalian Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi (penyelarasan kesehatan-ekonomi) menjadi sangat penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan daerah selama semester II/2021.

Konsekuensinya, laju Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi daerah mungkin akan terjadi secara moderat.

<https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04850452/menyelaraskan-kesehatan-ekonomi?page=all>

Optimisme Ekonomi 2022

Oleh: **Prof Dr Andreas Lako**,

Pengamat ekonomi, Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata Semarang.

Saya optimistis kinerja ekonomi Jateng pada 2022 akan jauh lebih baik. Demikian pula implikasinya pada pendapatan daerah dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat akan semakin lebih baik lagi.

SESUAI prediksi saya pada awal tahun, pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2021 sangat mungkin berkisar 2,40 – 2,42 persen. Berdasarkan rilis BPS Jateng, secara kumulatif selama Januari-September 2021 realisasi pertumbuhan ekonomi telah mencapai 2,44 persen.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2021 akan sedikit menurun seperti pola pada tahun-tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi pada 2021 kemungkinan adalah 2,41 persen.

Pencapaian fantastis itu patut kita syukuri, karena mengindikasikan perekonomian Jateng sudah mulai pulih dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bertumbuh minus 2,65 persen.

Hal lain yang juga patut kita syukuri adalah inflasi Jateng pada 2021 sangat rendah, yaitu 1,70. Angka ini sedikit lebih ting-gi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,56 persen.

Dengan pencapaian kinerja ekonomi dan inflasi seperti itu, sangat mungkin dampak positifnya terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan sosial ekonominya daerah pada 2021 akan jauh lebih baik. Jumlah kemiskinan per September 2021 yang akan segera diumumkan BPS sangat mungkin akan menurun signifikan dibandingkan dengan periode Maret 2021, yaitu 4,11 juta orang (11,79%).

Begitu juga ketimpangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat (rasio Gini) yang sempat meningkat ke level 0,372 (Maret 2021) kemungkinan juga akan menurun kembali.

Demikian pula jumlah pengangguran terbuka yang akan diumumkan BPS pada Februari 2022 kemungkinan juga akan makin menurun. Kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita juga akan meningkat. Dampak positif kian membaiknya kinerja perekonomian dan inflasi Jateng pada 2021 juga telah terlihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik cukup signifikan dan 71,87 (2020) menjadi 72,16 (2021). Semua pencapaian tersebut tentu menjadi modal berharga bagi Jateng dalam mengarungi tahun 2022 ini.

Jauh Lebih Baik

Berdasarkan sejumlah indikator kinerja tersebut, saya optimistis kinerja ekonomi Jateng pada 2022 akan jauh lebih baik. Demikian pula implikasinya pada pendapatan daerah dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat akan semakin lebih baik lagi.

Mencermati kinerja struktur perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang hampir semuanya sudah bertumbuh positif dan terus meningkat selama 2021, maka saya optimistis kinerja perekonomian pada 2022 akan bertumbuh lebih tinggi.

Optimisme itu juga didasarkan atas hasil analisis faktor-faktor pendukung dan lingkungan global, nasional, dan regional yang juga terus membaik dan positif.

Lonjakan Covid-19 yang sering menjadi momok pada 2020-2021, tampaknya akan terus mereda dan melandai pada 2022. Berdasarkan sejumlah indikator tersebut, saya optimistis perekonomian Jateng pada 2022 bakal bertumbuh pada kisaran 3,4-4,6 persen. Sementara itu, inflasi kemungkinan besar akan berkisar 1,81-2,2 persen.

Apabila skenario moderat itu yang terjadi, maka dampaknya pada penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bakal makin besar.

Demikian pula dampak positifnya pada pendapatan daerah (APBD) juga akan sangat besar. Hal ini tentu saja akan memudahkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih longgar dalam pelaksanaan APBD 2022 dan menyusun RAPBD 2023.

Strategi Pendorong

Meski optimistis, namun tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada bagaimana efektivitas strategi dan kebijakan Pemprov Jateng dalam memperkuat kolaborasi dan sinergitas dengan pemkab/kota, dunia usaha dan masyarakat.

Kolaborasi itu terutama dalam melanjutkan penerapan era New Normal dan pengendalian Covid-19, dan dalam upaya pengatasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial-ekonomi dan ketimpangan antarwilyah yang masih cukup tinggi.

Selain itu, pencapaian optimisme 2022 juga sangat tergantung pada efektivitas pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi, fasilitasi dan insentif untuk memacu ekonomi dari sisi permintaan (demand), yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor, dan ekonomi dan sisi penawaran (supply), terutama sektor primier, sekunder, dan tersier strategis yang selama 2021 sudah kembali bertumbuh positif. Dari tren permintaan ekonomi yang terus meningkat pada 2021, maka kebijakan krusial yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera menyiapkan sektor-sektor usaha yang terkait untuk memenuhi permintaan itu.

Jangan sampai kenaikan permintaan itu lalu dipenuhi dengan strategi impor yang pragmatis. Kebijakan itu, sama sekali tidak memberi nilai tambah ekonomi-sosial bagi dunia usaha dan masyarakat Jateng.

Hal lain yang juga perlu diperkuat pemerintah adalah membangkitkan kembali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sempat lesu dan mati pada 2020-2021, terutama di wilayah perkotaan. UMKM adalah pilar dasar ekonomi kerakyatan di wilayah perkotaan.

Berdasarkan rilis BPS, selama masa Covid-19, pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial-ekonomi di wilayah perkotaan meningkat signifikan dibandingkan dengan perdesaan.

Banyak UMKM yang mati suri dan tutup. Ketika ekonomi mulai pulih, mereka tidak mampu lagi beroperasi karena kesulitan pendanaan. Pemerintah perlu mencari terobosan untuk membantu para pelaku UMKM.

Selain sejumlah strategi di atas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu menyiapkan contingency plan (rencana darurat) untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat yang tak terduga, seperti kemungkinan terjadinya Gelombang IV kasus Covid-19, bencana alam, dan lainnya.

Melanjutkan pengendalian inflasi daerah, seperti pola pada 2020-2021, juga sangat penting untuk menjaga kualitas dan inklusivitas pembangunan daerah pada. 2022.

Suara Merdeka 6 Januari 2021 hal 4

Waspadai Ketimpangan Perkotaan

Oleh : **Prof Dr Andreas Lako**,

Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang.

“Untuk merumuskan solusi yang efektif mengatasi peningkatan ketimpangan perkotaan, maka pemerintah daerah perlu segera mengundang pimpinan BPS Jateng untuk dapat dimintai penjelasannya lebih lanjut tentang daerah-daerah perkotaan mana saja yang mengalami peningkatan ketimpangan yang serius dan apa saja faktor penyebabnya.”

PADA 15 Juli 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis dua berita sekaligus, yaitu berita kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk per Maret 2021. Di satu sisi, BPS melaporkan bahwa per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jateng menurun 10,2 ribu orang, yaitu dari 4,12 juta orang atau 11,84 persen (September 2020) menjadi 4,11 juta orang atau 11,79 persen (Maret 2021).

Walaupun hanya sedikit, penurunan itu sedikit melegakan hati kita di tengah kekhawatiran sejumlah pihak bahwa akan terjadi lonjakan jumlah pendidik miskin akibat dililit Covid-19.

Namun di sisi lain, BPS juga merilis berita yang cukup mencemaskan, khususnya berkaitan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk. Dilaporkan bahwa per Maret 2021, ketimpangan pengeluaran penduduk, yang diukur dengan Rasio Gini, meningkat dari 0,359 (September 2020) menjadi 0,372 pada Maret 2021.

Dari angka tersebut, sebenarnya ketimpangan di Jateng masih aman, karena masih masuk dalam kategori “ketimpangan rendah”. Potensi gejolak sosial pun sangat kecil. Namun, bila ditelaah lebih lanjut dari pemberitaan BPS tersebut, maka akan terlihat bahwa Rasio Gini di daerah perkotaan meningkat cukup tajam dari 0,386 (September 2020) menjadi 0,398 pada Maret 2021.

Sementara itu, peningkatan rasio Gini di wilayah pedesaan masih tergolong ketimpangan rendah, yaitu dari 0,318 (September 2020) menjadi 0,325 pada Maret 2021.

Berdasarkan kriteria Rasio Gini, ketimpangan sosial di daerah perkotaan tersebut sudah nyaris masuk ke 0,40, yaitu masuk ke dalam kategori “ketimpangan menengah”. Hal ini cukup mencemaskan dan patut diwaspadai pemerintah, karena potensi risiko-risiko sosial-politiknya cukup besar. Fakta-fakta empiris menunjukkan ketika suatu daerah akan masuk atau sudah masuk ke dalam kategori “ketimpangan menengah”, maka daerah itu akan mudah sekali terjadi gejolak sosial. Kecemburuan sosial antarkelompok masyarakat meningkat.

Kecemburuan itu bisa memicu riak-riak konflik sosial antarkelompok masyarakat yang berujung pada tindakan anarkisme yang merugikan masyarakat dan daerah. Biasanya daerah dengan ketimpangan sosial menengah dan tinggi juga akan mudah dijadikan tempat yang subur bagi bersemainya benih-benih radikalisme.

Daerah itu juga mudah tersuluh konflik sosial dan kegaduhan politik. Selain itu, daerah-daerah dengan ketimpangan yang cukup lebar biasanya pengaruh pemerintahan juga kurang efektif.

Coudouel, Dani, dan Paternostro (2006) dalam artikelnya “Poverty and Social Impact Analysis of Reform: Lessons and Examples from Implementation” menjelaskan, meskipun ketimpangan bisa saja tidak sampai menimbulkan guncangan sosial dan politik, namun ketimpangan itu dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap berbagai reformasi kebijakan pemerintah.

Roda pemerintahan kurang efektif. Dalam kondisi dililit pandemik Covid-19 seperti saat ini, di mana sumber-sumber penghidupan atau penghasilan masyarakat kelas menengah-bawah di daerah perkotaan banyak yang hilang atau merosot tajam akibat pelaksanaan PPKM darurat, maka peningkatan ketimpangan ekonomi (Rasio Gini) hingga mencapai 0,398 dan bahkan mungkin sudah melampaui di 0,40 selama April-Juli 2021, patut diwaspadai dan disiasati.

Di daerah perkotaan, ketimpangan berskala menengah memiliki potensi risiko konflik yang jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan daerah pedesaan. Apalagi dalam kondisi diliputi ketidakpastian dan kecemasan akibat Covid-19.

Hal itu akibat lebih dari 40 persen kelompok masyarakat miskin berpendapatan rendah lebih rentan dan sensitif, serta mudah terprovokasi oleh isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan isu-isu lain dari orang-orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, daerah perkotaan juga menanggung beban pengangguran terbuka lebih berat dibandingkan dengan pedesaan.

Dalam kondisi ketidakpastian dan ketimpangan yang kian melebar, serta juga beban perkotaan yang makin berat itu, maka akan sangat mudah sekali masyarakat terprovokasi oleh isu-isu sensitif dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Belajar dari sejumlah kasus kerusuhan massa dari sejumlah kota dan daerah, seperti di DKI Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Solo, Papua, dan lainnya, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/ kota di Jateng dan pihak-pihak terkait perlu mewaspadai peningkatan ketimpangan di daerah perkotaan. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk merumuskan solusinya yang efektif.

Mengatasi Ketimpangan

Lalu, bagaimana solusinya? Untuk merumuskan solusi yang efektif mengatasi peningkatan ketimpangan perkotaan, maka pemerintah daerah perlu segera mengundang pimpinan BPS Jateng untuk dapat dimintai penjelasannya lebih lanjut tentang daerah-daerah perkotaan mana saja yang mengalami peningkatan ketimpangan yang serius dan apa saja faktor penyebabnya.

Penjelasan itu sangat penting untuk memudahkan pemerintah dan berbagai pihak bisa fokus dalam merumuskan berbagai strategi dan kebijakan pembangunan untuk mengurangi peningkatan ketimpangan dan mencegah potensi gejolak sosial di perkotaan.

Langkah penting berikutnya adalah sebaiknya melonggarkan penerapan PPKM darurat di wilayah perkotaan yang akan dilanjutkan lagi pemerintah demi menekan laju Covid-19.

Hal ini penting untuk memungkinkan para pelaku ekonomi, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat menjalankan kembali usaha ekonomi bisnisnya dan mempekerjakan kembali para pekerjanya serta merekrut tenaga kerja baru.

Hal ini tentu akan memiliki efek positif terhadap penurunan laju kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta mendongkrak kinerja perekonomian dan pendapatan daerah. Kepada mereka, pemerintah perlu mensyaratkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan sebagai budaya bisnis dalam operasi usaha bisnis.

Mereka juga diminta untuk “mendidik dan bahkan memaksa” para pelanggannya untuk menaati protokol kesehatan. Walaupun kebijakan ini bisa berpotensi meningkatkan lagi kasus Covid-19, namun di sisi lain pelonggaran itu akan sangat efektif menekan potensi gejolak sosial akibat melebarnya ketimpangan sosial ekonomi.

Patut juga diingat, mayoritas dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah dan rendah yang bermukim di daerah-daerah perkotaan sangat mengandalkan penghasilan harian untuk menopang kelangsungan hidup mereka.

Pembatasan sosial dan penerapan PPKM secara ketat untuk menekan laju Covid-19 yang telah diterapkan pemerintah daerah tentu saja sangat berdampak negatif terhadap sumber penghidupan dan kelangsungan kehidupan mereka.

Hal ini harus juga dipertimbangkan secara arif dan bijak oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Langkah ketiga adalah intervensi pemerintah berupa pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, kaum difabel, tua jompo, dan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menopang kelangsungan hidup mereka. Walaupun anggaran pemerintah kian terbatas atau defisit akibat dililit Covid-19, namun pemerintah perlu menguyapakan sumber-sumber pendapatan alternatif untuk membantu kelompok ini.

Misalnya, penggalangan dana kemanusiaan dari masyarakat dan korporasi agar saling berbelas kasih. Semoga badai krisis Covid-19 segera berlalu! (37)

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04471223/waspadai-ketimpangan-perkotaan?page=all>

Medsos Dalam Edukasi Cagar Budaya

Dr Ir B Sumardiyanto MSc,

Dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta &

Andreas Ryan Sanjaya SIKom MA,

Dosen Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang

Medsos menjadi alternatif piranti sosial yang dapat digunakan untuk membangun gerakan sosial peduli cagar budaya. Melalui medsos berbagai isu dan latar belakang sejarah serta nilai-nilai penting di balik sebuah cagar budaya dapat disebar-luaskan dan didiskusikan ke masyarakat. Hal ini akan membantu proses edukasi masyarakat terkait cagar budaya.

AKHIR Agustus 2021 warga Pedukuhan Kretek, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul digegerkan penemuan sebuah wajan raksasa yang diduga landasaan pompa air untuk irigasi kebun tebu di jaman Hindia Belanda. Sontak, sebelum akhirnya dipasang garis polisi, masyarakat berdatangan untuk melakukan swafoto bersama benda yang diduga cagar budaya tersebut.

Ada yang berdiri di depan, di belakang, di samping dan yang memprihatinkan, tidak kurang dari sembilan orang nyemplung di dalam wajan yang diameternya mencapai 2,5 meter (Brilio.net). Foto-foto mereka kemudian viral di dunia maya. Fenomena keterkaitan antara (objek yang diduga) cagar budaya dan perilaku masyarakat dalam bermedia sosial ini menarik, khususnya dilihat dari aspek edukasi cagar budaya.

Pelindungan Cagar Budaya

Undang-undang RI No.11/ 2010 tentang Cagar Budaya secara khusus mengatur peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Upaya terkait dengan pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Adapun upaya pengembangan dapat dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Sedangkan dari segi pemanfaatan dapat digunakan untuk kepentingan seperti agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Media sosial (medsos) di era digital sekarang ini mempunyai berbagai manfaat. Pertama, dilihat dari jangkauannya, media ini sangat luas dan mampu mengoneksikan masyarakat dari berbagai tempat, termasuk mereka yang ada di lokasi terpencil. Kedua, sejauh ada jaringan internet, semua orang dapat bermain medsos. Ketiga, melalui medsos orang dapat berdialog untuk meningkatkan atau memperluas pemahaman terhadap sebuah objek. Keempat, medsos dapat membangun berbagai komunitas atas dasar kesamaan minat. Kelima, melalui medsos orang bisa berbagi pendapat, gagasan, pertanyaan, opini dan bahkan pekerjaan. Keenam, melalui perjumpaan dalam medsos orang juga dapat meningkatkan kualitas penelitian dan yang terakhir, melalui medsos orang dapat menghimpun data secara lebih efisien.

Melihat manfaatnya yang beragam, medsos menjadi alternatif piranti sosial yang dapat digunakan untuk membangun gerakan sosial peduli cagar budaya. Melalui medsos berbagai isu dan latar belakang sejarah serta nilai-nilai penting di balik sebuah cagar budaya dapat disebarluaskan dan didiskusikan ke masyarakat. Hal ini akan membantu proses edukasi masyarakat terkait cagar budaya. Pada gilirannya akan meningkatkan penghargaan dan sikap terhadap cagar budaya.

Strategi

Tapi harus diakui, bahwa meskipun cagar budaya merupakan persoalan penting bagi masyarakat, namun isunya sangat sektoral. Sementara itu, medsos yang berkembang di masyarakat saat ini masih didominasi oleh hiburan-hiburan budaya yang bersifat populer. Di samping itu, konten-konten medsos yang ada kurang memerhatikan aspek keterlibatan publik. Untuk itu diperlukan strategi media sosial yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Dalam menyusun strategi media sosial ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu tujuan, target 'audiens' dan platform. Tujuan perlu disusun dengan spesifik, misalnya sekadar membuat warga lebih terinformasi, atau mendorong perubahan perilaku, atau bahkan mendorong pemerintah ambil kebijakan tertentu. Target 'audiens' juga harus jelas, misalnya dilihat dari gender, usia, lokasi, dan tingkat pendidikan.

Terakhir, tapi sangat penting, adalah mengidentifikasi platform media sosial yang paling sering mereka gunakan. Facebook, misalnya, media yang sangat populer digunakan warga, tetapi belum tentu dia menjadi platform paling efektif untuk melakukan edukasi tentang cagar budaya. Pemilihan platform ini akan menentukan pesan seperti apa yang akan dibangun.

Kedaulatan Rakyat 4 Oktober 2021 hal. 11

Keadilan dalam Konflik Wadas

Oleh **Benny Danang Setianto**,

buruh pengajar dan peneliti FHK dan PMLP Unika Soegijapranata.

Kegiatan penambangan dalam kapasitas yang besar dapat dipastikan akan menimbulkan dampak penting dan signifikan terhadap lingkungan hidup, tanpa melihat tujuan penambangan tersebut. Hal itu yang mendasari mengapa izin untuk melakukan kegiatan itu selalu dibutuhkan. Apalagi jika proses penambangan tersebut akan membuat warga sekitar kehilangan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

HARI Jumat 18 Februari 2022, harian kita Suara Merdeka menampilkan kepala berita di halaman satu “Tambang Andesit Tak Perlu IUP”, yang diambil dari pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Pernyataan itu muncul akibat usikan beberapa akademisi yang mempertanyakan pertambangan batu andesit di Desa Wadas guna pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Pernyataan itu otomatis memunculkan bantahan dari anggota Komisi VII DPR.

Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana perspektif keadilan lingkungan bisa digunakan untuk memotret pernyataan itu, terutama bagi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan manusia agar bisa bertahan hidup.

Keadilan Lingkungan

Istilah keadilan lingkungan sebenarnya baru ada ketika di Amerika Serikat muncul demonstrasi untuk menentang kondisi sanitasi yang buruk pada tanggal 11 Februari 1968. Demonstrasi ini dilakukan oleh warga negara Amerika yang berkulit hitam yang merasa bahwa perlakuan Pemerintah Kota Memphis membedakan antara mereka yang berkulit hitam dan berkulit putih, terutama bagi pekerja-pekerja dinas kebersihan. Tentu saja gerakan ini didukung dengan berkembangnya pula gerakan kemerdekaan masyarakat sipil (Civil Liberties).

Gerakan ini semakin menguat dan menjadi tuntutan hukum ketika masyarakat kulit hitam di Houston protes terhadap penempatan Tempat Pembuangan Sampah yang terlalu dekat dengan tempat tinggal mereka.

Dalam kasus antara *Bean v South-western Waste Management Corps*, mereka menuntut untuk dipindahkannya lokasi pembuangan sampah dari area permukiman mereka. Hal itu memunculkan kesadaran juga bahwa selama ini lokasi-lokasi di mana warga kulit hitam tinggal ternyata sering kali dijadikan juga sebagai lokasi untuk Tempat Pembuangan Sampah baik sementara maupun permanen.

Sejak saat itulah, kesadaran bahwa pemerintah seringkali memperlakukan secara diskriminatif untuk warga kulit hitam yang dikaitkan dengan kebijakan perlindungan lingkungan semakin menguat. Seringkali masyarakat kulit hitam yang kebetulan juga memiliki pendapatan ekonomi yang relatif rendah menerima paparan kondisi lingkungan yang lebih buruk dibandingkan dengan kaum kulit putih.

Beberapa kasus serupa muncul di beberapa daerah di Amerika Serikat, hingga muncullah kongres pertama di Washington DC yang mengumpulkan warga negara Amerika Serikat dari berbagai daerah dan terutama mereka yang bukan kulit putih (Afrika-Amerika, Asia, Latino dan Indian) dan melahirkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan.

Ada 17 prinsip yang dicetuskan pada pertemuan pada tahun 1991 itu. Perlindungan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dengan perlindungan masyarakat yang tertindas. Mereka yang lemah secara ekonomi, dan memiliki kedudukan sosial lebih rendah dalam masyarakat tidak boleh begitu saja dikalahkan atas nama perlindungan lingkungan. Bahkan dalam upaya mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang baik, kondisi mereka justru menjadi salah satu fokus perhatian juga. Prinsip itu juga menegaskan adanya hak dari masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Gerakan keadilan lingkungan ini menguat ke seluruh dunia karena ternyata fenomena yang terjadi di Amerika Serikat juga terjadi di banyak negara lainnya. Kebijakan untuk menempatkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah misalnya, seringkali memang dialokasikan lebih dekat dengan permukiman yang secara ekonomi lebih rendah dibandingkan di kawasan elite.

Lebih jauh lagi, bahkan kebijakan-kebijakan lingkungan seringkali lebih mendukung kepentingan kaum menengah atas dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang secara sosial dipandang lebih rendah. Di banyak negara berkembang, atas nama pembangunan dan pengembangan maka masyarakat yang dipandang memiliki status sosial lebih rendah dipaksa kalah dengan mengalami paparan lingkungan yang lebih buruk.

Fenomena tersebut mendorong PBB secara serius kemudian melakukan beberapa kajian tentang kepentingan, masyarakat untuk mendapatkan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat sehingga membatasi pemerintah untuk tidak semena-mena menetapkan kebijakan pembangunan yang melanggar jaminan tersebut.

Puncaknya, pada tanggal 8 Oktober 2021, Dewan Hak Asasi Manusia (The Human Rights Council) mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan adalah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh semua negara. Fenomena Wadas Terlepas dari bentrokan fisik yang terjadi baru-baru ini di Desa Wadas yang juga memunculkan potensi pelanggaran HAM, tulisan ini akan lebih menyoroti bagaimana ketidakadilan telah terjadi.

Kebijakan untuk melindungi lingkungan ditujukan agar semua kegiatan manusia yang memiliki potensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, seringkali pemerintah di banyak negara mempersyaratkan banyak hal sebelum memberikan izin bagi terlaksananya kegiatan tersebut.

Kegiatan penambangan dalam kapasitas yang besar dapat dipastikan akan menimbulkan dampak penting dan signifikan terhadap lingkungan hidup, tanpa melihat tujuan penambangan tersebut. Hal itu yang mendasari mengapa izin untuk melakukan kegiatan itu selalu dibutuhkan. Apalagi jika proses penambangan tersebut akan membuat warga sekitar kehilangan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

Tujuan yang berbeda terhadap pelaksanaan penambangan bisa jadi membuat secara hukum tidak perlu mendapatkan izin penambangan, namun perlindungan lingkungan bukan sekadar hukum (administratif) belaka. Bagi alam, segala persyaratan administrasi hukum tidak berpengaruh banyak terhadap kenyataan akan dampak buruk yang terjadi.

Analogi yang sama adalah bahwa hukuman mati di banyak negara masih dilaksanakan, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa hukuman mati adalah pelanggaran terhadap hak hidup sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian tambahan kedua dari Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia juga.

Dalam gerakan keadilan lingkungan justru di situlah pokok permasalahannya. Hukum dan kebijakan tidak berpihak kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Terlebih karena alam tidak bisa mempertahankan dirinya jika manusia sendiri

tidak memiliki kesadaran untuk melindungi mereka. Di sinilah tantangan kebijakan pembangunan berkelanjutan menemui ujiannya. Akankah membiarkan ketidakadilan lingkungan terus terjadi.(34)

Suara Merdeka 22 Februari 2022 hal. 4

Memerdekakan Pendidikan

oleh: **Benny Danang Setianto**,

Buruh pengajar dan peneliti Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

“Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang benar akan lebih memerdekakan kampus daripada sekadar membuat mereka dimagangkan ke dunia industri tanpa dibekali terlebih dahulu dengan sikap mental yang tepat”

SETIDAKNYA-TIDAKNYA ada dua kondisi yang saat ini dirasakan dalam **pendidikan** tinggi di Indonesia. Pertama, badai pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir setelah berjalan lebih dari satu setengah tahun, dan kedua adalah gagasan yang terus digaungkan untuk diwujudkan dalam kebijakan mendekatkan dunia industri dan **pendidikan** melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Tulisan ini akan memaparkan bagaimana kelindan kedua hal tersebut dalam praktik **pendidikan** tinggi saat ini.

Kemerdekaan Semu

Berbeda dari tingkatan **pendidikan** sebelumnya, para peserta didik di tingkat **pendidikan** tinggi secara alamiah adalah mereka yang sudah dapat digolongkan sebagai usia dewasa mula (early adulthood).

Dalam usia itu, keinginan untuk diperlakukan sebagai manusia dewasa sudah mulai muncul, sehingga mendorong **pendidikan** yang menciptakan kemandirian tidak bisa dihindarkan.

Hal ini terwujud dalam pola **pendidikan** yang tidak lagi seperti pola “drilling” dengan memaksa mereka menggunakan seragam dan hadir setiap hari dalam kelas untuk waktu tertentu.

Mereka sudah diberi keleluasaan untuk bisa menentukan mata kuliah yang akan diambil dan waktu yang disediakan. Pendidik tidak setiap saat harus memastikan bahwa anak didiknya berada di kelas di tiap pertemuan.

Meski di Indonesia masih ada ketentuan jumlah kehadiran minimal, tetapi di banyak negara syarat itu sudah dihilangkan. Kemandirian tersebut juga terlihat dalam pola interaksi hak dan kewajiban yang lebih menekankan kepada konsekuensi dan bukan keharusan.

Dosen tidak lagi mengejar mahasiswa untuk mengerjakan tugas, namun hanya menunjukkan konsekuensi jika mahasiswa tidak mengerjakan tugasnya.

Dengan kata lain, sebenarnya sejak awal mula, **pendidikan** di perguruan tinggi sudah dijiwai dengan nilai-nilai kemerdekaan bagi para peserta didiknya. Kampus hanya memberikan tawaran-tawaran yang membantu peserta didik memahami ilmu yang memang dipilihnya secara mandiri.

Hanya, dalam menjalankan kemandirian dan kebebasan yang dimilikinya, peserta didik diasumsikan memang memiliki semangat dan keinginan untuk mendalami dan memahami ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan mereka. Kenyataannya, sejak pertama kali memilih program studi atau jurusan, banyak peserta didik tidak mendasarkan kepada keinginan dan hasratnya pribadi untuk mengembangkan diri melalui pengetahuan dan keterampilan tersebut, tetapi lebih karena keinginan orang tuanya atau bahkan sekadar ikut temantemannya.

Akibatnya, mereka masih menggunakan pola **pendidikan** di tingkat sebelumnya. Kuliah adalah kewajiban, sebagai lanjutan setelah lulus SMA/SMK. Keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran hanya untuk memenuhi kewajiban yang dibuat oleh dosen atau kampusnya dengan tujuan mendapatkan nilai yang baik. Lebih parahnya, dosen dan sistem pembelajaran di kampus juga melakukan seperti di tingkat pembelajaran sebelumnya.

Asal sudah menyampaikan materi yang dituliskan dalam silabus dianggap sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada niatan untuk menginspirasi mahasiswanya agar lebih mau mendalami materi yang diberikan.

Pendekatan model **pendidikan** untuk orang dewasa (andragogi) ditinggalkan. Proses yang terjadi hanya sekadar pendalaman materi secara lebih khusus sesuai dengan prodinya tanpa memperhatikan perubahan sikap dan mental anak didik terhadap ilmu dan keterampilan yang diajarkan.

Pendidikan tinggi sebagai lembaga formal terakhir yang menghubungkan sikap dan mental siap beradaptasi dengan dunia kerja dan kehidupan hanya mampu menyentuh kepada level pemberian ilmu pengetahuan, tanpa membekalinya dengan sikap mental tersebut. Keluhan yang bisa dipastikan muncul adalah mereka seolah menjadi tidak siap kerja.

Bayangkan, siapa yang akan mampu menghafal semua teori yang dijejalkan kepada anak didik jika mereka sendiri tidak memiliki sikap mental untuk memahami dan mengembangkannya sebagai pengetahuan dan keterampilan untuk hidup mereka.

Kampus kehilangan esensi kemerdekaan dan kemandirian dalam proses pembelajarannya.

Pandemi Covid-19

Dalam kondisi seperti itu, dunia **pendidikan** tinggi harus menghadapi kenyataan bahwa pertemuan- pertemuan klasikal dalam pembelajaran di kelas menjadi tidak bisa dilakukan karena serbuan badai Covid-19.

Banyak perguruan tinggi tidak siap menghadapinya, mereka sempat menghentikan kegiatan belajar mengajarnya karena ketiadaan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaganya. Beberapa perguruan tinggi yang sebenarnya sudah memiliki infrastruktur pun sempat terguncang karena ternyata manusia- manusianya tidak siap untuk mengoperasikan fasilitas yang ada.

Dari gagap teknologi bahkan sampai phobia teknologi melingkupi dunia perguruan tinggi yang katanya melahirkan lulusan yang siap beradaptasi dengan kehidupan selanjutnya. Seolah ingat dengan tujuan menjadikan mahasiswa bisa mandiri belajar, maka banyak kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan hanya sekadar membagi bahan bacaan dan memberikan tugas.

Dosen dengan cepat mengalihkan proses interaktif di kelas dengan memberikan banyak tugas.

Mahasiswanya yang tidak siap, karena memang pertama tidak ada kebiasaan untuk secara mandiri membaca buku dan mengambil kesimpulan dari bahan bacaan yang ada, karena biasanya sudah disimpulkan oleh dosennya dalam pertemuan di kelas.

Kedua, karena tumpukan tugas dari dosen yang lebih seperti mengalihkan tugas dosen untuk mengajar menjadi pemberi tugas semata tanpa ada kesempatan nyata untuk berdialog atas hasil tugas tersebut. Akibatnya, tuntutan bahwa dosen tidak memberikan kuliah dan minimnya penggunaan fasilitas kampus berujung kepada permintaan turunnya pembayaran uang kuliah.

Mahasiswa merasa bahwa ilmu yang mereka dapatkan tidak diperoleh dari kampus mereka.

Setelah berjalan dua semester, beragam teknologi pembelajaran virtual sudah mulai banyak digunakan oleh banyak perguruan tinggi.

Ada beberapa klasifikasi penggunaan teknologi pembelajaran yang bisa dianalisis. Pertama, mereka yang hanya memanfaatkan teknologi video call untuk menggantikan pertemuan di kelas. Semua sistem pembelajarannya sebenarnya masih manual, yang tergantikan hanya pertemuan di kelas digantikan dengan pertemuan virtual. Susahnya, dalam pertemuan virtual tersebut, dengan alasan keterbatasan kuota atau buruknya infrastruktur, pertemuan menjadi hanya satu arah (monolog), bahkan dengan kondisi dosen juga tidak bisa memantau apakah mahasiswanya mendengarkan atau tidak.

Bisa dibayangkan dengan sikap mental anak didik akan keingintahuan belajar ilmu dan keterampilan yang disebutkan tadi, ditambah dengan sikap mental pendidik yang sekadar selesai menyampaikan materi, maka suara dosen dalam pertemuan virtual bisa saja hanya didengar oleh anak didik sambil melakukan aktivitas yang lain.

Kedua, ketika pembelajaran memanfaatkan teknologi pertemuan virtual digabungkan dengan interaktif di luar kelas melalui media sosial percakapan (WhatsApp, LINE, dst). Dalam hal ini kegiatan pembelajaran tidak lagi bersifat monolog saja tetapi sudah muncul kegiatan interaktif.

Hanya, dengan penggunaan dua atau tiga platform yang terpisah, meski membantu peserta didik untuk memahami materi tetapi sebenarnya sistem ini masih dikategorikan satu arah karena lebih mementingkan pemberian materi.

Evaluasi terhadap peningkatan kemampuan peserta didik agak susah dilakukan oleh pendidik. Terlebih dengan sikap mental yang hanya sekedar mendapatkan nilai baik, tetapi tidak disertai integritas peserta didik dalam mencapai nilai baik tersebut dan keterbatasan teknologi **pendidikan** yang diterapkan untuk menjamin integritas membuat tipe ini lemah dalam menjamin integritas dan kualitas pembelajaran.

Ketiga, digunakannya sistem dan teknologi pembelajaran yang lengkap, media pembelajaran pertemuan virtual yang interaktif, pencatatan kehadiran, pemuatan materi, penggunaan metode proctor serta pemeriksaan kemiripan (cek plagiarisme) ketika dilakukan evaluasi pembelajaran yang telah terintegrasi dalam sebuah sistem dari sejak perencanaan studi sampai pemberitahuan hasil studi menjadi tuntutan yang sudah harus dilakukan.

Dalam kategori inilah teknologi akan memaksa peserta didik untuk bisa belajar secara mandiri untuk membaca materi, mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan ujian karena pengawasan teknologi yang ketat.

Di sisi lain, teknologi ini juga memaksa dosen untuk memberikan materi dengan lebih baik dan benar, karena apa yang disampaikan tidak hanya terbatas pada tembok dinding kelas tetapi dimungkinkan didengar dan dilihat oleh lebih banyak orang.

Sekaligus juga memaksa pendidik untuk memperhatikan satu per satu peserta didik dalam melakukan evaluasi. Dengan demikian, akan mendorong proses pembelajarannya menjadikan peserta didik merdeka dalam memperoleh bahan materi tetapi sekaligus mandiri dalam mengerjakan seluruh proses belajarnya, tanpa harus kehilangan kualitas pendidikannya.

Harapannya, model pembelajaran dengan teknologi yang lengkap dan tepat guna akan membantu peserta didik untuk siap terhubung (bukan siap kerja seperti istilah yang digembargemborkan saat ini) ke kehidupan selanjutnya.

Catatan Akhir

Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang benar akan lebih memerdekakan kampus daripada sekadar membuat mereka dimagangkan ke dunia industri tanpa dibekali terlebih dahulu dengan sikap mental yang tepat.

Teknologi pembelajaran yang lengkap akan membuat mahasiswa memiliki kemandirian mencari sumber-sumber referensi dan menggunakannya dalam pembelajarannya yang lebih mendalam.

Sekaligus, akan mendorong dosen juga lebih siap terhadap keragaman sumber referensi sehingga lebih bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan.

Kemandirian mencari dan menggunakan sumber referensi sekaligus juga menunjukkan kemerdekaan pembelajaran dengan tidak hanya mengandalkan sumber dari dosen.

Penggunaan teknologi pembelajaran yang tepat bahkan membuat mahasiswa maupun dosen untuk memiliki perubahan sikap mental terhadap ilmu pengetahuan yang didapat dan terutama penerapan dan pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini justru membuat lulusannya lebih siap beradaptasi dengan lingkungannya termasuk dunia usaha dan dunia industry yang akan digelutinya. Kenyataannya memang sudah terbukti, gaya hidup, cara berpikir dan bertindak diubahkan dengan adanya teknologi.

Pandemi ini di satu sisi juga mempercepat perubahan hidup, dan teknologi berkelindan untuk membentuk gaya, cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan ini. Semestinya, gaya belajar, cara berpikir dan bertindak dalam pembelajaran juga bisa semakin dimerdekakan bukan justru merasa terkungkung oleh teknologi.(34)

Suara Merdeka 7 Agustus 2021 hal. 4

*[https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04602567/memerdekakan-
pendidikan?page=all](https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04602567/memerdekakan-
pendidikan?page=all)*

Pandemi, Saatnya Melepas Topeng

Oleh: **Budi Widianarko,**

Guru Besar Program Doktor Ilmu Lingkungan, Unika Soegijapranata Semarang

Covid-19 telah mencelikkan mata kita bahwa masih banyak tantangan kemanusiaan yang memerlukan kepedulian kita daripada sekadar pertikaian untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kekuasaan.

"In every crisis, doubt or confusion, take the higher path—the path of compassion, courage, understanding and love." Amit Ray

Dalam Catatan Politik & Hukum-nya, Budiman Tanuredjo (*Kompas*, 10/7/2021) menyerukan semua pihak duduk bersama untuk menemukan solusi menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Budiman mengajak para pihak meninggalkan dulu segala perbedaan dan sepenuhnya mencurahkan segenap daya dan upaya untuk melawan Covid-19 sebagai musuh bersama.

Pertikaian yang hanya demi mengukuhkan bahwa gagasan "kita" lebih baik dari gagasan "mereka" sudah selayaknya dihindari. "Di saat krisis, keputusan bukan antara yang baik dan buruk, melainkan yang kurang buruk dan yang buruk," seru Budiman.

Catatan Budiman mewakili kegetiran dan kecemasan sebagian besar kita ketika menyaksikan keriuhan yang berlangsung di panggung media, baik yang arus-utama maupun yang baru. Di tengah serangan SARS CoV-2 yang masif, perdebatan, bahkan pertikaian, antartokoh dan unsur masyarakat seperti tiada henti dan tidak mengarah pada solusi bersama. Semua pihak bersikukuh menjaga "marwah" pendapatnya—seolah dunia hanya menyisakan kebenaran tunggal.

Luluh lantak sudah keyakinan pada kekuatan pikiran bersama, *mind sharing*, yang pernah dielu-elukan sebagai jalan menuju kebenaran yang utuh-lengkap-mendalam. Alih-alih kolaborasi pemikiran, yang terjadi adalah "perang" pendapat dan sikap yang diumbar bebas di berbagai media—terutama media sosial.

Akan tergerakkah para pihak yang sedang sengit mempertikaikan gagasan mereka oleh seruan Budiman dan seruan-seruan lain yang senada? Mungkin kita harus

rela menerima apa yang dinyatakan oleh John F Kennedy: *"In a time of domestic crisis, men of goodwill and generosity should be able to unite regardless of party or politics"*. Yang akan tergerak hanyalah mereka yang berkehendak baik dan punya kemurahan hati saja.

Dengan lebih gamblang, Paus Fransiskus dalam bukunya *Let-Us Dream* (2020), bahkan berujar bahwa di masa krisis kita akan mendapati keduanya-(orang) baik dan buruk: orang akan menunjukkan jati diri mereka. Sebagian orang terjun melayani mereka yang memerlukan pertolongan, dan sebagian lagi justru mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Dalam hal ini, keuntungan yang diraup bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga pengaruh dan kekuasaan.

Sulit terwujudnya kebersamaan demi menemukan solusi atas krisis adalah suatu wujud pelarian diri dari kenyataan. Paus Fransiskus (2020) menyebut ada tiga penyebab putusnya hubungan kita dengan realitas dan kegagalan kita dalam menangkap pesan keilahian tentang pentingnya menyayangi sesama kala terjadi krisis kemanusiaan. Tiga penyebab itu adalah narsisisme (*narcissism*), keputusasaan (*discouragement*), dan pesimisme (*pessimism*).

Narsisisme hanya membawa kita pada bayangan cermin saat berkaca. Semuanya berpusat pada diri kita, sampai pada titik kita kagum dan tenggelam dalam citra kita sendiri. Berita hanya baik jika itu baik bagi kita. Ketika berita buruk muncul itu karena kita adalah korban utamanya. Keputusasaan mendorong kita untuk mengeluh dan "nyinyir" tentang segala keadaan—karena kita gagal melihat apa yang ada di sekitar kita dan apa yang ditawarkan orang lain.

Dalam ungkapan Paus Fransiskus, keputusasaan membawa kita pada kesedihan dalam kehidupan spiritual. Bagaikan digerogoti kuman dari dalam, kita akhirnya menutup diri dan gagal melihat apapun yang di luar diri kita. Pesimisme bagaikan pintu yang kita tutup rapat-rapat—menafikan kemungkinan munculnya hal baru yang baik di depan pintu esok hari.

Lepas topeng

Ketiga penghalang itu telah menjadi topeng yang kita kenakan. Saat mengenakan topeng ini sebagian orang memeragakan ketidakpedulian (*indifference*). Tidak peduli sedang berlangsung krisis kemanusiaan dan tetap saja sebagian dari kita berjuang penuh semangat untuk memenangi pertikaian pendapat demi kekuasaan.

Sebenarnya krisis, keraguan dan kebingungan punya sisi baik. Dalam ungkapan Amit Ray, di awal tulisan ini – setiap krisis akan membawa kita ke lintasan yang lebih tinggi—yaitu jalan *welas asih*, asa, saling-pengertian, dan kasih sayang. Krisis

kemanusiaan oleh Covid-19 ini benar-benar terjadi dan telah memakan korban sesama kita—insan berdarah-daging yang punya nama dan wajah.

Dalam pengalaman pribadi kita masing-masing, serangan Covid-19 bahkan sudah semakin merangsek masuk dalam lingkaran kerabat dan keluarga kita. Kita tidak bisa lagi bersikeras untuk tetap bertopeng. Gambar suram nan mengerikan telah terpampang di depan mata. Korban Covid 19 yang begitu banyak mestinya sudah cukup menggerakkan hati kita untuk rela melepaskan topeng.

Ketimpangan lingkungan

Saat topeng terlepas, kita bisa melihat dan merasakan Covid-19 tidak hadir sendiri. Ia beriringan dengan krisis-krisis lain yang masih terabaikan selama ini. Paus Fransiskus menyatakan Covid telah menyingkap tabir krisis lain yang diakibatkan oleh yaitu "virus ketidakpedulian" (*virus of indifference*). Krisis itu terabaikan terus karena kita semua menganggap belum ada solusinya—dan memilih membebaskan beban perasaan kita dengan melupakannya.

Salah satu krisis itu adalah ketimpangan lingkungan. Kondisi lingkungan hunian yang timpang tentu memunculkan risiko keparahan infeksi Covid-19 yang berbeda. Bayangkan bagaimana warga harus menjalankan protokol kesehatan di permukiman yang dikepung sampah kota—seperti Kampung "Bengek", Penjaringan, Jakarta Utara—misalnya (*Kompas*, 6/9/2019). Padahal permukiman serupa tidak terlalu sulit ditemukan di kota-kota lain negeri ini.

Kepadatan hunian, sanitasi lingkungan yang buruk, kelangkaan air bersih dan mutu serta keamanan pangan yang rendah tentu memudahkan terjadinya infeksi – bukan hanya karena imunitas yang rendah tetapi juga higienitas yang parah. Keadaan itu diperparah dengan semakin membanjirnya sampah medis, seperti masker bekas, yang tidak semuanya mampu ditangani dengan baik. Belum ada kota yang mampu memastikan bahwa seratus persen sampah rumah tangga berlabuh di tempat pembuangan akhir sampah.

Bahkan untuk sampah yang tercecer (*mismanaged waste*) ini, Indonesia adalah pemegang rekor tertinggi kedua di dunia—setelah China (Jambeck dkk., 2015). Akibatnya cecceran sampah kota masuk ke saluran air dan akhirnya berlabuh di pantai. Para penghuni permukiman padat dan kumuh di sekitar pantai harus bergaul dengan cecceran sampah ini. Padahal sejak masa pra-Covid mereka sudah kewalahan hidup di atas sampah—termasuk sampah "baru" berupa popok sekali pakai – yang semakin banyak mengapung di badan air.

Mari sudahi pertikaian—lepaskan topeng kita masing-masing—agar kita lepas dari rabun jatidiri (*existential myopia*). Covid-19 telah mencelikkan mata kita

bahwa masih banyak tantangan kemanusiaan yang memerlukan kepedulian kita daripada sekadar pertikaian di lintasan yang rendah—”sekadar” demi keakuan dan kekuasaan.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/19/pandemi-saatnya-melepas-topeng/>

Selamat Jalan Prof Andre

Oleh: **Budi Widianarko,**

Guru Besar UNIKA Soegijapranata

KETIKA hendak mengawali bimbingan daring dengan salah satu mahasiswa, Rabu pagi (23/2) pukul 08.58 saya dikejutkan oleh masuknya pesan dari salah satu lulusan Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, Dr. Constantinus ke telepon genggam saya. Saya mencoba menepis isi pesan tentang berpulangnya sahabat-sejawat Prof. Andreas Lako. Muskil! Lha wong semalam Prof. Andre – begitu para sejawat memanggilnya – masih menyemangati beberapa dari kami yang sedang menjalani isoman.

Belum sempat memastikan kebenaran pesan itu, pada pukul 09.02 sebuah pesan dari nomor Prof. Andre saya terima “Pak Budi, bapak hari ini meninggal dunia Intan”. Pesan Intan putri Prof Andre – bagaikan “gempa” yang mengguncang kuat. Saya tak mampu berkata-kata untuk beberapa saat, penuh dengan perasaan yang campur aduk, terkejut, sedih dan tidak rela. Setelah guncangan mulai berlalu, mulailah gambar dan “video” kenangan tentang Prof. Andre mengatir seolah tidak terbandung.

Tiga tahun terakhir ini saya memang berinteraksi cukup intens dengan Prof. Andre yang memimpin PDIL. Saya berkesempatan menyaksikan bagaimana komitmen, dedikasi, dan prestasi Prof. Andre dalam mengembangkan sebuah program doktor benar benar dari awal. Dalam mengembangkan dan mematangkan PDIL, Prof. Andre bukan hanya mengandalkan dorongan obsesif belaka – tetapi benar-benar berhasil menyeimbangkan antara keinginan, rasa memiliki dan substansi. Bukan sekali, dua kali secara terbuka saya sampaikan dalam perbincangan dengan para sejawat bahwa Prof. Andre benar-benar sosok yang tepat untuk “babat alas” PDIL. Perjuangan Prof. Andre mengembangkan dan mematangkan PDIL sungguh-sungguh *from the scratch* selalu berhasil menggugah kekaguman saya padanya.

Episode PDIL hanyalah ujung kecil persahabatan kami. Saya mengenalnya sejak tahun 1994 segera setelah kami berdua bergabung dengan Unika Soegijapranata. Sejak awal perjumpaan kami, saya sudah menaruh hati pada dosen muda dari Flores itu. Dengan kecerdasan yang dibungkus keramahan dan kerendahan

hati sulit untuk mengabaikan kehadiran seorang Andreas Lako. Ia cukup sering menyambangi ruang kerja saya untuk berdiskusi tentang banyak hal. Rupanya minat yang sama dalam dunia tulis-menulis mengakrabkan kami dengan cepat. Kedekatan kami semakin terwujud melalui minat ilmiah yang beririsan di bidang lingkungan.

Secara keilmuan saya sungguh kagum dan terinspirasi oleh evolusi kepakaran yang dijalani oleh seorang Andreas Lako. Saya beruntung mengikuti dari dekat kiprah akademik dan intelektualnya, sejak S1 hingga S3 – dan akhirnya meraih jabatan akademik tertinggi, Guru Besar.

Prof. Andre bukan hanya seorang yang sangat produktif dalam menulis terbukti dari puluhan buku dan publikasi ilmiah serta ribuan artikel di media masa – tetapi ia juga sangat gigih. Pengalamannya berjuang belasan tahun untuk menembus halaman opini salah satu koran nasional utama sungguh sangat menggetarkan. Tidak banyak orang yang begitu gigih dan tekun mengirimkan tulisan ke media yang telah menolaknya puluhan kali apalagi pada saat itu tulisan Prof. Andre sudah tersebar luas di hampir semua koran dan majalah nasional.

Dalam sebuah perbincangan santai, Prof. Andre sempat berbagi tentang “jurus rahasia” yang diterapkannya sehingga mampu menembus benteng editorial koran nasional Temyata yang Prof. Andre lakukan tidak main-main. Dia menganalisis ratusan artikel opini yang dimuat di koran itu. Selain mempelajari struktur dan alur isi artikel-artikel itu, Prof. Andre juga melakukan analisis paragraf demi paragraf di dalamnya. Dan yang semakin membuat saya terkagum-kagum, Prof. Andre membedah artikel-artikel itu bukan demi mencontohnya tetapi justru berusaha menemukan ceruk yang khas yang tidak ada dalam artikel-artikel itu. Bahkan, saya dikejutkan oleh ketepatan analisis Prof. Andre tentang kekuatan dan kelemahan tulisan-tulisan saya – dan menemukan alasan mengapa artikel saya di muat di koran yang sama.

Terus-terang, hingga Saat ini saya belum mendapatkan kawan berdebat secermat dan seteliti Prof Andre. Terima kasih dan selamat jalan sahabatku. Tuhan pasti punya rencana indah untukmu.

Suara Merdeka 25 Februari 2022 hal. 2

Semarang Ikut Pakta Milan

Oleh: **Budi Widianarko,**

Anggota DP2K, Guru Besar Unika Soegijapranata

SEMARANG adalah sebuah metropolitan yang unik, karena "aura" agrarisnya masih kuat. Dibandingkan kota-kota besar lain di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Jakarta, Semarang memiliki kelebihan khas yaitu lahan pertanian.

Diukur berdasarkan indikator persentase luas lahan sawah dari total luas Kota Semarang jauh melampaui ketiga kota tersebut. Dengan luas wilayah 373,7 kilometer persegi, Semarang masih memiliki persawahan seluas 4165,4 hektare (ha) atau 41,6 kilometer persegi atau 11,1 persen (BPS, 2021). Persentase ini jauh melampaui Bandung (6,5 persen), Surabaya (5,4 persen) dan DKI Jakarta (1,4 persen).

Kota dengan keberadaan pertanian yang signifikan seperti Semarang, adalah kota yang sesuai tuntutan keberlanjutan yang semakin menguat belakangan ini.

Sistem pangan perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban food system) adalah sebuah ideal baru yang ingin dicapai oleh kotakota dunia. Tekanan sistem pangan yang terus meningkat terhadap planet bumi telah semakin dikenali, bukan saja oleh kalangan ilmiah, tetapi juga oleh para pengambil kebijakan kota.

Valette dkk (Sustainable Food System Assessment, 2020) menyebut pemahaman terhadap pentingnya transformasi sistem pangan perkotaan menuju ke sistem yang lebih berkelanjutan adalah suatu imperatif yang punya implikasi serius di masa depan.

Dalam proyeksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dua per tiga populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Dengan gaya hidup dan praktik konsumsinya, penduduk perkotaan memonopoli tiga per empat (75 persen) sumber daya alam dan menyumbang 60-80 persen emisi gas rumah kaca global (UNEP, 2011). Inilah justifikasi untuk dilakukannya transformasi sistem pangan perkotaan sesegera mungkin.

Idealnya, kota bukan hanya pelahap sumber daya alam (baca: pangan) tetapi juga harus mampu memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri. Selain itu, kini sudah saatnya untuk melibatkan isu-isu pangan dalam perencanaan kota. UNEP menyebut kemampuan kota dalam menyediakan sebagian pangannya sendiri dan adalah pelibatan pangan dalam rencana kota esensi dari transformasi sistem pangan perkotaan (Collaborative Framework for Food Systems Transformation, 2019).

Seperti mengukuhkan kota sebagai pusat kreativitas dan inovasi, saat ini sudah banyak kota yang telah memulai transformasi sistem pangannya melalui berbagai prakarsa inovatif yang mendukung prinsip keberlanjutan. Menariknya prakarsa-prakarsa itu bukan hanya dimotori oleh pemerintah, tetapi juga diinisiasi dan dikembangkan oleh warga.

Sistem Pangan

Prakarsa-prakarsa inovatif itu juga telah bersemi dan berkembang di kota-kota belahan bumi utara maupun selatan. Pada intinya prakarsa-prakarsa itu menawarkan berbagai cara baru memberi makan kota dan menghubungkan para segenap pelaku di perkotaan dan desa yang berperan dalam isu pangan (offer new ways of feeding cities and connecting actors of urban and rural territories around food issues).

Salah satu kota yang memelopori pentingnya transformasi sistem pangan perkotaan adalah (Wali) Kota Milan, Italia. Wali Kota Giuliano Pisapia (2011- 2016) sangat peduli pada "kegagalan" sistem pangan perkotaan. Berdasarkan kajian tentang sistem pangan lokal di Kota Milan pada 2014 telah dirumuskan kebijakan pangan yang komprehensif untuk skala kota yang berfokus pada limbah pangan.

Prakarsa Kota Milan ini sekarang telah mewujudkan menjadi gerakan global yang dikenal sebagai Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), atau Pakta Milan yang telah diikuti 217 kota di seluruh dunia dan mencakup 400 juta warga. Gerakan global dalam keberlanjutan pangan ini, telah menghasilkan sejumlah deklarasi yang sangat bermanfaat untuk mewujudkan transformasi sistem pangan perkotaan, seperti The Global Cities Pledge on Food Justice, C40 Good Food Cities Declaration, The Glasgow Food and Climate Declaration at COP26.

Dalam laman MUFPP, per 2022 Kota Semarang ternyata telah menandatangani keikutsertaan dalam Pakta Milan bersama dengan kota-kota lain Indonesia, seperti Bandung, Solo, dan Pekanbaru.

Sungguh sebuah prakarsa yang baik dan penting bagi kota "lumpia". Keunikannya sebagai metropolitan dengan kehadiran pertanian yang masih menonjol, memang

sudah selayaknya Kota Semarang menjadi anggota Pakta Milan — sebagai sebuah platform prakarsa global yang perlu diikuti.

Saya ucapkan selamat kepada Kota Semarang — senyampang menanti aneka kabar baik tentang transformasi menuju sistem pangan perkotaan yang berkelanjutan dari kota ini. Proficiat! (46)

Suara Merdeka 10 Februari 2022 hal. 4

Semarang Menuju Kota Megapolitan

Oleh: **Christian Moniaga ST MArS,**

Kepala Prodi Arsitektur Unika Soegijapranata

KOTA Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi. Eksistensi sejarah Kota Semarang dapat terlihat dari cerita klasik perdagangan yang menjadi urat nadi kehidupan kota ini sendiri, termasuk kota lain di sekitarnya.

Kawasan Kota Lama Semarang adalah saksi bagaimana sejak zaman dulu kota ini sangat sarat dengan napas perdagangan. Dari perdaganganlah segala bentuk peradaban, agama, suku, ras dan kebudayaan berkembang pesat secara harmonis hingga saat ini. Perdagangan dan harmoni kehidupan antaretnis inilah yang dapat menjadi benang merah identitas Kota Semarang.

Berkenaan HUT Kota Semarang, searik harapan dapat saya tuliskan. Sebagai akademisi di bidang arsitektur tentunya harapan terletak tentang pembangunan dan pengembangan fisik Kota Semarang.

Kota Semarang yang sarat dengan kultur perdagangan pasti tidak bisa berhenti dengan pengembangan fisik bangunan. Skyline kota akan terus bergerak secara dinamis. Vista dan pemandangan sudut-sudut kota akan terus mengalami perubahan.

Namun demikian, aspek humanis dan pertimbangan tentang sinergisitas antara lingkungan buatan (bangunan) dengan manusia dan alam jangan pernah dikesampingkan.

Triangulasi yang baik antara manusia, alam, dan bangunan apabila terjaga dengan baik, maka akan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan alam semesta.

Bukti nyata pengejawantahan harapan di atas dapat ditelisik melalui pola ilmiah pokok (PIP) dari Unika Soegijapranata yakni eco-settlement, di mana khususnya prodi arsitektur memiliki konsep dasar tri dharma perguruan tinggi tentang aspek desain ekologis.

Seluruh civitas akademika dan para lulusan diharapkan mampu memberikan sumbang ilmu pengetahuan khususnya terkait pengembangan desain bangunan dan tata kota yang berorientasi pada aspek pelestarian alam.

Kota Semarang ke depannya akan sarat dengan perkembangan menuju kota megapolitan. Proyeksi ini harapannya dapat terjadi dengan sangat harmonis karena adanya integrasi yang indah dari berbagai aspek, baik aspek perdagangan, infrastruktur, pariwisata, dan aspek lain yang berkontribusi pada pertumbuhan Kota Semarang.

Diorama perkembangan ini harapannya tetap tidak melupakan aspek kemanusiaan dan alam. Dimana kedua aspek tersebut sejatinya adalah aspek fundamental yang mampu membantu Kota Semarang mencapai titik terbaiknya, sehingga kembali, kota ini adalah kota perdagangan yang memiliki ciri keharmonisan peradaban di dalamnya sama seperti identitas sejarah Kota Semarang yang sudah sejak lama dikenal. Selamat ulang tahun Kota Semarang ke-475.

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-043370733/semarang-menuju-kota-megapolitan?page=all>

Mudik, Jika Lelah Beristirahatlah

Oleh: **Djoko Setijowarno,**

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat.

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memperkirakan sekitar 80 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan kelelahan. Pentingnya mengutamakan keselamatan, sebab keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari risiko terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan.

Jika tidak ingin celaka, maka pahami resikonya dan hindari atau kendalikan. Hasil survey ke tiga Badan Litbang Perhubungan yang dilakukan 22 – 31 Maret 2022, diperkirakan 85,5 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Secara kuantitas, jumlah kendaraan pribadi 39,8 juta orang (mobil pribadi 22,9 juta orang dan sepeda motor 16,9 juta orang).

Disusul angkutan darat dengan kendaraan umum 25,7 juta orang (bus 14,1 juta orang, mobil sewa 6,7 juta orang, mobil travel 4,5 juta orang dan taksi daring 0,4 juta orang); transportasi udara 8,9 juta orang; kereta api 7,6 juta orang; transportasi air 2,4 juta orang (kapal laut 1,4 juta orang dan kapal penyeberangan 1 juta orang); kereta perkotaan (KRL/MRT/LRT) 0,6 juta orang; sepeda 0,4 juta orang; dan angkutan lainnya 0,1 juta orang.

KNKT (14 April 2022) memberikan himbauan keselamatan bagi pemotor, kendaraan pribadi, kendaraan bus dan penumpang, dan pengguna bus wisata.

Keselamatan pemotor

Memberikan himbauan untuk tidak mudik dengan motor untuk jarak lebih dari tiga jam melalui media, bekerjasama dengan Astra Honda Motor untuk memberikan pemahaman keselamatan, memberikan himbauan ke Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) tempat-tempat rawan kecelakaan agar memasang banner untuk tidak menggunakan motor matic pada daerah turunan curam seperti, Batu-Cangar, Gunung Lio, daerah Wonogiri, Bawang-Dieng, Cijapati Garut dll.

Meminta bantuan Dishub dan BPTD untuk memasang himbauan berupa banner di semua jembatan timbang agar:

(1) jika lelah beristirahatlah, (2) jika anda berpuasa lebih sering untuk beristirahat, (3) sebaiknya melakukan perjalanan setelah anda berbuka puasa, (4) menyiapkan motornya agar laik untuk perjalanan, (5) melakukan pengecekan tekanan dan kondisi ban, dan (6) jika menggunakan google map agar diyakinkan rute tersebut tidak ekstrem.

Keselamatan kendaraan pribadi

Memberikan himbauan melalui media tentang:

(1) agar beristirahat yang baik sebelum melakukan perjalanan jauh, (2) menyiapkan kendaraan agar laik untuk perjalanan jauh, (3) mengecek tekanan angin dan kondisi ban anda, (4) mengisi bahan bakar anda dan lakukan pengisian ulang ketika SPBBU (pompa bensin) tidak mengantri untuk menghindari kelelahan akibat mengantri BBM, (5) agar segera beristirahat jika telah merasa Lelah, (6) agar melakukan perjalanan setelah berbuka puasa, (7) jika anda berpuasa, agar sering beristirahat, dan (8) jika menggunakan google map agar diyakinkan bahwa rute tersebut tidak ekstrem.

Selain itu, meminta BPTD dan Dishub agar memberikan tanda atau peringatan bahaya untuk di setiap daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Agar dapat menyiapkan personel dan peralatan di daerah rawan kecelakaan.

Berkoordinasi dengan operator Jalan Tol dan pengelola rest area agar melakukan manajemen lalu lintas di kawasan rest area untuk menghindari kepadatan (crowded) dan agar semua instansi pemerintah untuk tidak melakukan intervensi.

Keselamatan pengguna kendaraan bus dan penumpang umum.

Memberikan himbauan baik melalui BPTD atau secara langsung agar semua PO Bus memperhatikan beberapa hal, seperti:

(1) kompetensi pengemudi, khususnya untuk trayek jarak jauh, (2) agar waktu libur dan istirahat pengemudi dapat diperhatikan dengan seksama, (3) untuk trayek dengan waktu tempuh lebih dari 8 jam agar disediakan 2 pengemudi, (4) yakinkan pengemudi memiliki kompetensi sesuai dengan peruntukannya, (5) yakinkan pengemudi telah melakukan istirahat dengan baik dan cukup sebelum melakukan perjalanan baik dari asal keberangkatan maupun dari daerah tujuan, (6) menyiapkan kendaraan dalam kondisi laik jalan untuk perjalanan jauh, dan (7) jika menggunakan google map agar diyakinkan bahwa rute tersebut sesuai dengan kelas jalan dan tidak ekstrem.

Keselamatan pengguna bus wisata

Hal perlu dilakukan mengimbau:

(1) BPTD dan Dishub pada tempat-tempat wisata yang memiliki jalur estram untuk bersiaga pada daerah rawan kecelakaan, (2) agar bus besar tidak memaksakan masuk daerah ekstrem dengan menyediakan angkutan alternatif, (3) jika menggunakan google map agar diyakinkan bahwa rute tersebut sesuai dengan kelas jalan dan tidak ekstrem, (4) untuk kota tujuan wisata dan tempat wisata untuk menyediakan tempat istirahat pengemudi, (5) agar agen biro perjalanan untuk menyediakan tempat istirahat yang layak bagi pengemudi, agar pengemudi dapat beristirahat dengan baik.

Kemudian agar diyakinkan armada bus kondisi teknisnya, perijinan dan uji laik jalan (keer/keur) dalam kondisi laik untuk melakukan perjalanan.

Pengemudi harus memiliki kompetensi sesuai dengan peruntukannya. Pengemudi telah melakukan istirahat dengan baik dan cukup sebelum melakukan perjalanan baik dari asal keberangkatan maupun dari daerah tujuan. Untuk trayek dengan waktu tempuh lebih dari 8 jam agar disediakan 2 pengemudi.

Jika dalam perjalanan, pengemudi merasa lelah, sebaiknya beristirahat saja. Jangan dipaksakan minum suplemen tambahan agar bisa bertahan mengemudi. Justru nantinya akan merusak kondisi tubuh. Dan sebelum berdoalah sebelum melakukan perjalanan.

<https://opinijateng.com/2022/04/14/6361/djoko-setidjowarno-mudik-jika-lelah-beristirahatlah/>

<https://jakartanews.com/jika-lelah-beristirahatlah/>

Arus Mudik Lebaran 2022 Tidak Hanya Tanggung Jawab Negara Tetapi Juga Masyarakat

Oleh: *Djoko Setijowarno*,

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan.

Arus mudik lebaran 2022 perlu kita antisipasi dini. Kegiatan mudik tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kegiatan mudik selama ini terkesan hanya menjadi tanggung jawab negara. Mungkin perlu dicoba bahwa mudik adalah tanggung jawab masyarakat (people responsibility) dalam arti tanggung jawab setiap individu, keluarga atau kelompok masyarakat (Imam Prasajo, 31 Maret 2022).

Potensi pergerakan nasional pada Lebaran 2022 adalah yang semula pada survei pertama 20,3% atau 55 juta orang akan melakukan perjalanan ke luar kota, setelah dilakukan survei kedua mengalami peningkatan menjadi 29,4% atau 79,4 juta.

Potensi pergerakan dari Jabodetabek pada survei pertama sebanyak 9,1 juta orang atau 26,84% dari penduduk Jabodetabek, setelah dilakukan survei kedua mengalami peningkatan menjadi 13 juta atau 38,35%.

Hasil survey kedua yang dilakukan Balitbang Perhubungan (2022), menghasilkan setelah dihapusnya test swab antigen/PCR, potensi penggunaan moda agak bergeser walaupun penggunaan kendaraan pribadi tetap terbanyak, pemilihan penggunaan pesawat menjadi lebih banyak dibandingkan menggunakan kereta api dibandingkan hasil pada survey 1.

Potensi penggunaan moda mobil pribadi 26,8% atau 21,3 juta orang, sepeda motor 18,7% atau 14,9 juta orang, bus 16,3% atau 12,9 juta orang, pesawat terbang 12,1% atau 9,6 juta orang, kereta api 9% atau 7,2 juta orang, kapal laut 1,4% atau 1,1 juta orang, dan kapal penyeberangan 1,2% atau 900 ribu orang.

Total pengguna transportasi jalan 75,3% atau sebanyak 59,8 juta orang akan menggunakan transportasi jalan. Perlu antisipasi yang menggunakan kendaraan pribadi antar pulau adalah juga potensi menggunakan angkutan penyeberangan atau angkutan laut.

Mudik gratis

Memang, biasanya mudik gratis membutuhkan persiapan selama tiga bulan. Mudik gratis tidak hanya menggunakan bus, namun ada kereta dan kapal laut.

Masih sangat memungkinkan dilakukan mudik gratis dengan menggunakan dana pertanggungans sosial masyarakat atau *cost social responsibility/CSR* dari BUMN.

Pemberangkatan mudik gratis tidak lagi diselenggarakan di lapangan terbuka, seperti Lapangan Monas atau yang sejenis.

Sekarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah banyak membangun terminal penumpang yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Saat ini terdapat 127 Terminal Tipe A, yang **beroperasi sebanyak 119 Terminal** (8 terminal belum beroperasi). Sebanyak 62 terminal sudah memiliki *detail engineering desain* (DED) dan sudah terbangun 26 terminal.

Masih ada lagi sejumlah terminal tipe A yang dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Mudik berangkat dari terminal akan memudahkan pengawasan dan pengaturan. Apalagi mudik lebaran tahun ini ada persyaratan sudah vaksin ketiga (*booster*).

Pengawasan akan lebih mudah dilakukan di ruang tertutup seperti terminal ketimbang di ruang terbuka.

Penyelenggara tidak perlu menyediakan sejumlah toilet *portable*, tenda bagi pemudik yang menunggu sebelum diberangkatkan, tidak perlu mendatangkan petugas untuk melakukan *ramp check* bus.

Kemudian dapat mengutamakan Bus AKAP yang angkut peserta mudik gratis. Jika kurang, baru kemudian dibantu sejumlah bus pariwisata.

Tidak hanya penumpang yang harus diwajibkan sehat, akan tetapi semua pengemudi Bus AKAP/AKDP juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan

diberikan tambahan vitamin. Hanya pengemudi yang lolos tes kesehatan dapat diijinkan mengemudikan bus mengangkut pemudik.

Lama perjalanan yang sekiranya di atas 8 jam, operator bus diharuskan menyediakan dua orang pengemudi. Semua armada bus yang mengangkut pemudik dipastikan sudah lolos uji berkala.

Disamping itu, pasti ada pengaturan rekayasa lalu lintas di jalan tol oleh Polri, entah *contra flow* maupun *one flow*. Namun harus diberikan perhatian khusus atau prioritas bagi sejumlah bus yang sudah tiba di lokasi tujuan untuk kembali mengangkut penumpang akan mudik.

Pengalaman tahun 2019, banyak pengemudi bus yang mengeluh akibat kebijakan penerapan *contra flow* di jalan Tol Trans Jawa. Sejumlah armada bus yang akan menjemput pemudik menjadi terhambat perjalanannya.

Harus dicermati pula, keberadaan angkutan umum pelat hitam dan biro jasa yang sudah menawarkan mudik menggunakan bus pariwisata melalui media sosial.

Pemerintah perlu mengantisipasi sejak dini. Kendaraan yang digunakan pasti tidak lolos *ramp check*, penumpang tidak diperiksa kesehatannya, pengemudi tidak ikut tes kesehatan.

Sanksi dapat diberikan terhadap PO Bus Pariwisata yang beroperasi dengan berkedok wisata mudik.

Di sisi lain, masih ada sejumlah armada truk yang masih kerap digunakan untuk mengangkut pemudik.

Tentunya ada larangan penggunaan truk untuk membawa pemudik. Di masa lebaran, juga penggunaan mobil bak terbuka digunakan untuk berwisata, harus dilarang. Mulai saat ini sosialisasi itu perlu dilakukan.

Pintu perlintasan sebidang yang tidak dijaga kerap terjadi kecelakaan di saat mudik Lebaran. Korbannya adalah yang jarang melintas di situ, sehingga selama musim mudik Lebaran perlu dilakukan peningkatan pengawasan oleh pemda setempat.

Ada kemudahan

Kemudahan dalam hal digitalisasi pembayaran juga harus disiapkan. Sinyal minimal 4G dapat merata di semua jalur mudik. Semua stasiun pengisi bahan bakar umum (SPBU) harus disiapkan pembayaran menggunakan nirtunai (*cashless*).

Karena pemudik sekarang sudah semakin banyak kaum milenial yang tidak suka membawa uang kertas. Kemudian, sejumlah warung-warung makan, toko-toko dan UMKM menjual oleh-oleh harus menyiapkan pembayaran cashless minimal menggunakan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS).

Yang dimaksud QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) khususnya untuk transportasi umum yang membutuhkan solar perlu diantisipasi serius agar tidak mengganggu mobilitas. Kemudahan mendapatkan BBM bagi transportasi umum mengangkut pemudik

Terkait *rest area* di jalan tol, tentu tidak akan menampung seluruh pengguna jalan tol. Diberikan himbauan untuk keluar jalan tol mencari *rest area* di jalan non tol.

Harus dilarang bagi pemudik yang menggunakan bahu jalan tol untuk beristirahat. Bahu jalan tol digunakan untuk kondisi darurat, bukan untuk istirahat sesaat.

Pemudik tidak harus lewat jalan tol, akan tetapi dapat menggunakan jalan non tol, karena Kemen. PUPR sudah menjamin selesai perbaikan jalan nasional saat mudik Lebaran.

Sementara, untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor, sebaiknya disediakan fasilitas mudik gratis, sepeda motor bisa diangkut dengan truk, pemudik dengan bus.

Mudik menggunakan sepeda motor untuk jarak pendek dan ikuti aturan. Maksimal untuk dua orang, barang yang dibawa tidak boleh melebihi lebar stang kemudi dan tinggi tidak boleh lebih 90 cm dari sadal, dilarang bawa barang dengan tambahan di belakang.

Sepeda motor bukan moda transportasi untuk perjalanan jarak jauh. Melarang anak-anak dibawa menggunakan sepeda motor.

Protokol kesehatan harus tetap ada untuk setiap kegiatan mudik Lebaran.

Mudik Lebaran tahun ini harus tetap memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudian ditambahkan aspek kesehatan dan bertanggungjawab.

<https://portalpekalongan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1914186654/arus-mudik-lebaran-2022-tidak-hanya-tanggung-jawab-negara-tetapi-juga-masyarakat?page=all>

<https://portalpekalongan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1914187133/pemberangkatan-mudik-gratis-tidak-lagi-di-lapangan-terbuka-antisipasi-dini-arus-mudik-lebaran-2022?page=all>

<https://jayakartanews.com/antisipasi-dini-arus-mudik-lebaran/>

<https://www.suarakarya.id/opini/pr-2603158096/antisipasi-dini-mudik-lebaran-2022>

<https://rm.id/baca-berita/nasional/119636/antisipasi-dini-arus-mudik-lebaran>

<https://hariansemarang.id/2022/04/11/antisipasi-dini-arus-mudik-lebaran/>

Jaminan Keamanan Pemudik ke Sumatera

Oleh: **Djoko Setijowarno,**

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Setiap tahun pemudik yang menyeberang ke Sumatera menggunakan kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni cenderung memilih perjalanan malam dengan alasan keamanan. Hingga sekarang, pemerintah belum dapat menjamin keamanan pemudik dari Jawa ke Sumatera.

Ketersediaan armada kapal penyeberangan Merak – Bakauheni dapat mengangkut pemudik Lebaran. Tahun 2019 dan sebelumnya selalu terjadi penumpukan. Pasalnya, distribusi kedatangan pengguna jasa penyeberangan tidak merata. Lonjakan terjadi mulai pukul 22.00 dan baru dapat terurai pada pukul 09.00 pagi esoknya. Penjualan tiket sudah dilakukan secara daring (online).



Alasan keamanan menyebabkan pemudik memilih menyeberang pada jam tersebut. Hingga saat ini pemerintah belum dapat menjamin keamanan pemudik di wilayah Sumatera, khususnya di Lampung. Pemudik masih merasa was-was jika harus melakukan perjalanan di malam hari di jalan non tol, terutama sepeda motor.

Selain itu masalah ketersediaan angkutan umum yang buruk di daerah tujuan, sehingga memaksa harus membawa kendaraan sendiri untuk nantinya melakukan silaturahmi ke sanak keluarga.

Berdasarkan perhitungan, kapasitas terpasang harian, baik pola padat maupun sangat padat masih mencukupi untuk melayani proyeksi demand angkutan lebaran tahun 2022

Di Pelabuhan penyeberangan Merak tersedia pelayanan reguler dengan 6 dermaga dan pelayanan ekspres dengan satu dermaga. Dermaga 6 Merak berpasangan dengan Dermaga 7 Bakauheni. Selain itu untuk menyeberangkan pemudik sudah disediakan 68 kapal siap operasi. Ada 3 kapal tidak siap operasi disebabkan proses docking, yakni KMP Labrita Karina, KMP Nusa Dharma dan KMP Putera.



Penyelenggaraan mudik bus gratis tidak hanya ditujukan dan terkonsentrasi ke daerah di Pulau Jawa. Namun dengan sudah terhubungnya jaringan jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Palembang sepanjang 335 km, bahkan dua tahun lagi ditargetkan sudah akan mencapai Pekanbaru, keberadaan bus gratis akan membantu masyarakat yang akan mudik ke Sumatera. Terutama yang menggunakan sepeda motor. Mengurangi pemudik sepeda motor beralih ke transportasi umum adalah pilihan yang bijak dan humanis. Sepeda motor tidak untuk digunakan perjalanan jarak jauh.

Selain itu, pembenahan fasilitas transportasi umum di daerah juga harus segera dilakukan, supaya pemudik tidak ada alasan lagi membawa kendaraan bermotor dengan alasan buruknya layanan transportasi umum. Harus diakui keberadaan transportasi umum di daerah saat ini sungguh memprihantinkan dan cenderung makin berkurang. Political will kepala daerah sangat rendah untuk memperhatikan layanan transportasi umum di daerah.

Data dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten (Maret 2022), di Provinsi Banten terdapat 4 terminal tipe A yang menyediakan 1.431 armada bus, yakni Terminal Terpadu Merak (531 armada bus), Terminal Pakupatan (729 armada bus), Terminal Labuan (112 armada bus) dan Terminal Lebak (59 armada bus).

Sementara itu, kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Merak 3.003 unit, sedangkan kapasitas jalan di luar kawasan pelabuhan 2.573 unit. Apabila kedatangan kendaraan tidak terdistribusi secara merata, maka berpotensi terjadi kemacetan hingga area di luar kawasan pelabuhan. Berdasarkan kapasitas pelabuhan 3.003 unit kapasitas kapal (KK) dan kapasitas jalan total di luar Pelabuhan 2.830 KK dengan kapasitas kapal per jam 1.242 unit KK, maka antrean baru akan habis dalam waktu 4 jam 30 menit (BPTD Banten, 2022).

Jalur Khusus Sepeda dan Bus Gratis

Memang saat akan menyeberang di Pelabuhan Merak sudah disediakan jalur khusus untuk pemudik sepeda motor. Jalur khusus ini berupa tenda, sehingga tidak kepanasan maupun kehujanan. Prioritas juga diberikan yang membawa anak-anak.

Pengadaan bus gratis ke Sumatera harus menysar hingga setiap ibukota kabupaten. Memang jumlahnya tidak sebanyak yang di Pulau Jawa. Namun setidaknya untuk memberikan pilihan pemudik sepeda motor.

Hasil survei ketiga Badan Litbang Perhubungan (Maret 2022), menunjukkan penghasilan pemudik terbesar kurang dari Rp 3 juta per bulan (66,9 persen). Penghasilan sebesar itu dapat dipastikan menggunakan sepeda motor dan angkutan umum. Sementara ketersediaan bus kelas ekonomi AKAP sudah makin berkurang. Dalam keseharian, masyarakat memilih menggunakan bus kelas eksekutif AKAP. Pada saat mudik, Bus AKAP menggunakan tarif batas atas yang tidak terjangkau masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan.***

<https://jayakartanews.com/jaminan-keamanan-pemudik-ke-sumatera/>

Kelancaran Mudik di Jalan Tol

Oleh: **Djoko Setijowarno**

Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Pilihan pemudik menggunakan jalan tol masih cukup tinggi, terutama setelah terhubung jaringan jalan Tol Trans Jawa tahun 2018. Eforia terjadi, jalan non tol yang biasanya ramai menjadi lebih lengang beralih memilih jalan tol. Sampai-sampai bahu jalan digunakan untuk beristirahat, karena rest area sudah tidak dapat menampung pemudik untuk istirahat.

Berdasarkan hasil survey ketiga Badan Litbang, Kementerian Perhubungan (Maret 2022), adanya potensi pergerakan Nasional selama angkutan Lebaran 2022 sebanyak 85,5 juta orang dan 14,3 juta orang (16,7%) diantaranya merupakan pemudik dengan asal wilayah Jabodetabek.

Pilihan pemudik menggunakan jalan Tol Trans Jawa 24,1 persen. Lebih tinggi daripada pilihan menggunakan jalur lintas tengah Jawa 9,7 persen, Tol Cipularang 9,2 persen, jalur lintas pantai utara (pantura) Jawa 8,2 persen, Trans Sumatera (non tol) 4,7 persen, Tol Jagorawi 4,2 persen, jalur lintas selatan (pansel) Jawa 3,7 persen, Tol Jakarta-Merak 3,5 persen dan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) 0,7 persen, sisanya jalan lainnya 31,8 persen.

Keberadaan jalan tol dapat memangkas sekitar 50 persen – 60 persen waktu perjalanan dibanding di jalan non tol. Keberadaan jalan tol di Jawa memunculkan angkutan pelat hitam, sementara jalan tol di Sumatera dapat menghilangkan praktek angkutan pelat hitam.

Peningkatan layanan *rest area*

Jaringan jalan Tol Trans Jawa yang mayoritas diusahakan oleh PT Jasa Marga harus melakukan banyak upaya dalam memenuhi layanan bagi pemudik. Upaya itu antara lain (1) **penambahan** fasilitas **peturasan/toilet portabel** di **TIP Tipe A** dan **TIP Tipe B**, ketersediaan air bersih, toilet harus bersih & wangi, penambahan petugas kebersihan, (2) menerapkan **Prokes** COVID-19 serta sosialisasi melalui spanduk dan **public address**, *Tagline* Mudik “Vaksinasi booster, mudik sehat dan

aman”, (3) implementasi Management *Rest Area* dengan *Rest Area Management System (RAMS)* dalam menginformasikan kapasitas parkir kepada pengguna jalan tol sebelum masuk *Rest Area* dan *Rest Area* berikutnya, (4) penyediaan sarana **perambuan, rubber cone, water barrier** saat *oneway* dan buka/tutup akses, menambah petugas keamanan, (5) memastikan **keberfungsian RAMS, CCTV, public address, videotron**, menambahkan nomor telepon pengaduan (PIC Satgas), (6) **memastikan ketersediaan** BBM, BBM Modular/Pertashop, BBM Motorist, bengkel *motorist*, layanan top up, Posko layanan, pasokan listrik, (7) **menyampaikan informasi** saat diberlakukan **oneway** melalui *public address* serta lama waktu di *Rest Area* (maksimal 30 menit).

Himbauan bagi pemudik

Dalam hal kesiapan (1) mematuhi **persyaratan perjalanan** sesuai dengan SE Menteri Perhubungan No: 38 Tahun 2022, berupa vaksinasi *booster*. Dianjurkan untuk vaksinasi 14 hari sebelum perjalanan. (2) memastikan **kondisi pengemudi dan kendaraan** dalam keadaan prima dan laik jalan, (3) **mempersiapkan perbekalan** selama perjalanan (makanan, minuman, serta peralatan ibadah), (4) memastikan **kecukupan BBM**, (4) melakukan **pengecekan tarif tol** serta **kecukupan saldo** uang elektronik, (5) **update lokasi posko layanan Kesehatan** yang tersedia di *rest area*.

Pemilihan dan waktu perjalanan, diupayakan (1) **menghindari perjalanan di waktu puncak** arus mudik dan arus balik, (2) **hindari perjalanan di waktu favorit**, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa, (3) cek **waktu dan rute** pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari kepolisian, (4) **update selalu informasi lalu lintas** melalui channel resmi Jasa Marga, seperti Aplikasi Travoy, Twitter, Call Center 14080

Aturan selama perjalanan, (1) agar selalu **mengikuti rambu dan arahan petugas** di lapangan, (2) **disiplin dalam ketentuan berkendara** di jalan tol serta tidak berhenti di bahu jalan, kecuali darurat, (3) dalam kondisi darurat dapat menghubungi **Call Center 14080**, (4) dianjurkan untuk menggunakan **fasilitas top up di Rest Area**, serta menghindari *top up* di gerbang tol.

Sejumlah *rest area* yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna jalan tol untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk *rest area* di jalan tol atau mencari *rest area* di luar jalan tol. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di *rest area* di jalan tol, seperti tidak berlama-lama di *rest area*, **maksimal 30 menit**, dianjurkan untuk **take away makanan**, selalu **menerapkan Protokol Kesehatan** selama berada di *rest area*, menjaga **kebersihan rest area**, apabila *rest area* penuh, agar menggunakan *rest area* di lokasi berikutnya, dan memanfaatkan **posko pelayanan kesehatan** di *rest area* apabila memerlukan pengecekan kesehatan

Yang harus diperhatikan selama berada di jalan tol adalah jangan sekali kali beristirahat menggunakan bahu jalan tol. Karena keberadaan bahu jalan tol untuk keadaan darurat. Ada juga kebiasaan memilih beristirahat di bahu jalan yang berada di bawah jembatan yang melintas di jalan tol, merasa teduh dan tidak kepanasan.

Petugas mobil patroli jalan tol jangan membiarkan jika menemukan sejumlah kendaraan beristirahat di bahu jalan. Segeralah meminta untuk melanjutkan perjalanan atau keluar jalan tol terdekat untuk mencari tempat istirahat yang lebih aman.

Ke depan, pembenahan penataan di sejumlah *rest area* harus dilakukan supaya *rest area* bukan lagi sebagai salah satu penyebab kemacetan dengan antrian masuk yang cukup panjang.

<https://www.suarakarya.id/opini/pr-2603263837/kelancaran-mudik-di-jalan-tol?page=all>

tulisan serupa

<https://hariansemarang.id/2022/04/23/kelancaran-mudik-di-jalan-tol/>

<https://jayakartanews.com/kelancaran-mudik-di-jalan-tol/>

Mengimplementasi Transportasi Umum Perkotaan

Oleh: **Djoko Setijowarno,**

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Masyarakat MTI Pusat

Tidak berkembangnya transportasi umum perkotaan, akar masalahnya adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk membangun sistem angkutan umum massal perkotaan. Keterbatasan kelembagaan/otoritas yang mampu mengintegrasikan pengembangan transportasi perkotaan lintas administrasi dan lintas sistem angkutan di kawasan metropolitan.

Kajian Bappenas bersama Bank Dunia (2019), antara lain menyebutkan pangsa angkutan umum Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya rata-rata kurang dari 20 persen. Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia. Kota Jakarta menduduki peringkat 10 dengan 53 persen tingkat kemacetan dibandingkan kondisi normal atau tidak macet di kota tersebut. Keterbatasan sistem angkutan umum massal menyebabkan kemacetan yang akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya berdampak pada peningkatan 1,4 persen PDB per kapita. Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Pada 5 wilayah metropolitan (Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar) kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun.

Saat ini, payung hukum untuk pembangunan proyek angkutan massal perkotaan (termasuk dalam hal dukungan Pemerintah), masih belum menyeluruh atau bersifat untuk masing-masing proyek (arbitrary). Dukungan pusat, misalnya, LRT Sumatera Selatan 100 persen, MRT Jakarta 49 persen, LRT Jabodetabek berupa sinergi BUMN (PT Adhi Karya, PT Inka, dan PT Kereta Api Indonesia). Selain DKI Jakarta, tidak ada kota yang mampu membangun MRT dan LRT jika hanya mengandalkan APBD.

Untuk mengimplementasi kebijakan pengembangan angkutan umum massal perkotaan, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

Rancangan Perpres antara lain mengatur kebijakan mobilitas perkotaan dan pengembangan kelembagaan dan dukungan fiskal, termasuk (1) kriteria untuk dapat memperoleh dukungan (termasuk syarat kelembagaan otoritas transportasi kawasan metropolitan) dan ruang lingkup, skema, serta bentuk dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Menurut Bappenas (2021), ada 7 alasan mengapa perlu diterbitkan Perpres Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan?

Pertama, kontribusi metropolitan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Hal ini terutama dipengaruhi kemacetan akibat kurangnya pelayanan angkutan umum massa. Kedua, Biaya awal pembangunan angkutan umum massal perkotaan sangat besar. Selain itu, angkutan massal biasanya juga tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk biaya operasi dan perawatan.

Ketiga, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pembangunan angkutan umum berada di Pemda dan terbatas pada satu wilayah administrasi. Namun, Pemda selain DKI Jakarta terkendala keterbatasan fiskal dan kelembagaan, sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Pusat. Keempat, Saat ini belum ada aturan yang memungkinkan Pemerintah Pusat memberikan dukungan fiskal kepada Pemda untuk angkutan massal, kecuali KPBU. Dukungan 49% Capex (dalam aturan KPBU) tidak mencukupi untuk angkutan massal, sehingga sampai saat ini belum ada proyek KPBU angkutan massal.

Kelima, selama ini, angkutan umum massal di Indonesia dilakukan melalui investasi Pemerintah dengan mekanisme ad hoc, hasilnya kurang optimal. Contohnya MRT hanya terbatas di Jakarta; LRT Sumatera Selatan melalui APBN berdasarkan Perpres Penugasan (dampaknya tidak terintegrasi dan Pemda tidak mampu mengoperasikan); LRT Jabodetabek melalui pendanaan BUMN berdasarkan Perpres Penugasan.

Keenam, investasi swasta dalam angkutan umum massal sangat terbatas, umumnya pada pengadaan sarana, pengoperasian dan perawatan. Investasi swasta sangat terbatas antara lain karena pengelola angkutan swasta tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi demand angkutan umum, konsesi angkutan perkotaan cukup rumit, karena tiap kota mempunyai kebijakan yang tidak sama, dan terbatasnya operator yang mempunyai kapasitas keuangan yang cukup untuk mengelola angkutan

Ketujuh, diperlukan Peraturan Presiden yang memungkinkan Pemerintah Pusat mendukung biaya investasi awal yang diperlukan. Tanggung jawab Pemda berupa menanggung sebagian investasi awal, kekurangan biaya operasi dan perawatan serta menjamin terjadinya integrasi layanan antar moda dan antar wilayah kota metropolitan. Investasi pemerintah untuk biaya modal dan biaya operasi angkutan umum dilakukan banyak negara dan mempunyai alasan yang kuat untuk proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan sosial-ekonomi yang besar.

Mulai implementasi

Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan (pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Untuk mengimplementasikan transportasi umum perkotaan, diterbitkan PM Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Angkutan Massal Perkotaan merupakan public goods, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Program Buy the Service (BTS) dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100%) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Di samping itu, pemda juga harus berperan untuk menjaga keberlangsungan program ini. Pertama, pembuatan halte. Halte dapat berupa bus stop, halte eksisting (revitalisasi) atau kerjasama dengan pihak swasta (CSR atau memanfaatkan halte sebagai media iklan). Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kesadaran untuk kembali ke angkutan umum serta tata cara menggunakan angkutan umum.

Ketiga, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan push strategy seperti pembatasan ruang (ganjil genap) atau waktu (bus priority in peak hour) atau kebijakan lain yang berpihak ke angkutan umum. Keempat, daerah diharapkan melakukan survey kondisi lalu lintas sebelum, saat dan sesudah dilaksanakannya BTS untuk didapat data yang akurat sebagai dasar evaluasi kemanfaatan program.

Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat bersama Pemerintah Pusat untuk sama-sama mendukung program sebagaimana dimaksud serta melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta

Tahapan implementasi sudah dimulai tahun 2020 untuk di lima kota, yaitu Medan (Trans Metro Deli melayani 5 koridor dan 72 bus, 345 titik halte), Palembang (Trans Musi Jaya melayani 4 koridor, 66 bus, 151 titik halte), Yogyakarta (Trans Yogya melayani 3 koridor, 44 bus, 113 titik halte), Solo (Batik Solo Trans melayani

4 koridor, 6 feeder, 90 bus, 105 MPU, 828 titik halte) dan Denpasar (Trans Metro Dewata melayani 4 koridor, 105 bus, 186 titik halte). Bus beroperasi selama 17 jam mulai jam 05.00 hingga 22.00.

Tahun 2021 akan diimplementasikan di enam kota, yaitu Bogor (6 koridor), Banjarmasin (4 koridor, 77 armada bus, 195 titik halte), Purwokerto (3 koridor, 58 armada bus, 185 titik halte), Makassar (3 koridor, 86 armada bus, 261 titik halte), Bandung (5 koridor, 103 armada bus, 240 titik halte), Surabaya (6 koridor, 132 armada bus, 366 titik halte).

https://www.times.id/2021/06/mengimplementasi-transportasi-umum_27.html

tulisan serupa

<https://rm.id/baca-berita/nasional/81126/catatan-djoko-setijowarno-mengimplementasi-transportasi-umum-perkotaan>

<https://indonesiainside.id/narasi/2021/06/27/mengimplementasi-transportasi-umum-perkotaan>

<https://m.suarakarya.id/detail/135223/Mengimplementasi-Transportasi-Umum-Perkotaan>

<https://www.soloposfm.com/mengimplementasi-transportasi-umum-perkotaan/18402/>

<https://www.soloposfm.com/mengimplementasi-transportasi-umum-perkotaan/18402/>

<https://smol.id/2021/06/28/mengimplementasi-transportasi-umum-perkotaan/ali/>

<https://ayoyogya.com/read/2021/06/27/45084/akar-masalah-tak-berkembangnya-transportasi-umum-perkotaan>

Mudik Sehat 2022, Protokol Kesehatan Wajib Dijalankan

Oleh: **Djoko Setijowarno**,

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Masyarakat MTI Pusat

Mudik kali ini layak dikedepankan Mudik Sehat 2022. Proses wajib dilakukan. Makna transportasi tidak hanya menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, tetapi juga aspek kesehatan saatnya mulai sekarang diterapkan.

Karena wajib antigen atau PCR, sebaiknya di setiap simpul transportasi disediakan pula vaksinasi ketiga (*booster*) di setiap simpul transportasi (bandara, pelabuhan, terminal, stasiun). Pemudik yang menggunakan angkutan umum tinggal memilih akan vaksin ketiga atau tes antigen, karena bisa saja ada pemudik yang belum boleh vaksinasi ketiga.

Mudik gratis dapat diadakan meskipun Kementerian Perhubungan tidak menganggarkan. Sebab, tiga bulan sebelum pelaksanaan mudik gratis diselenggarakan semestinya sudah dilakukan persiapan.

Caranya, dengan melibatkan semua BUMN yang memiliki kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pelaksanaan mudik gratis. Kegiatan mudik gratis ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk ikut mudik Lebaran.

Mudik gratis akan membantu PO bus wisata dan PO bus antarkota antarprovinsi (AKAP) menanggung keuntungan setelah dua tahun ikut 'berpuasa' akibat pandemi. Selama dua tahun, sudah dua kali pula mudik Lebaran dilarang dioperasikan.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, perlu diingat terhadap masyarakat yang memiliki komorbid. Jika tetap merasa perlu bepergian mudik, mintalah saran dari ahli kesehatan, terutama cara apa yang harus dilakukan di dalam perjalanan.

Agar tidak lagi dilakukan pencegatan di jalan karena tindakan itu tidak efektif. Ketersediaan *rest area* di jalan tol tidak dapat menampung semua pemudik yang menggunakan jalan tol.

Oleh sebab itu, dapat diarahkan untuk keluar jalan tol dan pemerintah daerah menyediakan *rest area* sementara. Keberadaan *rest area* sementara akan membantu peningkatan ekonomi daerah.

Pemudik yang akan menggunakan sepeda motor jarak jauh sedapat mungkin dihindari demi keselamatan. Pemudik menggunakan bus gratis, sepeda motor diangkut menggunakan truk, truk yang digunakan tidak kelebihan dimensi. Sejumlah bak truk yang sudah dipotong, armada truk tersebut dapat digunakan untuk angkut sepeda motor.

Kementerian Perhubungan harus buat komunikasi himbauan kepada masyarakat untuk gunakan penyelenggara angkutan resmi dan tidak gunakan penyelenggara dengan angkutan tidak resmi.

Sekarang sudah mulai marak penawaran mudik Lebaran 2022 oleh penyelenggara melalui media daring (*online*).

Namun di lapangan juga harus konsisten, pengawasan dan penindakan ditujukan ke angkutan dan penyelenggara yang tidak jelas. Jangan sebaliknya penyelenggara dan PO resmi dipersulit dengan alasan pengawasan namun yang abal-abal karena angkutan plat hitam malah lolos pengawasan.

Semoga kasus PO Rukun Sayur yang mengalami kecelakaan lalu lintas di KM 202 Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) pada mudik Lebaran 2015 tidak berulang.

<https://kabarsdgs.com/opinion/2022/03/5705/mudik-sehat-2022-protokol-kesehatan-wajib-dijalankan/>

Pentingnya Keselamatan Pada Jalur Kereta Api

Oleh : **Djoko Setijowarno**,

Akademisi Prodi Teknil Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat.

Sebanyak 60% kecelakaan di perlintasan sebidang merupakan kecelakaan KA ditemper orang (PT KAI, 2022). Angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia rata-rata per tahun mencapai 28 ribu jiwa (setara 3-4 orang meninggal per jam) (Korlantas Polri, 2021).

Kegiatan penutupan perlintasan sebidang kereta api sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurangi kejadian kecelakaan antara pengguna jalan dengan kereta api serta mengurangi jumlah perlintasan sebidang KA

Sementara itu, jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.

Hingga sekarang masih dilakukan pembongkaran pagar dan patok rel pengaman jalur KA yang menimbulkan perlintasan sebidang baru (liar). Di samping itu terjadi kemacetan akibat perlintasan sebidang. Juga masih adanya bangunan tanpa izin yang dapat membahayakan KA di dalam area **rumaja** (ruang manfaat jalan), **rumija** (ruang milik jalan), dan **ruwasja** (ruang pengawasan jalan).

Rumaja diperuntukkan bagi pengoperasian KA dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. **Rumija** diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan rel, dapat dimanfaatkan atas izin pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan operasi KA. **Ruwasja** diperuntukkan bagi pengamanan dan kelancaran operasi kereta api, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi KA.

Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sangat diharapkan dalam

penyusunan RAK LLAJ Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota mencantumkan program dan kegiatan keselamatan perkeretaapian khususnya di perlintasan sebidang.

Potensi dampak atau risiko dari keberadaan perlintasan sebidang (lalu lintas jalan vs kereta api) adalah (1) perlambatan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang, (2) hambatan kelancaran lalu lintas jalan dengan adanya penutupan perlintasan sebidang, (3) Tingginya tingkat kerusakan perkerasan jalan, khususnya pada titik pertemuan antara aspal/beton dengan bagian rel kereta api, (4) roda kendaraan (sepeda motor) yang sering selip saat melintas di atas rel, dan (5) potensi kecelakaan bila pengendara kendaraan **abai** terhadap peraturan.

Data (Ditlentas, Polda Jatim, 2022) menunjukkan sebanyak 395 kejadian tahun 2018, 260 kejadian tahun 2019, 268 kejadian tahun 2020 dan 271 kejadian tahun 2021.

Di sisi lain, ada regulasi yang mengatur pemanfaatan barang milik negara di sepanjang jalur KA. Pemanfaatan dapat dilakukan dengan Sewa, Pinjam Pakai, KSP, KSPO, dan lain-lain. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan KMK 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Potensi Bentuk Kerja Sama atas BMN Jalur Kereta Api dapat berupa Pembangunan Underpass, Pembangunan Jalur Fiber Optik, Pembagunan Jalur Gas dan Pembangunan Saluran Air.

Dalam hal pemanfaatan untuk kepentingan keselamatan dengan cara membangun jalan layang atau terwongan, seharusnya tidak tepat diterapkan regulasi ini. Dan dibebaskan dari persewaan, sehingga dapat memacu pemda untuk mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di daerahnya.

Early warning system (EWS) di Jawa Timur

Data PT KAI (2022), di Provinsi Jawa Timur terdapat perlintasan di 1.074 lokasi yang berada di jalan nasional 44 lokasi, jalan provinsi 19 lokasi dan jalan kabupaten/kota 1.011 lokasi. Provinsi Jawa Timur memiliki 19 perlintasan sebidang kereta api di jalan provinsi. Sebanyak 18 telah dilengkapi dengan pintu perlintasan dan 1 perlintasan akan dipasang palang pintu pada tahun 2022.

Provinsi Jawa Timur memiliki **19 perlintasan sebidang kereta api di jalan provinsi**, yakni sebanyak 18 telah dilengkapi dengan pintu perlintasan dan satu perlintasan akan dipasang palang pintu tahun 2022.

Selain itu mengoptimalkan fungsi *early warning system (EWS)* perlintasan sebidang KA. EWS merupakan inovasi keselamatan di perlintasan sebidang

kereta api dari tahun 2005 – 2019. Harus dicermati bahwa **EWS sebagai alat bantu keselamatan** seperti halnya fungsi rambu, bukan sebagai tumpuan utama keselamatan jalan di perlintasan. Terutama dipasang pada perlintasan yang tidak dijaga. Masyarakat sekitar sebaiknya ikut menjaga dan jangan melakukan aksi vandalisme dan merusak komponen. Pemasangan EWS ini memang memerlukan partisipasi warga sekitar.

Minim perhatian

Sangat memprihatinkan masih banyaknya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Kampanye keselamatan lalu lintas di jalan raya sangat minim sekali. Terlebih setelah dihilangkannya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Perhubungan Darat tahun 2019.

Belum lagi anggaran yang sangat minim di Dinas Perhubungan, karena transportasi bukan kebutuhan dasar, sehingga anggaran untuk keselamatan sering tidak disetujui oleh DPRD setempat.

<https://www.sonora.id/read/423229411/djoko-setijowarno-pentingnya-keselamatan-pada-jalur-kereta-api?page=all>

<https://jakartanews.com/keselamatan-pada-jalur-kereta-api/>

<https://www.eksplora.co.id/keselamatan-di-jalur-kereta-api/>

Suka Duka Pengemudi Truk

Oleh: **Djoko Setijowarno,**

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

PENGEMUDI truk menanggung beban sistem logistik yang salah. Tanggung jawab pemilik barang (pabrik) dibebankan pada pengemudi. Setiap terjadi kecelakaan lalu lintas, pengemudi dijadikan tersangka. Belum lagi masih suburnya pungli di sepanjang perjalanan aliran logistik.

Tidak ada kaderisasi pengemudi truk dan minim bimbingan teknis. Jadikan pengemudi truk mitra, bukan tersangka. Kompetensi pengemudi truk ditingkatkan, pendapatan dinaikkan. Saat ini pengemudi truk sudah jarang yang membawa kernet. Dampaknya, regenerasi pengemudi truk terhambat alias tidak ada. Biasanya sopir belajar mengemudi ketika dia menjadi kernet, menggantikan sopir yang lelah.

Namun, karena saat ini ongkos muat kembali ke angka di era 2000an, sudah terlalu minim, perolehan bagi hasil antara pengemudi dengan pengusaha truk pun anjlok. Dulu pengemudi truk identik dengan banyak istri atau pacar. Bahkan, dulu jika terjadi persaingan antar pengemudi truk untuk mendapatkan wanita cantik di warung kopi, mereka berani berlomba memikat si wanita dengan memberikan hadiah. Memberi hadiah sepeda motor atau perhiasan adalah hal yang jamak bagi para pengemudi truk. Saat ini, pengemudi truk jarang ada yang mau membawa kernet agar masih ada sisa uang yang bisa dibawa pulang untuk keluarganya.

Saat ini sudah banyak pengemudi truk yang membawa istrinya untuk berperan sebagai tukang masak, tukang cuci, tukang pijit, dan tukang menghitung barang yang dimuat dan dibongkar. Perilaku pengemudi truk yang dulu sering menghiasi warung remang-remang berubah menjadi sering membawa istrinya sekarang ini adalah bukan karena alasan pertobatan atau agamais. Namun lebih karena pengirikan akibat tidak punya uang lagi.

Sebelum 2000 pengusaha pun berani mengambil kredit armada truk baru jika memiliki sudah memiliki satu truk lunas. Istilahnya satu menggendong satu. Akan tetapi saat ini tiga armada truk lunas baru bisa menghidupi satu armada truk

kredit. Atau kredit truk dibayar dengan dana hasil kerja lainnya.

Jika mendapat kontrak mengangkut barang senilai Rp5 juta, dibagi Rp2,5 juta buat sopir dan Rp2,5 juta buat pemilik kendaraan. Namun, persentase tidak harus fifty-fifty. Barang yang berpotensi dicuri, sopir (55%) dan pemilik truk (45%). Jika barang yang diangkut tergolong aman, pembagiannya sopir (45%) dan pemilik truk (55%).

Pengemudi truk menanggung pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, makan dan minum, MCK, pungutan liar, petugas resmi, tilang, tarif parkir, pecah ban, dan berbagai retribusi lainnya. Sementara pengusaha angkutan akan menanggung angsuran kredit kendaraan, penyusutan kendaraan, penggantian ban, oli dan suku cadang, stoorng dan derek, perizinan dan surat menyurat.

Kalau ketahuan overload, pengemudi membayar tilang sebesar Rp500 ribu. Tapi dia ingin muat overload agar ongkosnya tinggi dan secara otomatis bagi hasilnya juga tinggi. Jadi sebenarnya tidak ada pengemudi truk yang terpaksa muat lebih. Itu pilihan pengusaha dan pengemudi. Akibat tekanan ongkos murah dari pemilik barang. Jika ongkos bagus dan muatan ringan, pengemudi dan pengusaha angkutan sama-sama happy. Karena sebenarnya yang dikejar itu nilai ongkosnya. Itulah suka duka pengemudi truk di Indonesia.

Kalau BBM irit, tidak harus lewat jalan tol (tarif tol mahal), tidak ada preman, tidak ada petugas menjahili, tarif parkir murah, tidak ada retribusi, berbahagialah sang pengemudi truk. Namun sebaliknya, jika penggunaan BBM boros, harus lewat jalan tol, banyak preman, banyak petugas jahil, tarif parkir mahal dan banyak retribusi, celakalah nasib sang pengemudi.

Selain mengakibatkan kaderisasi pengemudi truk terhambat, banyaknya pengemudi truk yang tidak membawa pendamping atau kernet sama sekali juga menyebabkan tingginya angka kecelakaan tunggal. Sebab waktu dan tenaga yang mestinya digunakan untuk istirahat, terpaksa digunakan untuk melakukan pekerjaan kernet. Biasanya jika ada kernet, pengemudi bisa tidur saat bongkar dan muat barang. Namun, tidak adanya kernet mengharuskan pengemudi harus melakukan penghitungan barang yang dibongkar dan dimuat. Mekanisme bongkar muat barang harus diperbaiki.

Pengemudi truk juga harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menutup barang muatan. Selain itu, masih juga harus melakukan perawatan kendaraan, seperti melakukan pengecekan tekanan angin dan bahkan melakukan bongkar dan pasang ban sendiri. Mestinya, sistem bongkar muat barang di Indonesia sudah memikirkan tanpa kernet.

Istirahat pengemudi pun jadi tidak relaks benar. Pasalnya, jika tidurnya terlalu lelap bisa-bisa ketika bangun barang bawaannya hilang. Sering juga ketika ada sopir yang tertidur terlalu lelap di rest area jalan Tol, muatan truk akan digerayangi pencuri atau muatannya dilubangi dan diambil oleh begal truk. Sekarang malah yang lebih populer lagi adalah pencurian speedometer, accu, dinamo, dan ban cadangan.

Pengemudi truk di Eropa

Di Eropa, pengemudi truk hanya mengecek oli saja. Lagipula jarang terjadi ban kempes atau pecah, karena muatan standar masih dalam batas load index ban. Pengemudi dapat tidur dengan nyaman di ruang dalam kabin truk. Jika kendaraan dicurigai mengangkut overload, pengemudi tidak diapa-apakan, tapi si pembawa manifes barang yang harus mempertanggungjawabkannya. Atau polisi di perbatasan negara akan mengundang perwakilan dari pabrik untuk hadir ke penimbangan supaya bertanggung jawab.

Di dalam manifes barang ada jumlah muatan dan berat muatan. Soal tata cara muat dan tonase mereka self assessment, namun jika dicurigai oleh polisi, kendaraan akan digiring ke lokasi penimbangan dan akan digeledah. Jika muatan tidak sesuai dengan manifes, itu baru persoalan.

Sekarang, di Eropa seringkali operasi narkoba memakai anjing pelacak, sedangkan operasi Tonase malah jarang. Pokoknya yang sering terjadi adalah barang selundupan. Belum tentu narkoba, bisa saja barang yang harus pakai bea masuk khusus. Kebanyakan pelanggaran overload dilakukan oleh truk-truk yang berasal dari Eropa Timur seperti Rusia, Rumania, Albania, Republik Ceko, Hungaria, dan Bulgaria.

Sebab di Eropa Timur masih banyak aparat yang korup dan gampang disuap. Negara yang paling ketat dan disegani oleh para sopir adalah Jerman, Swiss, Austria, Inggris, dan negara-negara Skandinavia. Overload masih sering terjadi juga di Eropa Barat, namun paling banyak adalah pelanggaran tata cara muat.

Misalkan ikatan barang tidak benar. Tetapi sepanjang masih bisa diatasi atau diperbaiki tidak akan ditilang, cuma diminta membetulkan saja. Jika terjadi kasus tonase tidak sesuai dengan manifes, pengemudi truk diminta istirahat, lalu polisi menelpon pemilik barang agar mempertanggungjawabkan. Selama pengemudi menunggu argometer jalan terus. Karena standard trading conditions berjalan dengan baik. Waktu tunggu pengemudi truk akan diganti rugi oleh pemilik barang.

<https://mediaindonesia.com/opini/474959/suka-duka-pengemudi-truk>

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Oleh: **dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG,**

Dekan Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, anggota Ikatan Dokter Indonesia.

Fakultas Kedokteran dituntut tidak hanya meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran, tetapi juga berperan sangat penting untuk melatih para calon dokter yang bukan hanya bisa mengobati tetapi juga “mempunyai hati”. Seorang dokter tidak hanya bisa mengobati para pasien tetapi juga harus punya empati, mampu berpikir cepat, mempunyai pandangan luas dan bijaksana sehingga dapat melakukan pencegahan suatu penyakit dengan memperbaiki kesehatan di lingkungan tempat tinggal.

PANDEMI Covid 19 membuat Indonesia kehilangan ratusan dokter. Ketua IDI Kota Semarang dr Elang Sumambar menyatakan ada puluhan dokter di Semarang yang gugur saat menyelamatkan nyawa masyarakat dari paparan Covid-19. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Mahesa Paranadipa bahwa jumlah dokter di Indonesia yang gugur 640 orang. Belum lagi tenaga kesehatan lain yang juga gugur akibat pandemi.

Meski sekarang angka kematian dokter akibat pandemi sudah menurun, jumlah dokter yang gugur itu perlu mendapatkan perhatian karena banyak fasilitas kesehatan yang kehilangan dokter, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Keberadaan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah DTPK sangat dibutuhkan masyarakat karena keterbatasan akses dan fasilitas yang dimiliki.

Saat ini rasio dokter dan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh dan angka ideal. Distribusi dan penempatan dokter di seluruh wilayah Indonesia juga tidak merata. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya melakukan pemerataan tenaga dokter hingga area DTPK bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Pada tahun 2018 sudah ditempatkan lebih dari 7.377 dokter, namun rasio dokter di negeri ini masih yang terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu 0,4 dokter per 10.000 penduduk, sehingga empat orang dokter harus melayani 10.000 penduduk.

Saat ini pandemi memang sudah cukup terkendali. Namun situasi pandemi yang lain masih mungkin terjadi lagi pada masa mendatang. Artinya, siapa pun harus selalu waspada dan siap melakukan langkah antisipatif. Salah satunya dengan memperkuat respons terhadap krisis kesehatan masyarakat pada masa depan dengan menyiapkan lebih banyak dokter yang terlatih.

Dalam menyiapkan para dokter, Fakultas Kedokteran dituntut tidak hanya meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran, tetapi juga berperan sangat penting untuk melatih para calon dokter yang bukan hanya bisa mengobati tetapi juga “mempunyai hati”.

Seorang dokter tidak hanya bisa mengobati para pasien tetapi juga harus punya empati, mampu berpikir cepat, mempunyai pandangan luas dan bijaksana sehingga dapat melakukan pencegahan suatu penyakit dengan memperbaiki kesehatan di lingkungan tempat tinggal.

Pendidikan dokter saat ini memang merupakan program studi yang paling diminati calon mahasiswa. Namun mempersiapkan dokter yang “mempunyai hati” tidak bisa secara instan. Karena para calon dokter harus melewati proses panjang dan ada keterlibatan banyak pihak.

Perlu diketahui, untuk menyelesaikan kuliah kedokteran, mahasiswa harus terlebih dulu menjalani program pendidikan sarjana kedokteran. Meraih gelar sarjana kedokteran (S1) itu baru langkah awal karena perjalanan belum selesai. Seorang sarjana kedokteran masih harus melanjutkan studi profesi dokter. Pada program profesi atau biasa disebut *co-ass (co-assistant)* atau dokter muda, mereka harus belajar secara langsung di rumah sakit pendidikan yang tidak hanya terakreditasi oleh Kemenkes tetapi juga Kemendikbud sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Meningkatkan Mutu

Pada Muktamar Ke-30 Tahun 2018, IDI pernah menyoroti sistem pendidikan dokter di Indonesia yang masih berbiaya mahal dan kualitas SDM-nya belum optimal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Pendidikan dokter masih sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu karena tingginya biaya pendidikan. Selain itu, penguasaan teknologi kesehatan juga belum memperlihatkan kemampuan daya saing dengan negara lain. Kesenjangan teknologi kesehatan sangat terlihat. Bahkan di tingkat ASEAN, Indonesia masih ‘berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Untuk menjawab tantangan di dunia kedokteran dan mengawal mutu pendidikan dokter, dibutuhkan kerja sama yang baik dan menyatukan visi-misi antara pemerintah, Kemendikbudristek, Kemkes, konsil, dan organisasi profesi. IDI, misalnya terus mengupayakan perbaikan mutu melalui advokasi pendidikan kedokteran dan program Continuing Professional Development (CPD). Karena itu, kualitas pendidikan di lebih dari 80 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia menjadi perhatian serius bagi IDI.

IDI juga mendorong mahasiswa kedokteran dibekali pemanfaatan teknologi dan pengembangan teknologi kedokteran harus mulai diperkenalkan sejak pendidikan Basic Medical Education (BME). Tantangan revolusi industri 5.0 yang berdampak luas terutama pada sektor kesehatan harus dihadapi dengan meningkatkan kemampuan SDM kesehatan kita dalam teknologi dan informasi.

Saat ini, DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran bersama pemerintah. RUU ini dirancang untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas layanan kesehatan. Hak ini tidak boleh terhalang oleh kelangkaan dokter. Melalui RUU Pendidikan Dokter, DPR akan mendorong afirmasi biaya pendidikan dokter untuk putra-putri terbaik. Targetnya untuk area DTPK diberikan beasiswa ikatan dinas untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah yang minim dokter. RUU Pendidikan Dokter juga akan mengatur penyetaraan strata pendidikan dokter. Para dokter yang diterima menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan langsung menjadi pegawai golongan IIIC.

Langkah lain untuk semakin mengoptimalkan dan menjaga mutu pendidikan kedokteran adalah dengan mengatur dan menentukan standar kompetensi dan kualifikasi lulusan program pendidikan dokter. Mulai dari proses masuk pendidikan dokter sampai lulus hingga memasuki dunia profesi tertuang pada sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Instrumen penting lainnya untuk menjaga standar kompetensi lulusan program profesi dokter adalah Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). UKMPPD harus dilalui oleh mahasiswa Program Profesi Dokter sebelum dinyatakan layak menyandang jabatan dokter. UKMPPD terdiri atas dua face tes, yaitu tes berbasis komputer (*computer based test*) dan OSCE (*objective structured clinical examination*).

Selain uji kompetensi, fakultas kedokteran sebagai kawah candradimuka para calon dokter harus terakreditasi secara nasional oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) atau Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health (IAAHEH) yang beroperasi sejak Maret 2015 yang selalu dipantau dan dievaluasi setiap tahun oleh Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dalam pengembangan sistem akreditasi nasional.

Terakhir, yang tak kalah penting, para staf pengajar juga harus terus meningkatkan kualitas sebagai pendidik para calon dokter dengan selalu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, seperti pengabdian masyarakat dan melakukan penelitian-penelitian yang menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Peran dosen sangat penting karena menjadi inspirasi dan contoh sehari-hari bagi para calon dokter sehingga dosen menjadi garda terdepan bagi para calon dokter yang tidak hanya belajar mengenai kedokteran tetapi juga harus mempunyai etika dalam praktik kedokteran.

Saat ini, yang sangat mendesak adalah meningkatkan jumlah dokter untuk merespons krisis kesehatan yang sewaktu-walau bisa terjadi lagi tidak hanya di area perkotaan tetapi juga di area DTPK. Dan, untuk mencetak dokter “mempunya hati”, fakultas kedokteran harus selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

Suara Merdeka 25 November 2021 hal 4

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-041915916/memperjuangkan-kualitas-pendidikan-dokter?page=all>

Mencegah Pandemi Jadi Endemi

Oleh: **dr Indra Adi Susianto MSi Med SpOG,**

Dekan Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata.

HAMPIR dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun, kasus aktif hingga kini masih naik-turun, belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Para pakar memprediksi pandemi akan menjadi endemi. Hal ini berdasarkan temuan dari penelitian yang melibatkan 100 ahli imunologi hingga para ahli virologi, 90 persen di antara mereka setuju Covid-19 akan menjadi endemi.

Berdasarkan temuan mereka, dalam konferensi pers Nota Keuangan pada 16 Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pandemi Covid-19 tak akan hilang dalam waktu singkat. Dia mengatakan, masyarakat mungkin akan tetap hidup bersama virus korona ini dalam 5-10 tahun lagi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan, kita mungkin melihat pada 2022 akan mengalami suatu masa bahwa pandemi menjadi endemi. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi endemi pada tahun depan. Salah satunya dalam penguatan program vaksinasi dan sistem kesehatan.

Sementara itu, dalam acara Penguatan Penanganan Covid- 19, Kamis (19/8), Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito mengatakan, tujuan besar penanganan Covid-19 mulai saat ini protokol kesehatan harus tetap terjaga agar masyarakat dapat produktif dan aman dari penularan virus korona.

Dari beberapa statemen dan keyakinan tersebut, mungkinkah pandemi di negeri ini akan menjadi endemi pada 2022? Mari kita menganalisis lebih jauh dengan memahami terlebih dahulu pengertian pandemi dan endemi serta perbedaannya.

Epidemi adalah kehadiran konstan dari suatu penyakit atau infeksi dalam wilayah geografis dengan persentase orang yang terinfeksi akan selalu ada. Sejak teridentifikasi pada Desember 2019 hingga kini, Covid-19 adalah pandemi. Namun, bukan tak mungkin ke depan, pandemi akan berubah status menjadi endemi.

Sementara itu, perbedaan antara pandemi dan endemik terletak pada prediktabilitas. Pandemi sering kali berada pada situasi ketidakpastian, sedangkan endemi akan menjadi sesuatu yang sering ada dan lebih bisa diatasi. Contoh HIV sebagai jenis virus endemik. HIV belum hilang, tetapi sudah ada terapi dan metode pencegahan dan orang tidak merasa takut seperti sebelumnya. Bahkan, pengobatan modern menawarkan kehidupan yang panjang dan sehat untuk orang dengan HIV.

Malaria juga menjadi salah satu contoh kasus endemi yang terjadi di wilayah tertentu. Malaria bisa dibilang memiliki tingkat penularan tertinggi, bahkan fatal yang disebabkan oleh parasit dan ditularkan oleh nyamuk ke manusia. Kasus penyakit malaria lebih sering terjadi di daerah hangat dekat dengan garis katulistiwa yang otomatis menjadi negara endemik malaria. Karena itu, wisatawan yang datang ke negara tersebut memerlukan obat pencegahan malaria.

Tiga Pilar

Yang perlu digarisbawahi, kemungkinan Covid-19 menjadi virus endemik untuk saat ini masih menjadi hipotesis. Harus dibuktikan kebenarannya. Sebab, virus terutama yang telah menyebar luas seperti Covid-19, tidak bisa hilang begitu saja. Satu kasus infeksi disebut menjadi endemi ketika tetap pada tingkat yang relatif konstan di suatu wilayah geografis tanpa penambahan kasus dari luar ke daerah tersebut.

Penyakit menular hanya berhenti menyebar di suatu laju reproduksi patogen jika tetap di bawah satu. Jika laju reproduksi patogen sama dengan satu maka setiap orang yang terinfeksi akan menyebarkan virus ke rata-rata satu orang lainnya. Jadi, setiap kali seseorang sembuh atau meninggal dari infeksi, orang lain sudah terinfeksi. Hal ini pada gilirannya, menjaga jumlah total orang yang terinfeksi dalam populasi kurang lebih sama. Cara yang mungkin dilakukan untuk membuat laju reproduksi patogen tetap di bawah satu adalah dengan menemukan sesuatu yang dapat mencegah setiap orang menularkan satu orang dengan yang lainnya.

Pada kasus Covid-19, pandemi akan menjadi endemi bergantung pada penanganannya. Khusus di Indonesia, pemerintah mempunyai peta jalan berdasarkan tiga pilar. Pertama, pelaksanaan protokol kesehatan 5M. Kedua, meningkatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment). Ketiga, meningkatkan capaian vaksinasi.

Khusus pilar ketiga, pemerintah saat ini terus mengejar target vaksinasi kepada 208 juta penduduk hingga akhir 2021. Target vaksinasi sudah ditingkatkan, terutama dengan adanya penambahan usia yang boleh divaksin sampai 12 tahun. Vaksinasi sudah menyasar kepada lebih dari satu juta orang per hari. Hingga 17 Agustus

lalu, rata-rata vaksinasi harian mencapai 1,15 juta dosis. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 secara global dari segi jumlah penduduk yang sudah divaksin.

Diharapkan tiga pilar tersebut bisa dijalankan dengan baik didukung semua komponen bangsa dan masyarakat. Maka saat pandemi Covid-19 ini berubah status menjadi endemi, jangan heran jika kelak saat Anda sakit, dokter akan bertanya, apakah Anda terserang flu biasa atau virus korona.

Kita harus optimistis dan yakin pandemi ini dapat dikendalikan meskipun menjadi endemi dengan hidup berdamai dan berdampingan dengan virus korona, karena masih akan ada potensi kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Maka penerapan 3T, 5M, dan vaksinasi ini harus digencarkan di seluruh wilayah di Indonesia.

Saat semua usaha sudah dilakukan secara maksimal, kebenaran hipotesis pandemi Covid- 19 menjadi endemi hanya bisa dibuktikan seiring dengan berjalannya waktu.

Suara Merdeka 23 Agustus 2021 hal. 4

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04942793/mencegah-pandemi-jadi-endemi?page=all>

Kurikulum Khusus, Solusi Disparitas Tenaga Kesehatan Daerah Tertinggal

Oleh: **dr. Indra Adi Susianto, MSi.Med, SpOG,**

Dekan Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata.

INDONESIA sebagai negara kepulauan memiliki problem yang khas, yaitu pembangunan yang belum merata antar wilayah. Masalah ini juga berdampak pada pembangunan di bidang kesehatan.

Permasalahan distribusi tenaga kesehatan (terutama dokter) yang belum merata di semua pulau, berakibat pada terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah.

Di mana proses pembangunan kesehatan di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT)- yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara (termasuk Bali), Kepulauan Maluku, dan Papua- tidak secepat wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB), terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Data terakhir Kementerian Kesehatan RI mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya sekitar 1-3 persen saja.

Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan primer tidak memiliki dokter : sebagian besar di Papua (45,2 persen), Maluku (44,9 persen), Papua Barat (40 persen), Sulawesi Tenggara (29,5 persen), dan NTT (20,5 persen).

Berdasar data, tercatat juga rendahnya rasio jumlah dokter dengan pasien, yaitu, Jakarta (1 dokter melayani 350 orang dan 27.000 dokter terdaftar untuk 10.3 juta orang); Maluku dan Papua (1 dokter melayani 4.000 orang dan 1.700 dokter terdaftar untuk 6,5 juta orang).

Tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berfungsi dengan semestinya.

Kekurangan dan maldistribusi tenaga kesehatan merupakan masalah umum yang dihadapi banyak negara dan menjadi tantangan dalam peningkatan derajat kesehatan seperti yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

Namun, hampir semua negara tanpa melihat tingkat perkembangan sosial-ekonomi, termasuk Indonesia, menghadapi masalah dalam distribusi tenaga kesehatan seperti kesulitan dalam pendidikan dan pelatihan, penempatan, retensi dan kinerjanya.

Pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan berkualitas yang masih kurang, pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi yang belum tegas merupakan beberapa masalah strategis dalam subsistem SDM kesehatan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.

Meski lebih dari 50 tahun pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan, masih saja investasi tenaga kesehatan di wilayah DTPK tetap rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa tenaga dokter dan tenaga kesehatan lain terkonsentrasi di ibukota provinsi atau kota besar lainnya di provinsi tersebut.

Secara nasional, rasio dokter/penduduk memang masih kurang oleh karena itu dokter memiliki opsi untuk memilih pekerjaan dan tinggal di wilayah urban (perkotaan).

Selain itu, ada kemungkinan alasan mengapa dokter memilih bekerja di daerah urban di antaranya infrastruktur fasilitas kesehatan, kondisi kerja dan kehidupan yang kurang layak di daerah pinggiran/ rural, dan kesempatan memperoleh tambahan penghasilan dari kerja sampingan di daerah perkotaan atau di daerah kaya.

Demikian pula wilayah dengan tingkat sosial ekonomi lebih baik seperti akses terhadap pendidikan layak untuk anak dan ketersediaan lapangan kerja untuk pasangan berpengaruh terhadap pilihan tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah tersebut.

Kurikulum Khusus Fakultas Kedokteran

Hingga saat ini, kebutuhan dokter di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan masih sangat krusial, mencapai angka 1.500 puskesmas yang belum memiliki dokter.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi dokter terutama saat mereka masih menimba ilmu di kampus.

Sistem pendidikan di fakultas kedokteran harus memiliki kurikulum khusus yang bisa mencetak dokter yang siap bekerja di DTPK.

Mengapa harus kurikulum khusus?

Karena tenaga kesehatan tersebut nantinya harus bekerja jauh dari teknologi, fasilitas yang belum memadai, kondisi geografis yang menantang, dan kultur lokal yang berbeda.

Dokter-dokter yang ditempatkan di DTPK memang semestinya didesain untuk ditempatkan di sana.

Dari 91 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, belum ada yang khusus mendesain calon dokter untuk bekerja di daerah terpencil.

Meski ada pelatihan dari pemerintah, namun diberikan setelah mereka lulus sekolah dokter dan khusus bagi mereka yang akan ditugaskan ke DTPK.

Hal ini berbeda dengan Australia, di mana rural doctor sudah dipersiapkan sejak menjalani pendidikan dan bahkan lokasi pendidikannya pun di kawasan terpencil.

Jadi, bisa dibayangkan, ketika pendidikan dokter diajarkan sesuai perkembangan teknologi terbaru tetapi ketika ditempatkan di daerah tidak ada teknologi tersebut.

Tentunya berbagai program pembangunan kesehatan dan upaya untuk mengurai masalah maldistribusi dokter di wilayah DTPK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus melibatkan peran serta institusi pendidikan swasta.

Dan, sebagai wujud komitmen FK Unika Soegijapranata yang tahun ini menginjak usia tiga tahun terhadap pemerataan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di DTPK, FK Unika memiliki kurikulum khusus berupa inisiasi dini (fast track) yang terwujud melalui program field lab di mana mahasiswa sejak awal dilatih terjun ke masyarakat sejak dini sehingga terbiasa untuk memecahkan masalah kesehatan secara menyeluruh.

Kurikulum khusus ini mendorong mahasiswa menjadi dokter yang kompeten, bisa bekerja dengan baik di area-area kepulauan khususnya DTPK.

FK Unika Soegijapranata mempunyai visi dan misi membantu pemerintah menyukseskan program “Nusantara Sehat” yang berbasis kerjasama tim maupun individu.

Dengan adanya kurikulum khusus ini, harapan masalah pemerataan dan pembangunan khususnya di bidang kesehatan secara nasional dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan program pemerintah Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030.

Opini ini dipersembahkan untuk Dies Natalis ke-3 Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-042688198/kurikulum-khusus-solusi-disparitas-tenaga-kesehatan-daerah-tertinggal?page=all>

Solusi Disparitas Tenaga Kesehatan

Suara Merdeka 18 Februari 2022 hal. 4

Momentum Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia

Oleh: **dr. Indra Adi Susianto, Msi. Med, SpOG.,**

Dekan Fakultas Kedokteran Unika

PANDEMI Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung selama dua tahun. Pemerintah hingga kini masih terus berupaya menekan penyebaran virus agar tak kembali meluas karena pandemi memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan termasuk bagi pelayanan kesehatan.

Meski memberikan dampak buruk pada berbagai bidang, pandemi juga memberikan banyak pelajaran dan melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Pandemi dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk berbenah, mengoreksi, menyempurnakan dan memperbaharui sistem kesehatan di Tanah Air.

Mengapa sistem kesehatan di Indonesia perlu berbenah, dikoreksi dan diperbaharui?

Karena ke depan, tantangan dalam bidang kesehatan yang harus dihadapi Indonesia lebih berat. Berupa tantangan eksternal, seperti pandemi global seperti covid 19, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), mobilisasi populasi, Global Burden of Disease (usaha sistematis dan ilmiah untuk mengukur besarnya perbandingan kerugian kesehatan akibat penyakit, cedera dan faktor risiko menurut usia, jenis kelamin dan geografi) dan disrupsi digital.

Sementara itu, tantangan internal berupa penerapan adaptasi kebiasaan baru, melemahnya kondisi ekonomi, jumlah penduduk, umur harapan hidup, transisi epidemiologi, infrastruktur, sumberdaya manusia dan mutu layanan rumah sakit, akses terhadap layanan kesehatan yang masih belum merata, hingga rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Pandemi Covid 19 yang mengguncang sistem kesehatan global maupun lokal yang memunculkan banyak tantangan baru tersebut mengantarkan dunia kesehatan kepada dua pilihan. Yakni, mempertahankan status quo atau memilih perubahan. Jika pilihan jatuh pada status quo, maka hanya akan membawa Indonesia kepada berbagai masalah kesehatan yang tak kunjung reda. Mulai dari angka kematian ibu dan bayi selama proses kehamilan dan melahirkan, stunting, hingga masyarakat yang menderita akibat penyakit menular maupun tidak menular. Dan, selama hampir dua tahun, pandemi Covid-19 telah menguji status quo dari sistem kesehatan Indonesia.

Jika pilihan kedua yang dipilih, yaitu perubahan, maka akan terbuka jalan untuk merevisi pola yang lama, meninggalkan kebiasaan buruk dalam bekerja, serta jalan untuk mengawali pola hidup yang sehat mulai hari ini. Dan, jalan perubahan inilah yang menjadi pilihan Presiden RI, Joko Widodo dan Menkes, Budi Gunawan.

Enam Pilar

Upaya apa yang dilakukan Indonesia untuk mengubah sistem kesehatan Indonesia yaitu dengan melakukan transformasi. Dalam ajang Health Business Gathering di Bali akhir tahun 2021, Kemenkes mempromosikan transformasi kesehatan Indonesia 2021-2024. Transformasi yang dimaksud mencakup berbagai hal termasuk pusat pelayanan primer dan sekunder, respons kedaruratan, reformasi bidang pendanaan, bidang budaya dan sumber daya manusia, hingga teknologi dan sistem data kesehatan.

Ada enam pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan Kemenkes yaitu Pilar pertama, transformasi layanan primer. Yakni, transformasi untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, sumberdaya manusia, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di Tanah Air.

Pilar kedua, transformasi layanan rujukan. Dengan cara meningkatkan akses serta mutu rumah sakit Indonesia melalui program sister hospital dengan rumah sakit internasional, pengembangan *Center of Excellence*, sistem pengampuan rumah sakit, serta pendidikan dan penelitian. Upaya ini harus dilakukan sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan layanan dengan kualitas yang baik, tanpa perlu lama mengantre, apalagi sampai harus berobat ke luar negeri.

Kemandirian

Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Yakni, dengan mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, serta meningkatkan jejaring surveilans dan persiapan tenaga kesehatan cadangan dalam merespons

ancaman krisis kesehatan. Negara ini selain dikaruniai oleh banyak sumber daya alam juga sering mengalami bencana baik alam maupun nonalam. Oleh karena itu, kita harus memiliki sistem ketahanan kesehatan yang selalu siap dan siaga setiap kali ada bencana.

Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan menata ulang pembiayaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan proporsi pembiayaan layanan promotif dan preventif melalui penambahan layanan penyaringan (screening) dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Transformasi di sistem pembiayaan kesehatan ini harus bisa menciptakan sistem yang berkesinambungan dan masuk akal. Terutama, sistem pembiayaan yang bisa memberikan layanan adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga dalam skala yang bisa ditanggung secara berkesinambungan oleh negara.

Pilar kelima, transformasi SDM kesehatan, dengan meningkatkan kuantitas, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan, melalui beasiswa, pemberdayaan diaspora kesehatan, dan pertukaran tenaga profesional kesehatan dengan mitra internasional.

Tak dipungkiri hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses ke dokter dan pelayanan yang layak dari tenaga kesehatan, terutama yang tinggal di pelosok daerah. Ke depan, kita harus dapat memastikan jumlah, sebaran hingga kualitas dari tenaga kesehatan mencukupi untuk memberikan layanan dan akses kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, pilar keenam, adalah transformasi teknologi kesehatan. Terdiri dari transformasi teknologi informasi dan bioteknologi. Transformasi teknologi meliputi big data, kecerdasan buatan, internet of things. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, ke depan industri kesehatan akan mengalami transformasi secara masif. Baik dari sisi diagnosis, screening, maupun penyampaian dari layanan kesehatan.

Melalui perbaikan, penguatan dan implementasi keenam pilar transformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan bisa menyempurnakan sistem kesehatan Indonesia yang berimplikasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk bertransformasi. Namun, dengan peran aktif, komitmen dan sinergi seluruh elemen tenaga kesehatan dan dukungan seluruh rakyat Indonesia melalui para pemangku jabatan, maka Indonesia bisa mencapai transformasi kesehatan yang paripurna, dimana dengan menjadi

transformasi suatu gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama sehingga pelayanan kesehatan sampai ke seluruh pelosok Tanah Air akan semakin merata dan berkualitas. (*)

Tribun Jateng 14 Maret 2022, hal. 2

Pentingnya Dokter Keluarga di Era Normal Baru

Oleh : **dr. Indra Adi Susianto, SpOG, MSi.Med,**

Dekan Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

TERWUJUDNYA keadaan sehat tidak hanya keinginan individu, tetapi juga oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan sehat adalah keadaan sejahtera baik badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi sesuai UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan.null

Dalam forum Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat, 17 September 2021, Presiden Joko Widodo memastikan kondisi pengendalian angka penularan Covid-19 di Indonesia sudah membaik. Kasus harian turun dari puncaknya pada 15 Juli lalu di angka 56 ribu menjadi 2.500 kasus per hari pada 13 September.

Penurunan persentase kasus harian sebesar 13,6% kasus harian per 1 juta, jauh di bawah negara tetangga Asean. Meski angka penularan sudah menurun, Presiden meminta masyarakat untuk terus waspada dan mulai belajar hidup berdampingan dengan virus corona.

Dalam kondisi kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19, maka keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat membutuhkan kiat khusus untuk mempertahankan keutuhan unit keluarga dengan daya tahan jangka panjang. Daya tahan ini dalam psikologi disebut dengan istilah 'resiliensi'.

Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 membuat masyarakat dihadapkan pada perubahan berbagai tatanan kehidupan yang tak terduga sehingga seringkali tidak memiliki langkah antisipatif.

Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dengan realitas baru yang didominasi oleh ketakutan akan penyebaran dan penularan virus yang menjadi penyebab banyak

orang mengalami permasalahan kesehatan baik fisik maupun mental sehingga berefek pada perilaku tidak produktif.

Keluarga yang resilien atau berdaya tahan lebih akan merespon secara positif segala kesulitan melalui cara-cara tertentu, sesuai konteks, tingkat permasalahan, kombinasi interaktif antara faktor-faktor risiko dan protektif yang dimiliki, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang seluruh anggota keluarga. Resiliensi di masa pandemi ini juga dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan baik dari internal maupun eksternal.

Langkah Antisipatif

Salah satu upaya dan langkah antisipatif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan resiliensi dalam Tatanan Normal Baru Produktif Aman Covid 19 (TNBPAC) yaitu memberikan proteksi kesehatan kepada seluruh anggota keluarga.

Di sinilah keberadaan dokter keluarga menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan Mei 2020, bahwa masyarakat diminta untuk menghubungi dokter keluarga pada masa pandemi. Dokter keluarga sendiri bekerja di puskesmas atau di fasilitas kesehatan tingkat primer lainnya, seperti klinik pratama, klinik dokter keluarga, dan sebagainya.

Kehadiran dokter keluarga di masa TNBPAC bukan sekadar mendeteksi kemungkinan penularan virus Corona pada seluruh anggota keluarga. Tapi sebagai langkah antisipatif untuk mendeteksi, memberikan konsultasi, pelayanan dan memberikan rujukan untuk permasalahan penyakit lain yang mungkin muncul dalam keluarga. Dokter keluarga punya peran penting untuk melakukan skrining dan diagnosis yang tepat.

Selama ini, misalnya, puskesmas dan klinik yang menjadi provider BPJS memiliki program penyakit kronis yang disebut sebagai prolanis, dalam rangka memonitor penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus dan hipertensi.

Program prolanis selain memeriksakan gula darah dan tekanan darah secara teratur, juga memberdayakan pasien untuk melaksanakan diet dan aktivitas fisik secara teratur. Namun, pelayanan prolanis terhenti selama PSBB. Jika PSBB terus diterapkan muncul kekhawatiran penderita diabetes dan hipertensi ini menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan komplikasi selama pandemi.

Di luar itu, masalah kesehatan yang perlu dicegah, bukan hanya komplikasi penyakit kronis tidak menular. Penyakit kronis yang menular, penyakit kronis bawaan/keturunan, penyakit kronis autoimun, dan banyak penyakit kronis lainnya,

juga perlu dikontrol dan dicegah komplikasinya. Belum lagi pencegahan masalah kesehatan akibat perubahan risiko, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, tumbuh kembang anak, perencanaan keluarga, seluruhnya perlu mendapat perhatian agar tidak timbul masalah kesehatan.

Layanan daring

Selain pelayanan langsung (tatap muka) di fasilitas kesehatan, masyarakat bisa berkonsultasi secara daring dengan dokter keluarga menggunakan smart phone. Dokter keluarga bisa melakukan skrining dengan aplikasi mobile JKN untuk pasien-pasien BPJS diikuti fitur-fitur konsultasi jarak jauh dengan chatting. Bahkan dengan fitur pendaftaran online juga sehingga meminimalkan kontak dengan orang lain di ruang tunggu.

Cara ini mengurangi risiko penularan dan menjauhkan dari stigmatisasi masyarakat, meningkatkan kepatuhan serta menurunkan transmisi lokal di komunitas. Juga menurunkan risiko penularan kepada petugas kesehatan.

Pada saat PSBB, puskesmas dan hampir semua klinik menawarkan pendaftaran pelayanan online, pelayanan online dan persepahan online. Hingga Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang “Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19” tertanggal 29 April 2020. Surat Edaran yang berlaku untuk internal Kementerian ini memperkuat Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan”.

Konsil Kedokteran Indonesia kemudian pada tanggal 30 April 2020 mengeluarkan Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 74 Tahun 2020 tentang “Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia” yang berlaku untuk semua dokter praktik dan didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Oleh karena itu pelayanan online yang menyeluruh (holistic) dan paripurna (comprehensive) serta bersinambung (continue) sangat diperlukan. Masyarakat membutuhkan pelayanan online yang dilayani oleh seorang dokter keluarga yang menggali dan mencatat keadaan keluarga, menganalisa risiko kesehatan pasien dan keluarganya, sehingga dapat mengingatkan dan mengedukasi pasien sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Masyarakat perlu memperoleh pelayanan untuk dapat mengajukan pertanyaan bagi masa depan kesehatannya, mendapat pendampingan apabila perlu dirujuk ke rumah sakit, dan mendapat pendampingan kembali setelah dirawat di rumah sakit.

Pelayanan primer

Masyarakat perlu juga memperoleh layanan dokter yang tidak hanya membicarakan masalah fisik tapi seringkali disertai masalah psikologis. Masyarakat juga perlu dokter yang mengetahui sejarah penyakit dirinya serta sejarah penyakit keluarganya, sehingga dapat memberi edukasi yang komprehensif agar terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadi risiko keluarga akibat genetik, lingkungan atau kebiasaan hidupnya.

Dokter keluarga adalah dokter umum yang berada pada pelayanan primer yang mampu sediakan pelayanan secara komprehensif dan berkesinambungan sehingga mampu mengasuh individu dengan mempertimbangkan segala aspek. Dokter keluarga merupakan dokter yang dapat memberikan pelayanan Kesehatan berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, dimana keluarga adalah pintu masuk pertama sistem pelayanan Kesehatan secara personal dan komunitas keluarga dimana pasien berada

Dengan hadirnya lebih dari 76 fakultas kedokteran yang tersebar di Indonesia ini, maka lulusan dokter tidak hanya berfungsi kuratif namun juga preventif dan promotif. Dan konsep tersebut merupakan konsep dokter keluarga yang penerapan praktiknya berada di pelayanan kesehatan primer sehingga menjadi pendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam kompetensi dan kualitas pelayanan, ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan, yang mempunyai sistem mekanisme dan monitoring rujukan yang baik, dan memperbarui kompetensi secara periodik.

Sebagai penutup tulisan, peran dokter keluarga sangat penting di era Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) dalam memberikan motivasi, semangat dan edukasi, sekaligus garda depan penanganan masalah kesehatan dalam masyarakat. Dengan memiliki dokter keluarga, masyarakat dibiasakan untuk memahami masalah kesehatan yang perlu dicegah, memahami risiko kesehatan yang sedang dihadapinya, dan dapat membangun kesehatan keluarga dengan optimal.

<https://jateng.tribunnews.com/2021/09/29/opini-dr-indra-adi-susianto-spog-msimed-pentingnya-dokter-keluarga-di-era-normal-baru?page=all> , Tribunjateng 29 September 2021 hal 2

Memperpendek Siklus Zona Nyaman

Oleh **Ferdinand Hindiarto**,

Rektor Unika Soegijapranata Semarang.

Namun setelah berjalan hampir dua tahun berbagai aktivitas itu dilakukan secara daring, kita sepertinya terjebak di zona nyaman yang baru. Banyak orang mulai enggan dan berat untuk bekerja secara langsung atau sebagian yang lain lagi enggan untuk belajar dan enggan beribadah secara langsung.

SERING kita mendengar ungkapan, “Kita harus berani keluar dari zona nyaman.” Namun sebaliknya, ada ungkapan lain, “Bukankah setiap orang justru mencari dan memperjuangkan kenyamanan, mengapa harus keluar dari sana?”

Dialog ungkapan-ungkapan itu menyerupai sebuah paradoks, namun sebenarnya lebih tepat disebut sebagai sebuah siklus. Tentu saja setiap orang atau organisasi akan berjuang untuk mencapai situasi kenyamanan dan menikmatinya.

Namun jika situasi itu berlangsung dalam waktu yang lama, banyak hal yang dilakukan akan cenderung menjadi sebuah rutinitas. Dan jika hal itu terjadi maka ruang-ruang kreativitas dan inovasi menjadi sangat sempit. Pengembangan pribadi ataupun organisasi juga akan cenderung stagnan. Dalam bahasa Jawa sering diungkapkan, “Ngene wae ya wis cukup kok.”

Sebagai sebuah siklus, maka baik individu maupun organisasi perlu memiliki mekanisme agar tidak terjebak dalam zona nyaman yang terlalu lama. Berputar dan kembali. Artinya, ketika individu berjuang dan mendapatkan kenyamanan, seharusnya akan kembali muncul kecemasan dan kegelisahan untuk menemukan sesuatu yang baru dan lebih baik.

Dalam kurun hampir dua tahun terakhir, kita mendapat pelajaran berharga akibat pandemi Covid-19. Pada awal pandemi, banyak orang yang merasa cemas ketika harus melakukan berbagai aktivitas secara online. Belajar, bekerja, beraktivitas sosial, dan beribadah harus dilakukan secara online. Saat itu banyak orang merasakan ada sesuatu yang hilang. Tidak mudah pula bagi sebagian orang untuk

beradaptasi dengan situasi baru tersebut akibat terlalu lama berada di zona nyaman yang sudah dirasakan sebelumnya.

Namun setelah berjalan hampir dua tahun berbagai aktivitas. itu dilakukan secara daring, kita sepertinya terjebak di zona nyaman yang baru.

Banyak orang mulai enggan dan berat untuk bekerja secara langsung atau sebagian yang lain lagi enggan untuk belajar dan enggan beribadah secara langsung. Sudah merasa nyaman melakukan berbagai hal secara virtual. Perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan secara virtual seolah sudah dianggap cukup meski secara hakiki sebenarnya banyak yang “hilang” dari perjumpaan semacam itu.

Sebagai contoh dalam konteks dunia pendidikan. Sejatinya pendidikan tidak sekadar mentransfer pengetahuan dari guru/dosen kepada siswa/mahasiswa.

Pendidikan tidak hanya berdimensi pada pengetahuan saja. Namun harusnya menjangkau dimensi penanaman nilai-nilai, pembangunan karakter. pembentukan kompetensi-kompetensi sosial, yang jika dilakukan secara virtual tentu akan sulit terjadi.

Misalnya menanamkan nilai empati, dapat dilatih saat para siswa bersedia mendengarkan siswa lain berbicara atau berpendapat, termasuk melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Dalam pembelajaran online semua itu tidak dapat dilakukan dengan baik karena guru/dosen tentu tidak dapat mengontrol perilaku siswa/mahasiswa lain saat ada temannya sedang mengemukakan pendapat.

Namun rupaanya saat ini bukan hal yang mudah untuk mengajak para siswa/mahasiswa atau bahkan guru/dosen untuk kembali pada pembelajaran tatap muka (PTM). Berbagai alasan pun dikemukakan. Misalnya, ada kekhawatiran pembelajaran tatap muka dapat menjadi klaster baru penularan Covid-19 dengan segala variannya.

Ekspresi Keengganan

Namun sesungguhnya kekhawatiran itu muncul sebagai sebuah ekspresi keengganan untuk keluar dari zona nyaman. Hampir dua tahun menikmati pembelajaran daring telah membuat mereka merasakan kenyamanan.

Akibatnya, mereka pun merasa tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu uang transpor, tidak perlu bayar biaya kos, belajar-mengajar dapat dilakukan sambil mengerjakan hal lain, serta kenyamanan-kenyamanan lain yang memperkuat zona nyaman itu. Soal efektif atau tidak, seolah kalah oleh kenyamanan yang mereka rasakan. Soal out-comes mau seperti apa, sepertinya bukan hal yang penting lagi.

Alasdair White. penulis buku *From Comfort Zone to Performance Management* (2009) menyebut zona nyaman sebagai *a behavioural state within which a person operates in an anxiety-neutral condition, using a limited set of behaviours to deliver a steady level of performance, usually without a sense of risk*. Dalam zona nyaman individu berada dalam kondisi normal tanpa adanya kecemasan, individu hanya menggunakan seperangkat perilaku terbatas yang dimilikinya untuk mencapai level performa tertentu dan cenderung menghindari risiko. Jelas sekali bahwa zona nyaman akan menjadikan individu-individu enggan untuk melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu dengan usaha yang lebih keras.

Zona nyaman memang menyerupai sebuah siklus. Dan saat siklus itu berjalan dalam waktu yang panjang akan membuat manusia enggan melakukan perubahan. Pandemi Covid-19 ini telah memberikan pelajaran berharga bagi manusia tentang beratnya keluar dari zona nyaman.

Kita boleh menikmati zona nyaman sebagai cara untuk membangun *self esteem* yang lebih kuat. Namun di sisi lain, jika perlu harus dihadirkan kecemasan atau kekhawatiran baru, atau disebut dengan *fear zone*, dengan mengungkapkan pertanyaan: Apakah betul sudah cukup? Apakah betul hasilnya sudah maksimal? Apakah tidak ada cara lain?

Beberapa ahli psikologi, seperti David McClelland menyatakan bahwa dalam batas tertentu kecemasan justru akan memicu meningkatnya performa. Maka panduan antara kekuatan *self esteem* yang diperoleh dari zona nyaman dan kekhawatiran dari *fear zone* seharusnya menjadi energi untuk berani menemukan cara-cara baru dalam berpikir, bersikap, dan bertindak serta beradaptasi dengan berbagai perubahan yang akan terjadi. Itulah cara terbaik untuk memperpendek siklus zona nyaman.

Suara Merdeka 18 Desember 2021 hal. 4

Menjadi Pendidik Transformatif

Oleh **Ferdinand Hindiarto**,

Rektor Unika Soegijapranata Semarang

“Seorang pendidik transformatif akan memiliki kekuatan untuk mengarahkan cinta murni bagi kepentingan peserta didiknya. Bukan sebaliknya justru meminta peserta didik untuk memahami pendidiknya.”

JUDUL tulisan ini barangkali terasa seperti utopis. Namun jika berani merefleksikan secara jernih apa yang terjadi dalam dunia pendidikan selama hampir dua tahun terakhir ini, maka judul ini menjadi sebuah keniscayaan.

Selama masa pandemi Covid-19 pembelajaran di semua level dilakukan secara daring tanpa ada pertemuan antara peserta didik dengan pendidik maupun antar peserta didik. Banyak muncul keraguan apakah model pembelajaran itu efektif? Apakah dapat terjadi transfer pengetahuan? Lalu apakah pendidikan hanya sebatas transfer pengetahuan?

Jika demikian, bukankah para peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa pendidik, bukankah sumber pengetahuan tersedia secara berlimpah? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya menjadi titik tolak untuk mendefinisikan ulang peran pendidik dalam konteks tantangan zaman ini.

Menjadi pendidik transformatif dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan di atas. Dan sesungguhnya peran itu bukan hal yang baru. Seharusnya sudah menjadi DNA-nya para pendidik. Merujuk pendapat salah satu filsuf pendidikan Indonesia, Drijarkara, bahwa pendidikan adalah kegiatan fundamental. Kata fundamental mengandung dua arti.

Pertama, pendidikan bertujuan mengubah, menentukan dan membentuk hidup manusia. Dari arti pertama ini saja dengan sangat jelas bahwa peran pendidik mutlak harus menjadi sumber daya ubah atau transformasi bagi peserta didik. Maka menjadi pendidik transformatif adalah mutlak. Profesi pendidik memang berbeda dari profesi lain. Menjadi pendidik tidak sekedar menjalankan tugas

kewajiban semata. Terdapat sebuah keputusan mulia yang diemban untuk mentransformasi manusia-manusia muda menjadi manusia yang seutuhnya, tidak hanya secara pengetahuan dan ketrampilan.

Manusia Berbudaya

Jauh lebih penting adalah menjadikan manusia yang berbudaya, manusia yang secara otentik mampu memilih respons yang tepat dan dewasa atas segala hal yang ditemui dalam hidupnya. Maka hal utama untuk menjadi pendidik transformatif adalah menyadari keputusan ini. Dari kesadaran ini maka seharusnya setiap pendidik memiliki kebanggaan besar terhadap pilihannya menjadi pendidik. Melalui pilihan inilah seorang pendidik akan dapat menemukan kebermaknaan hidup yang lebih dalam. Kemudian dari kebanggaan ini seorang pendidik akan memiliki energi yang besar dalam mendampingi, menemani, dan memfasilitasi peserta didik berproses menjadi manusia yang cerdas sekaligus bermoral dan berkarakter kuat.

Energi besar tersebut akan tampak setiap kali pendidik menjalankan aktivitas pendidikan yang secara alamiah akan dirasakan dan ditangkap oleh peserta didik. Dengan energi yang besar ini pula, para pendidik akan memiliki kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk dalam pembelajaran selama masa pandemi ini maupun tugas-tugas administratif yang seringkali ditempatkan sebagai hal yang menyita waktu dan tenaga.

Arti kedua dan kegiatan fundamental pendidikan menurut Drijarkara adalah bahwa kegiatan pendidikan harus berpangkal dari sikap fundamental cinta dalam arti cinta murni, yaitu cinta yang mengarah pada kepentingan yang dicintai bukan kepentingan yang mencintai. Maka menjadi pendidik transformatif berarti setiap kali menjalankan keputusan harus dilandasi oleh rasa cinta murni kepada peserta didik apapun kondisinya. Tentu ini bukan hal yang mudah.

Perubahan karakteristik generasi peserta didik bukanlah hal yang mudah untuk dipahami oleh para pendidik. Namun tidak ada cara lain, pendidik harus menerima perubahan-perubahan itu. Dengan penerimaan itulah seorang pendidik transformatif akan memiliki kekuatan untuk mengarahkan cinta murni bagi kepentingan peserta didiknya. Bukan sebaliknya justru meminta peserta didik untuk memahami pendidiknya.

Dengan kekuatan cinta murni itulah seorang pendidik akan berusaha mengenali peserta didiknya, yang dikenal dengan istilah *cura personalis*. Melalui cara itulah pendidik dapat mendampingi dan menemani peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya. Melalui kekuatan ini pula pendidik akan memiliki energi untuk selalu mencari cara-cara terbaik dalam mengajar bagi peserta didiknya.

Dengan demikian proses pembelajaran akan selalu menghadirkan suka cita yang membangkitkan antusiasme peserta didik. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pendidikpun akan dapat diatasi. Pada akhirnya para peserta didik akan mampu mentransformasi dirinya menjadi manusia yang berbudaya, otentik, dan dewasa. Di situlah pendidik telah mewujudkan peran transformatifnya.

Suara Merdeka 3 Desember 2021 hal. 4

Pandemi, Adaptasi & Resiliensi Lulusan Perguruan Tinggi

Oleh: **DR Ferdinand Hindiarto SPsi, MSi.,**

Rektor Unika Soegijapranata

SITUASI yang akan dihadapi para lulusan perguruan tinggi saat ini dan ke depan nanti digambarkan dalam empat kata yang dikenal dengan VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity. Empat kata itu menarasikan dengan jelas sebuah situasi yang berubah dengan cepat, penuh dengan ketidakpastian, segala sesuatu bersifat kompleks dan multitafsir yang akan muncul terhadap sebuah fenomena.

Konsep VUCA telah lama dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus dalam bukunya yang berjudul, *Leaders: strategies for taking change* (1985). Namun baru mulai tahun 2000-an topik tersebut semakin intens menjadi bahan diskusi dalam berbagai forum, munculnya banyak tulisan dan berbagai penelitian. Situasi pandemic covid-19 dalam hampir dua tahun terakhir ini semakin memperjelas dan memperkuat bahwa narasi itu benar adanya.

Bagaimana para lulusan harus menghadapi tantangan itu menjadi hal paling krusial. Oliver Mack dkk (2016) dalam bukunya yang berjudul *Managing in a VUCA world*, menyatakan bahwa kemampuan beradaptasi adalah salah satu kompetensi kunci dalam menghadapi situasi VUCA. Steven Boylan dan Kenneth Turner (2017), dalam artikelnya yang berjudul *Developing organizational adaptability for complex environment* menyatakan bahwa kemampuan beradaptasi harus dimiliki tidak hanya pada level individu, organisasi pun harus memiliki kemampuan beradaptasi tinggi dalam menghadapi situasi yang sangat kompleks dan penuh ketidakpastian ini.

Beradaptasi

Kemampuan beradaptasi individu sebagai salah satu kunci sukses dalam menghadapi situasi VUCA telah dikemukakan oleh David O'Connell dkk pada tahun 2008 dalam penelitiannya yang berjudul *Unpacking personal adaptability at work*. Menurut hasil temuan penelitian ini, salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan beradaptasi seseorang adalah tingkat pendidikan. Temuan ini tentu

sangat relevan dengan situasi yang dihadapi para lulusan perguruan tinggi saat ini.

Sebagai sebuah kompetensi yang sangat penting, kemampuan beradaptasi ini sebenarnya secara tidak langsung telah dimiliki oleh para lulusan. Selama hampir 2 tahun terakhir, para lulusan telah dihadapkan pada sebuah situasi pandemic yang menuntut kemampuan beradaptasi. Dalam konsep pembentukan kompetensi, efektivitas penguasaan kompetensi akan lebih tinggi ketika dijalani, dialami dengan berbagai pengalaman konkrit.

Dan hal itu sungguh telah dilalui oleh para lulusan saat ini. Beradaptasi dari model pembelajaran tatap muka menjadi model pembelajaran tatap maya adalah pengalaman konkrit. Dari belum pernah menggunakan berbagai platform digital, seperti google meet atau zoom dan lainnya, para lulusan ini mampu beradaptasi dengan baik hingga sangat akrab dengan platform-platform itu. Pengalaman ini secara tidak langsung telah membentuk para lulusan memiliki kemampuan beradaptasi.

Temukan solusi

Selain kemampuan beradaptasi, situasi VUCA ini juga menuntut para lulusan memiliki kemampuan lain, yaitu resiliensi. Situasi yang cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian menuntut tiap lulusan untuk mampu bertahan, berpikir menemukan solusi dan bertindak konkrit mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam studi terhadap remaja di Indonesia, UNICEF bekerja sama dengan Oxford Policy Management (2019) melaporkan bahwa organisasi pemberi kerja menuntut lima kompetensi utama, yaitu ketrampilan digital, kemampuan berbahasa asing, ketrampilan komunikasi, kerjasama dan resiliensi atau spirit pantang menyerah.

Secara tidak langsung, sebenarnya para lulusan saat ini telah belajar dan memiliki kemampuan resiliensi itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi pandemic ini telah menggempleng para lulusan memiliki kemampuan resiliensi. Pembelajaran online yang dijalani para lulusan tentu telah menghadirkan berbagai macam tantangan. Jaringan internet yang tidak selalu baik, penjelasan dosen yang tidak dapat seutuhnya diterima, dialog tanya jawab dengan dosen seringkali terganggu jaringan, diskusi dengan sesama mahasiswa tidak dapat dijalani sebagaimana mestinya adalah tantangan konkrit yang dihadapi.

Sudah dialami

Dan pada saat menyelesaikan tugas akhir pun mereka tidak menjalaninya dengan mudah. Proses pembimbingan yang tidak ideal, praktikum yang tidak dapat

dilakukan sepenuhnya adalah situasi sulit yang harus mereka hadapi. Namun ketika para lulusan ini akhirnya mampu menyelesaikan studinya, hal itu adalah bukti bahwa mereka telah mampu melewati situasi sulit, menemukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah dan tantangan. Secara tidak langsung situasi ini telah membentuk para lulusan memiliki kompetensi resiliensi.

Maka di tengah pandemic yang tidak mudah ini, para lulusan perguruan tinggi harus memiliki optimisme dan harapan yang tinggi. Dua kompetensi penting yang diperlukan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa depan yang selalu berubah, penuh ketidakpastian dan kompleks telah dimiliki. Tidak saja dipelajari, namun justru dialami. Pengalaman konkrit adalah metode pembentukan kompetensi yang paling efektif.

Tribun Jateng 18 September 2021 hal. 2

Pendidikan dan Nyala Kemanusiaan

Oleh: **Ferdinand Hindiarto,**

Rektor Unika Soegijapranata Semarang

Pembelajaran daring tentu secara natural membawa konsekuensi berbagai "kekosongan" dalam proses pembelajaran. Hilangnya interaksi yang mendalam, baik antarsiswa maupun siswa-pengajar adalah kekosongan yang paling besar."

PANDEMI Covid-19 telah menghantam berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang pendidikan.

Perubahan yang tiba-tiba memaksa institusi pendidikan pada semua level untuk melakukan adaptasi dalam proses pembelajarannya. Dari tingkat prasekolah hingga pendidikan tinggi mau tidak mau harus berpaling dengan apa yang kita kenal dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring, karena memang tidak ada pilihan lain.

Adaptasi terhadap media pembelajaran itu membuat para pengajar dan peserta didik akrab dengan berbagai platform digital.

Sampai pada titik inilah banyak dialog yang dapat mengisi ruang-ruang diskusi terkait dengan proses pendidikan. Pertama, apakah benar telah terjadi adaptasi dan bahkan transformasi pendidikan? Atau sebenarnya hanya berganti medianya saja?

Bisa jadi sebagian besar masih terbatas pada berganti media pembelajaran saja. Dari semula tatap muka menjadi tatap maya.

Barangkali materi atau konten pembelajaran dan metode pembelajaran masih sama.

Jika hal ini yang terjadi, maka sesungguhnya dunia pendidikan belum melakukan adaptasi apalagi transformasi. Maka menjadi sebuah kewajaran jika kita banyak

mendengar keluhan baik dari para pengajar maupun siswa/mahasiswa mengalami kejenuhan dan kebosanan.

Apalagi jika infrastruktur jaringan tidak memadai. Pembelajaran daring tentu secara natural membawa konsekuensi berbagai "kekosongan" dalam proses pembelajaran. Hilangnya interaksi yang mendalam, baik antarsiswa maupun siswa-pengajar adalah kekosongan yang paling besar.

Kehadiran berbagai platform digital sepertinya tidak mampu menggantikan kualitas interaksi antarmanusia secara langsung. Dikhawatirkan akan banyak kompetensi-kompetensi sosial yang tereduksi. Kedua, jika memang pembelajaran online ini efektif maka muncul pertanyaan yang sangat substansial: masih perlukah sekolah atau universitas?

Toh siswa dapat memperoleh berbagai pengetahuan dari berbagai sumber di dunia maya secara murah bahkan gratis. Sebuah kewajaran jika publik memiliki asumsi bahwa biaya pendidikan seharusnya menjadi jauh lebih murah.

Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi institusi pendidikan, secara lebih khusus bagi pendidikan tinggi.

Bagi institusi pendidikan swasta, yang nota bene mengandalkan operasionalnya dari penerimaan uang pendidikan siswa, tentu situasi tersebut menjadi tantangan sangat berat. Peter Fleming dalam bukunya yang berjudul *Dark Academia, How Universities Die* (2021) menggambarkan situasi tersebut dengan sangat jelas.

Menurut Fleming, situasi pandemi Covid-19 ini dapat menjadi "penyakit" bagi universitas. Penyakit ini ditunjukkan dengan munculnya simptom- simptom, yang dapat berakibat pada matinya universitas jika tidak diantisipasi dan diintervensi secara tepat. Salah satu simptom yang diuraikan oleh Fleming adalah godaan pada universitas dengan membuka kelas-kelas besar dengan biaya murah, karena dengan pembelajaran online hal itu dapat dilakukan, namun dengan mengorbankan aspek-aspek yang substansial dalam pendidikan.

Godaan lain adalah universitas cenderung memenuhi keinginan atau kepuasan "customer" yang menginginkan segala sesuatu harus mudah, cepat, dan murah. Jika universitas lalu mengabaikan filosofi pendidikan sebagai hal yang paling substantif, maka pada titik tertentu justru akan menjadi liang kubur kematian bagi universitas itu sendiri. Lalu bagaimanakah universitas harus memosisikan dirinya?

Pemicu Kualitas

Kemajuan teknologi informasi yang kita nikmati saat ini, seharusnya menjadi pemicu dan pemacu semakin baiknya kualitas kehidupan manusia, melalui pendidikan.

Ketika pandemi Covid-19 ini nanti berakhir pun, kehadiran teknologi informasi tetap harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kemudahan mencari sumber-sumber pengetahuan, menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif ke dalam kelas secara online adalah contoh yang paling nyata.

Namun demikian hal yang paling substantif dalam pendidikan harus diteguhkan bahkan harus semakin diperkuat. Drijarkara, salah satu tokoh filsafat pendidikan Indonesia, mengungkapkan dua pokok pemikiran dalam pendidikan. Pertama, mendidik atau melaksanakan kegiatan pendidikan merupakan perbuatan fundamental.

Kata fundamental merujuk pada dua arti, yaitu pendidikan bertujuan mengubah, menentukan dan membentuk hidup manusia serta pendidikan berpangkal pada sikap fundamental cinta dalam arti cinta murni, yaitu cinta yang mengarah pada kepentingan yang dicintai bukan kepentingan yang mencintai.

Kedua, isi perbuatan fundamental adalah pemanusiaan manusia muda dalam arti hominisasi dan humanisasi. Hominisasi adalah proses manusia menyadari dirinya bukan makhluk biologis semata, melainkan sebagai seorang pribadi atau subyek yaitu mengerti diri, menempatkan diri dalam situasinya, mengambil sikap dan menentukan dirinya.

Humanisasi adalah proses manusia berdasarkan budinya mengangkat alam menjadi alam manusiawi atau menjadi kebudayaan.

Dengan kata lain, pemanusiaan dalam arti hominisasi dan humanisasi adalah pengangkatan manusia muda sampai sedemikian tingginya sehingga dia bisa menjalankan hidupnya sebagai manusia dan membudayakan diri (Sudiarja dkk, Karya Lengkap Drijarkara, 2006).

Berdasarkan pemikiran Drijarkara tersebut, maka pendidikan sudah seharusnya dikembalikan pada hakikatnya untuk menggembleng manusia muda agar mampu menjalankan hidupnya sebagai manusia.

Menjadi pribadi yang merdeka dalam menentukan sikap dan perilakunya secara dewasa dan berbudaya. Beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, mendefinisikan kembali apa arti mengajar dan mendidik di zaman ini? Apakah sekadar mentransfer pengetahuan?

Jika hanya itu maka sebenarnya tidak diperlukan lagi institusi pendidikan, karena dalam dunia maya tersedia pengetahuan yang berlimpah. Kedua, mendidik melalui proses dialog, interaksi, dan modelling dari para pengajar adalah metode terbaik agar manusia muda menjadi pribadi yang merdeka, dewasa sekaligus berbudaya.

Di sinilah letak penting institusi pendidikan, yang sulit tergantikan oleh media lain. Ketiga, untuk menemukan dan bertemu dengan kontekstual dunia saat ini dan masa depan, maka pemanfaatan teknologi informasi secara tepat akan menjadi kolaborasi yang ideal.

Unika Soegijapranata yang lahir membawa perutusan luhur dari Mgr Alb Soegijapranata berkomitmen untuk terus menyalakan kemanusiaan melalui proses pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai dasar pendidikan itu. (46)

Suara Merdeka 31 Agustus 2021 hal. 4

<https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-041013721/pendidikan-dan-nyala-kemanusiaan?page=all>

Rumah Belajar dan Rumah Sukacita

Oleh: **DR. Heny Hartono, SS, MPd,**

Kepala Lembaga Pengkajian & Pengembangan Pendidikan Unika Soegijapranata Semarang

INSTITUSI pendidikan seyogyanya adalah rumah belajar bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses belajar tersebut. Di dalamnya ada peserta didik, tenaga pengajar, tenaga pendidikan, dan orang tua. Proses belajar tidak terbatas oleh usia dan kedudukan. Dalam segala posisi dan peran masing-masing, proses belajar adalah proses seumur hidup.

Demikian pula dalam sebuah institusi pendidikan, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan harus mengalami proses belajar dari hari ke hari. Guru harus belajar untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri sebagai pengajar yang berkualitas, peserta didik harus terus belajar di bawah bimbingan guru, tenaga kependidikan harus terus belajar memberikan pelayanan terbaik, dan orang tua harus terus belajar menjadi pendamping belajar anak.

Dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, pengelola perguruan tinggi, dan tenaga kependidikan perlu pula terus belajar merawat kampus sebagai rumah belajar yang penuh dengan kesukacitaan. Kesukacitaan belajar di kampus perlu diusahakan oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Pada hakikatnya sukacita adalah kekuatan. Yaitu kekuatan yang mendorong gairah atau passion untuk belajar.

Joyful Learning

Dalam tulisannya, Tukiman Taruna (2022), ketua Dewan Penyantun Unika Soegijapranata sekaligus penggiat pendidikan, mengangkat isu tentang “Universitas Sekolah Dasar” dan menyorot bagaimana suasana penuh keceriaan dan menyenangkan di jenjang pendidikan yang lebih rendah mulai dari PAUD tampak semakin berangsur berkurang di jenjang pendidikan yang semakin tinggi.

Sebagai sebuah rumah belajar, seluruh komponen yang ada dalam sebuah perguruan tinggi harus turut mengusahakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Tak dapat dipungkiri bahwa suasana yang menyenangkan mencakup berbagai aspek pendukung proses belajar mengajar. Namur demikian,

joyful learning dapat dimulai dari setiap pribadi yang ada di perguruan tinggi. Sedikit bermain-main dengan akronim kata “Joyful”, ada setidaknya empat hal yang dapat menjadi parameter untuk menghadirkan kesukacitaan dalam kampus sebagai sebuah rumah belajar. Empat hal tersebut adalah “J” untuk Jolly yang berarti keceriaan yang membawa semangat serta kekuatan untuk bergerak dan belajar, “O” untuk Open-minded, suatu sikap membuka diri untuk belajar, ‘Y’ untuk Youthful -semangat muda yang tak dibatasi usia untuk terus belajar, serta “Full” untuk FULL of energy yang menjadi penggerak dan pendorong semangat untuk belajar.

Kampus yang dapat menjadi rumah belajar yang penuh kesukacitaan akan menjadi rumah belajar bagi seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Kampus harus menjadi rumah bagi dosen untuk belajar memberi kesempatan kepada mahasiswa berpikir kritis, kreatif, visioner, peduli, dan tangguh lewat berbagai aktivitas pembelajaran yang disusun dan direncanakan dengan rapi.

Kampus menjadi rumah penuh sukacita bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mencari relasi antara pengetahuan yang mereka dapatkan dari dosen, berbagai sumber belajar digital dan pustaka dengan kehidupan. Bahkan, mahasiswapun dapat belajar langsung di tengah masyarakat sebagai laboratorium nyata.

Menarik pula bahwa para alumni pun dapat turut ambil bagian dalam proses belajar ini lewat pengalaman kontekstual yang mereka bagikan dalam kelas untuk adik-adik se-almamater mereka. Pengelola dan tenaga kependidikan juga merupakan komponen penting dalam usaha menjadikan kampus sebagai rumah belajar yang penuh sukacita melalui pelayanan yang ramah dan humanis. Sebagai rumah belajar, kampus menjadi tempat untuk menggembelng dan mengangkat manusia-manusia muda sehingga mereka akan menjadi pribadi yang mumpuni dalam bidang ilmunya serta memiliki kematangan pribadi yang siap mengambil peran sebagai pemimpin di era global ini.

Ambil peran

Meminjam istilah Hoi Aristoi yang diperkenalkan oleh Mgr. Soegijapranata, di akhir masa belajar mereka di perguruan tinggi, mahasiswa akan menjadi cendekiawan yang siap mengambil peran sebagai pemimpin. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh komponen yang ada dalam perguruan tinggi harus bahu membahu menciptakan sekaligus menjaga atmosfir belajar yang penuh sukacita lewat model pembelajaran yang khas seperti yang tengah dikerjakan oleh Unika Soegijapranata dengan model pembelajaran yang disebut sebagai Soegijapranata Learning Model.

Soegijapranata Learning Model mengusung semangat kesukacitaan dalam belajar yang akan mendorong dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni ikut terlibat aktif dalam proses belajar. Dosen dan mahasiswa akan ditantang untuk mempertajam kekritisannya, kreativitas, sikap visioner, kepedulian, serta ketangguhan dalam berbagai aktivitas belajar yang kontekstual.

Sebagai rumah belajar, kampus juga memberikan ruang kepada mahasiswa dan dosen untuk merefleksikan pengalaman belajar di akhir semester. Refleksi akan membawa dosen dan mahasiswa pada peningkatan demi peningkatan dalam proses belajar itu sendiri.

Sejatinya sebuah institusi pendidikan adalah institusi strategis untuk menyampaikan kabar sukacita kepada mahasiswa dan masyarakat luas melalui pengetahuan, sumbangan hasil penelitiannya, serta berbagai program yang dirancang sebagai program pengabdian kepada masyarakat. Sinergi yang harmonis antara berbagai unsur penyelenggaraan proses pendidikan di kampus adalah sebuah kekuatan untuk menjadikan kampus sebagai rumah belajar yang penuh sukacita. (*)

Tribun Jateng 2 Maret 2022 hal. 2

<https://jateng.tribunnews.com/2022/03/02/opini-heny-hartono-rumah-belajar-dan-rumah-sukacita>

Memanusiakkan Manusia

Ditulis oleh : **Ign. Dadut Setiadi,**

Anggota The Soegijapranata Institute Unika Soegijapranata dan Manager GA
Yayasan Sandjojo

Konsep “Memanusiakkan Manusia” merupakan bagian dari humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti manusia. *Humanus* berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia (A.Mangunhardjana dalam Haryanto Al-Fandi, 2011:71). Dalam situasi bangsa saat ini, terutama masa pandemi ini akar kemanusiaan yang muncul dalam hati dan pikir kita haruslah diwujudkan dalam mengedepankan membantu sesama manusia dengan lebih humanisme dengan tidak memandang perbedaan bangsa, agama, daerah, suku dan warna kulit serta lainnya.

Kata “Memanusiakkan Manusia” yang lebih mendasar yakni memanusiakkan manusia yang memiliki cita-cita sama ingin selalu dihormati dan dihargai. Itu adalah keinginan mendasar dari seorang manusia, terutama ingin dihargai. Terlebih dalam interaksi dengan sesama manusia termasuk orang per orang.

Dihargai yang dimaksud dalam konteks ini adalah memberikan apresiasi kepada hasil karya seseorang terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya.

Menyalakan Kemanusiaan

Unika Soegijapranata salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah melangsungkan pergantian tampuk kepemimpinan Rektor pada 31 Agustus 2021 untuk periode 2021-2025. Yang menarik untuk diperhatikan dan diikuti bukan hanya upacara pelantikan dan serah terima jabatan Rektor, namun yang sangat menarik penulis adalah kalimat dalam backdrop dan sambutan rektor baru yang selalu diucapkan berkali kali yaitu “*Inflamare Humanitatem*” yang berarti menyalakan kemanusiaan. Sebuah tagline yang akan dijadikan pegangan untuk melaksanakan tugas empat tahun kedepan sebagai nahkoda Unika Soegijapranata.

Penulis tidak akan membahas permasalahan pergantian rektor Unika Soegijapranata, tetapi ingin mendalami tentang konsep yang akan dikembangkan dengan mengedepankan *Inflamare Humanitatem*. Kalimat ini sangatlah bermakna mendalam karena unsur manusia diangkat dan ditempatkan sebagai ciptaan

Allah yang sempurna. Artinya, sebagai ciptaan Tuhan paling mulia, kebahagiaan utama adalah tatkala kita dapat menjadikan sesama manusia lebih terdidik, lebih bermartabat, lebih sukses, lebih pintar, dan lebih baik hidupnya. Di situlah baru seseorang benar-benar memperoleh 'gelar kemanusiaannya'. Bila konsep memanusiaikan manusia ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ditempat kita bekerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, niscaya akan tercipta sebuah kehidupan yang harmonis, Sesama manusia saling menghargai.

Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir atau hal lainnya yang membuat sakit hati dan sebagainya. Jika konsep memanusiaikan manusia ini diterapkan dalam relasi sesama dan pelayanan publik, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan indah pada akhirnya.

Hal yang paling mendasar dalam menerapkan memanusiaikan manusia adalah adanya kecintaan dan kasih dalam diri kita kepada sesama manusia. Kecintaan dan kasih adalah pernyataan diri dan mempersatukan diri sendiri untuk menjadi satu dengan yang dikasihi, siapapun, apapun bagaimanapun yang dikasihinya. Ini melebihi dari arti Humanisme. Kasih kepada sesama berarti kita harus mampu menghargai, menghormati sesama sesuai dengan martabatnya.

Kemanusiaan itu Satu

Seorang tokoh pahlawan nasional Mgr Alb. Soegijapranata, SJ dalam masa perjuangan melawan tantara Jepang. Mgr Soegija, seorang nasionalis kemanusiaan yang mempunyai semboyan hidupnya yang terkenal 100% katolik 100% Indonesia. Mgr. Soegija pernah berucap: *"Kemanusiaan itu satu, bangsa manusia itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar (umat manusia); demikian juga kendati tampak dalam kodrat laki-laki dan perempuan. Malahan, menurut kehidupan di dunia ini, seluruh umat manusia dan bangsa-bangsa saling membutuhkan satu sama lain; kalau tidak saling bekerja sama dan saling menolong pasti tak akan lepas dari bahaya, tidak akan terjelam kesejahteraan, tak akan ada kemajuan, tak akan ada tata susila, tak ada ketentraman dan keselamatan. (Surat Kegembalaan September 1940)"*. Karena manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna diharapkan mampu berdaya ubah dalam memandang unsur kemanusiaan yang hakiki, sehingga akan membawa kesejahteraan dan kerukunan bagi manusia di Indonesia. Ucapan Mgr Soegija tersebut membukakan hati dan pikir kita bahwa kemanusiaan itu adalah hal yang bisa menyatukan segala perbedaan dari berbagai usul dan harapan kita semua.

Seorang tokoh nasional dan sekaligus filsuf bernama Rm. J. Driyarkara, SJ mengemukakan bahwa pembentukan manusia-manusia yang memiliki keahlian

saja tidaklah cukup, keahlian manusia haruslah harus diiringi dengan pendidikan dalam jiwa dan kepribadiannya.

Gagasan ini menempatkan manusia dalam kehidupannya yang harus memanusiakan manusia lainnya dan menjadi manusia yang membudaya dalam konteks “homo homini socius” (manusia sebagai kawan bagi sesamanya).

Semoga arti kemanusiaan yang sebenarnya selalu merasuk dalam hati setiap insan manusia Indonesia sehingga akan tercipta kesatuan dan persatuan serta saling menghargai antar sesama yang saling memiliki perbedaan.

Tribun Jateng, 25 September 2021, hal. 2

Sang Pahlawan Diplomasi

Oleh **Ign Dadut Setiadi**,

Anggota The Soegijapranata Institute (TSI) Unika Soegijapranata

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan ini dibuktikan dengan bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya, karena setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebuah pertanyaan mendasar mengapa diperingati tanggal 10 November?

Perlu di kenang kembali bahwa pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di kota Surabaya antara tentara Indonesia dengan pasukan Britania Raya. Pertempuran tersebut adalah pertempuran yang pertama antara tentara Indonesia dengan pasukan asing sejak Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan 17 Agustus 1945 dan peristiwa tersebut terjadi di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya, dimana klimaksnya terjadi perobekan bendera merah putih biru (bendera Belanda) di robek kain warna birunya menjadi merah putih.

Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan.

Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November 1945 ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa dan rakyat Indonesia hingga sekarang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai berbagai macam sebutan bagi para pahlawan diantaranya Pahlawan Nasional adalah orang yang diangkat dan diberikan kehormatan oleh pemerintah dalam hal ini melalui surat keputusan Presiden berdasarkan jasanya kepada bangsa dan negara, Pahlawan Revolusi yang gugur karena kekerasan G 30 S PKI yang terdiri 7 (tujuh) enam perwira tinggi dan satu orang perwira pertama Angkatan Darat yang jenazahnya ditemukan pada 4 Oktober 1965 oleh anggota Kipam KKO AL dari sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya Pondok Gede Kecamatan Pasar Gede,

Pahlawan Emansipasi seperti Ibu Kartini yang membela drajat dan eksistensi para kaum wanita di Indonesia, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini sebuah sebutan untuk menghargai jasa para guru dan pendidik di Indonesia, Pahlawan Devisa sebutan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, Pahlawan olah raga adalah seseorang yang berjasa karena mengharumkan nama bangsa melalui kegiatan olah raga. Dari ke lima macam pahlawan tersebut ternyata masih ada sebutan satu lagi yaitu Pahlawan Diplomasi.

Sosok Sang Diplomat

Setelah mengenal berbagai macam sebutan pahlawan di Indonesia, penulis mencoba ingin menjelaskan tentang pengertian Pahlawan Diplomasi. Pahlawan Diplomasi adalah seseorang yang berjuang membela kedaulatan negara Indonesia melalui seni dan praktik negosiasi baik menyangkut politik, ekonomi, budaya dan lain lain. Di Indonesia gerakan diplomasi terbagi menjadi empat periode yaitu yang pertama masa perang kemerdekaan atau revolusi di tandai dengan berbagai peristiwa penting dalam mempertahankan keutuhan Negara Indonesia melalui diplomasi melawan Belanda , kedua proses integrasi dan disintegrasi wilayah Indonesia antara lain dengan masuknya Irian Barat menjadi Provinsi ke 26 dan Provinsi Timor Timur sebagai Provinsi ke 27 serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, ketiga gerakan Sparatisme seperti gerakan RMS (Rakyat Maluku Selatan) di Maluku, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua, dan keempat yaitu sengketa antara Indonesia dan Malaysia memperebutkan pulau Sipadan-Ligitan dimana Indonesia kalah.

Berdasarkan gerakan gerakan masa diplomasi tersebut tentunya banyak orang yang berperan dalam turut melakukan diplomasi untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Para pejuang diplomasi sebelum kemerdekaan yang cukup dikenal adalah Ir. Soekarno dilahirkan di Surabaya 6 Juni 1901 yang akhirnya menjadi Presiden RI yang pertama yang terkenal dengan semboyannyadiplomasi adalah cara yang terbaik dalam melawan musuh , Moh. Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 beliau adalah seorang pahlawan diplomasi yang dibuktikan dengan memimpin delegasi Indonesia di KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag Belanda dan memimpin berbagai pergerakan dengan tanpa kekerasan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX lahir 13 April 1922 di Jogjakarta beliau adalah seorang pahlawan diplomasi ulung dengan keberhasilannya mengatur dan menguasai Serangan Umum 1 Maret 1949 dan berhasil menguasai kota Yogyakarta sedang diplomasi kedua adalah berhasil menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia atas Belanda 27 Desember 1949.

Uskup Nasionalis

Kedua tokoh pahlawan diplomasi yaitu Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX tersebut sangatlah dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun diantara pahlawan diplomasi tersebut ada seorang yang belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ. Beliau adalah seorang Uskup Agung dari kalangan pribumi pemimpin umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Lahir dengan nama asli Soegija di Surakarta pada 25 November 1896 sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara, keluarga pasangan Bapak Karijosoedarma seorang abdi dalem keraton Surakarta dan Ibu Soepijah seorang pedagang setagen dan nila.

Pada tanggal 15 Agustus 1931 ditahbiskan menjadi imam dan berganti nama dari Albertus Soegija menjadi Albertus Soegijapranata, pada 1 Agustus 1940 diangkat menjadi Uskup Vikariat Apostolik Semarang oleh Paus Pius XII. Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ. Dalam mengungkapkan rasa kecintaannya kepada Tanah Air Indonesia, Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ memiliki semboyan yang terkenal sampai sekarang ini : “.....kita merasa patriot seratus persen, sebab itu kita pun merasa Katolik seratus persen pula”(Theodorus Sudimin dan Yohanes Gunawan, Pr, 2015). Dari pernyataan tersebut dikenal dengan semboyan “Seratus persen Katolik-Seratus persen Indonesia”. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ dalam melawan penjajahan baik Belanda dan Jepang, hal tersebut dibuktikan dengan caranya diplomasi beliau dan perbuatan yang berani tidak gentar sedikitpun melawan penjajah.

Dedikasi dan komitmen kepada tanah air diperlihatkan misalnya pada September 1945 ketika pasukan Sekutu datang di Indonesia. Pada saat itu Mgr. Soegija menyuruh membuat Bendera Merah Putih yang besar dan dikibarkan di depan Gedung Gereja Gedangan Semarang. Pihak Belanda menegurnya, namun Mgr. Soegija berani menjawab : “Kalau kamu ingin bendera itu turun, coba datanglah kembali dan rebutlah kekuasaan di sini”.

Dalam sambutannya diulang tahun yang ke 20 jabatan Uskup KAS yang dikutip harian Suara Merdeka terbitan 7 November 1960 dimasa penjajahan Jepang saat tinggal di Paroki Gedangan mengatakan “ Kalau pada waktu itu ada yang berkata barang siapa tidak mau mengungsi adalah “pengkhianat”, tetapi saya berpendirian sebaliknya, yaitu siapa yang meninggalkan kota dan keluarganya adalah ‘pengkhianat’. Sebab dengan meninggalkan kota serta keluarganya itu sama artinya dengan membiarkan keluarganya serta negaranya menjadi ‘rayahan’ musuh, sedangkan orang-orang itu sendiri tidak berani melawan musuh yang datang. Maka pada waktu itu saya tidak mau meninggalkan Semarang untuk mengungsi. Saya akan tetap menjaga tempat tinggal saya dan mempertahankan tanggung jawab.

Mgr. Alb. Soegijapranata selain pemimpin gereja beliau seorang nasionalis dan sekaligus memiliki jiwa supra-nasional ini dibuktikan sebagai Ketua Dewan Wali Gereja Pusat pada tanggal 14 Desember 1957 mengirimkan surat edaran untuk seluruh umat Katolik Indonesia, dalam surat edaran tersebut beliau menekankan sebagai warga negara Indonesia yang harus kita lakukan dan kita usahakan demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, kita diwajibkan untuk menaruh cinta kasih yang sejati terhadap tanah air dan bangsa, serta patuh kepada pemerintah Indonesia.

Pemikiran beliau tentang kemerdekaan sangat visioner ini dibuktikan saat wawancara dengan Romo J. Dijkstra, SJ pada tanggal 6 Oktober 1971 yang dimuat dalam buku yang berjudul "Beberapa Aspek dari Sejarah Indonesia", beliau berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa dan bahwa kemerdekaan adalah sesuai dengan keadilan, dan bahwa segala macam bentuk penjajahan bertentangan dengan hakekat keadilan. Soegijapranata selalumengedepankan sikap Kasih atau cinta kepada tanah air adalah salah satu roh politik yang perlu kembali di proklamasikan agar perpolitikan di Indonesia kembali menjadi gerakan yang bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat di Indonesia.

Soegijapranata juga pernah menulis di sebuah majalah Hidup tanggal 17 November 1947 dengan judul tulisan "Rakyat dengan Kewajibannya". Salah satu kutipan tulisan beliau sebagai berikut : " Kasih akan tanah air itulah terutama melarang kita merugikan kepentingan umum, untuk menguntungkan suatu golongan atau lapisan. Barang siapa sudi mengorbankan keselamatan umum, untuk kepentinganorang perseorangan atau golongan, sungguhlah cinta kasihnya kepada tanah air itu tiada effectief meskipun dapat juga terlalu affectief (terasa), penuh dan menggegar. Sebaiknya barang siapa memperhatikan undang-undang dan keadilan sosial dengan ikhlas hati, ia itu sungguh kasih akan tanah airnya....".

Dalam tulisan tersebut Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ mengajak para rakyat yang bergerak dalam perpolitikan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dengan tidak mengorbankan kepentingan umum. Mgr. Soegija menegaskan bahwa kasih akan tanah air atau cinta pada negara dan rakyat adalah roh politik yang harus terpatri dan tertanam dalam hati setiap rakyat yang akan terjun dalam bidang politik. Keberanian dan kelaihaannya berdiplomasi sebagai caranya melawan penjajah membuat Presiden Soekarno sangat dekat dengan Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ bahkan Presiden Soekarno memberikan penghargaan atas pengorbanan dan perjuangan beliau diwujudkan dalam pengangkatan sebagai tokoh Nasional dalam surat Keputusan Presiden No. 152 tahun 1963 tanggal 26 Juli dan penganugerahan pangkat Djenderal TNI kehormatan yang tertuang dalam Kepres/Pangti ABRI no. 223/AB-AD tanggal 17 Desember 1964 yang berlaku tanggal 22 Juli 1963. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut maka Mgr. Alb.

Soegijapranta, SJ berhak di makamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang.

Semoga setiap orang yang berkecimpung dalam dunia perpolitikan selalu disinari dengan roh politik yaitu “Kasih dan Cinta Tanah Air”, niscaya dunia perpolitikan di Indonesia akan selalu bertujuan memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Tribun Jateng 11 November 2021 hal. 2 <https://jateng.tribunnews.com/2021/11/10/opini-ign-dadut-setiadi-sang-pahlawan-diplomasi?page=all>.

(Jadilah) Pemimpin Yang Memet, Jlimet, dan Rapet

Oleh: **JC Tukiman Taruna,**

Pengajar pada Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) di Unika Soegijapranata, Semarang, dan Penyuluhan Pembangunan di UNS Surakarta

Dalam konteks Indonesia, dewasa ini, pemimpin yang disebut berhasil adalah dia atau mereka yang mampu melaksanakan amanat kepemimpinannya secara sepenuh hati, teliti, dan bekerja dalam sunyi.

Menjadi pemimpin di era serba digital dengan banyak perubahan cepat seperti saat ini, ajaran/petuah kultural tentang pentingnya berpikir dan bertindak *memet*, *jlimet*, dan *rapet* justru menjadi sangat relevan (bacalah ketiga kata itu seperti Anda mengatakan segera atau setelah). Jika dibandingkan dengan pola pikir Barat, pola pikir dan tindak MJR ini, antara lain diwakili oleh Marvin Weisboard dan Sandra Janoff dalam bukunya *Future Search* (2000), dikerangkakan dalam fase *learning* dan fase *doing*, serta kedua fase itu perlu didukung oleh sumber daya yang sesuai/memadai (*supporting resources*).

Dalam fase *learning*, pemimpin melakukan sekurangnya lima hal utama, yaitu melihat secara garis besar dinamika tugas, kewajiban, dan wewenangnya; mencermati apa yang pernah terjadi; memikirkan secara serius tentang tujuan dan sukses yang bakal diraihinya; menentukan peta jalan; serta merumuskan/menyusun semuanya itu ke dalam sebuah rancangan pelaksanaan. Terkait dengan fase *doing*, seorang pemimpin idealnya sadar betul tentang (a) penentuan waktu paling tepat untuk segera melakukannya, (b) penentuan waktu paling tepat kapan sukses/hasilnya dicapai, (c) tuntutan "harus hadir" di sana karena tidak cukup atau berhenti pada berkeputusan saja; dan (d) sadar betul bahwa semuanya itu pasti akan berlangsung seperti "menaiki *roller coaster*".

Bagaimana MJR?

Pola pikir dan tindak *memet*, *njlimet*, *rapet* (MJR) sulit dibuat distingsinya seperti pola Marvin Weisbord dan Sandra Janoff di atas karena, bagaikan intan, MJR itu satu entitas, tetapi kilau pantulan warnanya bisa berbeda tergantung dari

posisinya terhadap cahaya/sinar. MJR itu menyatu, saling mengisi dan melengkapi antara (a) memikirkan segala sesuatunya secara dalam-dalam penuh ketelitian dan bahkan sepenuh perasaan hati (*memet*), (b) semua aspek dipelajari, dilihat, dan dipertimbangkan secara teliti (*jlimet*), serta (c) harus berproses dalam sunyi senyap penuh kerahasiaan (*rapet*).

Dalam konteks Indonesia, dewasa ini, pemimpin yang disebut berhasil adalah dia atau mereka yang mampu melaksanakan amanat kepemimpinannya secara MJR dan, sebaliknya, itu berarti masyarakat segera dapat menilai (dalam 100 hari, misalnya) pemimpin mana yang akan sukses dan pemimpin mana akan tidak sukses. Intan MJR kilaunya sering kurang menyilaukan terutama karena kesulitan terbesar paling sering dihadapi oleh para pemimpin (kita) dalam pola pikir dan tindak MJR ini terletak pada ketidakmampuannya menyimpan atau menjaga rahasia. Seolah tidak ada rahasia dalam relasi sosial kita, termasuk seolah tidak ada rahasia di antara pemimpin kita. Rahasia sering bocor di mana-mana dan ke mana-mana. Akibat dari mudah bocor di mana-mana/ke mana-mana, karena MJR itu satu entitas model kepemimpinan, maka menjadi pudar pulalah pola pikir dan sikap *memet* dan *jlimet*-nya.

"Hemisfer" baru

Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila ada satu permintaan khusus kepada para pemimpin Indonesia, yaitu jadilah pemimpin yang berpola pikir dan tindak MJR serta menjadikannya sebagai *hemisfer* baru untuk model kepemimpinan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa pola pikir dan tindak MJR mendesak dan penting sebagai belahan dunia baru (*hemisfer*) kepemimpinan.

Pertama, terlepas dari huru-hara pro-kontra yang muncul berkaitan dengan kosakata "tiga periode", tampak jelas betapa sejumlah pihak melihat betapa model kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama ini telah mengembangkan pola pikir dan tindak MJR. Artinya, ada damba masyarakat agar model kepemimpinan MJR itu semakin berkembang dan dipraktikkan oleh sebanyak mungkin pemimpin lainnya.

Kedua, sudah terlalu lama kita tidak menemukan indikator pemimpin berkarakter itu bagaimana dan apa saja. Sekarang, lewat pengembangan pola pikir dan tindak MJR, menjadi sangat jelaslah indikator yang diharapkan itu dan sangat jelas pula menilainya kelak.

Alasan ketiga, satu entitasnya MJR sangatlah sesuai dengan kultur kemasyarakatan kita yang tidak terbiasa berpikir secara distingtif sebagaimana biasa dilakukan oleh orang Barat. Contoh paling nyata adalah kita sangat tidak terbiasa menyusun daftar apa pun secara alfabetis, entah terkait daftar nama, tempat, dan lain-lain.

Pola pikir dan tindak MJR menyatu bagaikan bumbu masak yang tercampur menjadi satu rasa dalam olahan lodeh misalnya. Pada saat seorang pemimpin berpikir *memet*, saat itu pula ia pasti juga menjalankan analisis secara *jlimet*. Begitu seterusnya.

Keempat, pola pikir dan tindak MJR itu kekayaan lokal, tetapi sekaligus juga merupakan kekayaan nasional Indonesia. Di masing-masing daerah, para pemimpin daerahnya sangat merdeka untuk melaksanakan pola pikir dan tindak MJR sesuai kultur wilayahnya.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/04/19/jadilah-pemimpin-yang-memet-jlimet-dan-rapet/>

Rapor Pendidikan

Oleh: **JC Tukiman Taruna,**

Pengajar Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) dan Ketua Dewan Penyantun Unika Soegijapranata Semarang

AN selayaknya sangat kuat berdasarkan dan merekam pengalaman empirik siswa, guru, dan juga kepala sekolah; supaya rapor pendidikan yang kelak dihasilkan, benar-benar membuktikan satunya hasil dengan kebijakan pemerintah.

Gebrakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim selama ini sudah "sangat" banyak, terbaru penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan dan berikutnya asesmen nasional yang kelak akan menghasilkan rapor pendidikan bagi sekolah dan dinas pendidikan.

Pengukur tingkat kepercayaan publik pada Kemendikbudristek saat ini cukuplah satu saja, yaitu yang penulis sebut *contra ac dicta sunt*; berlawanan dengan yang dikatakan atau tidak. Tegasnya, adakah satu kata dan perbuatan; adakah bukti atas apa yang diwacanakan.

Karena itu, sampai 2021 ini berakhir (empat bulan lagi), sebaiknya Kemendikbudristek membuktikan dulu adanya sinyal-sinyal keberhasilan dari apa yang selama ini diwacanakan lewat berbagai kebijakan, sebelum ada gebrakan lain.

Asesmen nasional (AN) yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum dan survei lingkungan diharapkan sebagai langkah tepat memetakan kualitas pendidikan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Hasil AN akan dimuat dalam sebuah platform bernama Rapor Pendidikan.

Rapor ini kelak akan diberikan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan sebagai "dokumen rahasia," Maksudnya, pembagian atau pengumuman hasil AN tidak dapat diakses secara luas dan hanya pihak sekolah (satuan pendidikan) bersangkutan yang dapat melihat hasil AN miliknya.

Kemendikbudristek mengatur, hanya kepala dinas pendidikan yang bisa melihat hasil AN seluruh sekolah di wilayahnya. Atas rapor pendidikan itulah, selanjutnya kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan bisa merencanakan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing.

Rapor pendidikan juga tidak akan memuat baik skor individu murid sebagai subyek asesmen, apalagi rankingnya, skor setiap guru, maupun skor sekolah. Rapor pendidikan juga tidak akan dipublikasikan; dan hal itu dilakukan antara lain untuk menghindari adanya "hukuman" atau "sanksi sosial" terhadap sekolah, bahkan mungkin terhadap guru dan peserta didik.

Pada tahap awal "turunnya" rapor pendidikan, Kemendikbudristek berharap setiap sekolah merefleksikan diri, bercermin dan tergerak untuk merencanakan peta perbaikan sekolahnya.

Mengapa hasil AN berupa rapor pendidikan harus dirahasiakan sedemikian rupa, padahal arahnya adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan sekolah dan wilayah? Mampukah hanya kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan saja kelak membuat pemetaan itu?

Sengaja akan dimatikan perannya serta masyarakat untuk menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan peta peningkatan kualitas pendidikan? Dan, pada zaman seperti ini, siapa dapat menjamin kerahasiaan apa pun atau siapa pun?

Satu kata dan perbuatan

Ada contoh kuno, tetapi bagus terkait tokoh yang berpegang pada satunya kata dan perbuatan. Adalah Francis Bacon (1561-1626), filsuf Perancis yang menggebrak dominasi mazhab Skolastik yang sangat kuat mengakar dengan metode deduktifnya. Gebrakannya harus ia bayar sampai masuk penjara dan kena denda 40.000 franc. Memang tak berapa lama ia di penjara, karena dilepaskan dengan janji agar sisa hidupnya harus berada di pengasingan dan hanya boleh menulis buku.

Konsisten dan konsekuen dengan janjinya, Bacon berhasil menulis sejumlah buku, antara lain *Novum Organum*, *Advancement of Learning* dan *New Atlantis*, semuanya bercorak menentang metode deduktif kaum Skolastik. Sebagai ganti dan buktinya, Bacon menawarkan metode induktif eksperimental; dia melakukan sendiri eksperimennya dengan mengadakan percobaan pendinginan ayam dengan salju. Namun, justru di situlah Bacon meninggal karena terpaan musim dan hawa dingin yang luar biasa.

Apa yang mendasari metode induktif eksperimental Bacon? Ia memikirkan serius bagaimana caranya mengubah metafisika yang spekulatif dengan yang ilmiah eksperimental; karena itu pikiran kita harus mampu mengalihkan ke arah penyelidikan dan melihat kenyataan-kenyataan empirik.

Akal manusia, kata Bacon, harus digunakan untuk mendapatkan kebenaran, karena *knowledge is power* (Endang Daruni Asdi dan Husnan Aksa, 1981).

Bisa dipastikan AN menerapkan metode induktif, bahkan bisa dikategorikan eksperimental mengingat asesmen kompetensi minimum (terutama bagi peserta didik) sebaiknya menggunakan uji coba dulu, baik instrumen maupun siswanya. Uji coba sangat penting karena instrumen yang baik hanya mungkin tersusun jika diperkaya pengalaman empirik.

Ketika kami berempat (di bawah pimpinan seorang profesor peneliti dari Selandia Baru) melaksanakan tes EGRA (*early grade reading assessment*) di Sumba (2016), dalam bacaan yang kami sodorkan, ada kata *warung* yang tak dikenal oleh satu siswa pun. Untung ketidaktahuan itu, kami ketahui pada saat uji coba instrumen, yang tentu saja segera kami ganti dengan kata *kios* (lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari) ketika EGRA yang sesungguhnya kami lakukan bagi siswa kelas II SD.

Simpulan singkatnya, AN selayaknya sangat kuat berdasarkan dan merekam pengalaman empirik siswa, guru, dan juga kepala sekolahnya; supaya rapor pendidikan yang kelak dihasilkan benar-benar membuktikan satunya hasil dengan kebijakan Kemendikbudristek sebagaimana diharapkan agar memenuhi syarat untuk membuat pemetaan kualitas pendidikan Indonesia.

Kompas 13 September 2021 hal. 6

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/13/rapor-pendidikan/>

Realitas Sosial Pandemi dan Asesmen Nasional 2021

Oleh: **JC Tukiman Taruna,**

Pengajar Mata Kuliah Community Development Planning; Ketua Dewan Penyantun Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Ada sekurangnya dua realitas sosial pada masa pandemi ini terkait peran orangtua dalam pembelajaran anaknya. Sebelum program Asesmen Nasional 2021 terealisasi, perlu dipikirkan tambahan asesmen, yakni survei orangtua.

Salah satu pembelajaran terpenting dari realitas sosial pandemi Covid-19 ialah masyarakat Indonesia menjadi semakin realistis dalam bersikap dan berpikir tentang semua aspek kehidupan dewasa ini.

Mungkin saja ada segelintir orang yang masih sangat utopis, kurang puas atau bahkan memberontak, mencemooh serta sinis menghadapi realitas sosial ini. Namun, percayalah, hukum sintesa sebagai hukum dasar cara menguasai alam semesta Indonesia ini akan terbukti kebenarannya.

Rahmat Subagya, sebagaimana dikutip Veeger (*Realitas Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993) menulis, "Cara berpikir dan bertindak asli di Indonesia berpangkal pada keyakinan bahwa seluruh jagat raya adalah kesatuan dan perpaduan. Sekalipun kita diberi kesan seolah-olah jagat raya dikuasai dan diceraikan oleh unsur-unsur yang berposisi satu terhadap lain—langit-bumi; gelap-terang; basah-kering; jahat-baik; lahir-batin—namun hasil terakhir yang ditonjolkan ialah persatuan, keseimbangan, perdamaian".

Ditambahkan, "Inilah hukum sintesa; yang perlu dikagumi, diteladani, ditaati, dan diterapkan manusia pada perilakunya. Kadang-kadang masyarakat diguncangkan dan diceraikan oleh adanya oposisi, malapetaka, huru-hara; tetapi akhirnya masyarakat senantiasa kembali kepada kesatuan dan perpaduan yang disebabkan hukum sintesa itu. Maka dari itu, keutamaan-keutamaan yang harus dikembangkan oleh tiap-tiap orang Indonesia adalah penyesuaian, ketaatan, kesabaran, keikhlasan, dan penghormatan" (hlm 4-5).

Asesmen Nasional 2021

Harus diakui, guncangan oleh Covid-19 di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di satu sisi sangatlah signifikan, tetapi di sisi lain semuanya harus tetap berjalan/berlangsung terus; termasuk dalam kaitan Asesmen Nasional 2021 yang akan dilakukan September-Oktober mendatang.

Program ini berupa penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Idealnya dilakukan berkala untuk mengetahui dinamika dan kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Variabel penilaian terfokus pada literasi, numerasi, karakter, kualitas proses pembelajaran, dan iklim setiap satuan pendidikan.

Tiga jenis instrumen dalam Asesmen Nasional 2021 ini meliputi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen kompetensi minimum dimaksudkan untuk mengukur hasil belajar kognitif, dan karena itu diikuti hanya oleh peserta didik untuk mengukur literasi membaca dan numerasi.

Survei karakter diikuti peserta didik dan guru karena mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai karakter yang tampak sebagai hasil belajar non-kognitif. Adapun survei lingkungan belajar akan diikuti kepala satuan pendidikan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran.

Orangtua

Sebelum program Asesmen Nasional 2021 itu terealisasi, perlu rasanya dipikirkan penambahan "instrumen khusus", yakni survei orangtua. Ada sekurangnya dua realitas sosial pada masa pandemi ini terkait peran orangtua dalam pembelajaran anaknya.

Pertama, selama pandemi ini orangtua yang terutama jatuh bangun memenuhi segala persyaratan agar pembelajaran daring anak dapat berlangsung. Tanpa turun tangan langsung orangtua, pembelajaran pasti akan terganggu, bahkan anak boleh jadi tidak belajar. Orangtualah yang benar-benar belajar selama Covid-19 ini.

Kedua, iklim rumah tangga jauh lebih banyak dialami, dinikmati, membahagiakan atau menekan anak selama pandemi ini dibandingkan dengan iklim sekolah.

Karakter anak berikut nilai-nilai yang ditanamkan bisa disebut secara ekstrem semata-mata dibentuk oleh orangtuanya selama pandemi. Fungsi atau peran guru dan kepala sekolah pasti hanya sebagian amat kecil selama 1,5 tahun terakhir dalam konteks pembiasaan dan nilai-nilai karakter.

Kembali mengingatkan kehebatan hukum sintesa bangsa Indonesia, kiranya perlu dipahami oleh semua pihak betapa realisasi program Asesmen Nasional 2021 selayaknya dilaksanakan secara realistis; realistis metodologinya berikut perlu lebih lengkap, tetapi sederhana instrumen surveinya, serta realistis terhadap hasilnya nanti.

Dalam hal literasi membaca dan numerasi (berhitung)—tanpa mendahului hasil asesmen—besar kemungkinan hasilnya kelak kurang bagus, terutama ketika membaca dikaitkan dengan keterampilan menulis dan numerasi dikaitkan dengan operasionalisasinya.

Pada sisi karakter, bisa diduga betapa akan amat bervariasi nilai-nilai karakter dan pembiasaan anak berhubung selama 1,5 tahun lebih "didominasi" iklim rumah dan orangtua.

Sekiranya kelak hasil asesmen ini tidak/kurang memuaskan baik dari sisi kognitif maupun nonkognitifnya, masyarakat tetap patut berbangga karena semakin besar peran orangtua/rumah dalam pencapaian kualitas pendidikan anak.

Berdasarkan hasilnya, kelak Kemdikbudristek bukan saja akan memperoleh peta jalan baru untuk dirumuskan secara konkret, melainkan juga akan semakin yakin betapa sangat pentingnya melakukan berbagai penyesuaian untuk memperoleh sintesa baru pendidikan Indonesia.

Kompas 2 September 2021 hal. 6

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/02/realitas-sosial-pandemi-dan-asesmen-nasional-2021/>

Universitas Sekolah Dasar dan Kurikulum Merdeka

Oleh: **JC Tukiman Taruna**

Ketua Dewan Penyantun dan Pengajar Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, Semarang

Kurikulum disebut baik apabila memberi manfaat penuh bagi anak-anak. Karena itu, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari minat (individu) terhadap masalah-masalah dan bidang pengetahuan yang dipilihnya secara bebas.

Sebagian besar orang pasti mengernyitkan dahi manakala mendengar soal University Elementaire-School, padahal itu nyata ada.

Setelah pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago pada 1894, John Dewey (sepuluh tahun ia mengabdikan di Michigan) ditugasi secara khusus di bagian pedagogik dan serta-merta (karena mimpinya sudah lama) ia mendirikan sekolah percobaan yang diberi nama University Elementaire-School. Jadi, ada “universitas” di dalam Universitas Chicago.

Ia mengawali segala perencanaannya sendiri, apalagi sejak awal ia memang berniat menerapkan universitas sekolah dasar itu sebagai percobaan serta uji coba teori filsafatnya yang disebut metode kritis. Ia begitu terobsesi oleh metode kritisnya Immanuel Kant (1724-1804), bahkan disertasinya di Universitas John Hopkins berjudul *The Psychology of Kant*.

Di universitas sekolah dasar itu, Dewey menerapkan kurikulum dan pengajarannya secara tak lazim, dan ketidaklaziman seperti itu sudah pasti dapat banyak tantangan. Dan itulah Dewey, semakin banyak tantangan, semakin bersemangat karena ia berasumsi, semakin pikiran/metode kritis itu direspons, semakin terujilah ia.

Pikiran besar yang selalu dikemukakannya ialah, pendidikan harus bermanfaat. Maka, kurikulum disebut baik apabila ia memberi manfaat penuh bagi anak-anak. Karena itu, “....pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari minat (individu) terhadap masalah-masalah dan bidang-bidang pengetahuan yang dipilihnya secara bebas.”

Pikiran dan rancangan super John Dewey, kian menjadi-jadi, ketika pada 1897 ia menulis *My Pedagogic Creed* dengan ungkapan terkenalnya: “Aku percaya akan pendidikan itu adalah kehidupan dan bukannya persiapan untuk hidup.”

Rupanya, dari *My Pedagogic Creed*-nya Dewey inilah cikal bakal kurikulum prototipe, sebuah pikiran kritis nan genuine bahwa pendidikan itu adalah kehidupan (anak) itu sendiri; dan janganlah disempitkan menjadi pendidikan itu untuk mempersiapkan kehidupan anak. Kurikulumnya berarti kehidupan sehari-hari anak yang dipilihnya secara bebas.

Universitas anak usia dini?

Mengawali 2022, atau 128 tahun setelah berdirinya *University Elementaire-School Dewey*, Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang benar-benar sedang gandrung terhadap tersusunnya joyful learning model (JLM) dan bermimpi semester depan bisa dideklarasikan kampus (pertama) yang sepenuhnya menerapkan JLM pada seluruh mata kuliahnya dan pada semua semesternya.

Saat ini semua program studi, semua jurusan dan semua fakultas sedang menggalang semangat bersama untuk siap mengatakan: “Apa pun mata kuliahnya dan apa pun rencana pembelajaran semesternya, JLM adalah kunci jawabannya.” Dan memang perdebatan sengit saat ini ialah upaya menemukan/merumuskan apa/bagaimana joyful itu, yang sudah barang tentu akan dipakai sebagai pengukur adil baik bagi dosen dan tenaga pendidikan serta mahasiswa.

Intinya, joyful harus mampu menghilangkan sekat antar siapa dan apa pun, menjunjung tinggi fleksibilitas terkait kapan saja dan di mana saja, serta berkeadilan bagi semuanya.

Apakah JLM yang diimpikan seperti itu akan menjadi cikal bakal berdirinya “universitas anak usia dini”? Sebagaimana semua pihak selama ini merasakan bahkan mengalami betapa cerianya anak-anak dan bunda pengasuh di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Seluruh hari-harinya—padahal hanya sekitar 2-3 jam saja—dan seluruh suasana yang terjadi di PAUD adalah kegembiraan, keceriaan, teriakan yel-yel, bernyanyi dan menari.

Semuanya senang dan menyenangkan. Namun, fakta lapang menunjukkan, suasana penuh keceriaan di PAUD, berangsur-angsur berkurang dan nyaris hilang begitu anak-anak memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi. Dan di perguruan tinggi hilanglah semua yang serba menyenangkan itu. Malah di situ semua berubahjadi

“tempat yang tak aman/nyaman” sampai-sampai muncul Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Sangat berharap, gagasan JLM oleh Unika Soegijaprata Semarang segera terwujud.

Kompas 14 Februari 2022 hal. 6

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/13/universitas-sekolah-dasar-dan-kurikulum-merdeka>

Setali Tiga Uang: Gidhuh, Kisruh, Lan Ribut (Part 1)

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga,**

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang

Di masa kanak-kanak saya, -sebutlah di tahun 1950 an- , mata uang seharga satu sen (sepersepuluhnya satu rupiah) masih berlaku untuk/sebagai transaksi jual-beli; bahkan juga ada yang berharga setengah sen.

Uang itu berupa uang logam, dan karena banyaknya uang logam itu beredar, ada sebutan khas untuknya, yaitu **kricik**. Sebutannya kricik (searti dengan recheh) karena suaranya ketika berada di saku baju atau celana laki-laki, atau ketika dibawa di dalam **kantong dhuwit**: kricik ...kricik kricik. Apalagi ketika dihitung ramai-ramai, wah kricik... kricik...kriciknya lebih seru.

Saat itu, sebutan untuk satu rupiah ialah **sak gelo** (bacalah gelo seperti Anda mengucapkan “gadis itu pintar memainkan **cello**, sebuah alat musik;” atau Anda mengumpat mengatakan seseorang “bego.” Untuk menyebutkan setengah rupiah, digunakan ungkapan setengah gelo; namun uniknya untuk menyebutkan **seprapat gelo** (seperempat rupiah), dipergunakanlah sebutan **setali**.

Satuan setali terdiri atas uang logam dua sen dan setengah sen (mata uang ini berlobang di tengahnya); nah..., rupanya dari sanalah lalu dikenal ungkapan **setali tiga uang** karena memang terdiri atas tiga uang kricik. Sebagai ungkapan untuk/dalam relasi sosial kemasyarakatan, setali tiga uang kemudian berkembang menjadi semacam peribahasa, yang berarti sama saja, mirip, atau kalau ungkapan zaman sekarang sebelas duabelas, tipis bedanya.

Gidhuh, Kisruh, dan Ribut

Ungkapan setali tiga uang untuk kata-kata **gidhuh, kisruh, lan ribut** sangatlah tepat untuk melukiskan berbagai peristiwa sosial dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Lihat misalnya, apa yang sedang terjadi di sebuah organisasi profesi di bidang kesehatan, juga di organisasi kepemudaan: *anane mung lagi gidhuh, kisruh lan ribut*; sedang terjadi sebutlah ribut-ribut atau keributan.

Tentang “suka ribut-ribut ini,” silakan Anda mencari sendiri contoh lainnya di luar organisasi itu, -ada cukup banyak/sering kan?- , namun intinya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai betapa gidhuh, kisruh, lan ribut sering menjadi sajian pembuka, bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai menu utama.

Sampai-sampai ada ungkapan “*Kudu gegerakan dhisik sebelum ger-geran*” harus kisruh dulu sebelum akhirnya saling tertawa terbahak-bahak. Apakah memang perangai masyarakat kita begitu; ataukah itu semua sekedar strategi kasar untuk mencapai suatu tujuan?

Gidhuh artinya *sarwa bingung satandang tanduke*, serba salah; mau diam saja nanti dipermasalahakan bahkan disalahkan, mau bertindak sesuatu juga dapat menjadikannya lebih berdampak. Itulah kondisi gidhuh, dan pada umumnya kondisi itu terjadi sebagai akibat dari suasana kisruh dan ribut-ribut sebelumnya.

Kisruh berarti *bingung ora karuwan*, serba bingung, bahkan dalam konteks berorganisasi, kisruh juga berarti *dadi rame* karena muncul bermacam-macam permasalahan, protes, tuding-menuding, malahan sering terjadi percekcoakan baku hantam atau banting kursi. Itulah kondisi kisruh yang biasanya dipicu oleh terjadinya ribut-ribut di awalnya.

Kembali ke pertanyaan di atas: Mengingat gidhuh, kisruh lan ribut ini setali tiga uang dalam arti saling berkaitan lewat pertalian sebab akibat, apakah benar semuanya itu dipakai sebagai strategi kasar untuk mencapai suatu tujuan?

Kalau memang benar sebagai strategi kasar, aduh.... betapa rendahnya gradasi dan cara-cara kita berorganisasi selama ini. Di organisasi ini hampir selalu ada ribut-ribut, di ormas itu selalu tampil sebagai menu utama; di sini gambut di sana gunung, di sini suka ribut-ribut, di sana banyak kisruh gidhuh. Begitukah ciri budaya masyarakat kita dalam upaya mencapai suatu tujuan?

“Kasus” paling anyar, -semoga tidak berkepanjangan- , dengar-dengar ada pencatutan nama sebuah asosiasi, konon ketua umumnya tidak tahu-menahu mula bukane, awal mulanya, tetapi tiba-tiba ada kegiatan ini-itu atas nama asosiasinya. *Sing bener endi lan sapa ya?* Pihak mana yang benar, kita tunggu saja seraya berdoa jangganlah setali tiga uang itu terjadi lebih parah. ***Isin ah!***

<https://suarabaru.id/2022/04/03/setali-tiga-uang-gidhuh-kisruh-lan-ribut-part-1/>

Setali Tiga Uang: Beler, Clemer, Lan Cemer (Part 2)

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga,**

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang dan UNS

Saat saya usia SD-SMP, terutama di tlatah/wilayah kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebutan untuk uang satu rupiah ialah **sak gelo** (bacalah gelo seperti Anda mengucapkan “Gadis itu pintar memainkan **cello**, sebuah alat musik;” atau Anda mengumpat mengatakan seseorang “bego.”

Untuk menyebutkan setengah rupiah, digunakan ungkapan setengah gelo; namun uniknya untuk menyebutkan *seprapat gelo* (seperempat rupiah), dipergunakanlah sebutan **setali**. Satuan setali terdiri dari uang logam dua sen dan setengah sen (mata uang ini berlobang di tengahnya); nah ... rupanya dari sanalah lalu dikenal ungkapan **setali tiga uang** karena memang terdiri dari tiga uang kricik.

Sebagai ungkapan untuk/dalam relasi sosial kemasyarakatan, setali tiga uang kemudian berkembang menjadi semacam peribahasa, yang berarti sama saja, mirip, atau kalau ungkapan zaman sekarang sebelas duabelas, tipis bedanya.

Beler, Clemer, dan Cemer

Baru-baru ini seorang mantan anggota dewan perwakilan rakyat yang baru saja keluar dari masa “bertapanya,” mengawali dunia barunya dengan cara “mau jujur tentang liku-liku permasalahan korupsi.” Semoga ia tidak tertelung lagi seperti dulu dialaminya; dan semoga ia lancar serta mampu mengorek siapa yang sebenarnya **beler, clemer, dan cemer** dalam konteks korupsi di Indonesia.

Beler, clemer lan cemer, bacalah seperti Anda mengucapkan seger atau bener atau “Aku makan lempur dua;” dan tiga kata itu memiliki makna mirip-mirip terkait korupsi, bahkan boleh dibilang termasuk akar atau tempat belajar pertama untuk korupsi.

Beler, ungkapan khas yang awalnya untuk melukiskan perilaku anak-anak yang *tansah klithihan, glidhig banget*, anak yang tidak pernah bisa diam, usil, suka pergi dan serba jahil.

Di samping itu beler juga untuk melukiskan orang yang *mlincur lan emoh nyaur utang*, yakni orang yang tidak pernah mau bayar hutangnya (karena itu harus ditagih); namun untuk hewan piaraan, ayam terutama, beler berarti tansah *saba ing omah lan ngribedi*, ayam yang tidak mau keluar dari rumah (cari makan), karena hanya berada di dalam rumah terus, pun selalu mengganggu.

Beler dalam arti semacam inilah bila tidak disadari apalagi tidak dikelola dengan baik akan mendorong seseorang menjadi **clemer**, dan mulai dari sinilah bibit-bibit korupsi itu tersebar. Mengapa? Orang disebut clemer karena ia **seneng culika, seneng colong jupuk**, yakni orang yang suka berbohong serta suka ambil barang/harta orang atau pihak lain.

Bukankah clemer seperti itu identik dengan tindak korupsi yang selama ini menggelisahkan dan sebenarnya sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Orang atau pun lembaga/instansi yang seneng culika, suka berbohong berarti ora bares, dan itu sudah menggambarkan betapa perilaku koruptif sedang merajalela.

Kondisi menyedihkan dan memprihatinkan seperti inilah disebut **cemer, yakuwi jenes, nistha banget, jemer**; ialah kondisi yang nista, jorok, situasi yang sangat tidak terhormat bagi siapa pun: bagi pelakunya ya cemer, bagi lembaga/instansinya juga tercemar; apalagi bagi rakyat dan masyarakat yang sejatinya sangat mengharapkan kehidupan semua pihak yang bermartabat.

Marilah kita kembangkan pola asuh yang menjauhkan anak cucu kita dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat menyuburkan sikap beler, clemer dan apalagi cemer.

Mari kita dukung berbagai upaya memberantas tindak korupsi, dan semoga orang yang berkehendak baik mau “membongkar” semua liku-liku “petinggi” berbuat koruptif diberi semangat baja untuk melakukannya.

<https://suarabaru.id/2022/04/10/setali-tiga-uang-beler-clemer-lan-cemer-part-2/>

Hari Gini, Bersikap Kuatlah: Aja Cingeng, Cinging, Lan Cengeng (Part 3)

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga**,

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang dan UNS

Sudah seharusnya, layak, dan sepiantasnya, kita yang telah lebih dari dua tahun “dihajar” oleh Covid-19 dengan segala variannya, berpikir dan bersikap yang kuat (*taft*), bukannya malah berpikir dan bersikap *cingeng*, *cinging*, *lan cengeng*.

Tegasnya, hari gini, apa kata dunia kalau kita masih seperti itu, makanya ayolah, ***aja cingeng***, – bacalah cingeng ini seperti Anda mengucapkan “Aku mau beli cireng satu porsi –,” juga ***aja cinging, apadene cengeng***, – bacalah cengeng ini seperti Anda mengatakan “Salak ini sepet, tidak manis -.”

Cingeng, di beberapa wilayah/daerah menyebutnya dengan cengeng (seperti mengatakan cewek merengek), ialah ***gampang nangis***, alias *gembeng* (ucapkanlah “matanya *melek* sebelah”). Masak hari gini masih saja ada orang atau kelompok yang masih gampang nangis, masih suka merengek-rengok seraya menolak segala perubahan sekecil apa pun.

Harga sebagian BBM dinaikkan, wah ... ramai-ramai merengek-rengok, sementara ketika pernah harganya diturunkan, diam seribu bahasa. Jangan cingeng bin cengenglah menghadapi segala sesuatu, karena sebuah perubahan itu keniscayaan.

Di kelompok WA saya sejumlah teman merengek-rengok cingeng, karena dalam sebuah nyanyian kata “bunga” diganti dengan “kembang.” Sederhana amat, namun sudah membuat mereka sinis seraya cingeng, gampang nangis, seolah menjadi gembeng. ***Ora lanang!***

Cingeng dapat menjadi lebih parah lagi ketika berjangkit kepada orang-orang yang *gampang lara*; itulah ***cinging***. Orang (ada juga kelompok lho) yang mudah terjangkit cinging, gampang lara; dapat dipastikan ia/mereka ini lemah fisiknya maupun minta ampun mentalnya.

Sithik-sithik cingeng, banjur lara, sedikit saja tersinggung misalnya, atau kecewa, wah ... menangis sejadi-jadinya, lalu jatuh sakit. Itu namanya, sudah cingeng, cinging lagi. Jika menemui pribadi semacam ini, wah ya repot tenan; dan lebih repot lagi kalau pribadi semacam ini berjangkit kepada tokoh nan punya kedudukan apalagi punya wewenang untuk memutuskan sesuatu yang bisa berlaku ke seluruh negeri.

Pertanyaannya, adakah tokoh yang seperti ini? Semoga tidak ada, namun kalau pun ada semoga ia segera dibebaskan dari cingeng nan cinging.

Kalau suatu saat leher Anda gampang terasa kaku dan pegal inilah ***cengeng*** (harus Anda ucapkan seperti mengatakan pegel, kesel; bukan seperti mengatakan cewek tadi). Konon, sejumlah ahli kesehatan berkilah, bahwa apa yang terasa di leher Anda, itu dapat menjadi salah satu penanda kesehatan organ tubuh.

Taruhlah sering terasa kaku, atau kenceng atau bisa juga pegal, entah di bagian kiri entah pula kanan atau di tengkuk; konon katanya itu symptom suatu penyakit. Ringkasnya, apabila Anda merasa ***cengeng, yaitu gulune gampang kaku lan pegel*** sebaiknya waspadailah dan beri pertolongan pertama untuk dirimu sendiri entah dengan cara digosok-gosok balsam (kalau ada), atau sekurang-kurangnya dipijit-pijit sendiri.

Lengkaplah sudah, yakni hari gini, ketika siapa saja harus berpikir dan bersikap taft (kuat) mengingat kondisi Negara Indonesia maupun dunia memang sedang sangat memerlukan orang-orang kuat dalam segala hal; mari hindari berpikir dan bersikap cingeng, cinging, dan cengeng.

Kita harus sehat lahir batin, *mensana in corpore sano*, sehat dan siap menyumbangkan pikiran dan sikap yang kuat seraya menjauhkan diri dari gampang nangis merengek-renek, gampang lara, dan gampang kaku pegel gulune.

Dalam konteks hari raya Paskah yang sedang dirayakan, sangat jelas berpikir dan bersikap yang taft seperti itu dicontohkan dengan sangat jelas dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus.

la benar-benar sengsara, la benar-benar wafat, la benar-benar bangkit; dan semua itu dilakoninya secara kuat, *ora gampang nangis, ora gampang lara, lan ora gampang kaku/pegel gulune, apa maneh kaku atine. Ora!*

<https://suarabaru.id/2022/04/18/hari-gini-bersikap-kuatlah-aja-cingeng-cinging-lan-cengeng-part-3/>

Kesatria Zaman Now: Tinggalkanlah Dhemem Moyoki, Mojoke, lan Magoli (Part 4)

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga,**

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang

Ada sekurangnya tiga pola relasi sosial yang menjadikan kita maju mundur, berarti *ora maju-maju*; yakni banyak orang yang terpenjara dan justru menjadi kesukaan bersikap lewat ***dhemem moyoki, mojoke, lan magoli liyan.***

Mari kita amati baik-baik dan cermat, bagaimana reaksi orang pada umumnya manakala mendengar atau melihat sendiri ada orang lain yang sukses.

Sangat sedikit yang bersikap kagum (mengagumi) atau salut (hormat), karena pada umumnya orang bersikap iri, bahkan mencari-cari sisi negatif orang itu seraya bergumam: “*Mokal (ora mungkin) bisa sugih yen ora ngingu thuyul,*” misalnya.

Gumaman seperti itu contoh konkret reaksi ora pada umumnya ketika ada teman atau tetangga yang sukses menjadi kaya dengan “menuduh” si kaya itu berbuat tidak ketemu nalar karena memiliki thuyul.

Moyoki, Mojoke, lan Magoli

Lebih menyedihkan lagi adanya sikap dan komentar terhadap orang yang (sedang) gagal, kena musibah, atau mengalami kesedihan; karena orang-orang justru sering memanfaatkan kesempatan untuk ***moyoki, mojoke, lan magoli.***

Dengan kata lain, melihat derita atau sengsara pihak lain, sebagian (banyak?) orang justru sering memanfaatkannya untuk *moyoki*, yaitu menertawakan, mencibir, mengolok-olek, bahkan membuat daftar cacat cela orang yang sedang menderita itu.

Rasa simpati apalagi empati semakin terbangun jauh-jauh, apalagi orang yang sedang menderita itu selama ini dipandang sebagai “musuh,” orang jelek, dst. *Moyoki*, juga berarti dicari-cari kesalahannya, kalau perlu dibeber di muka umum.

Pola relasi *moyoki* memang semakin menjadi-jadi manakala orang itu “sedang tidak berdaya,” bahkan bisa berlanjut orang yang sedang menderita tidak berdaya itu semakin dipojokkan seraya ditunjuk-tunjukkan kesalahan atau kelemahannya.

Inilah pola relasi **mojoke**. Bacalah *mojoke* ini seperti Anda berkata “pokoke,” atau “makan sate.” Intinya, sudah jatuh tertimpa tangga pula, karena sedang tidak berdaya, sementara orang-orang lainnya justru menyudutkan dia dengan segala argumentasinya.

Dan minta ampun betapa sadisnya pola relasi sosial itu ketika orang yang sudah jatuh tertimpa tangga itu akan bangkit, justru ada saja pihak-pihak **sing magoli**. Artinya, upayanya untuk bangkit/berdiri dihalang-halangi, sekurangnya diganggu jangan sampai terjadi.

Lengkaplah penderitaan orang (sedang gagal) seperti ini oleh pola relasi sosial yang salah-kaprah: *moyoki, dilanjut mojoke, dan dilengkapi magoli..*

Itu bukti konkret betapa ada saja orang-orang yang tidak kesatria terhadap orang lain, karena yang dilihatnya selalu aspek negatif pihak lain itu, dan pada saat pihak lain itu sedang susah, semakin menjadi-jadilah sikap dan komentar-komentar negatifnya.

Karena itu, mari kita tinggalkan sikap-sikap semacam ini, karena memang sangat menghalangi kita bersemangat maju. Tinggalkanlah **dhemen moyoki, mojoke, lan magoli liyan**, dan mari melangkah maju dengan potensi dan kemauan baik setiap pribadi.

Percayalah, setiap pribadi itu punya potensi dan kemauan baik untuk maju dan berkembang, asal saja ia berani melawan pola relasi sosial yang salah tadi. Cara terbaik untuk keluar dari “penjara” itu salah satunya ialah **selalu berpikirlah positif tentang apa saja dan terhadap siapa saja**. Inilah sikap kesatria zaman now.

<https://suarabaru.id/2022/04/24/kesatria-zaman-now-tinggalkanlah-dhemen-moyoki-mojoke-lan-magoli-part-4/>

Mari Kita Kaji: Siapa Sebenarnya Kemaruk, Kemecer, dan Nyidham?

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga**

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang dan UNS

Tulisan saya minggu lalu tentang “Modal sukses Pilpres 2024: Sabar, Sareh, lan Tawekal” direspons oleh seorang sahabat dengan pertanyaan: “Tidak perlu uang bermilyar-milyar, ya?” Spontan saya menjawab, “Sudah ada yang menyediakan, kok!”

Dalam konteks seperti ini, baik penanya maupun si penjawab sama-sama “melucu/berkelakar” saja karena bukan tentang uang yang sedang dibicarakan, melainkan tentang modal mental(itas) individu yang memang ingin mencalonkan diri berikut partai politiknya.

Masih ingin melanjutkan pembahasan tentang topik Pilpres 2024 itu, setelah kita bahas tentang modal mental(itas) individualnya, sekarang kita mematangkan lagi lewat pertanyaan ini: Siapa sebenarnya paling kemaruk, kemecer dan nyidham terkait Pilpres 2024 ini?

Apakah individu yang bersangkutan, yaitu tokoh yang sering disebut-sebut di berbagai jajak pendapat itu yang memang kemaruk, kemecer, dan nyidham? Atau parpol yang memang bertujuan untuk menggerakkan kader-kadernya dalam pemanasan mesin politik?

Ataukah justru lembaga survey sehingga dengan tampilnya berbagai hasil survey berikut perbandingannya antara satu lembaga survey dengan lembaga lainnya; semakin serulah isu-isu Pilpres 2024? Dan jangan lupa, selalu tampil juga kelompok-kelompok pendukung calon, dan sudah barang tentu kelompok pendukung itu menguji juga strategi mereka masing-masing.

Singkat kata, sangat boleh jadi, ada sejumlah pihak yang memang kemaruk, kemecer dan nyidham Pilpres 2024; dan semua itu sah-sah saja, dan semakin berkualitas adu strateginya, semakin menariklah bagi masyarakat, lebih-lebih jika disertai pendidikan politik yang elegan.

Kemaruk

Dalam percakapan sehari-hari, kemaruk sering dikhususkan untuk menyatakan bahwa seseorang sedang suka makan banyak karena satu dua alasan, seperti baru saja sembuh dari sakit, mumpung ada karena beberapa waktu yang lalu mengalami kekurangan; atau karena menu yang disantapnya enak-enak sehingga mengundang selera makan. Intinya, dalam percakapan sehari-hari, kemaruk terucapkan ketika ada kaitannya dengan porsi makan atau pun makanannya.

Makna kedua, kemaruk ialah bungah utawa umuk banget amarga duwe apa-apa kang wingi-wingi durung/ora diduweni. Artinya, seseorang atau kelompok sedang sangat bahagia, bangga, bahkan menyombongkan diri karena sudah memiliki sesuatu/seseorang yang selama ini belum pernah dimilikinya.

Punya mobil baru misalnya, barang itu dibangga-banggakan, dipamerkan seraya jalan putar kampung. Orang seperti itu disebut sedang kemaruk, apalagi sudah sangat lama ia kepingin sekali memiliki mobil.

Nah, dalam kaitannya dengan Pilpres 2024, makna kemaruk seperti inilah yang saat ini sedang “mengharu-biru” dan membuat semua pihak berbunga-bunga, entah itu partai politisi, relawan/pendukung, bahkan mungkin juga lembaga survey serta masih ada pihak lainnya lagi.

Mengapa mereka kemaruk? Siapa tidak bangga atau diumuk-umukake kalau si Badu hampir selalu ada di ranking satu dalam jajak pendapat? Partai politik mana tidak “sombong” ketika ada kadernya melejit naik semakin tinggi? Boleh dan sah-sah saja mereka kemaruk.

Kemecer dan Nyidham

Kemecer, bacalah seperti Anda mengucapkan melempem, juga berkaitan dengan rasa ingin sekali (kepingin) terhadap makanan; bahkan saking kepinginnya, orang sampai ngulu idu, menelan ludah. Siapa ora kemecer di siang terik melihat penjual dawet cendhol di bawah pohon waru?

Saking kepinginnya, orang bisa saja clegukan, jakun ini naik turun, seraya cleguk, cleguk. Bagi orang yang sedang hamil, konon, rasa kepingin banget seperti itu dirumuskan dengan kata kumudu-kudu yakni tidak boleh tidak harus dipenuhi keinginannya. Itulah nyidham, ada juga yang mengatakan ngidham.

Bagaimana kemecer dan nyidham ini dengan Pilpres 2024? Wouw... jelas sekali kaitannya. Merasa punya “barang dagangan” anyar, wah... banyak pihak berbunga-bunga. Apalagi, kalau lembaga survey merilis ranking atas hasil surveynya dengan

didahului ungkapan kalimat: “Jika Pilpres diselenggarakan hari ini, Anda akan memilih ...” Kemecer deh ...

Terasa Dekat

Tahun 2024, jika dilihat dari Juni 2022 ini, kelihatannya masih jauh, sebutlah dua tahun lagi. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah dilanda kemaruk, kemecer, dan apalagi seolah-olah wis nyidham; waktunya sudah dilihat dekat dan dekat. Sedolah-olah tinggal telung ududan, tiga kali lagi menghisap rokok. Benarkah begitu?

Mari kita sekarang melihat bukan saat-saat nyidhamnya seseorang, tetapi saat-saat menunggu kelahirannya. Kalau nyidham, rasanya kok serba enak-enak, dalam arti keinginan yang mau tidak mau harus diusahakan pemenuhannya, dan keinginannya itu pada umumnya serba enak kalau bukan aneh. Namun, saat-saat menunggu kelahiran, inilah saat sakral bagi semua pihak. Orang melahirkan itu ibaratnya orang yang toh nyawa, nyawa dan hidupnya adalah taruhannya.

Artinya, mereka dan semua pihak yang saat-saat ini sedang kemaruk, kemecer dan nyidham; hendaklah kelak pada waktunya, siap memasuki saat sacral karena menunggu lahirnya seorang pemimpin. Di sinilah ujiannya bagi siapa pun.

Koran Tempo-Tempo.co

<https://suarabaru.id/2022/06/19/mari-kita-kaji-siapa-sebenarnya-kemaruk-kemecer-dan-nyidham>

Modal Sukses Pilpres 2024: Sabar, Sareh, Tawekal

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga**

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang dan UNS

Apakah sabar, sareh, dan tawekal itu berbeda? Di mana letak perbedaannya? Dan dalam konteks Pilpres serta Pemilu 2024, ada perbedaan nuansa seperti apa sih ketiga kata itu?

Mengawali sebuah uraian, tulisan, atau pun analisis berupa sejumlah pertanyaan, sekurang-kurangnya menandakan dua hal; pertama, permasalahan atau pun konteks bahasan terlalu kompleks; dan kedua, (sekedar) untuk daya tarik saja agar seolah-olah keren dan “ngilmiah.”

Jika Anda rela menyediakan waktu sejenak saja untuk membaca tulisan ini sampai selesai, salah satu dari dua hal itu akan terjawab. Sebentar saja, sabar, nggih!

Sabar, sareh, lan tawekal, ketiganya berkaitan dengan mentalitas dan olah kepribadian setiap individu dalam/ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan (a) durasi waktu, (b) gradasi permasalahannya, dan (c) dorongan hati setiap individu.

Dari sisi arti atau makna kata, ketiganya beda-beda tipis saja; karena sabar itu ada makna sareh dan tawekalnya. Dalam percakapan sehari-hari, kata sabar terhitung paling sering terlontar atau diucapkan manakala ingin mengingatkan, menghibur, atau pun bahkan “memaksa” orang lain. Untuk bersikap, “mBok sing sabar,” contohnya.

Sabar, boleh juga ditambah menjadi sabar drana, maknanya sangat berkaitan erat dengan sikap mental pengendalian emosi, karena memang arti kata sabar ialah, satu, sareh enggone nandhang utawa ngarep-arep (bacalah sareh seperti Anda mengucapkan akeh, gurameh saleh); yakni seseorang itu penuh kesabaran dalam penantian atau pun harapan. Dan arti keduanya ialah ora cepak nepsune, tidak gampang marah.

Dalam makna yang sangat berkaitan dengan sikap mental pengendalian emosi inilah, ada Amsal mengajarkan tiga kata kunci sabar sangat bagus, yaitu orang yang sabar itu besar pengertiannya, orang yang sabar itu memadamkan perbantahan, dan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Siapa, hayo, contoh orang (sabar) seperti ini?

Sareh lan Tawekal

Adapun sareh, makna terdalamnya berkaitan dengan sikap mental pengendalian waktu dan olah pikir yang jitu, sehingga ora kesusu, tidak serba tergesa-gesa; dan di dalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan waktu dan olah pikirnya itulah mengesankan orang itu cool, adem, lere, bikin tenang, berkepala dingin. Siapa, hayo, contoh orang (sareh) seperti ini?

Sedangkan yang berkaitan dengan tawekal, kiranya perlu diberi penjelasan agak panjang lebar. Dalam Baoesastra Djawa, yang dapat dijumpai adalah kata tawekal, sedang dalam KUBI, yang terjumpai adalah kata tawakal. Apakah sama makna maupun artinya? Tawekal memiliki tiga makna/arti, -dan inilah yang sedikit membedakannya dari tawakal-; yaitu (1) sabar sarta sareh ing sajroning nandhang kasusahan, betapa seseorang begitu mengendalikan emosi dan nalarnya dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, atau pun penderitaannya; (2) kukuh sarta sentosa atine, seseorang yang bersikap kokoh/kuat hati; dan (3) kumandel, ora jirih; seseorang yang bersikap pemberani tanpa ada rasa takut kepada siapa/apa pun. Sementara itu, tawakal menurut KUBI dimaknai dengan “orang yang berserah diri dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan.”

Pemilu dan Pilpres 2024

Sabar, sareh, lan tawekal adalah modal bahkan kunci sukses baik dalam pemilu 2024 maupun Pilpres 2024. Modal dan sukses bagi siapa? Bagi siapa pun, terutama bagi perseorangan yang mau mencalonkan diri, bagi partai politik, maupun bagi penyelenggaranya. Semua pihak hendaklah bermodalkan sabar, sareh lan tawekal. Seperti apa logika (politiknya)?

Pertama, Anda para calon dan penyelenggara, hendaklah membulatkan sikap mental pengendalian emosi, pengendalian waktu, dan olah pikirmu karena semua proses berikut jadwalnya sudah ada dan ditetapkan.

Oleh karena itu, kedua, cermatilah baik-baik 9 (sembilan) proses, kegiatan, dan jadwalnya, seperti (i) pemutahiran data pemilih, 14 Oktober 22 – 21 Juni 2023; (ii) pendaftaran dan verifikasi, 29 Juli 22 – 13 Desember 22; (iii) penetapan peserta pemilu, 14 desember 22; (iv).

Penetapan jumlah kursi dan dapil, 14 Okt 22 – 9 Februari 23; (v) pendaftaran dan penetapan calon DPD, 6 Des 22 – 25 Nov 23; (vi) pendaftaran dan penetapan calon DPR, 24 April 23 – 25 Nov 23; (vii) Pendaftaran dan penetapan Capres/Cawapres, 19 Okt 23 – 25 Nov 23; dan (viii) masa kampanye, 28 Nov 23 – 10 Februari 24; baru kemudian (ix) ada masa tenang empat hari sampai dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ketiga, sabar, sareh, lan tawekal memang ketiganya saling melengkapi, tidak ada satu lebih utama dari satunya; tidak perlu lalu Anda mengutamakan tawekal saja tanpa memedulikan sabar lan sareh, atau sebaliknya. Jalanilah bersama-sama dalam kolaborasinya: ya sabar, ya sareh, lan ya tawekal..

Menggunakan bahasa agama, kolaborasi terbaik tentu ketika pikir/nalar, bertemu hati, dan kemudian itulah yang melandasi kegiatannya. Dalam olah tubuh agama saya, itu semua ditandai dengan mengawali apa pun selalu melakukan olah tubuh: memegang/menyentuh dahi, menepuk dada, dan lalu menepuk bahu kiri dan kanan.

Melihat proses, kegiatan dan jadwal di atas, muncul pertanyaan amat besar/penting, yakni, mengapa jadwal kegiatan vii, yakni pendaftaran dan penetapan capres/cawapres 19 Okt 23 – 25 Nover 23, selama 38 hari itu, saat ini sudah mulai sangat heboh?

Padahal sebelum hari-hari itu, sudah ada sejumlah kegiatan lain yang juga sangat menentukan bagi siapa pun. Jawabannya, itulah magnet pilpres yang dalam konteks pemilihan umum 2024 nanti menjadi sangat-sangat spesial. Oleh karena itulah siapa capres dan cawapresnya juga dipandang sangat 3 S: spesial, strategis, dan seksi.

Maka, kepada Anda yang mungkin cenderung emosional, kendalikanlah emosimu; bagi saudara yang sering kesusu kurang sabar, sarehlah; dan semua pengendalian sikap mental itu terakumulasi dalam tawekalmu. Selamat berjuang dalam berkat Tuhan.

<https://suarabaruu.id/2022/06/13/modal-sukses-pilpres-2024-sabar-sareh-tawekal>

Kemlinthi, Kemlancang, Kemlungkung, Kementhus Vs Pimpinan Muring Bengkulu

Oleh: **JC Tukiman Tarunasayoga**

Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, Semarang dan UNS

Pernahkah Anda marah? Jawabannya pasti, pernah; dan ketika ditanyakan lagi, kemarahanmu termasuk marah kecil atau marah besar (*muring bengkala*, Jw), serta merta ada jawaban berupa pertanyaan meledek begini: “Ketika Anda marah, saat itu posisi Anda sedang sebagai pejabat/pimpinan, sedang sebagai politisi, atautkah sedang sebagai orang biasa-biasa saja?”

Mengapa demikian? Konon, orang marah itu ada kastanya. Ketika Anda marah dan saat itu sedang duduk sebagai pejabat/pimpinan, bisa jadi Anda sedang dalam kondisi *golek-golek*, yaitu mencari-cari, entah apa yang sedang Anda inginkan atau cari. “*Lagi kurang sajen*,” begitu sering kita dengar seloroh anak buah yang sudah hafal betul dengan perangai berbagai pimpinannya.:

Bagaimana halnya kalau yang marah-marah itu politisi? “Itu sedang main drama,” jawab si Dadap ketika sedang ngobrol santai bersama Badu dan Banu. Rupanya Dadap mau menjelaskan, gradasi kemarahan atau marah-marahnya politisi itu harus dilihat konteks luasnya dan jangan terfokus kepada omongan yang keluar saat dia sedang marah-marah, atau bahkan sedang *muring bengkala*, yaitu sedang marah besar sekali pun.

Termasuk muring bengkala apabila orang itu lalu mengata-katai siapa pun (tetapi umumnya justru teman sejawatnya yang dianggap rivalnya) dengan ungkapan, seperti: “Dia itu *adol bagus, kemlinthi, kemlancang, kumalungkung, kementhus*.” Ada juga politisi yang justru ungkapannya itu *glenyengan*, yaitu seolah-olah berkelakar, padahal marah, semisal mengatakan: “*Ya aku to capres-e!*”

Inilah yang disebutkan konteks luas tadi, yaitu agaknya saat ini dalam rangka pemanasan mesin politik dan “penawaran figur” para elite sedang mulai turun

gunung seraya membawa oli pelumas agar mesin politik mulai berputar-putar. Dan dalam rivalitas sesama partai, mengata-katai **kemlinthi** tadi muncul, padahal sangat bisa jadi dia sendiri juga *kemlinthi*; atau boleh jadi yang mengata-katai “*mung adol bagus thok*,” dia sendiri tanpa sadar *jan-jane ya lagi adol ayu*, misalnya.

Arti Kemlinthi

Jujur saya katakan, tidak ditemukan dalam **Baoesastra Djawa** terbitan tahun 1939, -entah kalau terbitan yang lebih baru-, kata *kemlinthi* itu; dan ketika saya uber ke kata atau ungkapan lainnya, agaknya arti *kemlinthi* itu senada dengan **kemlancang, kemlungkung, dan kementhus**.

Seseorang disebut **kemlancang** (akar katanya lancang) ketika dia sudah **tumandang dhisiki parentah utawa pakem**. *Intinya, belum ada aba-aba apa pun*, belum ada sinyal menyala, orang itu sudah mulai bergerak.

Salahkah kemlancang seperti itu? Jawabnya lihat konteksnya: Kalau konteks pemilu, wouw... itu pasti salah besar; tetapi dalam konteks kepartaian yang mesin politik segera berputar panas, **jan-jane ya kudune malah matur nuwun**.

Kemlungkung atau sering juga disebut *kumalungkung*, memiliki makna **ambeg linuwih**, yaitu bergaya lebih; atau kalau menggunakan ungkapan zaman now ya lebay. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang lebay: Sini atau situ, he...he... he... Dan bagi orang yang termasuk kelas berat kemlungkungnya, orang itu disebut **kementhus atau juga kumenthus**,

Makna kata **kementhus (kumenthus) ialah ambeg wani, ambeg pinter**, lebay-nya tertuang dalam gaya omong atau bersikap yang mengesankan sok pinter dan sok berani. Di sinilah titik pangkal para pimpinan, ataupun dia yang juga sering merasa “aku nih pimpinan lho,” *muntap* (marah) dan sangat boleh jadi marah besar, *muring benggal*.

Rasanya perlu dicatat bagi semua pihak atau siapa saja betapa sebaiknya semua pihak “**Aja kesusu**,” janganlah tergesa-gesa; termasuk sebaiknya jangan tergesa-gesa *muring benggal* sekali pun itu taruhlah “hanya bermain drama.”

Terhadap teman sendiri, saudara sebangsa setanah air, mengapa harus mengata-katai teman yang jika dirasakan kata-kata itu sudah tergolong pedes level empat lho. Siapa pun tidak mau dong disebut-sebut kementhus; dan sebetulnya akan lebih mengena ketika siapa pun menggunakan bahasa kasih pada saat mau menegur: “Mas...mas ...aja dipleroki.....Masmas.....mas aja dipoyoki.” Percayalah, menegur atau mengingatkan teman dengan/lewat bahasa kasih, pasti jauh akan

menghasilkan buah-buah manis sebagaimana kita inginkan bersama. Kita tidak ingin buah-buah pahit, kan?

<https://suarabaru.id/2022/06/05/kemlinthi-kemlancang-kemlungkung-kementhus-vs-pimpinan-muring-benggala/>

Cara Olah Susu Untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi Susu Segar

Oleh: **Laksmi Hartajanie,**

Dosen Teknologi Pangan, Unika Soegijapranata

Susu sapi memiliki kandungan gizi lengkap sehingga merupakan bagian dari makanan seimbang karena kaya akan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Susu sapi segar mengandung 3-4% lemak, 3,5% protein, dan 5% laktosa (FAO.org). Di samping itu, susu memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk menunjang kesehatan tubuh, yaitu kalsium, fosfor, zinc, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin B2, asam amino, dan asam pantotenat (cimory.com).

Meskipun nilai gizinya tinggi, tingkat konsumsi susu di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021, tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia tahun 2020 adalah 16,27 kg/kapita/tahun. Angka ini masih di bawah Malaysia 36,2 kg/kapita/tahun, Myanmar 26,7kg/kapita/tahun, dan Thailand 22,2 kg/kapita/tahun (Bisnis.com).

Nilai gizinya yang tinggi menyebabkan susu mudah mengalami kerusakan oleh mikroorganisme. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar. Mikroorganisme yang berkembang di dalam susu menyebabkan susu menjadi rusak sehingga membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Pengolahan Susu

Penanganan susu yang tepat dapat meminimalkan kerusakan oleh mikroorganisme sehingga susu dapat disimpan lebih lama. Selanjutnya dengan teknologi pengolahan sederhana dapat diperoleh berbagai produk olahan susu sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi susu segar.

Ada beberapa teknologi pengolahan sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan peternak untuk mengawetkan susu. Di antaranya pasteurisasi (susu pasteurisasi), pemekatan (susu kental manis dan susu evaporasi), dan fermentasi (yoghurt, yakult, dan kefir).

Dengan metode pengolahan ini, umur simpan dapat diperpanjang dan dihasilkan susu yang memiliki flavor dan tekstur yang berbeda sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut. Selain itu, proses pengolahan dengan metode fermentasi menghasilkan susu yang aman untuk diminum penderita intoleransi laktosa.

Dengan teknologi pengolahan dapat diperoleh berbagai produk olahan susu yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, memperpanjang umur simpan, mempermudah pemasaran dan transportasi dan meningkatkan daya guna susu sebagai bahan bakunya. Proses pengolahan susu selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu di bidang teknologi pangan.

Simulasi perhitungan produk olahan susu seperti yang ditampilkan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi tampak bahwa pengolahan susu segar dapat memberikan keuntungan dan berpotensi untuk dikembangkan.

| No. | Jenis Produk | Komponen Biaya | | Jumlah |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Yoghurt (skala 10 liter) | A | Biaya produksi: susu, kultur, gula, botol, tenaga kerja, penyusutan alat | Rp 100.000 |
| | | B | Penerimaan (20 botol @500 ml) @ Rp. 15.000 | Rp 300.000 |
| | | C | Keuntungan | Rp 200.000 |
| | | D | Profitabilitas (C/A x 100%) | 200% |

Tabel 1. Analisis Ekonomi Usaha Produk Olahan Susu Sapi

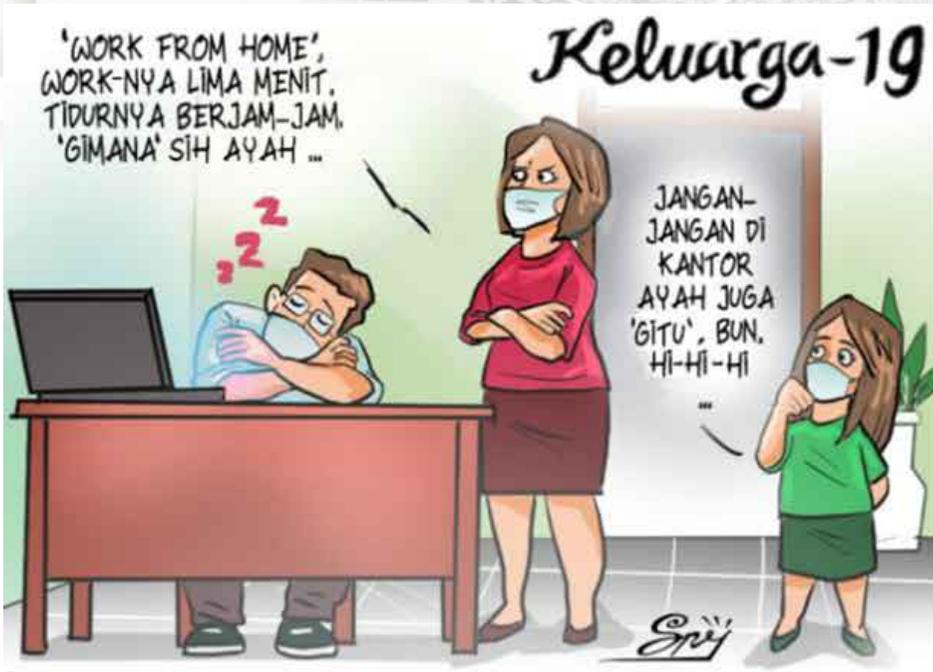
Penutup

Peternak susu sapi perah sebenarnya berpotensi untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi susu segar dengan menerapkan teknologi pengolahan susu sederhana. Biaya investasi memang relatif lebih tinggi dibanding susu segar. Namun, teknologi ini mampu memperpanjang umur simpan susu dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kebijakan terkait untuk pelatihan, permodalan, dan pendampingan kepada peternak dapat membantu tercapainya peningkatan ketahanan pangan peternak.

<https://betanews.id/2021/08/cara-olah-susu-untuk-tingkatkan-nilai-ekonomi-susu-segar.html>

Tidak Cukup Hanya Bekerja dari Rumah



Oleh: **Margaretha Sih Setija Utami,**

Dosen Psikologi Kesehatan Keluarga Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata

Kebijakan bekerja dari rumah saja tak cukup untuk mencegah penularan Covid-19. Ini baru efektif jika setiap rumah memiliki fasilitas bekerja dan belajar yang memadai, sarana hiburan, dan tetangga yang saling dukung.

Seorang tenaga administrasi menunduk lemas saat diberi tahu bahwa kantornya memutuskan seluruh karyawan harus bekerja dari rumah. Terbayang olehnya beratnya tugas yang akan dia hadapi. Dia harus bergantian komputer dengan anak dan suaminya yang juga bekerja dari rumah, padahal target kerja dari kantor tidak berubah.

Tidak hanya permasalahan komputer, masalah berperan ganda tanpa batas waktu juga membuatnya merasa sangat capai. Rumahnya yang sangat sederhana tidak memungkinkan orangtua dan anak bekerja dan belajar bersamaan. Akibatnya, orangtua membebaskan anak-anak belajar dan bermain di luar rumah. Para bapak "mengungsi" di tempat yang menyediakan Wi-Fi dan para ibu mengerjakan pekerjaan kantor di rumah sambil menyelesaikan pekerjaan domestik dan mengerjakan PR anak daripada repot mendampingi belajar anak.

Saat ini BDR (bekerja dari rumah) masih sering dipakai saat kasus Covid-19 melonjak. Efektifkah?

Hasil penelitian Crandall dkk (2020) menunjukkan bahwa keluarga dapat menyebabkan anggotanya menjadi sehat apabila mencakup empat aspek, yaitu kecukupan sumber daya, adanya emosi sehat, gaya hidup sehat, dan mempunyai dukungan sosial dari luar.

Pertama, sumber daya. Bekerja dari rumah sangat cocok untuk masyarakat kelas atas yang mempunyai rumah besar yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus kantor, banyak hiburan di dalam rumah, dan ada aturan ketat dalam hidup bertetangga. Masyarakat yang hidup di dalam rumah petak, tidak ada hiburan di dalam rumah, dan antartetangga hidup berdesakan yang tidak dapat saling mengingatkan tentang gaya hidup sehat akan sulit mencegah penularan Covid-19.

Kedua, kesehatan emosi. Penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2020 menunjukkan, selain menyebabkan jam bekerja menjadi sangat cair sehingga sering tanpa batas waktu, terutama bagi para perempuan, BDR juga menghilangkan kesempatan bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini menimbulkan perasaan terisolasi dan kehilangan makna dari sebuah pekerjaan. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan lebih dari 41 persen masyarakat dari 15 negara yang BDR selama pandemi Covid-19 menjadi stres.

Menyedihkannya, kebanyakan anggota masyarakat berusaha menghilangkan stres dan kejenuhan di dalam rumah dengan melakukan kegiatan di luar rumah. Akibatnya timbul kerumunan dan mobilitas tinggi yang berujung penularan Covid-19.

Ketiga, selain emosi positif, gaya hidup sehat juga penting untuk pencegahan penularan Covid-19. Sayangnya protokol kesehatan berupa 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) bukanlah gaya hidup masyarakat kita.

Akan sangat baik apabila rumah menjadi tempat belajar masyarakat tentang gaya hidup sehat. Gerakan bersama dari komunitas terkecil dalam masyarakat sangat diperlukan.

Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan gerakan yang sangat efektif untuk menularkan gaya hidup sehat. Sayangnya, belum terdengar gerakan PKK terkait pencegahan Covid-19, padahal gerakan PKK sudah berhasil

membiasakan warga mengurangi jentik nyamuk untuk mencegah demam berdarah dan meningkatkan gizi anak melalui program posyandu.

Keempat, Crandall dkk (2020) juga menyatakan bahwa keluarga sehat adalah keluarga yang percaya bahwa mereka mempunyai relasi sosial yang baik dan tolong-menolong dengan tetangga. Program Jogo Tonggo sangat bagus membantu anggota masyarakat yang terdiagnosis tertular Covid-19, dengan memberikan makanan dan vitamin. Namun, Jogo Tonggo belum menggerakkan masyarakat untuk saling menjaga supaya tetap sehat. Saat ada tetangga yang tidak pakai masker, kebanyakan masyarakat sungkan mengingatkan. Lebih mudah memberi vitamin C daripada mengingatkan tetangga untuk pakai masker.

Dapat disimpulkan bahwa BDR akan efektif menurunkan Covid-19 apabila, pertama, setiap rumah mempunyai fasilitas bekerja dan belajar yang memadai sehingga anggota keluarga tidak perlu keluar rumah mencari tempat khusus, komputer, sinyal, ataupun Wi-Fi. Kedua, rumah merupakan tempat yang membahagiakan bagi penghuninya sehingga tidak perlu mencari hiburan di luar rumah. Ketiga, relasi antartetangga saling mendukung untuk hidup sehat bersama sehingga gaya hidup sehat bukan milik individu tertentu saja, tetapi milik satu komunitas sehingga tidak saling menularkan penyakit.

Pandemi Covid-19 telah menyadarkan kita masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah dengan fasilitas yang memadai dan informasi kesehatan yang tepat. Kementerian perumahan rakyat perlu diaktifkan lagi sehingga masyarakat dapat membangun rumah yang dapat sebagai tempat tinggal sekaligus tempat bekerja.

Selain itu, penyediaan informasi kesehatan yang tepat dan mudah dijangkau masyarakat untuk pencegahan penularan Covid-19 sangat penting. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak belajar dari media sosial. Berbagai informasi, baik yang benar maupun yang tidak benar, mengalir dengan deras kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian tim dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata diketahui jumlah sumber informasi tidak menyebabkan literasi kesehatan tinggi. Kejelasan informasi yang meningkatkan literasi kesehatan. Sayangnya, hanya 40,7 persen partisipan penelitian tersebut yang menyatakan tidak bingung terhadap informasi terkait Covid-19. Sebanyak 59,3 persen menyatakan bahwa mereka bingung terhadap berbagai informasi Covid-19 yang bersimpang siur dan sering bertolak belakang. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu ditingkatkan dalam mengatur informasi yang beredar sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Semoga kebijakan BDR sungguh meningkatkan kesehatan masyarakat, tidak justru memindahkan kluster penularan Covid-19 dari tempat kerja ke perumahan.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/01/tidak-cukup-hanya-bekerja-dari-rumah>

Hari Kesehatan Dunia: Kiprah dan Pekerjaan Rumah Indonesia

Oleh : **Perigrinus H Sebong,**

Dosen FK Unika Soegijapranata, Peneliti Kesehatan Global

Seruan global "Our planet, our health" ibarat pendulum yang berayun dari arah kesehatan antroposentris ke ekosentris. Kacamata ekosentris melihat bahwa manusia dan semua bentuk kehidupan bagian yang saling berhubungan.

Tanggal 7 April 2022 diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia sekaligus hari lahir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, 74 tahun silam.

Peringatan Hari Kesehatan Dunia kali ini mengangkat tema "*Our planet, our health*". Hemat penulis, tema ini menarik karena, pada bulan yang sama, kita juga memperingati Hari Bumi, tepatnya 22 April. Dengan demikian, tema "*Our planet, our health*" menjadi penting untuk kita cermati secara saksama.

Sekilas, tema ini lebih merupakan seruan kesadaran bersama bahwa untuk tetap sehat manusia membutuhkan ekosistem planet Bumi yang sehat pula. Namun, untuk konteks Indonesia, apa benar demikian? Untuk menjawabnya, mari kita mencermati kiprah Indonesia dalam kancah kesehatan global.

Meskipun baru bergabung tahun 1950, kontribusi Indonesia terbilang cukup membanggakan.

Kiprah Indonesia

Kiprah Indonesia di kesehatan global tentu tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai anggota WHO yang tergabung dalam South East Asia Regional (SEARO). Meskipun baru bergabung tahun 1950, kontribusi Indonesia terbilang cukup membanggakan.

Indonesia termasuk yang paling aktif memerangi musuh utama WHO kala itu, seperti malaria, TBC, filariasis, cacar, malanutrisi, dan kematian ibu.

Tahun 1958-1967, bersama Myanmar dan Sri Lanka, Indonesia gencar menjalankan program eradikasi malaria melalui Komando Operasi Pemberantasan Malaria (Kopem). Memasuki era 1968-1977, lahirnya slogan "*Health for All by the Year 2000*" sebagai paradigma baru pembangunan kesehatan menjadi momentum istimewa bagi Indonesia.

Kala itu, pengobatan tradisional mulai diperhatikan, termasuk jamu tradisional yang mulai dikenal masyarakat dunia. Periode 1978-1987, Konferensi Alma Ata di Kazakhstan melahirkan konsep *primary health care* (PHC).

Konsep ini bertujuan menjamin masyarakat bisa mendapatkan perawatan kesehatan ketika membutuhkan. Indonesia memprakarsai PHC melalui terbentuknya puskesmas.

Tahun 1988-1997, Jakarta dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Ke-4 tentang Promosi Kesehatan tahun 1997. Dari konferensi inilah lahir komitmen bersama penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pendekatan komprehensif dan kemitraan.

Periode 1998-2018, Indonesia turut menyukseskan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan ikut serta meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Selain itu, rekomendasi Universal Health Coverage untuk keadilan kesehatan (*health equity*) direspons Indonesia melalui regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2018 hingga sekarang, bersama dengan 217 negara, Indonesia gencar menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 dan mendukung upaya global untuk penanggulangan krisis kesehatan yang dipelopori WHO.

PR selanjutnya

Rekam jejak kontribusi nyata Indonesia terhadap kesehatan global sejak 1950 hingga sekarang ternyata tidak serta-merta membuat Indonesia bebas dari masalah kesehatan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menambah daftar pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Pekerjaan rumah yang pertama adalah Indonesia saat ini termasuk dalam urutan ke-20 predikat negara terpolusi di dunia. Rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia berkurang dua tahun akibat polusi udara.

Polusi akibat kebakaran hutan menyumbang penderita gangguan pernapasan sebesar 71,4 persen dan penurunan fungsi paru-paru. Tidak hanya itu, polusi udara juga menyebabkan kematian ibu dan anak-anak. Paparan terhadap polusi udara di rumah tangga menyumbang 45 persen dari total kematian anak di Indonesia (WHO, 2012).

Juga diprediksi kematian prematur akibat polusi udara di Indonesia akan terus meningkat menjadi 90.000 per tahun hingga 2030, terutama pada perempuan dan anak-anak.

Kedua, musim panas berkepanjangan akibat perubahan iklim membuat vektor pembawa patogen, seperti nyamuk, semakin gencar menginfeksi manusia. Peningkatan suhu rata-rata harian sekitar 0,95 derajat celsius sejak tahun 2002 telah menjadi ancaman serius.

Alasannya, Indonesia termasuk daerah endemik penyakit tropis, seperti filariasis, malaria, dan demam berdarah (DBD) yang ditularkan lewat nyamuk.

Rekam jejak kontribusi nyata Indonesia terhadap kesehatan global sejak 1950 hingga sekarang ternyata tidak serta-merta membuat Indonesia bebas dari masalah kesehatan.

Perubahan iklim (suhu, kelembaban, dan curah hujan) memengaruhi siklus hidup dan intensitas gigitan nyamuk. Sifat nyamuk yang ektotermik tentu sangat nyaman dengan perubahan suhu karena suhu tubuh nyamuk bergantung pada suhu lingkungan, dan juga akan memengaruhi perilaku nyamuk.

Sebagai contoh *Ae aegypti* memiliki kecepatan terbang maksimum mencapai 34,1 meter per menit pada suhu 32 derajat celsius dan kelembaban 50 persen. Perilaku ini tentu membuat nyamuk betina dewasa memiliki frekuensi gigitannya semakin sering dan apabila ini tidak terkendali akan mempercepat terjadinya wabah penyakit.

Ketiga, tingkat resistansi antimikroba (*antimicrobial Resistance*) akibat penggunaan yang tidak tepat, baik di sektor kesehatan maupun sektor pertanian, cukup tinggi. Penggunaan pestisida dan insektisida secara berlebihan dalam jangka panjang meningkatkan resistansi patogen di tanah maupun di air yang kemudian menjadi inang perantara/pembawa penyakit.

Sebagai contoh, siput air tawar menjadi perantara penyakit cacing trematoda usus manusia dan penyakit *Schistosomiasis*. Selain itu, pengendalian vektor menggunakan bahan kimia telah meningkatkan kekebalan nyamuk *Ae*

aegypti karena resistansi silang pada kelompok insektisida sejenis sehingga memicu kian banyak spesies nyamuk ini di lingkungan kita.

Terakhir, saat ini Indonesia negara ketiga di Asia dengan tingkat deforestasi (penggundulan hutan) tertinggi (21 persen pada 1980-an menjadi 31,5 persen saat ini). Selain meningkatkan potensi bencana alam, deforestasi membuka jalur kontak antara satwa liar, manusia, dan penyakit zoonosis.

Jauh sebelum pandemi korona, para peneliti telah menemukan bahwa satwa seperti kelelawar merupakan inang bagi patogen yang hampir punah akibat deforestasi. Dari 60 spesies virus yang dilaporkan bisa diperantarai oleh kelelawar, sebagian besar telah diketahui menyebabkan penyakit menular pada manusia. Sebagai contoh, deforestasi di negara kita memicu munculnya virus Nipah, *lyssa virus*, dan patogen lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah selanjutnya.

Memperkuat "sense of place" kita!

Seruan global "*Our planet, our health*" ibarat pendulum yang berayun dari arah kesehatan antroposentris ke ekosentris. Sehat tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kita memelihara kebugaran diri kita, tetapi juga cara kita merawat bumi kita sehari-hari.

Kacamata ekosentris melihat bahwa manusia dan semua bentuk kehidupan adalah bagian yang saling berhubungan dalam planet Bumi sehingga keberlanjutan hidup manusia, spesies, dan peradaban bergantung pada keberlangsungan biosfer ini.

Seruan global "*Our planet, our health*" ibarat pendulum yang berayun dari arah kesehatan antroposentris ke ekosentris.

Momentum Hari Kesehatan Dunia mari kita pergunakan untuk meningkatkan *sense of place* dengan lebih memasifkan kampanye kesehatan planet Bumi (*planetary health*) dan mengakomodasi perspektif ekosentris dalam agenda pembangunan kita.

Selain itu, melalui upaya lintas sektor, kita bisa memperlebar literasi masyarakat terkait isu-isu konservasi keanekaragaman hayati dan adaptasi perubahan iklim, mulai dari lingkungan rumah tangga, rumpun keluarga, sekolah, tempat kerja, sampai pada perumusan kebijakan kesehatan.

Dengan demikian, "*Our planet, our health*" adalah metafora yang sederhana, tetapi membuka jalan untuk gerakan baru menyelamatkan keberlangsungan Bumi dan segala isinya.

Selamat Hari Kesehatan Sedunia! Mari menjadi bagian dari gerakan global, menjadi pemengaruh dan pelopor untuk Bumi kita yang lebih sehat.

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/07/hari-kesehatan-dunia-kiprah-dan-pekerjaan-rumah-indonesia>

Kompas 8 April 2022, hal. 6

Menekan Penularan Omicron

Oleh: **Perigrinus H Sebong**,

dosen FK Unika Soegijapranata; anggota NCDI Poverty Network.

Kita berharap masyarakat bisa sesegera mungkin melek informasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang penularan virus Korona varian Omicron, dan mungkin juga kehadiran varian-varian lain ke depan.

SAAT ini masyarakat Indonesia sedang memasuki dan menyaksikan episode baru penyebaran Covid-19 yang dipicu oleh Variant of Concern (VoC) Omicron. Tidak sendirian, Indonesia dan beberapa negara di wilayah South East Asia Region (SEARO), saat ini juga sedang mengalami peningkatan jumlah penderita Covid-19. Meskipun sebelumnya muncul prediksi 55% wilayah di region tersebut, termasuk Indonesia, kebal terhadap SARS-CoV-2 karena vaksinasi dan kekebalan alami pascainfeksi, namun faktanya masih banyak yang terserang Omicron.

Di negara kita, penambahan kasus baru Covid-19 yang dipicu oleh Omicron sejak Januari 2022, makin menambah ketidakpastian masyarakat. Kekhawatiran muncul mengenai seberapa cepat varian Omicron menyebar, bagaimana tingkat severitas atau keparahan yang ditimbulkan, apakah ada perbedaan dari gelombang varian Delta, seperti apa tren gelombang infeksi Omicron akan terjadi?

Pertanyaan tersebut muncul, karena keterbatasan informasi tentang bagaimana kemampuan virus Korona varian Omicron menularkan penyakit, dan apakah vaksinasi yang sudah dijalankan selama ini tidak cukup untuk menangkalnya? Untuk mendapatkan jawaban, mari menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tren pola penyebaran varian Omicron yang menyebabkan kembalinya lonjakan penderita Covid-19.

Tren pola penyebaran gelombang varian Omicron dapat digambarkan melalui beberapa faktor berikut ini. Pertama adalah kondisi kekebalan (individu atau masyarakat). Kekebalan terhadap Covid-19 bisa diperoleh melalui vaksinasi ataupun melalui infeksi Covid-19 terdahulu.

Studi di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian vaksin efektif menekan penderita Covid-19 yang harus dirawat di rumah sakit, menurun sekitar 50-80% dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Namun, keberhasilan vaksin untuk memproteksi diri dari infeksi Covid-19 tidak hanya bergantung pada jenis vaksin, tetapi juga pada cakupan atau persentase penduduk di suatu wilayah yang sudah menerima vaksin sesuai ketentuan pemerintah.

Penularan Lebih Tinggi

Faktor kedua adalah seberapa menular varian Omicron yang dilihat dari kemampuan virus untuk bereplikasi dalam sel manusia, kemudian berpindah dari satu orang ke orang lain, serta kemampuan virus untuk menghindari antibodi dan berbagai sel sistem kekebalan. Varian Omicron memiliki risiko penyebaran dalam skala rumah tangga dan tingkat infeksi sekunder yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian Delta. Hal ini berdasarkan pada penelitian bahwa varian Omicron memiliki tingkat penularan tiga kali lebih cepat daripada varian Delta, potensi kontak erat terinfeksi dua kali lebih besar, memiliki tingkat infeksi sekunder 21,6% dibandingkan dengan varian Delta (10,7%), dan mampu menyebabkan kejadian infeksi berulang (reinfection).

Selain kemampuan virus bermutasi, tingkat penularan varian Omicron di masyarakat juga dipengaruhi oleh besar-kecil jumlah individu dan masyarakat di suatu wilayah yang rentan, baik yang disebabkan oleh distribusi dan cakupan vaksin yang tidak merata, memiliki riwayat penyakit bawaan, adanya percampuran social (social mixing) yang meningkatkan potensi penularan, dan masih banyak misinformasi dan disinformasi tentang varian Omicron dan vaksin.

Ketiga, ketersediaan dan kecepatan akses perawatan dan pengobatan. Walaupun analisis awal dari sejumlah kecil kasus varian Omicron menemukan bahwa risiko rawat inap hanya sekitar 1,2% dibandingkan dengan varian Delta (1,5%)”, tetapi risiko keseluruhan yang terkait dengan varian Omicron masih cukup tinggi.

Varian Omicron memiliki pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan Delta, yang mengarah pada penyebaran lebih cepat dengan tingkat insiden yang lebih tinggi daripada varian sebelumnya. Meskipun varian Omicron memiliki risiko keparahan penyakit dan kematian setelah infeksi lebih rendah daripada varian sebelumnya, tetapi tingkat penularan yang sangat tinggi mengakibatkan jumlah kasus meningkat secara signifikan terutama pada populasi yang berisiko.

Faktor keempat adalah status kelompok berisiko. Saat ini, tren penularan varian Omicron mendominasi kluster keluarga dan perkantoran/tempat kerja. Dalam konteks penularan penyakit dalam lingkup keluarga, wajib memberi perhatian khusus pada lansia dan penderita penyakit bawaan. Sedangkan di kantor atau

tempat kerja, perlu prioritas khusus bagi pekerja yang memiliki potensi untuk bertemu banyak orang, pekerja yang belum menerima vaksin lengkap atau belum divaksin sama sekali.

Bukti terbaru menunjukkan bahwa varian Omicron dapat menyebabkan beban penyakit pada lansia dan penderita penyakit bawaan. Selain itu, kondisi ruang kantor tanpa ventilasi memadai dan penegakan protokol kesehatan yang lemah dapat meningkatkan percepatan penularan varian Omicron di lingkungan kerja.

Kelima, ketepatan dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan (prokes). Dasar dari semua ini adalah untuk memutus rantai dan media penularan Covid-19, yaitu melalui droplet, kontak dengan permukaan yang tercemar virus dan airborne. Belajar dari varian Delta, yaitu memiliki aerosol dan stabilitas untuk bertahan permukaan yang lebih lama, hal ini berarti bahwa Delta dapat lebih mudah ditransmisikan melalui aerosol dan fomites (CDC, 2021). Pelonggaran dan ketidakpatuhan melaksanakan prokes selama gelombang varian Omicron bukan tidak mungkin akan memicu ledakan kasus Covid-19, mengingat kemampuan menularnya lebih tinggi dibandingkan dengan varian Delta.

Kita berharap masyarakat bisa sesegera mungkin melek informasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang penularan virus Korona varian Omicron, dan mungkin juga kehadiran varian-varian lain ke depan.

Dan, belajar dari varian yang pernah muncul sebelumnya, untuk saat ini yang terpenting adalah melakukan intervensi/tindakan berlapis untuk mencegah penularan SARS-CoV-2, dengan tujuan mengurangi penularan dan kematian. Peningkatan penularan Covid-19 varian Omicron menyiratkan bahwa risiko dari semua rute transmisi dapat meningkat.

Karena itu, sangat dibutuhkan intervensi berbasis kesehatan masyarakat untuk meningkatkan proteksi diri dan membatasi aktivitas yang melibatkan banyak orang.

Belajar dari respons terhadap Delta bahwa strategi mengurangi keterpaparan (reduce exposure), menekan penularan (suppress transmission), perlindungan kelompok berisiko, mengurangi penularan dan kematian penguatan masyarakat melalui “Jogo Tonggo” adalah langkah yang jitu yang membawa kita keluar dari gempuran gelombang Delta.

Hal ini diperkuat dengan kegiatan pengawasan dan vaksinasi yang sampai saat ini masih digencarkan. Strategi bagaimana kita mengatasi varian Delta, bisa kembali diadopsi dan diaplikasikan untuk menekan laju gelombang Omicron: waktu yang

tepat dalam memberi penanganan, konsisten dan kepatuhan menjalankan proses serta menjalankan dan mendukung program pengendalian Covid-19 secara bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat. (37)

Suara Merdeka 11 Maret 2022 ha. 4

Pasang Surut Gelombang Corona, Endemikah?

Oleh: **Perigrinus H Sebong,**

Dosen FK Unika Soe gijapranata

ISTILAH endemi pertama kali digunakan oleh Hippocrates sekitar 2500-an tahun yang lalu. Awal mulanya Hippocrates memakai istilah nosos (penyakit), phtoros (kerusakan, ketidanyamanan), dan loimos (wabah menular) untuk menggambarkan situasi penyakit kala itu. Istilah ini kemudian mulai banyak digunakan di era mikrobiologi sekitar abad 19 dan terus berkembang hingga sekarang.

Sesuai prinsipnya, istilah “endemi” bisa digunakan dalam dua situasi. Pertama, endemi digunakan untuk meng-gambarkan karakteristik suatu daerah dalam kaitannya dengan kejadian suatu penyakit (daerah endemi) dan kedua, menggambarkan suatu penyakit dalam kaitannya dengan suatu daerah dan kelompok masyarakat (penyakit endemi). Lalu bagaimana dengan Covid-19? Apakah akan menjadi penyakit endemi?

Secara teknis para ahli menilai suatu penyakit sebagai endemi dengan memperhatikan keseimbangan nilai ekuilibrium endeminya. Selain itu, ketika endemi biasanya dampak infeksi virus atau penyebab penyakit yang lain di masyarakat menjadi lebih dapat diprediksi dan stabil. Namun, untuk melabel infeksi virus corona menjadi endemi, perlu kehati-hatian.

Belajar dari pengalaman sejauh ini, dampak corona yang begitu luas menjadikan persoalan pandemi tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga turut menyeret isu sosial, politik dan isu lainnya. Hal ini bisa kita amati dari informasi yang beredar, seperti ada dua poros informasi. Poros pertama adalah para ilmuwan yang selalu meminta kita untuk tidak tergesa-gesa mengklaim corona sudah menjadi endemi. Sedangkan poros kedua, adalah pemimpin atau pejabat publik yang mungkin dengan maksud untuk “mengademkan” mengklaim tentang endemi.

Sedikit benchmark, beberapa negara di Eropa dengan cakupan vaksinasi tinggi sudah mulai mengendorkan pembatasan sosial dan mulai memberlakukan

COVID-19 sebagai penyakit endemi., Namun, mereka masih mewajibkan sertifikat vaksin dan penggunaan masker di negaranya. Contoh sederhana ini sebenarnya bisa kita ambil maknanya bahwa belum ada ukuran yang pasti untuk memastikan corona menjadi endemi. Jeda lama lonjakan kasus COVID-19 dari varian Delta ke Omicron tanpa kita sadari telah “menjebak” kita dalam pusaran pandemi. Kita cenderung gegabah menyimpulkan penurunan kasus sebagai alarm pandemi akan (segera) menjadi endemi.

Apa yang terjadi?

Pertanyaan reflektif bagi kita adalah apakah COVID-19 akan menjadi endemi? Ataukah ini hanya pertanda kita sudah bisa menerima COVID-19 bersama kita? dan apakah endemi COVID-19 sama dengan penyakit endemi lainnya? Untuk menjawabnya maka mari menyimak analisis berikut.

Pertama, konsep endemi biasa digunakan untuk menilai virus dan penyebab penyakit lainnya yang selalu ada di suatu wilayah. Dalam kasus COVID-19, dari apa yang kita ketahui selama ini ada kemungkinan kasusnya akan meningkat atau akan menurun pada suatu waktu tertentu (pasang surut). Namun kabar baiknya, peningkatan jumlah kasus ini sebagian besar dapat diprediksi dan sistem kesehatan kita bisa meresponnya dengan baik.

Hal ini berarti, corona itu ini masih ada tetapi pada tingkat yang tidak menyebabkan terganggunya atau ancaman terhadap nyawa dan rutinitas. Selain itu, jika kita bandingkan dengan penyakit lain misalnya flu yang tergolong endemi, maka kita dapat memberi pilihan terhadap tingkat endemisitas corona tinggi atau rendahnya lewat perilaku kita.

Kedua, istilah endemi maril kita pahami dari perpektif yang lebih realistis. Perspektif realists menggunakan endemi untuk menggambarkan dimana kita berada sekarang. Sadar atau tidak yang sebenarnya terjadi saat ini adalah kita baru belajar untuk hidup dengan virus corona. Perjalanan dari pandemi menjadi endemi yang sebenarnya terjadi adalah transisi kehidupan sosial kita.

Masyarakat kita mulai menunjukkan ada peningkatan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah COVID-19, dan mulai mandiri mengenali resiko apa yang bisa membuat mereka rentan dari corona. Menurut penulis di sini jelas bahwa istilah endemi tidak hanya terbatas pada perspektif epidemiologi atau penyakit tetapi juga bisa dipahami dari perspektif sosial. Lalu bagaimana dengan perspektif epiderniologinya?

Pasang Surut

Dalam konteks COVID-19, perjalanan dari pandemi ke endemi menurut penulis tidak mudah untuk didefinisikan. Istilah endemi, yang diciptakan oleh Hippocrates, tidak memiliki definisi yang ketat. Namun, dalam epidemiologi, label endemi diberikan untuk keadaan infeksi yang bisa dikendalikan, tanpa lonjakan atau penurunan kasus infeksi.

Dalam catatan sejarah, penyakit Cacar (smallpox) yang semulanya pernah menyebabkan pandemi dan sekarang telah berhasil eradikasi (dimusnahkan) berkat kolaborasi internasional yang berkelanjutan, butuh 181 tahun menuju eradikasi (1977) sejak Vaksin pertama kali ditemukan pada tahun 1796. Contoh penyakit endemi lainnya adalah AIDS, TB dan Malaria yang sampai sekarang menjadi perhatian serius Global Fund to Fight AIDS, TB, Malaria (GF ATM).

Meskipun sudah menghabiskan miliaran dolar tetapi 3 penyakit ini memiliki resiko kematian yang jauh lebih besar dan sulit dikendalikan. Tidak hanya kematian, penderita penyakit endemi ini juga mengalami konsekuensi non-medis lanjutan seperti stigma, misalnya yang sering dialami ODHA, kehilangan pekerjaan dan bahkan meningkatkan pengeluaran untuk biaya perawatan.

Konsekuensi lanjutan

Beban penyakit endemi juga dialami Indonesia. Sebagai contoh, saking banyaknya pasien TB yang tidak patuh minum obat menyebabkan Indonesia memiliki beban TB resisten obat (Multidrug-Resistant) cukup tinggi (success rate of treatment hanya 48%). Beban penyakit endemi yang sudah ada, bisa kita bandingkan dengan COVID-19.

Kejadian long COVID misalnya, yang menyebabkan menurunkan produktivitas seseorang bisa kita anggap sebagai konsekuensi lanjutan. Meskipun belum tersedia informasi tentang potensi beban penyakit yang akan terjadi apabila corona menjadi endemi, tetapi pada tahap ini istilah endemi memiliki perspektif sosial. Walaupun penyakit sudah bisa dikontrol tetapi akibat dan dampak sosialnya tentu tidak bisa dilupakan begitu saja.

Pasang surut gelombang corona, sebenarnya menyadarkan kita untuk mulai mengalihkan fokus respon kita ke pencegahan dan penanganan lonjakan penularan. Meskipun pembatasan sosial kita sudah mulai dilonggarkan, tetapi pengawasan berkelanjutan terhadap corona dan tindakan pencegahan tetap digencarkan. Segala yang telah kita capai selama ini dalam jalur menuju endemi, harus kita perkuat melalui resiliensi sistem kesehatan kita.

Kita patut menyambut baik dan mensukseskan kebijakan pemerintah melakukan transformasi sistem kesehatan. Melalui transformasi, kita berharap punya infrastruktur kesehatan yang lebih siap ke depannya. Sehingga, kita tidak perlu lagi merespon pasang surut gelombang corona dan “kroni-kroninya” sebagai suatu keadaan darurat tanpa kepastian, melainkan sebagai bagian dari respons yang normal. Sekarang kita mungkin berhadapan dengan virus corona yang akan menjadi endemi, tetapi kita masih punya kendali untuk menekan dampak (kesehatan dan sosial) endeminya! Salam sehat. (*)

Tribun Jateng 30 Maret 2022 hal. 2

La Nina dan Ancaman Ekosindemi



Oleh : **Perigrinus H Sebong,**

Dosen FK Unika Soegijapranata Semarang; Peneliti Kesehatan Global

Fenomena La Nina yang kian menguat harus disikapi secara serius, terutama terkait ancaman ekosindemi. La Nina yang kuat bisa mengubah ekosistem yang berdampak kepada keselamatan, baik manusia maupun lingkungan.

Tajuk Rencana *Kompas* edisi 31 Mei 2022 berjudul “Merespon Cuaca La Nina” menurut penulis adalah kode keras yang mempertanyakan keseriusan kita berhadapan dengan fenomena cuaca ekstrem dan perubahan iklim saat ini. Lantas mengapa La Nina tidak bisa dipandang sebelah mata di Indonesia?

Ekosindemi

Indonesia sejak lama telah dililit beban penyakit gara-gara buruknya sanitasi lingkungan dan kebersihan diri. Pernyataan ini tidak berarti negara kita adalah negara kumuh! Tetapi, terhitung sejak masa Hindia Belanda (1901), perang melawan penyakit akibat buruknya sanitasi adalah program kesehatan masyarakat yang paling awal kala itu dan hingga kini belum berakhir. Laporan mencuatnya degradasi ekosistem akibat fenomena alam dibarengi maraknya kejadian wabah penyakit di beberapa negara, semakin meyakinkan dugaan telah terjadi ekosindemi.

Istilah ekosindemi sebenarnya diturunkan dari konsep sindemi, yaitu kumpulan berbagai epidemi kesehatan yang saling terkait dan bersinergis di suatu wilayah. Bedanya, ekosindemi lebih fokus kepada perubahan ekosistem yang berdampak kepada keselamatan, baik manusia maupun lingkungan.

Menurut kacamata ekosindemi, penyebab kematian dan penyakit tidak berdiri sendiri, tetapi dipicu juga oleh interaksi faktor lainnya terutama fenomena cuaca dan perubahan iklim (Tallman dkk, 2022). Lalu apa saja potensi ekosindemi di Indonesia selama fenomena La Nina ?

Pertama, La Nina berpotensi menyebabkan banjir akibat tingginya curah hujan. Selain menelan korban jiwa dan materi, banjir juga mengganggu fungsi sistem kesehatan. Ini terutama dirasakan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu karena membutuhkan perawatan dan pengobatan berkelanjutan seperti pasien penyakit kronis dan ibu hamil.

Sejak tahun 1990-2022, Indonesia telah mengalami lebih dari 78 persen kejadian bencana banjir dan cuaca ekstrem. Indonesia juga berada di peringkat ketiga negara yang paling sering kebanjiran (Oktari dkk, 2022).

Apabila, tidak ada inovasi perawatan kesehatan maka saat banjir datang sudah pasti akses ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan apotek sama sekali terputus. Kejadian banjir berulang juga mengacaukan rutinitas pelayanan perawatan kesehatan dasar seperti posyandu dan dapat menambah beban pikiran masyarakat yang terdampak.

Fenomena La Nina Pertengahan Tahun 2022

Prediksi BMKG pada Maret 2022, fenomena La Nina di Indonesia akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2022. Diperkirakan sejumlah dampak dari fenomena La Nina sebagai berikut:

- Sebanyak 47 persen wilayah zona musim (ZOM) terlambat masuk musim kemarau jika dibandingkan rerata klimatologis awal musim kemarau tahun 1991-2020.
- Sepertiga wilayah ZOM akan mengalami kondisi kemarau atas normal (musim kemarau lebih basah).
- Dampak buruk bahaya hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga angin kencang.
- Kerugian ekonomi akibat dampak bencana hidrometeorologi basah.

Kejadian Hidrometeorologi Basah di Jakarta Sepekan Terakhir

1 29 Mei 2022

Hujan deras yang mengguyur Jakarta, pada hari Minggu dini hari menyebabkan sejumlah permukiman di Jakarta Barat terendam banjir.

2 28 Mei 2022

Ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) arah Serpong, Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 40 cm akibat hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya.

3 27 Mei 2022

Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang di Jakarta menyebabkan atap tribune penonton Formula E ambruk.



Kedua, fenomena cuaca ekstrem meningkatkan kontak langsung antara kelompok rentan seperti anak-anak, warga lanjut usia (lansia), pekerja lapangan, dan difabel dengan sumber bahaya. Mereka jauh lebih berisiko karena lebih sering kontak fisik dengan potensi bahaya tetapi tidak memiliki kemampuan beradaptasi atau melindungi diri dari ancaman tersebut.

Ketiga, vektor penyakit seperti nyamuk yang sensitif terhadap cuaca seperti La Nina, populasinya terus bertambah. Kondisi ini tentu menambah daftar pekerjaan Indonesia sebagai negara tropis di mana masih banyak penyebab dan jenis penyakit lainnya yang sensitif terhadap cuaca.

Semakin banyak curah hujan, maka semakin banyak pula nyamuk yang berkembang biak dan siap menularkan penyakit ke tubuh kita. Apabila melihat data terkini, usaha pemberantasan sarang nyamuk kita masih memprihatinkan. Selama 10 tahun terakhir angka bebas jentik kita hanya sekitar 24 persen hingga 80 persen, masih jauh dari target nasional (<95 persen).

La Nina bisa memicu *outbreak* diare. Tanpa upaya serius, ini sangat mungkin terjadi mengingat kejadian diare meningkat dari 7 persen menjadi 8 persen beberapa tahun terakhir.

Keempat, La Nina bisa memicu *outbreak* diare. Tanpa upaya serius, ini sangat mungkin terjadi mengingat kejadian diare meningkat dari 7 persen menjadi 8 persen beberapa tahun terakhir. Selain disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa, diare juga sangat sensitif terhadap fenomena cuaca dan iklim. Curah hujan yang tinggi selama La Nina membuka jalur kontak manusia dengan patogen terutama yang penularannya lewat air. *Shigella* adalah contoh penyebab diare yang paling sering kejadiannya selama La Nina.

Kelima, fenomena cuaca meningkatkan kecelakaan di jalan raya. Curah hujan yang tinggi dapat mengganggu jarak pandang, kondisi jalan lebih licin dan menurunnya konsentrasi pengguna jalan atau pengendara. Saat ini, sekitar 40 persen-70 persen kecelakaan di jalan terjadi selama kondisi hujan (NHTSA, 2020).

Lantas kita bisa apa?

Sensitif dan adaptif

Sulitnya menebak gejolak cuaca dan iklim saat ini memaksa kita untuk ekstra hati-hati. Menurut penulis, upaya melindungi masyarakat dari ancaman keselamatan dan serangan wabah penyakit akibat La Nina harus lebih sensitif dan adaptif.

Sensitif berarti, kita memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan sekaligus pada penyakit yang sensitif terhadap fenomena cuaca dan iklim. Sedangkan adaptif lebih kepada tindakan kewaspadaan secara berlapis mulai dari tingkat individu, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat.

Tindakan berlapis pertama adalah meminimalisir jalur kontak kelompok rentan dengan sumber atau potensi bahaya. Anak usia sekolah misalnya, lebih rentan terkena diare selama La Nina karena lebih sering bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan. Selain anak, orang dewasa seperti pekerja lapangan lebih rentan kontak dengan vektor pembawa penyakit yang marak bermunculan ketika hujan.

Upaya ini bisa dilakukan melalui kegiatan fasilitasi agar mereka sanggup beradaptasi dengan fenomena La Nina. Misalnya mengaktifkan kembali kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah sebagai wahana literasi siswa tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.

Upaya melindungi masyarakat dari ancaman keselamatan dan serangan wabah penyakit akibat La Nina harus lebih sensitif dan adaptif.

Kedua, memperkokoh respon sistem kesehatan sehingga ancaman kematian dan penularan penyakit selama La Nina bisa terkendali. Ini penting karena, sampai sekarang sistem pelaporan dan deteksi penyakit kita masih menjadi pekerjaan rumah. Sebagai contoh, masih ada masyarakat yang enggan berobat atau melaporkan kasus penyakit.

Selain itu, kapasitas sistem kesehatan yang berbeda antarwilayah di Indonesia seperti terbatasnya laboratorium rujukan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan turut menyumbang keterlambatan *skrining* dan ketidaksesuaian data penyakit yang dilaporkan dengan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan inovasi dan koordinasi berkelanjutan untuk meminimalisir keterlambatan melakukan kewaspadaan dini.

Ketiga, merevitalisasi sistem respon berbasis masyarakat agar lebih sensitif dan adaptif terhadap dinamika penyakit melalui komunikasi risiko. Misalnya memberi informasi kepada masyarakat tentang penyakit apa saja yang sering muncul ketika terjadi La Nina.

Pesan yang dibuat harus mempertimbangkan latar belakang sasaran dan tidak menimbulkan kepanikan. Meskipun terlihat remeh, tetapi strategi ini efektif meningkatkan literasi masyarakat sehingga mereka mampu mengenali potensi bahaya dan jadi waspada.

Penguatan dari sisi lain seperti memasifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk terutama di wilayah langganan banjir, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, rutin berolahraga, makan makanan bergizi, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara atau berada di jalan, juga sangat relevan saat ini.

Dengan demikian, tak menentunya fenomena La Nina menyiratkan bahwa ekosindemi dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan proteksi melalui tindakan berlapis secara konsisten.

Hal ini harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor serta campur tangan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara berkelanjutan. Kita tentu yakin, pemerintah punya terobosan istimewa dalam menyikapi ancaman ekosindemi akibat La Nina yang kian menguat!

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/14/la-nina-dan-ancaman-ekosindemi>

Hotspot Sindemi Rokok dan Sudah Saling Tuding

Oleh: **Perigrinus H Sebong,**

Dosen FK Unika Soegijapranata, anggota NCDI Poverty Network

ANCAMAN new and emerging tobacco products (NETPs) dalam laporan Epidemio Tembakau Global (ETG) 2021, seperti varian baru saat gencarnya usaha mengerem epidemi rokok. Selain memberi aplaus bagi kemajuan negara-negara mengurangi prevalensi perokok, ETG juga mewanti-wanti Indonesia. Lantas ada apa dengan Indonesia?

Epidemi tak menentu

Dalam artikel mereka di *British Medical Journal*, Puljevi dkk (2021) menuturkan, Bangladesh dan sembilan negara maju telah mematok target mengakhiri epidemi rokok. Mereka mengklaim, penetapan target endgame tersebut telah melewati sederet kalkulasi presisi sehingga optimistis sanggup mengunci angka prevalensi perokok <5% hingga <1%. Dalam menanggapi, iktikad Bangladesh ‘bebas rokok’ tahun 2040, patut diapresiasi. Bagaimana tidak? jika disejajarkan dengan Indonesia, sebenarnya untuk urusan rokok kedua negara nasibnya hampir sama. Misalnya, prevalensi perokok periode 2008-2018, kedua negara agak lambat menurun dan juga masih terlilit beban penyakit akibat rokok. Namun, beban sindemi (sinergi dari berbagai epidemi yang ada), akibat co-epidemi rokok dengan epidemi penyakit lainnya, membuat Indonesia sedikit tak menentu. Sebagai contoh, saat ini beban penyakit tidak menular (PTM) misalnya kanker paru, jantung koroner yang punya ‘kekerabatan’ dengan rokok masih eksis, dan di saat yang sama epidemi rokok terus menetap.

Kian menetapnya rokok bisa kita amati dari status epideminya. Menurut Lopez, Collishaw dan Paha (LCP) 1994, status epidemi rokok diketahui dengan menghitung prevalensi perokok (terutama pria); konsumsi rokok; dan kematian akibat rokok, kemudian jika dibandingkan dengan kriteria masing-masing dari empat fase epidemi. Sesuai Riskesdas (2018), saat ini prevalensi perokok pria adalah 62,9%.

Bila memakai kriteria LCP, Indonesia berada di fase kedua epidemi rokok (prevalensi perokok pria 62,9%, berada di antara 50-80%, dan rerata konsumsi rokok 1.000-

3.000 batang per orang per tahun). Artinya, sampai sekarang masyarakat masih menganggap merokok tidak berbahaya, perokok baru kian bertambah, dan promosi rokok masih gencar. Jika terus berpangku tangan, dampak epidemi rokok tidak hanya pada klaster penyakit, tetapi juga bisa merambat ke klaster baru lainnya.

Kurang gesit

Dalam mencermati isi laporan ETG, Indonesia termasuk tiga negara di Asia yang namanya disebut-sebut. Bisa dibilang, ini lantaran kita kurang gesit berhadapan dengan NETPs seperti rokok elektrik. Mengapa?

Pertama dari perspektif commercial determinants of health (CDoH), selain menjadi produsen, Indonesia termasuk hotspot pasar rokok yang tak pernah sepi. Promosi rokok di media sosial (medsos) dan internet seperti trojan horse, perlahan memengaruhi persepsi remaja tentang rokok.

Dari surveinya Septiono dkk (2021), banyak remaja Indonesia tergiur dengan tobacco advertising, promotion and sponsorship (TAPS) karena sering melihat medsos. Sayangnya, belum tampak tindakan preventif konkrit untuk meluputkan mereka dari unhealthy products di medsos. Bila diabaikan, remaja kita bisa menjadi fourth-hand smoke, kaum yang menerima rokok sebagai kelaziman (socially acceptable) karena sering melihatnya.

Kedua, kampanye anti rokok seperti 'rokok membahayakan kesehatan' sudah tidak laku dan terkesan tumpul ke atas. Terbukti, tobacco industry interference index kita mendapat nilai merah, lantaran kentalnya konflik kepentingan dalam urusan rokok (GGTC, 2021).

Proporsi kematian yang dapat dicegah atau preventable death tegal rokok mencapai 16,2% dari total kematian. Penyakit katastropik akibat rokok juga mendominasi klaim peserta JKN. Bahkan, naiknya prevalensi perokok remaja mencapai 9,1% melampaui target nasional (5,4%) saat ini, dianggap biasa. Ditambah lagi, ancaman keracunan nikotin atau green tobacco sickness yang ditemukan sekitar 66 % pada petani tembakau di salah satu daerah juga lolos dari perhatian kita.

Holistik dan terukur

Untuk mencermati berbagai momok tersebut, banyak pihak menuding sikap Indonesia tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah penyebabnya. Meskipun dugaan ini belum seratus persen benar, sekarang epidemi rokok menjebak 33,6% perokok dewasa dan 19,4% remaja. Indonesia

juga masih berpredikat pasar rokok terbesar kedua di dunia versi Tobacco Free Kids (2021).

Bisa dilihat, sejak 1990-sekarang, permintaan impor tembakau kita naik 40% (Ahsan dkk, 2020). Artinya, rokok sudah seperti kebutuhan pokok sehari-hari yang terus meningkat, seiring bertambahnya perokok baru sehingga bukan mustahil, kita akan menjumpai lebih banyak epidemi akibat rokok. Lalu kita bisa apa?

Pertama, menutup celah bertambahnya remaja jadi perokok baru. Saat ini, kemasan rokok di medsos cukup jitu menggaet remaja karena dibuat lebih kekinian. Hobi swafoto (selfie) dimanfaatkan dengan menyediakan photobooth berlatar merek rokok. Juga beredar hashtag medsos, mengajak remaja untuk mengabadikan momen sponsor rokok dan berbagi dengan temannya. Intinya, kepiawaian produsen melancarkan promosi produk yang merugikan kesehatan (CDoH) harus diwaspadai.

Kedua, menyelamatkan pekerja bukan perokok di tempat kerja. Pelayan restoran di smoking area misalnya, sangat berisiko terpapar stres oksidatif (radikal bebas), akibat sistem ventilasi di tempat kerjanya tidak memadai. Mereka bisa menjadi secondhand smoke dan thirdhand smoke karena tidak bisa menjauhi asap rokok dengan alasan tuntutan pekerjaan.

Ketiga meredam pencemaran ekosistem. Puntung rokok misalnya, yang dibuang sembarangan selain menambah volume sampah, juga mencemari tanah karena filter selulosa asetat non-biodegradable (tidak bisa terurai alami). Mencuatnya temuan dioksin (polutan organik) pada telur melebihi batas aman di Indonesia adalah bukti rantai makanan kita telah tercemar mikroplastik (bioakumulasi). Sebagian rokok elektrik memiliki baterai berbahan kimia, perlu pembuangan khusus. Juga asap rokok menyumbang konsentrasi PM_{2,5} di udara yang pada pH tertentu sangat toksik.

Hemat penulis, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Bulan Mei 2022 bertema Tobacco's threat to our environment, adalah momentum meredam epidemi rokok klaster lingkungan. Tema ini, ibarat sirine mengajak kita beranjak ke titik kumpul evakuasi. Radius epidemi rokok kini sedang bergerak dari klaster katastropik menuju katastrofe lingkungan. Bukan mustahil beberapa waktu mendatang kita akan tinggal di hotspot sindemi, tempat dimana epidemi rokok, PTM dan pencemaran ekosistem, bersinergi mengancam nyawa dan keberlangsungan lingkungan.

Oleh sebab itu, perlu menambahkan perspektif sindemi yaitu bagaimana faktor sosial, budaya, ekonomi yang berdampak pada morbiditas dan komorbiditas

dicermati, untuk menstop sindemi akibat rokok dalam daftar kerja kita. Dengan demikian, kini saatnya kita menyudahi saling tuding perkara rokok antara kubu perokok dan antirokok. Slogan 'merokok itu soal pilihan' menurut penulis harus ditinjau kembali dengan kaca mata holistik dan terukur, demi keselamatan manusia dan ekosistem. Kita butuh solusi kebijakan yang kreatif dan berkesinambungan sehingga Bumi kita tidak menjadi korban rokok selanjutnya.

<https://mediaindonesia.com/opini/496613/hotspot-sindemi-rokok-dan-sudahi-saling-tuding>

Metaverse Bukan Obat Dewa

Oleh: **Ridwan Sanjaya,**

Guru Besar bidang Sistem Informasi Unika Soegijapranata

Metaverse disebut-sebut jadi mantra baru dalam pengembangan teknologi atau bahkan kehidupan di masa depan. Akan tetapi, seperti teknologi lainnya metaverse bukan obat untuk segala masalah dan bebas dari efek negatif.

Setelah Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan nama Facebook menjadi Meta beserta rencana pengembangan metaverse dalam sepuluh tahun ke depan, Seoul mendeklarasikan penerapan metaverse untuk kotanya lima tahun ke depan.

Di dalam negeri, langkah ini juga diikuti beberapa BUMN, universitas, dan pemerintah daerah melalui kesepakatan kerja sama dalam beberapa waktu ke depan. Metaverse disebut-sebut jadi mantra baru dalam pengembangan teknologi atau bahkan kehidupan di masa depan.

Sebagai sebuah pengalaman baru, atau bahkan baru sekadar informasi baru, berbagai analisis terkait dampak keberadaan metaverse muncul tiba-tiba secara gegap gempita, tetapi tidak lengkap dan tak komprehensif. Mengharapkan metaverse menjadi solusi positif tanpa adanya risiko dan dampak negatif hanya akan menjauhkan masyarakat dari kenyataan.

Sama seperti kenyataan yang lain, di mana mengharapkan seseorang dengan kepandaian penyembuhan untuk dapat menyembuhkan segala hal, atau sebuah pil yang hebat dapat menyembuhkan segala penyakit, hanya akan menciptakan akhir penuh kekecewaan.

Risiko dan dampak negatif

Pada kenyataannya, berbagai solusi masa lalu yang tidak melibatkan teknologi informasi sekalipun juga tidak dapat menyelesaikan semua masalah atau membebaskan dari risiko dan dampak negatif yang ada. Begitu halnya metaverse atau teknologi yang lain, sejatinya juga bukanlah obat dewa yang dapat memberi jawaban atau segala masalah dan bebas dari efek negatif.

Untuk itu, melihat secara proporsional dan komprehensif perlu dilakukan di zaman pascakebenaran seperti saat ini, agar kita tidak salah melangkah atau kehilangan manfaat dari keberadaan berbagai teknologi informasi yang sedang berkembang. Sepertinya perlu juga untuk melihat berbagai analogi di masa lalu agar cara memandang bisa lebih berimbang.

Seperti halnya analogi dalam melihat teknologi pembelajaran digital yang dituduh tak dapat menjadi solusi bagi banyak siswa di beberapa tempat yang memiliki kesulitan akses internet. Sudut pandang lain adalah melihat hal itu sebagai bentuk keterbatasan pengembangan jaringan internet dan kualitas jaringan. Suatu bentuk kritik yang diharapkan bisa mendorong ketersediaan jaringan internet di beberapa daerah.

Sama halnya dengan keterbatasan dalam penguasaan materi saat pandemi, di mana pembelajaran daring sering dituduh sebagai penyebabnya. Sudut pandang lainnya, bisa saja melihat hal ini sebagai bentuk keterbatasan dalam pengembangan teknik pengajaran dan pembelajaran secara daring.

Selama ini belum banyak dilakukan pengembangan teknik pembelajaran daring dan variasinya karena sebagian besar pengalaman masih terbatas di dalam pertemuan tatap muka. Hal ini dapat mendorong pengembangan pedagogi dan andragogi menjadi lebih luas.

Dua analogi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada obat dewa yang bisa menyelesaikan semua masalah, baik digital maupun nondigital. Namun, pengembangan ke arah yang lebih baik selalu diharapkan untuk dapat menciptakan dunia dan masyarakat yang lebih adaptif.

”Metaverse” tipis-tipis

Kondisi awal pengembangan metaverse saat ini mirip dengan awal pengembangan transaksi jual beli secara digital pada 25 tahun yang lalu. Meskipun sudah tampak menakjubkan dari sisi grafis, masih banyak yang harus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas di luar kepentingan rapat, diskusi, presentasi, atau menonton pertunjukan langsung di lain tempat secara bersama-sama.

Sampai saat ini, perangkat keras untuk bisa mengakses ke dunia virtual ini juga masih berbiaya besar. Masih dibutuhkan pengembangan, baik dari sisi teknologi maupun kemudahan akses dari sisi perangkat keras yang mungkin tidak bisa terjawab dalam waktu singkat.

Mekanisme untuk membawa produk nyata ke dalam dunia virtual juga masih belum ada. Wujud virtual juga masih belum serupa dengan wujud nyata juga. Begitu pula, kebebasan untuk membangun dunia sendiri juga belum dapat dirasakan oleh pengguna di luar Amerika Serikat dan Kanada.

Namun, metaverse tipis-tipis ini telah menciptakan harapan akan adanya kemudahan untuk bertemu, menjalin komunikasi, mendapatkan layanan, dan mendapatkan akses secara bersama-masa meskipun terpisah ruang.

Di dalam metaverse diharapkan layanan publik dapat makin mudah diperoleh, pemasaran produk dapat semakin interaktif, atau bahkan pertemuan-pertemuan dapat menjadi lebih berkualitas karena pihak-pihak yang terlibat secara fisik bertemu langsung meskipun di dunia virtual.

Keikutsertaan beberapa institusi di luar ataupun dalam negeri pada awal-awal pengembangan dapat dilihat sebagai pengondisian untuk menyiapkan diri dan kemungkinan mengembangkan layanan menjadi lebih baik ketika teknologi ini sudah sampai pada tahapan matang. Sekaligus menyiapkan diri untuk lebih dini dalam mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diharapkan.

Apalagi kemungkinan metaverse tidak hanya merupakan dimensi virtual yang didominasi oleh Oculus dari Meta saja, tetapi juga secara kompetitif akan dikembangkan oleh NVIDIA, Microsoft, Huawei, MagicLeap, ataupun yang lain.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadikan metaverse lebih beragam dan sangat berbeda dengan konsep awalnya. Masih harus menempuh perjalanan jauh dan waktu yang tidak singkat untuk mencapai kondisi yang ideal.

Selama perjalanan tersebut, perlu cara pandang proporsional dan komprehensif agar menjadi lebih bijak.

Kompas 19 April 2022. hal. 7

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/18/metaverse-bukan-obat-dewa>

Big Data Bukan Segalanya

Oleh: **Ridwan Sanjaya,**

Guru Besar Bidang Sistem Informasi Unika Soegijapranata

Big data” berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, ”big data” bukan segalanya. Kerap orang dibutakan oleh kebenaran berbeda di luar sana dan menolak untuk memprosesnya menjadi informasi yang komprehensif.

Menurut futurolog tersohor abad ke-20 Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* (1980), siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia.

Jika dirunut dari konsep dasarnya, informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang dapat dimaknai oleh penerimanya. Maka, tak heran, Michael Palmer (2006) menyampaikan bahwa data merupakan minyak baru yang bisa diolah dan dimurnikan sehingga dapat digunakan oleh penggunanya.

Namun, Michael Palmer tidak spesifik menyebutkan ”pemurnian” data tersebut juga bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang akhirnya tidak berharga, menyebabkan bencana bagi kemanusiaan, bahkan tidak akan membuat penguasa informasi itu menguasai dunia.

Dalam praktik saat ini, *big data* yang diolah dengan menggunakan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan juga bisa mengarahkan ”wujud” dunia setiap manusia menjadi kustom sesuai dengan preferensinya. Manusia hidup dalam dunianya sendiri, dunia yang didasarkan informasi dan fakta yang hanya ingin diterimanya.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana media sosial ikut berperan dalam hasil pemilihan presiden (pilpres) di Amerika Serikat pada 2016. Bukan karena efektivitas pemasaran digital oleh media sosial semata, melainkan juga karena kelebihanannya dalam hal personalisasi informasi yang sejatinya diciptakan untuk membantu banyak penggunanya.

Salah satu dampaknya, informasi-informasi yang menyesatkan, tetapi disukai dan secara terus-menerus diterima oleh setiap individu selanjutnya diyakini sebagai informasi atau bahkan fakta yang sesuai dengan preferensinya, dengan mengabaikan yang lain.

Akibatnya, setiap individu bisa hidup dalam dunianya sendiri tanpa harus mengalami gangguan sosial terlebih dahulu. Orang-orang tersebut normal, tetapi cara berpikirnya distimulasi secara simultan oleh algoritma komputer, yang awalnya didasarkan pada preferensi dan rekam jejaknya sendiri.

Karena itu, semakin lama terpapar, kepercayaannya terhadap informasi dan fakta tertentu jadi semakin besar, bahkan diyakini sebagai kebenaran. Pihak lain yang menyuarakan berbeda akan dianggap sebagai pembohong atau bahkan musuh yang harus dilawan.

Jebakan "mind stone"

Sebuah analogi yang menarik dapat kita lihat pada *mind stone* yang diceritakan dalam film-film Marvel. *Mind stone* dalam *Avengers: Age of Ultron* (2015) diceritakan memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga selain mampu menghidupkan Vision, kekuatannya juga bisa menciptakan ilusi kehidupan di dalam serial *Wanda Vision* (2021).

Karena kecintaannya pada Vision yang tewas di dalam *Avengers: Infinity War* (2018), Wanda Maximoff diceritakan membuat dunianya sendiri yang dibangun oleh pikirannya, yang mendapatkan imbas dari kekuatan *mind stone*.

Kebahagiaan semu yang tercipta karena dirinya tidak menginginkan informasi dan fakta yang berbeda di mana Vision sudah tiada, menjadikan semua orang yang berbeda menjadi lawan, jalan cerita di-*reset*, atau bahkan "menghitamkan layar" karena berbagai perbedaan yang tidak diinginkan. Sukacita yang didapatkannya itu dikendalikan oleh proses yang salah.

Ilusi tersebut akhirnya hanya bisa berhenti oleh dirinya sendiri ketika kesadarannya mau memproses informasi yang berbeda di luar dirinya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan klaim orang-orang yang sukses di masa lalu atau merasa akan membawa masa depan yang lebih baik, dengan data yang tidak komprehensif atau bahkan hanya didasarkan pada kata-kata orang-orang di lingkarannya. Halusinasi fakta terbentuk akibat dari pemrosesan data yang salah. Data yang berlimpah saat ini dan kemudahan dalam memperolehnya menjadikan kita masuk dalam jebakan *mind stone*.

Halusinasi fakta

Dari sini, kita bisa melakukan refleksi secara bersama-sama terhadap beberapa kejadian terakhir ini, ketika seorang anak muda menyampaikan kondisi Orde Baru yang berbeda jauh dengan kejadian masa lalu yang dialami oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya.

Dengan berbagai informasi dan berita tersajikan dengan kuantitas yang besar dan bisa dengan mudah diperoleh di dunia digital saat ini, muncul pertanyaan, informasi apa saja yang sudah dibacanya?

Begitu juga ketika salah satu pejabat menyampaikan bahwa data yang diperolehnya menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan pemimpin nasional, yang berbeda dari banyak survei, memunculkan pertanyaan dari mana data yang menjadi acuannya?

Kadang kala kita juga mendapati ada rekan kerja yang menceritakan pencapaiannya pada masa jabatannya meskipun data yang terbaca tidak menunjukkan informasi yang sama dengan yang disajikan. Muncul pertanyaan, dengan dasar data yang sama, dari sisi mana dia melihatnya?

Apakah kita memiliki kesulitan dalam mengolah data yang banyak tersedia di sekitar? Apakah ada kesalahan dalam prosesnya mengubah data menjadi informasi? Ataukah kita hanya mau menelan data yang sesuai preferensi kita sehingga akhirnya menyebabkan halusinasi fakta?

Tidak hanya literasi digital

Pemanfaatan berbagai hasil karya digital yang tercipta pada abad ini tidak hanya menuntut literasi digital dalam wujud penguasaan teknis, tetapi juga kesadaran dan pemikiran kritis bahwa kebenaran tidak lagi mutlak. Masih ada kebenaran yang lain di sisi yang berbeda, atau jangan-jangan kepercayaan kita hanyalah kebenaran sebagian (*half truth*) yang patut dievaluasi.

Sebuah obat mungkin terasa pahit, tetapi dampaknya bisa menyembuhkan. Menyadari bahwa kebenaran tidak hanya yang diinginkan, mungkin akan mengurangi kebahagiaan yang selama ini dirasakan. Namun, tanpa kesadaran tersebut, kita tidak akan pernah menghentikan halusinasi fakta.

Pengolahan data, baik besar maupun kecil, menjadi informasi sangat tergantung dari prosesnya. Ketika prosesnya salah atau menyimpang, informasi yang dihasilkan juga bisa berbeda.

Big data bukanlah segalanya, terutama ketika kita dibutakan oleh kebenaran yang berbeda di luar sana dan menolak untuk memprosesnya menjadi informasi yang komprehensif.

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/16/big-data-bukan-segalanya>

Kompas 17 Mei 2022 hal. 7

Heboh NFT

Oleh **Ridwan Sanjaya**,

Guru besar di bidang Sistem Informasi Unika Soegijapranata.

MESKIPUN NFT sudah ada sebelumnya, gagasan Metaverse oleh Mark Zuckerberg menjelang akhir tahun 2021 telah memicu heboh NFT dan beberapa aset kripto lainnya. Hanya saja, tatkala Syahrani mengumumkan untuk menjual NFT yang dimilikinya, maka nama NFT makin dikenal publik secara luas dan semakin heboh ketika seorang anak muda mendapatkan miliaran rupiah dari foto dirinya yang dipasang di NFT marketplace. Sontak semua merasa ketinggalan dan ingin terlibat di dalamnya.

Seperti yang disampaikan oleh Andrew K Przybylski pada tahun 2013, fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau takut ketinggalan peristiwa seringkali terjadi dalam menyikapi berbagai hal baru terutama di dunia digital. FOMO merupakan perasaan yang meyakini setiap peristiwa merupakan kejadian yang tidak boleh dilewatkan. Sehingga proses pengambilan keputusan cenderung tergesa-gesa dan tidak melalui analisis yang matang.

Kejadian ini mengingatkan kita pada fenomena harga tanaman hias yang tiba-tiba menjulang tinggi sehingga banyak orang ingin ikut-ikutan terlibat sampai dengan menjual aset motor dan mobil untuk membelinya. Namun secara tiba-tiba pula harganya turun seharga tanaman hias pada umumnya. Akibatnya, banyak frustrasi akibat investasinya tidak kembali. Suatu pelajaran berharga yang mengingatkan kita pada kondisi saat ini.

Apa itu NFT?

Bagi orang awam yang belum mencoba Non-Fungible Token atau disingkat NFT, secara singkat bisa diartikan sebagai sertifikat untuk aset digital yang kita daftarkan. Aset tersebut bisa berupa karya seni digital, perangkat lunak, aset yang didapatkan dalam permainan digital, musik, video, atau bahkan foto-foto yang kita hasilkan, termasuk foto selfie. Karena setiap sertifikat bisa mewakili aset yang berbeda, maka nilai setiap NFT bisa berbeda-beda.

Secara teknologi, NFT menggunakan teknologi blockchain yang membuatnya tetap otentik sejak diciptakan karena tercatat di berbagai tempat dan dapat diverifikasi.

Keberadaan teknologi ini membuatnya digolongkan sebagai aset kripto yang sejak lahir menggunakan blockchain dalam pencatatan dan telusurnya. Selain itu, pasar jual-beli NFT menggunakan mata uang kripto untuk pembeliannya.

Apabila ada aset digital yang menarik, dibutuhkan, atau diinginkan, maka nilai NFT bisa semakin tinggi atau bahkan tidak masuk akal bila dilihat dari aset di dalamnya. Namun bukan berarti NFT merupakan penipuan karena jelas bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan untuk menjual karya-karyanya kepada publik. Para desainer, animator, pemusik, pembuat video, dan pemain game merupakan contoh yang diuntungkan dalam bisnis ini. Kondisinya menjadi negatif ketika kita ikut di dalam transaksi-transaksi yang tidak masuk akal, seperti halnya fenomena tanaman hias di atas. Dalam konteks ini, produk yang tiba-tiba menjulang tinggi harganya bisa saja terkait dengan kelompok hobi tertentu, kelompok bisnis spekulatif, atau benar-benar beruntung karena asetnya tiba-tiba dijadikan pilihan untuk ditingkatkan harganya.

Bagaimana Menyikapi?

Pandemi dan percepatan adopsi teknologi telah membuat banyak peluang yang dulunya tidak mungkin menjadi terbuka, terutama dalam hal bisnis. Seluruh dunia menjadi terkoneksi dan memungkinkan kita saling berinteraksi. Transaksi NFT ataupun transaksi aset fisik yang dilakukan secara digital merupakan keniscayaan yang akan kita hadapi pada masa sekarang dan mendatang. Kita perlu mengenal NFT dan aset kripto lainnya agar tidak mudah terkagum-kagum ataupun ketakutan akan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia digital.

Fungsi NFT dalam menjembatani orang-orang kreatif untuk bisa menjual karyanya menjadi kesempatan yang perlu dicoba dan tidak perlu ditakuti. Justru dengan dikenali, dimengerti, sampai dengan menjadi bagian dari hidup sehari-hari akan membuat kita dapat memanfaatkan sisi-sisi positifnya.

Namun tetap sadar dan waspada karena kejadian-kejadian spekulatif dan negatif bukan hanya ada di dunia digital, melainkan justru lebih dahulu ada di dunia fisik. Sehingga jangan sampai terburu-buru dalam mengambil keputusan jika kita memilih untuk menjadi bagian dari bisnis jual-beli aset. NFT. Terutama ketika kita menyadari bahwa aset yang dijual tidak sebanding dengan nilai yang diperjualbelikan.

Selamat memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada! Jangan mudah terkagum-kagum ataupun takut yang berlebihan.(34)

Suara Merdeka 24 Januari 2022 hal. 4



Para penulis buku ini adalah dosen Universitas Katolik Soegijapranata yang aktif menuliskan pemikirannya dari berbagai perspektif keilmuan mereka di media masa cetak dan digital. Ada 17 (tujuh belas) penulis yang terpilih. Editor dengan seksama memilih sudut perspektif religius, pemulihan ekonomi, masa lebaran 2022, pendidikan yang merdeka, keuangan pemerintah, kesehatan nasional, petuah leluhur negeri, situasi jelang pilpres 2024, hingga bisnis NFT (Non-Fungible Token). Ada pula tulisan istimewa Prof. Andreas Lako yang sekarang telah hidup damai di Sorga. Semuanya dirangkum sesuai urutan nama penulis secara alphabetical untuk memudahkan pembaca membaca penulis favoritnya.